

THE THINK TANK OF BULAKSUMUR

**K A S T R A T**

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA 2013

# MENATAP INDONESIA

## DARI KAMPUS BULAKSUMUR

*Kumpulan Ide, Gagasan dan Kajian Kritis*





# **MENATAP INDONESIA DARI KAMPUS BULAKSUMUR**

**Kumpulan Ide, Gagasan, dan Kajian Kritis**



THE THINK TANK OF BULAKSUMUR

**K A S T R A T**

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA 2013

# **MENATAP INDONESIA DARI KAMPUS BULAKSUMUR**

**Kumpulan Ide, Gagasan, dan Kajian Kritis**

**Editor**

Faisal Arief Kamil

Ulya Amaliya



**MENATAP INDONESIA DARI KAMPUS BULAKSUMUR**  
**Kumpulan Ide, Gagasan, dan Kajian Kritis**

©Kementerian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013

Cetakan Pertama, Desember 2013

Editor: Faisal Arief Kamil, S.I.P - *@Ical\_Kamil*  
Ulya Amaliya, S.I.P - *@ulyaamaliya*

Pertama kali diterbitkan oleh:



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA 2013  
Kementerian Kajian Strategis  
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
<http://bemkm.ugm.ac.id/>

## PRAKATA EDITOR

Segala puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku serial kajian “Menatap Indonesia Dari Kampus Bulaksumur: Kumpulan Ide, Gagasan, dan Kajian Kritis”. Kementerian Kajian Strategis BEM KM UGM (Kastrat) 2013 memiliki visi “Bangkitnya Intelektualitas Mahasiswa dalam Gerakan Harmonis untuk UGM dan Indonesia Berdaulat”. Dengan mengusung visi besar tersebut, maka dibutuhkan langkah strategis dalam prosesnya, dan salah satu langkah strategis adalah penerbitan buku yang ada di tangan pembaca sekalian.

Selama satu tahun masa pengabdian bersama keluarga besar BEM KM UGM 2013, tentunya Kastrat memiliki pengalaman yang berharga atas pengumpulan intelektual dan diskusi-diskusi akademis dalam memberikan BEM KM UGM 2013 sikap terhadap sebuah isu ekstremal. Pada 2013 ini, kami memiliki tiga isu utama dalam mengawal Mahasiswa UGM menjadi mahasiswa yang benar-benar intelektual berbasiskan nilai-nilai ke-UGM-an, yaitu isu pendidikan tinggi, isu kedaulatan energi, dan isu kedaulatan pangan.

Buku ini adalah buku kajian yang awalnya dimaksudkan untuk mencerdaskan semua kalangan, utamanya mahasiswa di lingkungan UGM terhadap berbagai macam isu-isu strategis. Selain berisi hasil kajian selama satu tahun ini, buku ini juga memuat opini-opini yang berasal dari pemikiran anggota-anggota BEM KM UGM 2013 di berbagai sektor strategis. Ada banyak calon intelektual di BEM KM UGM 2013 yang perlu diapresiasi bakatnya dalam menulis, dan pembaca dapat menemukan kekayaan pemikiran mereka di bagian pertama buku ini.

Tentu saja, hasil kajian Kastrat selama satu tahun ini menjadi salah satu isi buku yang menghabiskan berlembar-lembar kertas yang berisi analisis isu. Diawali dari isu pendidikan tinggi yang mencuat di awal tahun ini. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. UU ini kami nilai hanya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang berganti baju yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ruh dan semangat UU ini sama saja dengan UU BHP yang melanggar konstitusi itu. Isu yang masih menjadi bagian integral dari pendidikan tinggi adalah isu uang kuliah tunggal (UKT). UKT ini adalah amanat dari pasal 88 UU Pendidikan Tinggi yang mengatur biaya kuliah mahasiswa di seluruh Indonesia menjadi



lebih mahal dari biasanya. Kami sudah mengkaji isu ini, dan terdapat di bagian kedua buku ini.

Isu yang kami bawa selanjutnya adalah isu kedaulatan energi. Pada pertengahan 2013 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Akhirnya tidak disangka, isu BBM ini santer meluas dan kami harus bersikap. Cita-cita kedaulatan energi yang kami usung seakan terjawab untuk dibuktikan dengan kebijakan ini. Semua panjang lebar akan dijelaskan di bagian kedua buku ini bahwa kedaulatan energi harus berbenturan dengan kepentingan neoliberalisme sektor hilir migas di Indonesia.

Isu yang dikawal menjelang dan sesudah hari lebaran adalah isu kedaulatan pangan. Sudah barang tentu harga-harga bahan kebutuhan pokok akan naik karena tingginya permintaan. Hal tersebut adalah masalah klasik. Tetapi menjadi penting ketika sehabis lebaran harga kedelai tiba-tiba melonjak secara tiba-tiba, yang beberap bulan sebelumnya diikuti oleh naiknya secara tiba-tiba harga bawang merah. Hal tersebut menjadi pintu gerbang bagi kami dalam melihat apa yang sesungguhnya terjadi dengan sistem pengontrolan harga pangan di Indonesia. Ketika rupiah melemah, dan masih terjadi hingga buku ini terbit, telah membuktikan bahwa terdapat gejala sistemik dalam melihat masalah kedaulatan pangan yang dicita-citakan bersama. Semua akan dikupas mendalam di bagian kedua buku ini.

Isu yang juga kami kaji adalah perihal korupsi dan permasalahan politik nasional. Isu korupsi kami gunakan untuk menganalisa dan menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih tegas dan lebih cepat menuntaskan kasus-kasus korupsi. Isu skandal Bank Century, hingga kini masih menjadi perhatian kami dalam melihat kesuksesan pemberantasan korupsi. Hal ini membuktikan bahwa ujian penegakan hukum akankah akan berhasil apabila dengan dibenturkan dengan masalah politik kekuasaan.

Isu politik nasional kami kaji sebagai bentuk persiapan menuju pesta demokrasi pada 2014 mendatang. Tentu menjadi tantangan tersendiri di era kepemimpinan BEM KM UGM 2014 selanjutnya dalam mengkaji isu ini karena 2014 adalah tahun politik.

Selain berisi berbagai hasil kajian dari internal BEM KM UGM 2013, di bagian ketiga juga terdapat beberapa kajian dari BEM-BEM fakultas yang ada di UGM tentang berbagai sektor yang digeluti dan menjadi *concernnya* selama satu tahun ini. Tentunya semua hal tersebut



menjadi sebuah buku serial pemikiran dan hasil kajian yang komprehensif di berbagai sektor.

Budaya membaca, menulis, dan berdiskusi saat ini semakin berkurang, padahal kita tahu di sekitar kita sangat banyak rekan-rekan kita yang memiliki bakat terpendam tersebut. Oleh karena itu, semoga buku serial hasil kajian ini menjadi pintu gerbang yang membuka cakrawala kehangatan diskusi intelektualitas mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Jadilah mahasiswa yang memiliki kekuatan berpikir yang handal, kedepankan humanisme, bangun kepercayaan dengan rasa saling percaya, hindari budaya kekerasan fisik yang membodohkan, lawan semua bentuk penindasan apapun alasan fundamentalnya, dan hargai perbedaan karena perbedaan adalah selat yang mempersatukan pulau-pulau persatuan. Hidup intelektual Gadjah Mada!

Selamat menatap Indonesia dari Kampus Bulaksumur...

Salam hangat dan tetap semangat ☺

Yogyakarta, di tengah hujan November 2013

**Editor**



# SEKILAS KASTRAT BEM KM UGM 2013

Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM (Kastrat) 2013 memiliki visi “Bangkitnya Intelektualitas Mahasiswa dalam Gerakan Harmonis untuk UGM dan Indonesia Berdaulat”. Dengan mengusung cita-cita besar tersebut, maka dibutuhkan langkah strategis dalam prosesnya, yaitu:

1. Membangkitkan tradisi intelektual (Baca, Tulis, Diskusi) kepada seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai basis pengkaderan intelektual
2. Menjadikan keilmuan interdisipliner sebagai dasar dalam merumuskan sikap BEM KM UGM 2013, terutama dalam menyikapi fenomena-fenomena sosial di sekeliling mahasiswa
3. Memperkuat jejaring kajian mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan menyertakan BEM di tingkat fakultas, kelompok studi, maupun komunitas-komunitas diskusi non-formal ataupun ekstrakampus
4. Menjadikan BEM KM UGM 2013 sebagai garda terdepan pengawalan isu strategis kedaulatan pangan/energi, pendidikan, dan lingkungan hidup, dan isu permanen yaitu kepemimpinan nasional dan korupsi di level lokal maupun nasional.
5. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan tradisi intelektual yang diimplementasikan ke dalam program-program kerja yang konkret.

Kastrat BEM KM UGM 2013 saat ini memiliki 27 anggota yang telah menemani dan berjuang bersama sepanjang 2013 ini. Mereka adalah Fatah Sirojuddin Fahmi, Abdurrahman Hamas Nahdly, Adriansyah Dhani Darmawan, Rizky Alif Alvian, Gilang Mahardika Muhammad, Aulia Ratna Kusuma, Khairul Umam, Ewira Nurul Hidayat, Eka Nanda Ravizki, Ryan Alief Putro Chaniago, Andri Akbar Pohan, Muhammad Fakhurrizi, Ulya Amaliya, Anahtadiya Nurfa Sochicha, Muhammad Thoriq, Hamzah M. Hafiq, Ardyan Kunto Wicaksono, Muhammad Pradana Naufal, Farhan Ahmadi Hakim, Fatkhul Ula Rohmawati, Yuli Paramita, Novitasari Tri Haryanti, Ufairah Nurulhayah, Cahyo Tri Hartoyo, Maristya Lira Shabrina, dan Alfredo Gustiar.



Kemudian, pada November 2013, Kastrat mendapatkan 14 anggota baru lagi yang akan berjuang bersama. Mereka adalah Afwan Kurniawan, Bayu Brilianto, Beni Khairul Arif, Dharrotuz Zahiroh, Harumi Puspa Rizky, Ipmawan Hari Sanjaya, Kharis Syahrial Alif Mamonto, Muhammad Rifqi Fuady, Naufal Adzkia El Imami, Prajaka Brian Lizadi, Rinta Meilani, Joko Wiyanto, Dion Taryono, dan Isnaeni Nurul Khusus.

Ke-41 anggota Kastrat BEM KM UGM 2013 adalah calon-calon intelektual Gadjah Mada. Mereka akan menjadi pejuang dan menjadi garda terdepan dalam pengawalan isu-isu eksternal. Semoga Kastrat BEM KM UGM 2013 bisa menjadi inspirasi bagi pergerakan mahasiswa seluruh Indonesia secara umum dan mahasiswa UGM secara khusus.

Atas nama seluruh intelektual muda Kastrat BEM KM UGM 2013

**Faisal Arief Kamil**  
***Menteri Kajian Strategis BEM KM UGM 2013***



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA EDITOR .....</b>	<b>V</b>
<b>SEKILAS KASTRAT BEM KM UGM 2013.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### BAGIAN PERTAMA

#### Esai-Esai Dari BEM KM UGM 2013

<b>Membajak Birokrasi: Korupsi Politik antara Birokrat, Politisi dan Pengusaha</b>	
<i>Faisal Arief Kamil.....</i>	<i>5</i>
<b>Perilaku Korupsi dalam Pendekatan Teori Victor Vroom</b>	
<i>Ditta Nisa.....</i>	<i>15</i>
<b>Menatap Masa Depan Indonesia</b>	
<i>Pipit Suprihatin.....</i>	<i>21</i>
<b>(Masih) Progresifkah Kita?</b>	
<i>Rizky Alif Alvian.....</i>	<i>27</i>
<b>Aktivis Mahasiswa</b>	
<i>Andhika Haryawan.....</i>	<i>33</i>
<b>Jalan Kembali Menuju Tirani</b>	
<i>Muhammad Fakhurrazi.....</i>	<i>39</i>
<b>Globalisasi bagi Dinamika Sosial Masyarakat di Kota Yogyakarta</b>	
<i>Muhammad Reksa Pasha Nizahiksan.....</i>	<i>43</i>
<b>Menyongsong Indonesia Pasca MDG's: Apa yang Bisa Kita (Mahasiswa) Lakukan?</b>	
<i>Hamzah Muhammad Hafiq.....</i>	<i>49</i>
<b>Meraih Kedaulatan Energi, Momentum Mahasiswa Berperan</b>	
<i>Micahel.....</i>	<i>57</i>
<b>Kedaulatan Energi Harus Menjadi Harapan Semua Warga Negara</b>	
<i>Faiz Deja Ramadhan.....</i>	<i>65</i>
<b>Sosial Media Bagian dari Life Style dan Pergeseran Trend Akses Media Massa Berbasis Jejarng Sosial Media</b>	
<i>Arif Rahman Wicaksono Djuwarno.....</i>	<i>69</i>



<b>Pergerakan Manusia Lintas Negara yang Mengancam Kesehatan Masyarakat</b>	
<i>Suci Ardini Widyaningsi</i> .....	73
<b>Batang Tembakau 9 Senti yang Merusak Segalanya</b>	
<i>Cipuk Wulan Adhasari</i> .....	79
<b>Kian Akrab dengan Kondom</b>	
<i>Ulya Amaliya</i> .....	87

**BAGIAN KEDUA**

**Kajian Tertulis BEM KM UGM 2013**

<b>Dibalik Rencana Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM): Implementasi Neoliberalisme Sektor Hilir Minyak</b>	
<i>Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013</i> .....	95
<b>Analisa Teori Strukturasi dalam Memahami Logika Marketing Politik: Studi Kasus Pencitraan SBY-Boediono dalam Memenangkan Pemilu Capres dan Cawapres RI pada 2009</b>	
<i>Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013</i> .....	107
<b>Analisa Kebijakan Subsidi: Antara yang Berhak dan Tidak Berhak Mendapat Subsidi</b>	
<i>Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013</i> .....	117
<b>Refleksi Teoritis atas Kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional</b>	
<i>Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013</i> .....	121
<b>Mengembalikan Kedaulatan Pertanian Pangan dalam Negeri</b>	
<i>Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013</i> .....	125
<b>Reformasi Sistem Pemilu Setengah Hati: Sebuah Studi mengenai Analisa Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif</b>	
<i>Heroik Mutaqien Pratama &amp; Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013</i> .....	129
<b>Menolak UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang Tidak Bertanggung Jawab</b>	
<i>Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013</i> .....	147
<b>Membedah Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Kampus UGM</b>	
<i>Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013</i> .....	151



<b>Analisa Komprehensif (Ekonomi, Poliik, dan Agraria) terhadap Cita-Cita Ketahanan dan Kedaulatan Pangan</b>	
<i>Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013.....</i>	161
<b>Penyebab Korupsi Partai Politik: Studi Kasus Wisma Atlet di Tubuh Partai Demokrat</b>	
<i>Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013.....</i>	185

### BAGIAN KETIGA

#### Kajian Tertulis BEM/DEMA/LEM Fakultas

<b>Kajian Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan akan Padi dan Jagung di Indonesia</b>	
<i>Kajian Strategis BEM Fakultas Geografi UGM 2013 .....</i>	199
<b>Korupsi: Fakta, Problem, dan Peran Mahasiswa</b>	
<i>Kajian Strategis BEM Fakultas Geografi UGM 2013.....</i>	203
<b>Kedaulatan Pangan=Retorika?</b>	
<i>Kajian Strategis Dema Fakultas Pertanian UGM 2013.....</i>	209
<b>Kami Juga Ingin Sekolah</b>	
<i>Kajian Strategis BEM Fakultas Geografi UGM 2013.....</i>	215
<b>Sistem Jaminan Sosial Nasional:</b>	
<b>Babak Baru Sistem Kesehatan Indonesia</b>	
<i>Advokasi &amp; Kajian Strategis BEM Fak. Kedokteran Gigi UGM 2013..</i>	221
<b>Membedah Mode Transportasi Massal di Indonesia</b>	
<i>Kajian Strategis BEM Fakultas Teknik UGM 2013.....</i>	227
<b>PROFIL PENULIS ESAI.....</b>	233
<b>PROFIL KAJIAN.....</b>	237





**BAGIAN PERTAMA**  
*Esai-Esai Dari BEM KM UGM 2013*



**TERUNTUK INDONESIA**

*Bangun dan lihatlah di sana, mereka saudara kita  
Sejarah itu telah lama makmurnya bangsa kita  
Hutan kita yang hijau dulu kini menjadi abu  
Sekuntum bunga yang hendak layu menunggu tanganmu*

*Bersemilah dan berkembanglah bungaku di tanah kaya  
Dan tumbuhlah warnai dunia bersama kilau permata  
Inilah suara hati kami, teruntuk Indonesia*

*Keserakahan manusia tak 'kan ada habisnya  
Abaikan rasa keadilan demi perut mereka*

*Bersemilah dan berkembanglah bungaku di tanah kaya  
Dan tumbuhlah warnai dunia bersama kilau permata  
Inilah suara kami, teruntuk Indonesia*

*Dengarkanlah, dengarkanlah  
Bapak kami yang ada di sana  
Tanah kita kaya raya  
Tapi mengapa kita berbeda?  
Inilah suara hati kami, teruntuk Indonesia*

*Bersemilah dan berkembanglah bungaku di tanah kaya  
Dan tumbuhlah warnai dunia bersama kilau permata  
Inilah suara hati kami, teruntuk Indonesia  
Teruntuk Indonesia  
Teruntuk Indonesia*

(Cipuk Wulan Adhasari)



# **MEMBAJAK BIROKRASI: KORUPSI POLITIK ANTARA BIROKRAT, POLITISI, DAN PENGUSAHA**

**FAISAL ARIEF KAMIL**  
*(Menteri Kajian Strategis BEM KM UGM 2013)*

## **Pendahuluan**

Birokrasi adalah sebuah sistem organisasi yang memiliki posisi strategis untuk melayani masyarakat sebagai warga negara. Kemampuan pelayanan yang baik di sebuah negara dapat diukur dengan birokrasi yang efektif dan efisien dalam mengurus urusan publik. Ketika urusan publik diurus oleh sebuah sistem yang bernama birokrasi, maka kepentingan publik menjadi tujuan dalam pengelolaan birokrasi.

Publik identik dengan masalah kepentingan banyak orang di atas kepentingan individu atau golongan. Ke-publik-an sebuah kepentingan yang diurus birokrasi menjadi nilai penting dalam menentukan langkah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena birokrasi berorientasi pada bentuk pelayanan kepada warga negara, bukan berarti birokrasi tidak mengurus bentuk lainnya dari warga negara. Bentuk pelayanan dari birokrasi adalah membantu masyarakat dengan efektif dan efisien,



sedangkan fungsi lainnya dari birokrasi adalah penarikan dana publik untuk kemudian diberikan kembali dalam pelayanan publik.

Urusan dana yang ditarik oleh birokrasi, dalam artian sangat luas, berupa modal pajak dan modal keuntungan perusahaan negara dalam mengelola *public goods* atau aset-aset yang dimiliki masyarakat luas. Keuntungan modal yang disetorkan untuk kepentingan publik yang kini diurus oleh birokrasi sebagai sistem administratif membutuhkan pengelolaan yang bertanggungjawab dan transparan. Karena birokrasi merupakan sebuah sistem administratif untuk mengumpulkan modal, maka birokrasi menjadi alat untuk memahami apa yang terjadi terkait dengan korupsi politik.

### Sejarah Akumulasi Modal Publik

Akumulasi adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan uang, dalam tulisan ini disebut modal, untuk mendukung fungsi birokrasi dalam mengumpulkan modal untuk pelayanan publik. Apabila kita berbicara soal modal, maka hal ini sangat terkait dengan kapitalisme yang mulai tumbuh subur di Indonesia menjelang awal abad ke-20. Sebelum itu, modal bukan menjadi hal yang diakumulasi (dikumpulkan) karena negara yang kelak bernama Indonesia ini belum memasuki tahap industrialisasi untuk menunjang kapitalisme. Ketika modal belum terkumpul, maka korupsi tidak akan terjadi.

Korupsi boleh dikatakan tidak terjadi dalam suatu masyarakat tani tradisional. Meminjam istilah Daniel Dhakidae<sup>1</sup>, “yang semata-mata bekerja untuk mencukupi makanya sendiri dalam hidup jarak pendek dari tangan ke mulut”. Korupsi akan terjadi ketika ada akumulasi modal yang melampaui kebutuhan dasar seseorang. Kebutuhan untuk bertahan hidup seperti untuk makan, minum, berteduh, dan pakaian adalah kebutuhan dasar. Ketika kemampuan kualitatif seseorang melebihi kebutuhan dasarnya, maka naik juga perkara kualitatif dan kuantitatifnya untuk korupsi<sup>2</sup>.

Korupsi lebih berhubungan dengan perkembangan modern terbesar, yaitu birokrasi dan kapitalisme, atau modal dan birokrasi, tergantung mana yang lebih dahulu berada dalam suatu masyarakat tertentu. Modal pada masa kolonial berkembang lebih dahulu daripada

---

<sup>1</sup> Dhaniel Dhakidae, ‘Kapital, Korupsi, dan Keadilan’, *Jurnal Prisma Volume 32*, (Jakarta: LP3ES, 2013, hlm. 84-87.)

<sup>2</sup> *Ibid.*



birokrasi, sehingga birokrasi yang ada dibuat untuk mendukung akumulasi modal yang dilakukan pemerintah kolonial. Ketika pemerintah kolonial diusir pada masa kemerdekaan, maka modal yang dikuasainya dinasionalisasi pada akhir tahun 1950-an. Birokrasinya yang didukung oleh hukum administrasi juga diambil alih. Dengan begitu, pemerintah telah mewarisi sumber akumulasi modal dan juga birokrasi administrasi untuk menunjangnya. Sebuah hal yang tidak pernah dipupuk sedari awal dari penguasa barunya saat itu.

Angkatan Darat adalah agen yang menguasai sumber akumulasi modal yang telah dinasionalisasi tersebut. Dengan kekuasaan terbesarnya dalam menguasai sumber akumulasi, maka dimulailah era di mana kebutuhan dasar individu terpenuhi dan berlebihan, tetapi hal tersebut tidak pernah memakmuran orang yang berada di luar batas kekuasaan. Kemudian juga menjadi penyokong Golongan Karya dalam membangun rezim Orde Baru<sup>3</sup>.

Yang terjadi di sini modal tidak dilihat sebagai “modal kapital”, tetapi sebagai sebuah “modal kemakmuran” di tangan pribadi, atau kolektif sebagai kumpulan pribadi. Tidak heran apabila terjadi konsumsi untuk menghabiskan “modal kemakmuran” tersebut. Praktek yang dinamakan korupsi politik akan bermula sejak masa ini sampai berdasawarsa kelak.

Semua ini menjadi dasar-dasar dari apa yang disebut Richard Robinson<sup>4</sup> sebagai modal yang berada dalam tangan para birokrat, dikuasai kaum birokrat, dan tidak akan pernah berlangsung tanpa “perkenan” kaum birokrat. Dalam perkembangannya, ia menjadi sistem dan menjadi *bureaucratic capitalism* atau kapitalisme birokratis yang beranak-pinak pada masa Orde Baru.

Ketika semuanya menjadi proses akumulasi kapital disertai birokrasi administratif yang menunjangnya, maka korupsi politik tidak pernah lagi menjadi pencurian tradisional untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk makan, minum, berteduh, dan pakaian, tetapi sebagaimana dikatakan Robinson bahwa terjadi “penjarahan sumber daya negara oleh para abdi negaranya sendiri”, dan ini lah yang disebut korupsi in *optima forma*<sup>5</sup>. Korupsi yang dilakukan secara sistemik dengan media birokrasi administrasi yang legal-formal.

<sup>3</sup> Lihat lebih lanjut studi David Reeve, *Golkar: Sejarah Yang Hilang*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013).

<sup>4</sup> Richard Robinson, *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013)

<sup>5</sup> *Op.cit.*



## Pemikiran Birokasi Marxisme

Ide dasar paradigma birokrasi muncul karena sebuah sebab. Seperti pribahasa yang mengatakan “tidak akan ada asap apabila tidak ada api”. Sudah dijelaskan di atas bahwa akumulasi modal adalah awal sebab munculnya birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, birokrasi dimunculkan untuk mengelola akumulasi modal yang ada<sup>6</sup>.

Pemikiran Marxisme memiliki keyakinan bahwa birokrasi muncul untuk mengadvokasi kepentingan kelas borjuis, sebab negara hanya merupakan instrumen dari para borjuis untuk melakukan eksploitasi pada kelas proletar. Pendekatan ini cocok dengan situasi dan kondisi awal sejarah kemunculan birokrasi, yaitu sejak era kolonialisme.

Dalam logika berpikir birokrasi ala Marxisme, maka setiap kelas akan bertindak sesuai dengan kepentingannya. Kepentingannya ditentukan oleh situasi yang obyektif. Sedangkan pengaruh struktural mempunyai peran sentral dibandingkan segi kesadaran dan moralitas dari manusia<sup>7</sup>.

Kepentingan borjuis dan proletar senantiasa bertentangan, sehingga mereka akan mengambil sikap dasar yang berbeda terhadap perubahan sosial. Borjuis cenderung konservatif, sedangkan proletar cenderung revolusioner. Ketika kaum borjuis memiliki kepentingan untuk melakukan akumulasi modal, maka dibutuhkan birokrasi sebagai penunjang untuk mencapai apa yang diinginkannya. Borjuis disini memiliki kepentingan yang sangat berbeda dengan kepentingan kelas proletar.

Dinamika birokrasi tidak akan berjalan tanpa ada hubungan patron-klien (hubungan tuan dan anak buah) yang membangun loyalitas para kawula kepada raja<sup>8</sup>. Hal tersebut berlaku pada masa kerajaan. Sedangkan, ketika masa telah berganti menjadi era akumulasi kapital industrial, maka karakter dasar ini pun tetap berlanjut untuk memenuhi kepentingan kaum borjuis dalam memperbesar sumber ekonomi.

Analisa Marxisme atas model birokrasi menjadi berhubungan dengan kondisi birokrasi yang sarat dengan budaya patron-klien, kemudian praktek korupsi politik. Borjuis kini terpecah menjadi kalangan borjuis besar dan borjuis kecil, sehingga terjadi belahan dua

<sup>6</sup> Mashuri Maschab dan M. Adhi Ikhsanto, *Konsepsi Dasar Birokrasi*, Bahan Kuliah Mata Kuliah Birokasi, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm. 59).



aktor antara patron (tuan) di satu sisi dan klien (anak buah) di sisi lain. Logika berpikir ini juga menjadi kekuatan terbesar atas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi berdasawarsa kemudian. Kelas proletar dalam kasus ini menjadi kelas yang tidak memiliki akses dalam mengambil akumulasi kapital. Mereka adalah rakyat biasa yang bukan merupakan bagian lingkaran kekuasaan birokratik. Relasi kuasa kelas borjuis birokratis dan kelas proletar menjadi arena kekuasaan yang saling meniadakan.

Hubungan dalam konsep dasar ini menjadi penting dalam memahami praktek korupsi yang terjadi di era pasca reformasi sekarang. Hanya ada pergantian aktor dalam prosesnya. Borjuis besar adalah partai politik, borjuis kecil adalah pengusaha klien partai yang kemudian menjadi donatur partai politik untuk menutupi biaya kampanye dalam sistem demokrasi prosedural. Ciri khas karakter patron-klien masih terjadi, kepentingan antar kelas masih juga terjadi, tetapi semua itu dapat bertransformasi di rezim demokrasi prosedural yang sarat budaya politik uang.

Setelah membedah letak korupsi politik dengan menggunakan pemikiran Marxisme dalam melihat birokrasi, maka kita akan bertanya di mana sesungguhnya letak birokrasi diantara tarik menarik dua kepentingan ini.

### **Membajak Birokrasi**

Birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber<sup>9</sup> dibayangkan merupakan sebuah serangkaian sistem yang membentuk sebuah organisasi raksasa yang disebut negara dan kesemuanya tunduk pada prinsip-prinsip rasionalitas, berjenjang, dan memiliki fungsi-fungsinya masing-masing.

Beberapa karakteristik birokrasi antara lain adalah adanya rasionalitas, adanya pembagian kerja yang jelas, adanya hierarki jabatan, adanya pengaturan sistem yang konsisten (teratur dan tertib), adanya prinsip formalistik impersonalitas (sistem formal yang agak kaku), dan penempatan berdasarkan karier.

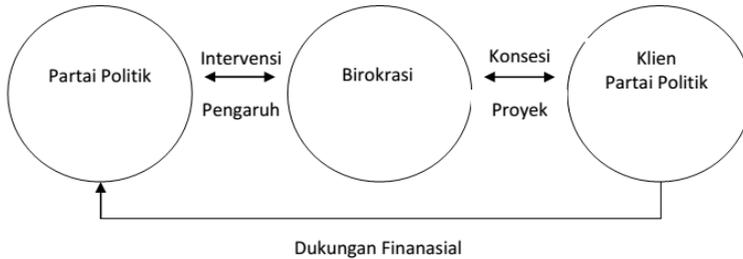
Bagan di atas membantu kita untuk memahami hubungan politik dan birokrasi yang berujung pada korupsi politik. Birokrasi berada di tengah dan terjepit kepentingan finansial jangka pendek dua aktor kartel

---

<sup>9</sup> Lihat Marx Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: The Free Press, 1974).

(bisnis politik), yaitu partai politik dan klien-partai politik (pengusaha). Birokrasi adalah aktor yang berkuasa melakukan pembangunan dengan akumulasi modal. Ketika kebutuhan *campaign finance* menuntut, maka dua atribut kartel akan membajak birokrasi.

*Bagan 1: Hubungan Tarik Menarik Politik dan Birokrasi*



Birokrasi idealnya adalah sistem administrasi yang netral. Birokrasi mengikuti kekuasaan politik yang menjadi lingkaran utamanya. Sehingga tidak heran apabila keterlibatan politik dalam birokrasi menjadi sesuatu yang mutlak. Birokrasi adalah bagian dari pemerintahan, dan pemerintahan akan ada apabila terdapat akumulasi modal. Dan sejarah terbentuknya birokrasi di Indonesia adalah untuk menunjang akumulasi modal sejak era kolonial. Berikut adalah beberapa konteks keterlibatan politik dalam birokrasi.

#### *A) Birokrasi sebagai sumber keuntungan tertentu*

Birokrasi acap kali dijadikan sebagai mesin politik dalam sejumlah kampanye politik. Kasus ini terjadi sejak Orde Baru Soeharto dengan menggunakan sistem Golongan Karya. Sehingga kekuatan birokrasi menjadi tumpuan kemenangan Golongan Karya dan juga sumber modal untuk pembiayaan politik dan kampanye<sup>10</sup>.

Birokrasi digunakan untuk menjembatani proses artikulasi kepentingan-kepentingan politik yang ada. Proses ini terjadi karena penguasa politik memiliki kekuatan untuk merekrut apapun yang disukainya untuk duduk sebagai birokrat administratif. Dan memang birokrasi menjadi sistem yang digunakan penguasa politik sebagai organisasi yang mengurus akumulasi modal.

Birokrasi juga merupakan instrumen untuk menjawab janji politik. Ketika penguasa politik duduk dalam kekuasaan yang signifikan,

<sup>10</sup> Lihat David Reeve, *Op.cit.*

maka janji-janji politik yang digunakannya selama proses kampanye akan menggunakan birokrasi sebagai implementasinya.

*B) Birokrasi sebagai sumber patron-klien dan keuntungan politik dalam menginisiasi kebijakan*

Dalam proses pembuatan kebijakan, birokrasi seringkali dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan tukar-menukar keuntungan politik. Bentuk tukar-menukar keuntungan dapat berupa konsesi (izin usaha) kebijakan, janji kebijakan, dan konsesi proyek dalam implementasi kebijakan. Proses ini yang dikatakan Robinson<sup>11</sup> sebagai kapitalisme birokrasi. Di era reformasi saat ini, sumber patronase yang kerap terjadi bukanlah lagi pada Golongan Karya, tetapi pada institusi-institusi demokrasi pasca amandemen ke-4.

Sebagai instrumen yang digunakan penguasa politik untuk mengorganisasi sumber kapital, maka birokrasi dibajak. Karakter pembajakan birokrasi adalah sama dengan karakter era Orde Baru Soeharto. Karakter patron-klien implementasi kebijakan dan konsesi proyek untuk modal partai politik dan politisi di era demokrasi prosedural kini menjadi hal yang lazim. Inilah konteks keterlibatan politik dalam birokrasi.

*C) Birokrasi sebagai sumber loyalitas politik*

Dalam berbagai proses politik, politisi relatif menggunakan janji politik untuk membangun loyalitas dan komitmen dengan birokrasi. Namun demikian, pada saat yang bersamaan, birokrasi sering digunakan sebagai instrumen untuk mendistribusikan sejumlah *political rewards* kepada para pendukung politisi.

Kegiatan loyalitas politik ini tidak hanya terjadi searah antara birokrasi dan institusi politik, tetapi juga sebaliknya antara institusi politik dengan birokrasi. Ada hubungan simbiosis mutualisme dalam proses ini. Apabila sudah menyangkut masalah akumulasi kapital, maka kepentingan pragmatis untuk bertahan hidup menjadi jalan yang harus ditempuh diantara semua pihak.

*Tabel 1: Kasus-Kasus Korupsi Politik Lintas Aktor (Politisi, Birokrat, Pengusaha)*

---

<sup>11</sup> Lihat Richard Robinson, *Op.cit.*



No	Kasus Korupsi	Aktor yang Terlibat
1	Kasus proyek pengadaan pembangkit listrik	Muhammad Nazaruddin (Politisi Partai Demokrat/Pengusaha) dan Neneng Sri Wahyuni (istri Nazaruddin)
2	Kasus suap kepengurusan anggaran Kemendiknas dan Kemenpora	Angelina Sondakh (Politisi Partai Demokrat)
3	Kasus dugaan suap impor daging sapi	Luthfi Hasan Ishak (Politisi PKS)
4	Korupsi pengurusan anggaran proyek pengadaan Al-Qur'an dan pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama	Zulkarnen Djabar (Politisi Partai Golkar) dan Dandy Prasetya (anak kadungnya)
5	Kasus suap izin usaha investasi pertambangan minyak dan gas bumi	Rudi Rubiandini (Kepala SKK Migas/Birokrat)
6	Korupsi pengadaan simulator SIM	Irjen Djoko Susilo (Polri/Birokrat)
7	Kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten dan Pilkada Gunung Mas, Kalteng	Akil Mochtar (Ketua MK/Birokrat)
8	Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung	Emir Moeis (Mantan Anggota DPR RI/Politisi)
9	Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor.	Andi Mallarangeng (Mantan Menpora RI/Birokrat)
10	Kasus suap Pilkada Lebak	Tubagus Chaeri Wardana (ketua Kadin Provinsi Banten / Pengusaha / Birokrat )

Sumber: Diolah dari *Kompas*, 25 oktober 2013



## Kesimpulan

Intervensi politik yang sedemikian telanjang membuat potret birokrasi di Indonesia semakin suram. Birokrasi ideal yang dicita-citakan Max Weber, terbentur dengan bekerjanya fakta pemikiran Marxisme atas birokrasi. Akumulasi modal menjadi sesuatu yang super menggiurkan sehingga segala aktor politik berusaha untuk membajaknya. Dan memang birokrasi adalah organisasi paling sah dalam proses pengumpulan akumulasi modal, sehingga banyak yang ingin menjadikannya rampasan perang, bukan sebagai institusi negara dengan orientasi layanan publik.

Tetapi ironis ketika pembajakan terhadap birokrasi yang dilakukan aktor politik demokratis lain menjadi sesuatu yang diinginkan birokrasi sendiri. Sudah menjadi hal yang wajar di era yang katanya reformis ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan pengusaha dan aktivis melakukan tindakan koruptif. Perlu ada semacam terapi untuk menghilangkan penyakit laten birokrasi kita. Jadi jangan kita salahkan aktor lain apabila birokrasi sendiri “senang untuk dibajak”.

## Referensi Literatur

- Dhakidae, Dhaniel. 2013. *'Kapital, Korupsi, dan Keadilan', Jurnal Prisma Volume 32*. Jakarta: LP3ES.
- Maschab, Mashuri, M. Adhi Ikhsanto. *Konsepsi Dasar Birokrasi, Bahan Kuliah Mata Kuliah Birokasi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Pranoto, Suhartono. 2008. *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah*. Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Reeve, David. 2013. *Golkar: Sejarah Yang Hilang*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Robinson, Richard. 2013. *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Weber, Max. 1974. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Free Press.

## Media Massa

*Kompas*, 25 oktober 2013



# PERILAKU KORUPSI DALAM PENDEKATAN TEORI

**VICTOR VROOM**

**DITTA NISA**

**(Anggota Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia  
BEM KM UGM 2013)**

Korupsi, terdengar akrab dan terkadang saking akrabnya ia menjadi ‘teman’ bagi hampir seluruh pejabat di Indonesia. Maraknya korupsi di Indonesia seakan mencerminkan legalnya perilaku korupsi. Namun, pada dasarnya hukum Indonesia telah mengatur apa dan bagaimana karakteristik dari tindak pidana korupsi, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Pada tahun 2012, Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) yakni indeks agregat yang dihasilkan



dari penggabungan beberapa indeks yang dihasilkan berbagai lembaga. Indeks ini mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi, menyebutkan bahwa Indonesia memiliki skor CPI 32 dan menempati ranking 118 dari 174 negara, (sumber: Transparency International Corruption Perceptions Index, 2012) hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada pada situasi korupsi yang sudah mengakar.

Tidak semudah membalikan telapak tangan untuk memberantas secara total perilaku yang dirasa cukup menguntungkan sebagian pihak dan merugikan sebagian pihak yang lain ini. Namun berbagai usaha tetap dilakukan oleh banyak pihak yang mengharapkan penegakkan hukum di negara kesatuan republik Indonesia, karena bagaimanapun tindak pidana korupsi adalah perilaku yang tidak dibenarkan baik dalam undang-undang, agama, norma sosial maupun nurani manusia. Kerugian yang dihasilkan dapat memberikan 'efek domino' dimana kerugian yang muncul akan berkelanjutan terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

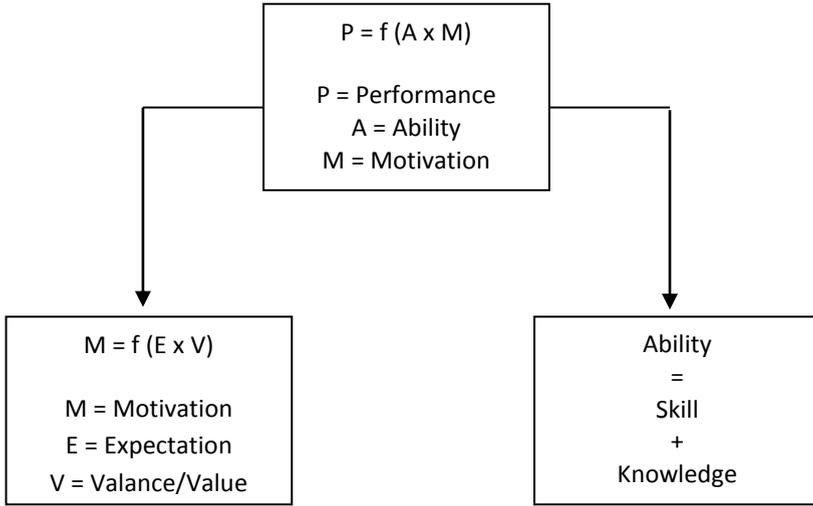
Walaupun sudah banyak dilakukan namun sejauh ini pemberantasan tindak pidana korupsi menitikberatkan pada perilaku korupsi itu sendiri, bukan *meta* perilaku korupsi sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi berupa solusi pasca korupsi terjadi seperti penjatuhan hukuman menurut undang-undang, pengusutan tindakan korupsi oleh KPK, dll. Hal tersebut bukanlah hal efektif dan tidak akan membuat jera para pejabat untuk berperilaku anti korupsi, yang terpenting adalah mengetahui apa dorongan dan motif dibalik perilaku korupsi sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan berupa pemberantasan terhadap hal-hal yang memicu perilaku korupsi. Untuk itu perlu adanya kajian secara intens dari perspektif bidang keilmuan psikologi yang mana dalam hal ini teori-teori psikologi memberikan penjabaran tentang perilaku manusia, termasuk perilaku korupsi.



Secara khusus, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental individu. Proses mental atau kognitif adalah segala bentuk aktivitas di dalam pikiran individu seperti kreativitas, intelegensi, persepsi, *imagery*, memori, perhatian, gagasan, percaya, pengambilan keputusan, motivasi, dll. Sementara perilaku didefinisikan sebagai hal yang nampak, yang muncul dipermukaan/dapat dilihat serta merupakan resultan dari interaksi antara stimulus-stimulus (faktor eksternal) dan respon (faktor internal) pada individu. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh individu dapat dijelaskan dalam berbagai teori.

Namun, dalam perspektif psikologi motivasi, faktor-faktor pendorong merupakan hal yang ditekankan dari sebuah perilaku yang muncul. Motivasi adalah *power* yang dapat menentukan tingkatan intensitas, persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu aktivitas, baik yang bersumber dari dalam diri individu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik), bagaimana bentuk dan seberapa besar motivasi individu akan mempengaruhi performa seseorang. Abin Syamsuddin Makmun (2003) mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya: (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) persistensi pada kegiatan; (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan; (5) devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan; (6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan; (7) tingkat kualifikasi prestasi atau produk (*output*) yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap sasaran kegiatan.

Victor Vroom, dalam teorinya menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang dimiliki sebagaimana tertulis dalam fungsi berikut:



Berdasarkan Teori Vroom tersebut, *performance* dalam hal ini merupakan kinerja para petinggi negara dari waktu ke waktu sejak terpilih selama menjabat wewenang yang merupakan fungsi dari variabel *ability* dan *motivation*. *Skill* dan *knowledge* merupakan determinan dari *ability* yang dimiliki individu (dimulai dari angka 0 yang berarti tidak ada) yakni keahlian dapat berupa kemahiran dalam bidang yang dilakoni, misalnya Presiden adalah pemimpin sehingga ia haruslah ahli dalam menentukan arah setiap pengambilan keputusan atas perkara-perkara yang dihadapi, sementara pengetahuan mencakup seberapa luas dan mendalam pemahaman Presiden dalam hal-hal yang harus ia putuskan. Maka, dengan asumsi variabel motivasi tetap, individu dengan *skill* dan *knowledge* yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Namun motivasi sendiri pada dasarnya berubah dan merupakan interaksi ekspektasi dan valensi yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Ekspektasi merupakan suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku. Ekspektasi merupakan probabilitas yang memiliki nilai berkisar nol yang berarti tidak ada kemungkinan hingga satu yang berarti kepastian, dalam hal ini misalnya Presiden SBY sempat meminta dinaikan gaji, probabilitasnya adalah 0 yakni tidak ada kemungkinan. Kemudian hal ini lah yang berkaitan dengan valensi atau nilai, yakni daya atau nilai motivasi baik positif maupun negatif, jika daya motivasi adalah positif maka perilaku yang muncul adalah cara-cara SBY untuk memperoleh pendapatan tambahan



melalui jalan yang baik misalnya membuka bisnis, investasi, dll tetapi jika daya motivasi negatif maka perilaku yang muncul adalah perilaku buruk yakni korupsi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal pertama yang merupakan determinan dari *performance* adalah motivasi yang merupakan gabungan dari ekspektasi dan valensi (+ atau -) yang mana motivasi akan menentukan konotasi *performance* setelah difungsikan dengan *ability*. Apabila terdapat salah satu variabel yang tidak dipenuhi standarnya, sudah dapat dipastikan akan terdapat penyimpangan-penyimpangan salah satunya perilaku korupsi.

Untuk itu, saran penulis adalah diperlukannya seleksi dan analisis psikologi melalui tes-tes psikologi yang memiliki validitas dan reliabilitas terhadap seluruh calon petinggi negara baik DPR, MPR, Presiden, dll dan secara transparan hasil tes dipublikasi, terkait probabilitas kepemimpinan. Hasil tes ini akan memprediksi dan berkaitan langsung dengan kinerja seseorang setelah diberi jabatan, termasuk seberapa besar potensinya untuk melakukan korupsi. Sehingga dengan adanya seleksi melalui analisis psikologi tersebut dapat diukur kelayakan seseorang untuk menempati kursi pemerintah sebelum akhirnya ia akan dipilih secara masal untuk memimpin.



# MENATAP MASA DEPAN INDONESIA

*PIPIT SUPRIHATIN*

*(Sekretaris Jenderal BEM KM UGM 2013)*

Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Tak bisa dipungkiri bahwa dengan penerapan sistem ini, maka pergantian pemerintahan mutlak ada sebagaimana sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masa periode pemerintahan di Indonesia yaitu maksimal menjabat dua kali periode, dengan lima tahun setiap periodenya.

Tahun 2014 merupakan tahun pertarungan politik di kancah pemerintahan Indonesia. Pemilu legislatif dan pemilu Presiden RI akan berlangsung di tahun tersebut. Saat ini aura politis sudah sangat tercium. Kalau kita amati, hampir setiap space iklan baik yang di media cetak maupun elektronik semua mengacu pada pencitraan baik yang disampaikan secara tersirat maupun tersurat.

Pemilu (Pemilihan Umum), menjadi pembelajaran politik yang efektif, namun jangan sampai terjebak menjadi oportunistis. Karena mengejar jabatan akhirnya menggunakan berbagai cara untuk



menempuhnya. Hal ini justru hanya akan mencederai pembelajaran politik itu. Menang dalam medan pemilu seharusnya tidak hanya dinilai dari unggulnya suara saja, melainkan bagaimana dapat melibatkan semua elemen atau calon yang menjadi peserta pemilu atau terlibat di pemilu. Karena sadar tidak sadar mereka yang sudah melibatkan diri di pemilu –baca:calon presiden-, berarti bukan sembarangan orang dan orang tersebut pasti telah menyiapkan mental, jiwa, dan raganya untuk berkontribusi demi kemajuan bangsa ini.

Kondisi bangsa ke depan dapat kita lihat dari kondisi bangsa ini saat ini. Karena para pemegang ranah strategis di pemerintahan ke depannya adalah pemuda saat ini. Lalu pertanyaannya, apakah karakter pemuda saat ini sudah mencerminkan karakter pemimpin unggul masa depan?

Sampai saat ini belum banyak pemuda yang mau ‘menceburkan’ diri untuk memperbaiki pemerintahan dengan memasuki ranah-ranah politik. Terbukti calon anggota legislative yang akan mengikuti perhelatan pemilu pada 9 April mendatang masih didominasi orang-orang tua. Bahkan beberapa dari mereka para pemain lama di pemilu lima tahun silam.

Regenerasi bangsa ini terjadi tiap lima tahun sekali. Dalam pergantian pemerintah tersebut berarti terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Menjadi pemimpin nasional tidak hanya sebagai jabatan structural, jabatan tertinggi di Negara. Namun yang terpenting adalah jiwa kepemimpinannya mampu membawa martabat bangsa ini ke arah yang lebih baik di segala aspek kehidupannya. Mengoptimalkan segala sector merupakan salah satu upaya untuk memajukan bangsa ini. Karena dengan demikian persoalan satu bidang tidak mempengaruhi bidang yang lain.

Menurut John Kotter, ia berpendapat bahwa Karena manajemen kebanyakan berurusan dengan status quo dan kepemimpinan kebanyakan berurusan dengan perubahan, maka pada abad ke-2 mendatang kita harus lebih mampu mencetak pemimpin-pemimpin. Tanpa pemimpin yang cukup jumlahnya, visi, komunikasi dan pemberdayaan yang menjadi jantung perubahan, secara sederhana dapat dikatakan tidak akan cukup cepat untuk memuaskan kebutuhan dan harapan.

Seorang pemimpin harus memiliki karakter negarawan. Artinya, seorang pemimpin harus mampu “mencetak” pemimpin- pemimpin



pada level di bawahnya dalam jumlah yang cukup. Tetapi tidak seperti di perusahaan, di tingkat pemerintahan dalam sistem pemilu sekarang ini, tidaklah mungkin seorang Presiden, misalnya, bisa “mencetak” gubernur dan bupati/walikota yang benar-benar mau dan mampu menjalankan visi misinya.

Selayaknya kendaraan, ada yang namanya spion. Dengan adanya spion ini harapannya bisa melihat dan mengambil hikmah dari yang sudah berlalu. Namun jangan terlena melihat ke belakang terus, karena yang perlu ditatap ke depan jauh lebih panjang. Jangan hanya disibukkan oleh ruang masa lalu –seperti kata Chairil Anwar, “*melap-lap*” masa silam-- seraya membiarkan kafilah masa depan berlalu. Tanpa perlu kehilangan ruh masa lalu, kita harus mengambil bagian dalam kebangkitan masa depan itu, karena kuku jejaringnya sebagian telah menancap di dalam diri, masyarakat, dan tubuh bangsa ini.

Jika kita bisa menemukan seorang pemimpin kuat yang akan memimpin bangsa dan negara ini, niscaya ia akan menjadi orang besar, setelah krisis mampu diatasinya. Jenis orang kuat ini harus “berjodoh” dengan impian masyarakat Indonesia sekarang. Kita tidak bisa meniru orang kuat bangsa-bangsa lain. Orang kuat itu kontekstual. Orang kuat kita di masa lampau, belum tentu cocok dengan konteks kebutuhan sekarang. Orang kuat yang kita cari kini, belum tentu akan menjadi kuat sepuluh atau dua puluh tahun mendatang. Apalagi menjiplak orang kuat dalam sejarah bangsa-bangsa lain, karena mereka memiliki orang kuatnya masing-masing. Setiap zaman melahirkan dan membutuhkan orang kuatnya sendiri. Karena setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda pula.

Sesungguhnya rakyat menginginkan pemimpin yang tegas, berani karena benar, benar karena menurut hukum. Rakyat tidak terlalu peduli tentang IQ, yang penting berani bertindak tegas sesuai kontrak sosial, jujur, tanpa pamrih, mengutamakan kepentingan bersama, jauh dari *aji mumpung*, berani tidak populer demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat tidak menginginkan pemimpin yang hanya peduli pada golongan sendiri, daerah sendiri, kerabat sendiri, pemimpin yang egoistik. Atau pemimpin mabuk kuasa, yang takut kehilangan kursi. Para pemimpin ini berdiri tegak di depan dengan panji-panjinya, dan di belakang, ribuan massa pendukungnya. Sebagaimana pepatah Jawa mengatakan “*Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*”.



Namun, suara seorang pemimpin politik sekarang ini, meski jelas-jelas demi kepentingan seluruh bangsa, tetap saja ditafsirkan bagi kepentingan kelompoknya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh dengan kepentingan golongan, massa tertentu, demi tujuan tertentu pula. Ia mengabdikan untuk masa kini yang dekat dan untuk persoalan-persoalan aktual saja. Karenanya, sulit memperoleh kepercayaan dari massa dan golongan lain. Tokoh pemimpin yang bisa diterima oleh seluruh golongan dan masyarakat bangsa adalah tokoh yang tidak memiliki massa golongan. Massanya adalah seluruh rakyat. Tokoh semacam itu barangkali memang berasal dari suatu golongan massa, tetapi memiliki kualitas di luar massa golongannya. Tokoh ini tidak berbendera, dan dengan demikian justru mewakili semua bendera, karena semua bendera yang ada bisa dikibarkannya. Ia tidak memiliki kepentingan kelompok, dan karenanya ia memenuhi semua kepentingan kelompok. Tokoh yang mungkin bisa dipercaya adalah tokoh yang kepentingannya tidak-berkepentingan, yang massanya tidak-bermassa, yang suaranya bukan suara sekarang ini.

Rakyat umumnya mendambakan pemimpin yang kuat karakternya, yang tidak bermuka banyak, dan tidak ragu untuk membenarkan dan menyalahkan. Pemimpin yang tidak melihat batas-batas golongan dan kepentingan.

Karakter pemimpin yang demikian itu mungkin banyak kita miliki. Ia tidak bisa memunculkan dirinya dengan usahanya sendiri. Orang yang terlalu percaya pada kerja rasionya, bahwa pemimpin itu dapat diperjuangkan, patut dicurigai kejujuran dan otentitas kepemimpinannya. Orang kuat adalah orang panggilan. Siapa yang memanggil? Hati nurani dan jeritan kebutuhan rakyat sendiri. Pemimpin sejati tidak berambisi menjadi pemimpin. Bila kualitas pemimpin yang demikian itu terpilih menjadi orang kuat, maka kebesarannya akan diuji. Menjadi pemimpin itu adalah sebuah amanah, padahal prinsip amanah yaitu bahwa jangan sekali-kali minta amanah, namun jika diamanahi jangan lari. Artinya, kita tidak berambisi untuk menjadi pemimpin, namun jika orang lain memberikan kepercayaan untuk memimpin maka harus siap.

Kualitas pemimpin yang demikian itu akan ada di tengah-tengah dualisme yang plural ini. Ia akan “terjepit” antara yang kanan dan kiri, antara mayoritas dan minoritas, antara yang keras dan yang lunak. Kreativitas dan kepekaannya diuji. Di saat-saat inilah keberanian dan



ketegasannya terhadap kebenaran mendapatkan tantangannya. Tarik-menarik kepentingan dualistik yang plural inilah ciri khas konteks Indonesia.

Belajar dari pengalaman sejarah, orang Indonesia dasarnya terbuka, toleran, mudah diatur, mudah patuh, tidak banyak menuntut, suka mengakurkan hal-hal dualistik, siap menerima yang asing, tidak menyukai sesuatu yang ekstrem. Orang kuat Indonesia adalah pemimpin yang memenuhi kebutuhan “dunia tengah” manusia Indonesia. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang kuat, yang berkarakter sederhana, jujur, tulus, memikirkan rakyat kecil, seperti Bung Hatta. Kharismatik dan patriotik seperti Bung Karno.

Negara Indonesia dibentuk dalam kerangka mencapai tujuan nasional Indonesia Merdeka yakni sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal tersebut tentunya harus dimaknai bahwa keberhasilan bangsa Indonesia sebagai suatu negara akan diukur dari seberapa jauh tingkat kemampuan.

Pemerintah bersama rakyatnya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, aman, adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengorganisasian seluruh rakyat dan segala sumber daya yang tersedia amat penting dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pengelolaan organisasi negara inilah, faktor kepemimpinan nasional amat menentukan.



## **(MASIH) PROGRESIFKAH KITA?**

**RIZKY ALIF ALVIAN**

***(Anggota Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013)***

Pertama, kata 'kita' merujuk kepada mahasiswa Indonesia dan '(masih)' menunjukkan bahwa mahasiswa pernah bersifat progresif. Kedua, makna 'progresif' harus dibedakan dari 'transformatif'. Menurut Munawar Ahmad, progresif dan transformatif pada dasarnya adalah sikap untuk memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan dengan basis fakta. Tetapi, apabila sifat transformatif memberikan solusi berdasarkan sebuah model yang pernah ada di dalam sejarah, sifat progresif memberikan jalan keluar yang baru.<sup>12</sup> Mahasiswa, dengan bekal kreativitas mereka, tentunya lebih tepat memiliki sifat progresif daripada transformatif meskipun bukan berarti kedua sifat itu saling meniadakan.

Dengan pengertian kata progresif di atas, kita dapat merumuskan sistem gerak mahasiswa dalam bentuk: pengalaman-kesadaran-aksi. Pengalaman nyata yang diperoleh oleh mahasiswa kemudian diproses menjadi kesadaran akan adanya permasalahan.

---

<sup>12</sup> Munawar Ahmad, 'New Social Movement', disampaikan dalam diskusi *Sekolah Hukum dan Politik Progresif*, Social Movement Institute, Dema FISIPOL UGM dan Senat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 28 Oktober 2013.



Dengan bekal kreativitas dan intelektualitas mahasiswa, kesadaran tersebut diubah menjadi solusi yang dilakukan atau aksi. Aksi adalah konsekuensi dari pengalaman mahasiswa karena tujuan mengetahui adalah untuk melakukan perubahan. Bahkan ketika seseorang ingin mengetahui sesuatu tanpa berniat untuk mengubahnya sekalipun, orang tersebut sebenarnya telah sedikit-banyak memengaruhi dan mengubah obyek yang ia amati, entah secara sengaja ataupun tidak. Oleh karena itu, mahasiswa harus memiliki niat untuk mengubah ke arah yang dipandanginya positif untuk minimal menghindari perubahan ke arah negatif.

Perubahan negatif misalnya disebabkan oleh apatisme. Ketika kita mengetahui realitas kehidupan masyarakat yang buruk namun tidak berusaha untuk memperbaikinya, maka realitas tersebut akan bergerak ke arah yang semakin buruk. Dengan demikian, pengetahuan kita mengenai realitas masyarakat tersebut berkontribusi bagi perubahan masyarakat ke arah negatif karena kita tidak berusaha untuk mengarahkannya ke sisi positif atau setidaknya menghentikan pergerakan ke arah negatif.

Sepanjang sejarah Indonesia, mahasiswa telah menampakkan sisi progresif ini. Pengalaman mahasiswa 1966 memicu kesadaran akan adanya kesewenang-wenangan rezim dalam bentuk kemiskinan hingga masalah PKI.<sup>13</sup> Hal ini barangkali dapat dibaca lewat catatan harian Soe Hok Gie:

“... Aku bertemu dengan seorang (bukan pengemis) yang tengah memakan kulit mangga. Rupanya ia kelaparan. ... Dua kilometer dari pemakan kulit “paduka” kita mungkin lagi tertawa-tawa, makan-makan dengan istri-istrinya yang cantik. ‘Aku besertamu, orang-orang malang’”.<sup>14</sup>

Menurut mahasiswa 1966, solusi bagi masalah tersebut ialah Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Solusi tersebut didorong agar menjadi kenyataan melalui demonstrasi skala besar yang antara lain disokong oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), KAPPI, dan Laskar Arief Rachman Hakim.<sup>15</sup> Sementara itu, peristiwa 15 Januari 1974 (Malari)

<sup>13</sup> Aria Yudhistira, *Dilarang Gondrong!*, Marjin Kiri, Jakarta, 2010, hal. 22-23.

<sup>14</sup> Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demontran*, LP3ES, Jakarta, 2012, hal. 69.

<sup>15</sup> KAMI sendiri dibubarkan oleh Sukarno pada 10 Januari 1966; Yudhistira, hal. 26.



berangkat dari kesadaran akan semakin kuatnya kekuatan modal Jepang di Indonesia. Selain itu, juga ditengarai adanya “antek Jepang” di dalam pemerintahan yang melangkahi kewenangan para menteri.<sup>16</sup> Kesadaran ini diwujudkan dalam bentuk aksi sentimen anti-Jepang dan pengajuan solusi Tritura Jilid II (pembubaran lembaga asisten pribadi presiden, turunkan harga, dan hukum para koruptor) ketika PM Jepang, Kakuei Tanaka, datang berkunjung ke Indonesia. Dengan kerangka berpikir pengalaman-kesadaran-aksi, kita dapat melihat pola serupa dari proses Sumpah Pemuda II tahun 1928 hingga proses reformasi 1998.

Namun, kita tidak boleh terjebak dalam pemikiran bahwa, misalnya, apa yang dilakukan oleh mahasiswa 1966, 1974, dan 1998 adalah hal yang sama. Pergerakan tersebut meskipun dilakukan dalam format yang agak mirip selalu menunjukkan sisi progresif karena mereka mencita-citakan sesuatu yang belum dicapai, bukan sesuatu yang pernah dicapai dan kemudian ingin diulangi sekali lagi. Mereka selalu berusaha untuk mengajukan solusi baru yang pas dengan konteks sejarah di mana mereka hidup dan berada. Kemiripan format semata-mata terjadi karena kondisi sosial-politik menuntut mereka untuk melakukan hal itu.

Pada 1966, tuntutan pembubaran PKI ditolak oleh Sukarno dengan alasan kelompok komunis berkontribusi sangat besar bagi revolusi kemerdekaan.<sup>17</sup> Hal ini sebenarnya mengindikasikan buntunya jalur aspirasi yang normal sehingga aspirasi harus didorong oleh gerakan massa. Hal serupa juga terjadi pada 1998 di mana pemerintah begitu represif terhadap kebebasan berpendapat. Contoh berbeda dapat ditarik dari peristiwa tahun 1928. Kondisi pemerintahan kolonial yang begitu berkuasa dan identitas bersama Indonesia yang masih dalam tahap pembangunan mensyaratkan adanya gerakan yang lebih moderat. Pemberontakan PKI yang gagal pada tahun 1926 menunjukkan bahwa gerakan massa pada waktu itu masih sukar diterapkan. Dengan begitu, Kongres Sumpah Pemuda II pun memiliki sisi progresif.

Lantas, bagaimana kondisi hari ini? Dari sisi pengalaman-kesadaran, gerakan mahasiswa hari ini sukar untuk menarik kesadaran dari pengalaman. Kesenjangan kelas ekonomi yang melebar membuat berbagai komponen masyarakat tidak merasakan suasana hidup yang sama. Hal ini mendorong kita untuk menarik kesadaran yang berbeda-

---

<sup>16</sup> *Historia*, “Hikayat Ali-Soemitro”, Nomor 9, Tahun 1, 2013, hal. 58-59.

<sup>17</sup> Yudhistira, hal. 22.



beda pula. Dibandingkan dengan 1998, misalnya, masyarakat pada era itu sama-sama merasakan krisis ekonomi yang menekan sehingga solidaritas dapat dibentuk. Masalah utama gerakan mahasiswa hari ini bukanlah ketiadaan musuh yang sama, melainkan tidak adanya pengalaman yang sama. Untuk mengatasi problema ini, mahasiswa dapat turun ke bawah agar mampu mengambil pengalaman secara langsung dan nyata. Mahasiswa dan rakyat dapat membentuk sinergi, misalnya, dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dst. Hal ini perlu untuk mencegah mahasiswa mengajukan solusi dengan dasar pengalaman yang salah karena hal itu bisa memicu solusi yang salah pula.<sup>18</sup> Selain itu, kedekatan rakyat-mahasiswa akan memperkuat klaim mahasiswa sebagai pembela rakyat dan dengan demikian meningkatkan *bargaining position* mahasiswa terhadap pengambil kebijakan.

Sedangkan dari sisi kesadaran-aksi, gerakan mahasiswa justru terbilang telat untuk menggunakan intelektualitas mereka sebagai basis solusi. Di sini, mahasiswa gagal melihat perubahan radikal yang terjadi pasca-1998. Dalam negara yang terpengaruh oleh neoliberalisme, sebuah kebijakan mengalami 'pertarungan wacana' antara pihak yang berusaha mempertahankan ideologi dominan melawan pihak yang membela mereka yang didominasi lewat kelompok *think-tank*.<sup>19</sup> Media massa pun memegang peran penting. Mahasiswa dewasa ini kurang melakukan advokasi kebijakan dengan cara membangun gagasan tanding. Di sini, kita dapat mengajukan pertanyaan reflektif: apakah mahasiswa sekarang ini mampu membangun gagasan tanding untuk melawan pakar-pakar yang mengadvokasi neoliberalisme? Apakah mahasiswa yang mengaku sebagai intelektual benar-benar intelek? Apakah mahasiswa mampu mengajukan solusi yang lebih baik daripada *think-tank* yang sudah mapan? Untuk menyelesaikan masalah ini, mahasiswa mau tidak mau harus mencerdaskan diri semaksimal mungkin. Setelah itu, mahasiswa bisa membangun saluran untuk menyebarkan ide mereka baik ke masyarakat ataupun ke pembuat kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan secara langsung.

---

<sup>18</sup> Mengenai studi tentang dampak ketidaktahuan, lihat WF Wertheim, *Elite versus Massa*, Resist Book, Yogyakarta, 2009.

<sup>19</sup> Hartwig Pautz, "Revisiting the Think-Tank Phenomenon", *Public Policy and Administration*, 19 September 2011, hal. 8.



Dibandingkan dengan 1966, 1974, dan 1998, gerakan mahasiswa hari ini justru lebih mirip dengan gerakan 1928 atau 1900-an<sup>20</sup>. Progresivitas mahasiswa hari ini harus dimulai dengan mengenali rakyat terlebih dahulu, mengajarkan ide-ide pembaharuan pada rakyat, baru kemudian mengambil langkah aksi. Hari ini, kita belum tiba di tahap-tahap itu. Tetapi, kita mempunyai kesempatan lebar untuk membuat gerakan mahasiswa menjadi progresif kembali dan bukan sekadar menjadi imitasi gerakan mahasiswa yang lampau. Sukarno menyebutkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kita mungkin perlu merevisi kata-kata itu: bangsa yang besar adalah bangsa yang membuat sejarahnya sendiri. Seperti kata Rene de Clerq, “Hanya satu negeri yang bisa menjadi tanah airku, yaitu negeri yang berkembang karena perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku”.

---

<sup>20</sup> Pola ini dapat dilihat dalam novel tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer.



# AKTIVIS MAHASISWA

**ANDHIKA HARYAWAN**

**(Anggota Kementerian Minat dan Bakat BEM KM UGM 2013)**

*“Di dalam hidup ini hanya ada dua pilihan,  
yaitu menjadi orang yang idealis atau apatis”  
Soe Hok Gie*

Saat pertama kali menginjak dunia perkuliahan saya bertanya-tanya tentang aktifitas mahasiswa itu apa saja. Karena notabene saya pada saat itu adalah mahasiswa baru saya berpikir bahwa kegiatan mahasiswa yaitu kuliah dan praktikum. Namun seiring berjalannya waktu saya merasa ada yang kurang dalam aktifitas perkuliahan saya sehari-hari, apalagi ketika mengingat cita-cita saya yang ingin menjadi seorang pemimpin bangsa.

Pada saat itu saya belum gemar membaca buku, sehingga wawasan saya hanya seputar bidang keilmuan saya yaitu pertanian. Kemudian saya kembali bertanya pada diri saya sendiri apakah saya bisa menjadi seorang pemimpin bangsa jika hanya menguasai ilmu pertanian teoritis? Saya merenung sejenak tentang bagaimana agar saya bisa menjadi seorang pemimpin bangsa. Selintas saya berpikir untuk menjadi



seorang pemimpin bangsa, saya harus bisa memimpin sesuatu yang lingkungannya lebih kecil terlebih dahulu dan hal ini harus konkret untuk saat ini.

Saya pikir hal itu adalah menjadi seorang pemimpin organisasi kampus. Namun yang menjadi masalah adalah saya pada saat SMA tidak aktif di organisasi sekolah, apakah bisa menjadi pemimpin organisasi kampus? Kembali saya merenung, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan salah satu organisasi kampus. Karena kalau tidak dimulai sekarang mau kapan lagi. Ingat, seorang atlet lari marathons menempuh jarak ribuan meter dimulai dengan satu langkah. Memang satu langkah pertama terlihat tidak berarti, namun sejatinya langkah pertama inilah yang menjadi saksi akan keputusan kita untuk melakukan sesuatu dan sekaligus menjadi pengingat kita akan tujuan kita. Sehingga kemudian langkah pertama kita inilah yang mendasari langkah-langkah kita selanjutnya.

Demikian halnya dengan saya, saya memutuskan untuk bergabung dengan organisasi dengan harapan saya dapat belajar untuk menjadi seorang pemimpin bangsa. Pada awalnya saya berpikir dengan menjadi pemimpin organisasi tersebut saya telah melakukan langkah konkret untuk belajar menjadi pemimpin bangsa, sehingga dengan giat saya mempelajari dan memahami organisasi tersebut, dengan demikian saya dapat mengetahui bagaimana cara agar saya bisa menjadi pemimpin organisasi tersebut.

Namun dalam perjalanan mempelajari tentang organisasi tersebut saya menemukan pelajaran bahwa untuk menjadi seorang pemimpin organisasi tidak cukup dengan hanya memahami organisasi dan program-program kerjanya. Kemudian saya kembali bertanya pada diri sendiri, lalu apa yang harus saya pelajari lagi?

Waktu demi waktu saya lalui dengan aktifitas akademik dan non-akademik seperti biasanya, hingga pada suatu ketika saya mendengar satu kata yang asing bagi saya, aktivis. Apa itu aktivis? Karena rasa ingin tahu saya dengan kata aktivis ini, saya membuka kamus besar bahasa Indonesia dan mendapati makna aktivis adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, pemuda, wanita, dsb) yang bekerja aktif dalam organisasinya. Arti kata aktivis dari KBBI tersebut belum memberi gambaran kepada saya tentang aktivis itu sendiri. Tapi satu pertanyaan yang kembali muncul dibenak saya, apakah dengan menjadi seorang aktivis dapat mengantarkan saya menjadi seorang pemimpin bangsa?



Kemudian kembali saya mencari-cari tentang makna aktivis dengan jalan bertanya kepada kakak kelas dan melalui *browsing* di internet. Salah satu yang saya ingat betul tentang jawaban kakak kelas akan pertanyaan saya tersebut adalah katanya tugas seorang mahasiswa tidak hanya untuk duduk di kursi perkuliahan dan kursi laboratorium tetapi juga untuk bermanfaat bagi mahasiswa lain dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu mahasiswa dituntut untuk aktif berorganisasi, yang kemudian anggota-anggota organisasi tersebut disebut sebagai aktivis. Sepintas saya berpikir kalau begitu saya seorang aktivis, karena saya pikir saya sudah aktif berorganisasi.

Saya kembali mencari-mencari makna aktivis melalui internet karena semakin saya tahu saya semakin merasa tidak tahu tentang hal ini. Di salah satu blog di sebutkan bahwa aktivis adalah pelopor/penggerak yang memicu perubahan kearah lebih baik. Aktivis adalah orang yang mendorong pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Aktivis adalah orang yang selalu ingin berbuat lebih untuk kepentingan bersama (Adhitya, 2012). Ketika saya kembalikan kepada diri saya, apakah saya sudah dapat dikatakan menjadi seorang aktivis?

Mulai saat itu saya berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas-tugas saya di organisasi yang saya ikuti. Harapannya dengan demikian saya dapat menjadi aktivis yang baik. Hari-hari pun terus berganti, saya kembali mempertanyakan tentang apakah hanya demikian peran aktivis? Sehingga pada saat itu saya putuskan untuk mencari-cari kembali tentang apa itu aktivis, sekarang saya mencoba untuk mencarinya melalui buku-buku.

Disetiap buku yang saya baca aktivis diidentikan dengan pergerakan perlawanan melawan penjahat dan rezim pemerintah yang *dzalim*. Sehingga pada saat itu saya simpulkan bahwa aktivis adalah orang yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi dan lembaganya, melainkan orang yang tidak akan tinggal diam ketika ada penindasan dan ketidakadilan disekitarnya. Ini jelas jauh dari pemahaman aktivis yang saya pahami pada awalnya.

Kembali dalam sebuah artikel disebutkan bahwa seorang aktivis adalah orang yang berani mengambil resiko meskipun akan dikucilkan oleh mayoritas orang karena selalu mencoba untuk mempertahankan kebenaran. Selanjutnya ini dikenal dengan istilah idealisme. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, idealisme berarti **1**. Aliran dalam falsafah



yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dirasakan dan dipahami; **2.** Hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita atau patokan yang dianggap sempurna; **3.** Karangan atau lukisan yang bersifat khayal atau fantastis yang menunjukkan keindahan dan kesempurnaan.

“Beberapa orang ikut organisasi karena ingin mendapatkan skill plus diluar akademik untuk menunjang dirinya, beberapa orang memperjuangkan “Sesuatu” yang dianggap memberikan kebermanfaatn bagi orang banyak (Rakhmanda,dkk,

Setelah saya dibingungkan dalam mencari makna kata aktivis sekarang saya kembali dibingungkan untuk mencari makna idealisme. Kalau menurut kutipan artikel dan KBBI tersebut mungkin dapat saya simpulkan bahwa idealisme adalah pikiran atau cita-cita yang harus diperjuangkan dalam hidup kita yang mana pikiran/cita-cita tersebut adalah suatu kebenaran. Idealisme aktivis mahasiswa adalah mewujudkan kesejahteraan yang nyata untuk seluruh warga kampus dan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tidak heran jika banyak teman-teman kita yang turun ke jalan (demonstrasi) menyuarakan pendapatnya untuk membela rakyat. Karena saya pikir seorang aktivis adalah orang yang peduli terhadap keadaan disekitarnya dan berusaha untuk dapat bermanfaat untuk orang lain. Sekarang kita sendiri yang harus menentukan apakah akan memilih di zona aman dan tidak peduli dengan masalah yang ada disekitar kita, serta hanya akan menjadi aktivis yang cukup dengan mengikuti organisasi dan menjalankan kepentingan organisasinya. Ataupun akan menjadi aktivis yang selalu merasa gelisah apabila ada penindasan dan ketidakadilan, aktivis yang selalu menginspirasi orang banyak untuk bergerak nyata, serta aktivis yang memahami masalah dan mencoba menawarkan solusi (Anonim). Semua ini harus kita renungkan kembali karena menjadi seorang aktivis adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Mengingat seorang aktivis ada yang *study-oriented* dan ada juga aktivis yang *hedonis*, namun orang yang *study-oriented* dan *hedonis* belum tentu seorang aktivis (Adi, 2008).

Setelah saya menemukan dua kata yang mengubah pandangan hidup saya yaitu aktivis dan idealisme. Saya kembali bergejolak dan mengajukan pertanyaan kepada diri saya untuk apa sih menjadi aktivis? Mengapa harus mempertahankan idealisme? Apakah hal ini hanya semata-mata untuk menjadi seorang pemimpin organisasi. Kalau begitu



untuk apa menjadi seorang pemimpin organisasi? Apakah ini hanya untuk tujuan belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin agar kelak menjadi seorang pemimpin bangsa, presiden. Lantas untuk apa menjadi seorang presiden? Apakah untuk menjadi terkenal, agar fotonya selalu di pajang di depan ruangan, mendapat predikat orang sukses, lalu setelah itu mati.

Saya yakin masing-masing dari kita sering memikirkan hal seperti ini yang intinya mempertanyakan untuk apa keberadaan kita di dunia ini. Dengan contoh lain mungkin untuk apa kita kuliah, apakah proses kuliah untuk memperoleh IP yang bagus, kemudian dengan IP yang bagus tersebut kita dapat mendapat pekerjaan yang aman, setelah itu sukses, menikah, punya anak, lalu mati ! Setelah kita menyadari tentang keberadaan kita ini, maka selanjutnya kita akan berpikir tentang pertanyaan mendasar yang sangat perlu, bahkan harus dijawab. Jawaban ini akan menjadi landasan kehidupan kita pada masa-masa selanjutnya. Selama pertanyaan ini belum terjawab, selama itu pula kita “tersesat” tanpa tujuan yang jelas dan tidak akan hidup di dunia ini dengan tenang (Rakhmanda,dkk, 2013). Pertanyaan ini adalah darimanakah manusia dan kehidupan ini? Untuk apa manusia dan kehidupan ini ada? Akan kemana manusia dan kehidupan setelah ini? Mungkin pertanyaan-pertanyaan pokok dan mendasar ini yang saya pahami sebagai ideologi. Apabila pertanyaan ini terjawab maka kita akan memiliki landasan kehidupan sekaligus tuntutan dan tujuan kehidupan. Selanjutnya kita akan hidup dengan landasan tersebut, mulai dari berekonomi, berbudaya, berpolitik, berinteraksi dan lain sebagainya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia ideologi berarti, 1) Sekumpulan konsep bersistem; 2) cara berpikir seseorang atau suatu golongan manusia; 3) Paham, teori dan tujuan yang berpadu merupakan satu program sosial politik. Lagi-lagi KBBI tidak dapat memberikan gambaran tentang ideologi kepada saya. Walaupun saya tidak tahu persis apa itu ideologi tetapi saya sudah punya landasan yang jelas untuk kehidupan saya.

Sebagai seorang aktivis sangat perlu membangun sebuah kesadaran tentang untuk apa menjadi seorang aktivis, untuk apa mempertahankan idealisme, atau jika lebih luas lagi untuk apa menjadi seorang manusia, untuk apa kita hidup dan lain sebagainya yang intinya



untuk memahami apa yang kita lakukan dan untuk apa kita melakukan hal tersebut.

Dari tujuan yang pragmatis, saya mencoba untuk menjadi orang yang ideologis dan idealis. Menjadi seorang aktivis yang memiliki idealisme untuk memperjuangkan kebenaran agar terciptanya kesejahteraan yang nyata. Hidup Rakyat Indonesia!



# JALAN KEMBALI MENUJU TIRANI

**MUHAMMAD FAKHRURRAZI**

**(Wakil Menteri Kajian Strategis BEM KM UGM 2013)**

Perjuangan dalam terwujudnya sebuah negara yang demokratis di Indonesia, tak lepas dari peran golongan menengah terpelajar yang biasa di sebut mahasiswa. Tak hilang dalam memori sejarah perjuangan bangsa ini, usaha-usaha untuk merdeka, mempertahankan kemerdekaan, maupun usaha-usaha untuk menjatuhkan rezim *dzholim* yang menguasai negeri ini, salah satu golongan yang memperjuangkannya adalah mahasiswa. Ya, hal ini mungkin yang melahirkan istilah bahwa mahasiswa adalah *agent of changes*. Dalam konteks kekinian, peran perjuangan mahasiswa seperti yang dilakukan pada masa lampau ternyata belum usai. Memang, *pasca* reformasi 1998, negeri ini “katanya” sudah kembali ke model demokrasi yang sesungguhnya setelah puluhan tahun di cengkram tirani “lama” dan “baru”. Namun, pada realita yang dihadapi, sisa-sisa tirani yang melukai negeri ini pada masa lampau ternyata tidak hilang begitu saja dari negeri ini. Mereka yang dahulunya merupakan “pesuruh muda” dari tirani



masa lalu justru menjadi pemegang kuasa pada masa kini. Lantas, apa bedanya?

Memang benar, setelah masa reformasi, segalanya menjadi “bebas”. Mahasiswa bebas bersuara, masyarakat bebas untuk protes kepada pemerintah, gerakan-gerakan yang bergerak di segala aspek menjamur tanpa larangan dan kekangan. Namun, hal itu ternyata belum mampu mengubah negeri ini untuk terbebas dari cengkraman puing puing tirani yang ternyata masih hidup penuh kesejahteraan. Hal ini tentu saja menandakan peran mahasiswa sebagai motor penggerak perjuangan belum selesai. Permasalahan baru muncul ketika kita mengetahui bahwa peran mahasiswa sebagai gerakan penumbang tirani justru ditentang oleh sebuah virus perlawanan yang menggerogoti mahasiswa itu sendiri. Virus itu bernama “apatisme” yang menjadi penyakit endemik mahasiswa. Adanya pengaruh yang mengatakan bahwa mahasiswa hanya berkewajiban untuk mengikuti kegiatan akademik diruang-ruang kelas dan laboratorium demi mendapatkan nilai baik dan anggapan bahwa gerakan perjuangan mahasiswa sudah tidak diperlukan dan harus dihindari, membuat tingkat apatisme mahasiswa meningkat.

Paham seperti ini ditularkan secara turun temurun bahkan lebih ekstrim lagi paham ini ditularkan untuk membunuh yang namanya gerakan mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa kehilangan jati dirinya sebagai *agen of changes* saat negeri ini membutuhkan mereka untuk berjuang melawan tindakan pemerintah yang tidak sesuai. Saat ini, kita sulit menemukan sebuah gerakan aksi besar yang mampu membuat pemerintah takut seperti yang terjadi pada tahun 1965 dan 1998 lalu. Yang kita lihat hanya kelompok kecil mahasiswa yang berteriak menyuarakan aspirasi jutaan orang, dan mahasiswa yang lain hanya sibuk untuk keluar masuk kelas dan tertawa melihat apa yang dilakukan kelompok kecil ini. Kewajiban utama mahasiswa memang belajar, namun bukan berarti peran mahasiswa sebagai pejuang dalam mewujudkan negeri yang lebih baik gugur bersamaan dengan berakhirnya gerakan mahasiswa 1965 dan 1998.

Dimana mahasiswa? Ketika kita menyadari bahwa ketidakadilan negeri ini masih ada dan tumbuh berkembang dalam jiwa penguasa. Dengan hal seperti ini bukannya tidak mungkin dan mustahil ketika tirani yang dulu sempat tumbang dapat muncul dan mencengkram kembali negara yang sudah merdeka sejak 1945 ini. Ketakutan akan



kembalinya tirani mencengkrum negeri ini bukan ketakutan prediktif. Namun, hal ini sudah menjadi ketakutan yang nyata. Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat semakin legal dan sah seakan tanpa perlawanan. Negeri ini, dijual murah ke dunia Internasiona dalam misi “globalisasi” justru disambut baik oleh segelintir masyarakat, pemuda, dan yang menyedihkannya lagi oleh mahasiswa itu sendiri.

Lantas dimana “taring” mahasiswa yang dahulu pernah mengusir penjajah dari negeri ini, yang mampu menumbangkan dua rezim tirani yang meresahkan masyarakat. Apatisme yang menyerang mahasiswa menjadi ancaman menakutkan negeri ini. Lebih mengerikan lagi ketika ancaman yang diakibatkan pengaruh apatisme yang semakin meluas ini justru dapat membunuh semangat perjuangan mahasiswa. Melawan kebijakan pemerintah dianggap durhaka, aksi turun kejalan dianggap “kurang kerjaan”, diskusi kajian dianggap diskusi kepentingan, dan lain-lain yang membuat gerakan mahasiswa menjadi tersudutkan keberadaannya.

Saat ini, gerakan raksasa yang sedang berusaha bangun dari tidur panjangnya pasca reformasi 1998 kembali “dinina bobokkan” oleh pengaruh apatisme yang menggerogoti keberanian gerakan mahasiswa untuk berubah. Lalu, ketika keberanian gerakan mahasiswa telah mati dalam kekalahan melawan apatisme, maka semakin nyata pula jalan menuju tirani akan terbuka lebar.

Namun, bukan berarti akhir dari tulisan ini, menjadi catatan akhir kekalahan gerakan mahasiswa terhadap apatisme. Gerakan mahasiswa masih mempunyai harapan untuk bertahan, bergerak, berjuang, bersuara, bahkan mengubah negeri ini untuk lebih baik. Pintu menuju tirani itu belum terbuka lebar karena masih dihambat oleh segerombolan kecil mahasiswa yang masih setia hingga akhir untuk memperjuangkan kebenaran melawan tirani itu sendiri. Apatisme belum menang selama gerakan mahasiswa masih konsisten berjuang di jalan lurus, masih mampu menarik massa walaupun tidak banyak, masih mampu menjalankan misi kebenaran ditengah olok-an dan cercaan apatisme di kiri dan kanan, dan masih bertahan pada sikap rela berkorban untuk mewujudkan negeri yang madani.

Mengutip sebuah ikrar penyemangat dari Hassan Al-Banna salah seorang tokoh perjuangan di Mesir *Jika ada 1000 orang yang memperjuangkan kebenaran maka saksikan aku satu diantaranya. Jika*



*ada 100 orang yang memperjuangkan kebenaran maka saksikan aku satu diantaranya. Jika hanya ada satu orang yang memperjuangkan kebenaran maka saksikan itulah aku. Semoga Ikrar ini dapat memberi semangat kepada gerakan mahasiswa yang sedang terhimpit oleh gerakan apatisme untuk segera bangkit dan tetap konsisten memperjuangkan kebenaran walaupun hanya dengan massa yang terbatas.*



# GLOBALISASI BAGI DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

**MUHAMMAD REKSA PASHA NIZAHIKSAN**  
**(Anggota Sekretaris Jenderal BEM KM UGM 2013)**

Dewasa ini, globalisasi menjadi pokok bahasan dunia terkait ekonomi, sosial, politik, industri dan perdagangan. Banyak negara Eropa yang merancang berbagai model pemerintahan untuk menghadapi dunia globalisasi. orientasinya lebih banyak berfokus kepada stabilitas ekonomi pemerintah demi terwujudnya *welfare state*. Bentuk implementasi dari globalisasi yang dapat masyarakat dunia rasakan adalah pasar bebas. Analisis terkait globalisasi telah banyak dikemukakan oleh para tokoh ekonom Eropa dan Amerika. Penjelasan demi penjelasan telah dipaparkan oleh pemikir-pemikir globalisasi tokoh ekonom. Realitanya hingga kini globalisasi gagal ditangkap tujuan dan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi sebagian besar



Negara-negara di dunia. Kemerosotan perkembangan ekonomi yang akhirnya dirasakan oleh sebagian besar Negara-negara di dunia, terlebih lagi bagi Negara dunia ketiga.

### **Definisi Globalisasi dan Realitas**

Definisi globalisasi pada dasarnya suatu proses hubungan antar berbagai masyarakat di dunia. Dunia yang terglobalisasi adalah dunia berisi peristiwa politik, ekonomi, budaya dan sosial. Berakibat masyarakat di Negara dunia ketiga lebih berfokus kepada peristiwa di Negara maju. Berdampak kepada kemajuan masyarakat di Negara dunia ketiga semakin tidak dapat meningkat, karena masyarakatnya masih bersifat tradisional. Terdapat tiga institusi pilar penopang globalisasi yang banyak berkontribusi dalam sosialisasi globalisasi kepada dunia, yaitu IMF (International Monetary Fund), World Bank dan WTO (World Trade Organization).

Menurut IMF, globalisasi ekonomi merupakan sebuah proses historis integrasi ekonomi antar Negara di dunia dengan segala kebijakan terkait perdagangan dan keuangan. Globalisasi menyangkut tenaga kerja antar Negara dan pengetahuan tingkat internasional. IMF menjamin ekonomi pasar bebas berperan sebagai efisiensi dalam kompetisi dunia. Suatu Negara akan menjadi berkembang GDP (Gross Domestic Product) negara, jika di adu dalam persaingan internasional. Sedangkan Bank Dunia (World Bank) memiliki definisi tersendiri terkait globalisasi. Inti globalisasi adalah proses tukar pengalaman mengenai kegiatan ekonomi dunia yang terealisasikan oleh hampir semua Negara di dunia. Pengalaman tersebut diambil dari tiga bentuk kegiatan, yaitu perdagangan internasional, investasi asing langsung dan aliran pasar modal. Berbeda dengan Anthony Giddens yang mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat. Kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di beberapa tempat jauh. Definisi tersebut memberikan sedikit gambaran terkait sistematika globalisasi secara cukup komprehensif.

### **Globalisasi bagi Negara Dunia Ketiga**

Globalisasi sebenarnya merupakan upaya pembangunan di dalam sejarahnya telah melewati berbagai teori dan pemikiran untuk membuat model ekonomi dunia yang bertujuan mensejahterakan



seluruh Negara di dunia. Pada periode tertentu, paradigma pembangunan masa lalu berkembang menjadi pandangan strategi pembangunan baru. Berbagai indicator dibuat untuk mengukur efektivitas pembangunan baru di suatu Negara dalam penerapan dan dampaknya. Timbul kekhawatiran terkait subyektivitas indicator pembangunan yang lebih mengarah kepada standar kesejahteraan Negara adi daya.

Muncul berbagai teori yang ingin menjelaskan pembangunan yang ideal bagi suatu Negara. Dialektika berbagai teori pembangunan mengungkapkan berbagai latar belakang dan kritikan. Para ahli ekonomi menjelaskan banyak kelemahan mengenai teori pembangunan pada rezim tertentu, kemudian digantikan oleh teori yang baru. Kelemahan yang terlihat adalah terjadinya disorientasi dan disfungsi teori pembangunan dalam memberi kontribusi kemaslahatan bagi Negara dunia ketiga di kancah globalisasi saat ini. Orientasi globalisasi menunjukkan gelagat mengarah kepada perdagangan bebas dan pasar bebas ditingkat internasional. Ahli ekonomi Inggris Adam Smith, Bapak Ekonomi Modern, adalah seorang yang mendukung penuh pasar bebas dan perdagangan bebas. *Statement*-nya adalah perdagangan bebas memungkinkan setiap Negara untuk mengambil keuntungan dari keuntungan komparatif yang dimilikinya. Realita implementasi yang terjadi terlihat sebagian besar Negara dunia ketiga gagal bersaing dalam perdagangan bebas.

Mau tidak mau negara dunia ketiga tetap tidak bisa menghindar dari globalisasi. Maka perlu strategi untuk mengatasi dampak buruk dari globalisasi. Salah satu negara dunia ketiga yang membuka diri dalam globalisasi adalah Indonesia. Negara Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah sebagai sumber utama pendapatan negara. Melalui penggunaan SDA dan pendayagunaan tenaga SDM, pemerintah Indonesia dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Di dalam Pemerintah Indonesia terbagi atas beberapa pemerintah daerah dan dibawahnya terdapat pemerintah kota atau kabupaten. Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerahnya tanpa campur tangan penuh dari pemerintah pusat. Salah satu daerah yang telah menerapkan sistem otonomi daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY memiliki pusat kota dan pemerintah ialah Yogyakarta. Kota yang penuh dengan hiruk-pikuk



keramaian dan berbagai macam budaya dibawa oleh pendatang. Semua itu berbaaur dalam satu kota hingga sering dijuluki kota miniatur negara. Toleransi yang kuat memberi kehidupan harmonis bagi setiap kebudayaan yang masuk ke Kota Yogyakarta.

Globalisasi bagi kota Yogyakarta memiliki arti yang luas terutama dalam toleransi antar budaya. Semakin terbuka keran pembatas antar negara maka kota Yogyakarta akan semakin banyak didatangi pendatang dengan membawa budaya masing-masing. Kondisi tersebut menjadi perhatian penuh bagi pemerintah kota Yogyakarta dalam mengatur harmonisasi pertemuan beda budaya. Ketika toleransi beda budaya tercipta maka akan menjadikan kerukunan antar umat berbudaya dan beragama.

### **Kontribusi Globalisasi bagi *City of Tolerance*<sup>21</sup>**

Konsep kebangsaan kita dibangun atas kebesaran jiwa untuk mengakomodasi perbedaan dan saling menerima perbedaan suku, etnis, bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Keberagaman tersebut sekaligus menjadi kekuatan bersama yang harus di lestarikan. Semangat dasar menerima dan menghargai perbedaan tidak ada di dalam hati dan jiwa setiap warga Kota Yogyakarta, maka kita akan kehilangan identitas diri sebagai *City of Tolerance*. Sebab kota Yogyakarta telah dikukuhkan oleh walikota bersama tokoh agama menjadi *City of Tolerance*. Sepantasnya kota Yogyakarta menjaga toleransi antar budaya dan umat beragama secara baik dan harmonis.

Realitas multikultur Kota Yogyakarta tidak hanya menyangkut pengakuan terhadap keragaman etnis, suku, bangsa, agama, kebudayaan, aliran politik, kelas social ekonomi, tingkat pendidikan, profesi, cara pandang, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, dan sebagainya. Manajemen multikultur Kota Yogyakarta juga menjadi fokus yang harus bermakna melibatkan semua komponen masyarakat ini tanpa kecuali di dalam sebuah proses pembangunan kota. Toleransi adalah modal pembangunan, terutama dalam mewujudkan rasa aman, tertib, dan damai. Warga Kota Yogyakarta dengan demikian dapat merasakan dirinya sebagai anggota satu keluarga besar dan satu komunitas.

Pilihan menjadi kota yang majemuk pada awal pendiriannya ini adalah sebuah pilihan futuristik. Suatu realitas kemajemukan yang

---

<sup>21</sup> Herry Zudianto. 2010. Yogyakarta: Management of Multiculturalism. Session 1 Multicultural Society. Dinduh pada tanggal 28 oktober 2013 dari



semakin kompleks dan melampaui pengertian batas-batas kenegaraan telah berada di hadapan kita dan kita tidak bisa lari dari kenyataan tersebut. Pilihan kita adalah mempersiapkan diri untuk mengasah kemampuan hidup dalam alam multikultur, hingga sedemikian rupa kita tidak menjadi bangsa yang kerdil, minder, dan tertutup yang melihat seluruh dunia sebagai ancaman. Kemampuan kita untuk berperan dalam dunia internasional yang majemuk sangat ditentukan oleh pengalaman dan kemampuan kita dalam mengelola perbedaan dan merawat kemajemukan di Kota Yogyakarta ini.

### **Daftar Pustaka**

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Taneko, Soleman B. 1986. *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Fajar Agung.
- Bintarto. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yunus, Hadi Sabari. 2008. *Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan Masa Depan Kota*.
- Zudianto, Herry. 2010. *Management of Multiculturalism*. Yogyakarta: Session 1 Multicultural Society.



# **MENYONGSONG INDONESIA PASCA MDG'S 2015, APA YANG BISA KITA (MAHASISWA) LAKUKAN?**

*HAMZAH MUHAMMAD HAFIQ*

*(Anggota Kementrian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013)*

Sebentar lagi rentang waktu yang telah di tentukan oleh pemerintahan di seluruh dunia mengenai Tujuan Perkembangan Millenium Development Goals (MDGs) akan habis masanya pada tahun 2015. Apa saja pencapaiannya dan bagaimana prospek kedepan? Apa pula peran mahasiswa dalam meningkatkan capaian tujuan pembangunan milenium ini?

## **Millenium Development Goals, Awal Mula Partisipasi Indonesia**

Millenium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Milenium berasal dari ratifikasi Deklarasi Milenium oleh seluruh pemimpin-pemimpin 189 negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 2000. Proses ratifikasi ini dilandasi oleh begitu banyaknya manusia yang hidup dengan tak terpenuhinya syarat-syarat kehidupan minimal bagi keberlangsungan hidup yang normal dan produktif.



Sebelum Deklarasi Millenium ini diratifikasi, terdapat banyak sekali permasalahan yang mencuat seperti 800 juta orang tertidur dalam kondisi lapar setiap harinya, hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari \$2 setiap harinya, setiap tahun hampir 11 juta anak tidak berhasil bertahan hidup sampai umur 5 tahun serta hampir 18 juta orang meninggal setiap tahun akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak.

MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan, memiliki tenggat waktu dan indikator yang terukur, sementara negara berkembang berusaha untuk memenuhi target mereka, negara maju wajib untuk mendukung upaya tersebut karena MDGs merupakan hasil konsensus pemerintahan negara-negara di dunia dan menuntut kemitraan global yang membangun.

Pertama kalinya dalam sejarah dimana pemimpin negara-negara di dunia sepakat untuk menjawab tantangan yang ada dan berkembang pada abad ke 21 ini. Ke – 189 pemimpin dunia tersebut sepakat untuk membebaskan dunia dari kemiskinan dan kelaparan dimana setiap orang dapat hidup sehat dan layak, dan setiap anak lelaki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. MDGs memaksa semua orang untuk peduli terhadap lingkungan dan menjebatani solidaritas internasional.

## **Indikator Tujuan dan Capaian Saat Ini**

Tujuan Pembangunan Milenium seperti yang telah disepakati pada bulan September terdapat 8 poin yakni:

### **1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrim.**

Indikator tujuannya adalah setengah dari populasi miskin dunia telah berkurang. Sementara capaian saat ini luar biasa sekali, target MDGs telah terpenuhi yaitu rata-rata kemiskinan dunia telah menjadi setengah (dari 47 persen menjadi 22 persen) dan 700 juta orang telah keluar dari garis kemiskinan ekstrim (pendapatan kurang dari \$1,25) dalam rentang waktu 1990-2010. Hal ini tentu memberikan harapan, seperti mengutip ucapan Sekretaris Jendral PBB saat ini, Ban Ki Moon bahwa MDGs merupakan gerakan mendorong anti kemiskinan terkuat di dunia. Bila dilihat dari hubungannya dengan tingkat



kesejahteraan manusia, kemiskinan merupakan bentuk kekerasan terparah sepanjang sejarah, karena kemiskinan mengekang kebebasan manusia untuk meningkatkan kesejahterannya, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, terlibat dalam proses demokrasi dan politik serta terjamin dari rasa takut dan teror. Namun walaupun dengan pencapaian yang impresif ini, 1,2 miliar orang di dunia masih hidup dengan pendapatan kurang dari \$1,25 dan sedikitnya 1 dari 6 orang anak dibawah umur 5 tahun menderita kekurangan berat badan di seluruh dunia.

## **2. Mencapai Pendidikan Bagi Semua.**

Targetnya adalah memastikan seluruh anak-anak di dunia dapat menyelesaikan seluruh pendidikan wajib. Tercatat di seluruh dunia, negara-negara berkembang memenuhi tanggung jawab mereka dengan sangat baik dimana laju pendaftaran pendidikan dasar berkembang dari 83 persen menjadi 90 persen dan jumlah anak putus sekolah berkurang dari 102 juta menjadi 57 juta. Tetapi apabila dilihat lebih lanjut, data ini menuturkan kisah yang berbeda. Terjadi penurunan pencapaian saat memasuki dekade baru dimana terjadi penurunan upaya di tahun 2008 ke 2011 yaitu jumlah anak-anak yang putus sekolah hanya berkurang 3 juta. Dengan tren seperti ini target Pendidikan Primer Universal pada tahun 2015 tidak akan tercapai. Banyak hal yang dapat menghambat kesempatan anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar yakni kemiskinan dan kesetaraan gender.

## **3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.**

Targetnya adalah menghilangkan disparitas gender pada pendidikan primer dan sekunder pada tahun 2005 dan di semua level pendidikan pada tahun 2015. Indikator ini dilihat melalui Gender Parity Index (GPI) yaitu sebesar 0,97 – 1,03. GPI merupakan indeks sosial ekonomi yang mengukur akses relatif tiap gender terhadap pendidikan, menggambarkan rasio partisipasi wanita pada pendidikan. Sehingga target dari MDGs yaitu adanya kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi laki-laki dan wanita. Menurut laporan MDGs



2013 terjadi kenaikan yang stabil pada akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan bagi pendidikan yaitu di area sub sahara afrika yang rendah indeks paritasnya, laju pendaftaran bagi wanita di pendidikan dasar meningkat dari 47 persen ke 75 persen, tapi lebih banyak aksi dibutuhkan untuk melejitkan pencapaian ini karena walaupun kita hampir mencapai target, tapi faktanya hanya 2 dari 130 negara berkembang yang mampu mencapai target.

#### **4. Menurunkan Angka Kematian Balita.**

Mengurangi dua pertiga ( $2/3$ ) angka kematian balita dari 1990-2015 adalah targetnya. Pencapaian yang besar telah diraih dalam jumlah anak yang berhasil bertahan hidup, tapi usaha ini harus di lipat gandakan untuk memenuhi terget dunia. Faktanya adalah sejak 1990 angka kematian balita telah menurun 41 persen, sebanyak 14.000 balita telah terhindar dari kematian setiap harinya. Tapi tetap saja sebanyak 6,9 juta balita meninggal pada 2011 terutama dari penyakit yang dapat dicegah. Di Indonesia sendiri menurut SDKI 2012 jumlah kematian balita telah meunurun dari 58 kematian anak per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002 menjadi 40 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011. Tentu saja pencapaian ini belum cukup dan belum memenuhi target.

#### **5. Meningkatkan Kesehatan Ibu.**

Mengurangi tiga perempat ( $3/4$ ) angka kematian ibu dari tanggal 1990-2015 adalah targetnya. Adalah Asia Timur, Afrika Utara dan Asia Selatan yakni daerah yang telah menurunkan angka kematian ibu sebanyak  $2/3$ . Tetapi tetap saja faktanya angka kematian ibu hanya menurun sejauh setengah saja. Sekitar 50 juta kelahiran bayi tidak dibantu dengan tenaga kesehatan yang ahli. Di Indonesia sendiri terjadi kenaikan angka kematian ibu sebanyak 359 per 100.000 kelahiran hidup (2013) padahal tren dari tahun 2000 selalu beranjak turun sedangkan target MDGs bagi angka kematian ibu di Indonesia adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup.

#### **6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya.**



Target dari tujuan ini adalah menghentikan secara total infeksi HIV pada 2015 dan mulai membalikkan penyebarannya. Dalam kenyataannya memang terjadi penurunan tingkat infeksi HIV secara stabil tapi tetap saja sebanyak 2,5 juta orang terinfeksi setiap tahunnya.

#### **7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup.**

Inti pencapaian dari tujuan ini adalah mengintegrasikan prinsip dari perkembangan berkelanjutan menjadi kebijakan dan program negara dan membalikkan kehilangan sumber daya lingkungan. Hutan merupakan jaring pengaman bagi masyarakat yang miskin tetapi hutan terus menghilang pada laju yang mengkhawatirkan. Dimana kehilangan terbesar terjadi di wilayah Amerika Selatan, yaitu sebanyak 3,6 juta hektar hutan menghilang setiap tahunnya dalam 2005-2010.

#### **8. Membangun Kemitraan Global bagi Pembangunan.**

Indikator tujuan ini adalah membangun sistem finansial yang terbuka, teratur, bisa di prediksi dan non diskriminatif serta memperhatikan kebutuhan negara yang terbelakang, terkurung, dan kepulauan kecil. Akibat adanya krisis finansial global menyebabkan dana bantuan bagi pengembangan daerah terhambat, menurun sebesar 4% menjadi \$125,6 miliar.

### **Rentang Waktu Sudah Mendekat**

Menurut Laporan Panel Tingkat Tinggi Para Tokoh terkemuka mengenai agenda pasca pembangunan 2015, bahwa dengan adanya agenda MDGs, dunia telah menyaksikan pengentasan kemiskinan tercepat dalam sejarah manusia, yaitu orang yang hidup dibawah garis standar kemiskinan internasional, yaitu \$1,25 telah berkurang setengah miliar orang. Laju kematian anak turun lebih dari 30%, dengan setiap tiga juta anak terselamatkan setiap tahun dibandingkan dengan tahun 2000. Kematian akibat malaria turun hingga seperempatnya. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang lebih baik dan komitmen dalam menjalankan agenda MDGs demi kesejahteraan manusia.

Menurut Monrovia Communique of the High Level Panel pada 1 Februari 2013, visi dan tanggung jawab kita semua untuk menghentikan dan menghapus kemiskinan ekstrem dan segala bentuknya dalam



konteks pembangunan berkelanjutan dan meletakkan dasar-dasar kesejahteraan yang berkesinambungan bagi semua.

Kemudian melihat dari berbagai prestasi gemilang yang telah dicapai oleh dunia dalam mengakhiri kemiskinan yang ekstrem, maka adalah kesalahan besar untuk membongkar MDGs dan memulai target baru dari awal. Seperti yang disepakati oleh para pemimpin dunia di Rio pada tahun 2012, sasaran dan target baru perlu dilengkapi dengan informasi dasar sehubungan dengan HAM universal, dan menyelesaikan kerja yang telah dimulai oleh MDGs. Dalam hal ini yang terpenting adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dari muka bumi ini menjelang 2030.

Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan merupakan harus meneruskan semangat baru dalam melaksanakan agenda setelah MDG yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kesehatan masyarakat yang terjaga, sanitasi air, akses pendidikan bagi semua, keadaan sosial dan ekonomi yang stabil dan juga kesejahteraan warganya. Tetapi guna menjalankan visi ini diperlukan lebih dari sekadar tujuan dan capaian yang ada di MDGs. Fokus MDGs tidak menjangkau masyarakat yang terkuci maupun terpencil. Pun juga tidak memuat mengenai kekerasan sebagai hasil samping dari pembangunan. Untuk itulah diperlukan pemerintahan yang akuntabel, dapat dipercaya, tidak korup serta menegakkan jalannya hukum demi lancarnya pembangunan yang berkesinambungan ini.

Berdasarkan pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh panel tingkat tinggi ini dalam menentukan target dari Pembangunan Milenium Pasca 2015 adalah sebanyak lima tranformasi besar yakni:

1. Tidak meninggalkan siapapun
2. Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti
3. Mentransformasikan ekonomi untuk lapangan kerja dan pertumbuhan inklusif
4. Membangun perdamaian, kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel.
5. Membangun sebuah kemitraan global yang baru

### **Apa yang Bisa Kita Lakukan?**

Tidak meninggalkan siapapun. Kita harus memastikan bahwa tiada seorangpun, terlepas dari jenis kelamin, etnis, wilayah geografis, keterbatasan fisik, ras atau status lainnya ditolak pemenuhan HAM



universal dan kebutuhan ekonomi dasarnya. Kita harus menjangkau seluruh masyarakat sampai ke daerah yang paling terpencil untuk memastikan haknya terpenuhi dengan baik dan layak. Kita juga harus merancang sasaran yang terfokus untuk memastikan bahwa masyarakat di pedalaman sekalipun masih terjangkau oleh negara dan masyarakat yang lain. Kita harus pastikan untuk tetap menelusuri kejadian yang ada di tempat dan meningkatkan daya tahan masyarakat agar lebih dapat bisa bertahan ditengah gejolak kehidupan yang serba tidak pasti.

Selain itu, kita sebagai mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengawali isu ini agar target-target MDGs yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat Indonesia dapat tercapai dengan baik dengan proses yang efektif. Mahasiswa sendiri dapat menciptakan program kerja yang inspiratif terhadap masyarakat, misalnya membuka ladang usaha baru yang kreatif seperti di bidang pertanian dan peternakan. Program kerja mengenai kesehatan sendiri pun tidak melulu mengutamakan aspek kuratif dan rehabilitatif, tetapi mulai sekarang lebih ditekankan kepada aspek preventif dan promotif sehingga kesehatan masyarakat dapat terjamin keberlanjutannya dan menciptakan generasi yang paham dan sejahtera. Tidak lupa bahwa membuat program kerja maupun pengabdian kepada masyarakat harus menyeluruh sampai menyentuh tempat terpenci dan pelosok.

Terakhir adalah kita harus turut serta membangun kesejahteraan rakyat Indonesia dengan segala pengetahuan, daya dan upaya yang kita terima dari bangku kuliah agar kelak target-target MDGs ini dapat tercapai sehingga tak ada lagi orang yang sakit maupun kelaparan. Hingga pada akhirnya kata sejahtera dapat terbit dari raut wajah rakyat Indonesia.

### **Referensi:**

- Badan Pusat Statistik. 2012. *Standar Demografi Kesehatan Indonesia*. Jakarta.
  - United Nations Development Programme. 2013. *Annual Report*. New York.
  - United Nations. 2013. *High Level Panel on the post-2015 Development Agenda*. New York.
  - United Nations. 2013. *Millenium Development Goals Report*. New York.
- [www.undp.org](http://www.undp.org)



# MERAIH KEDAULATAN ENERGI, MOMENTUM MAHASISWA BERPERAN

**MICHAEL**

**(Anggota Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia  
BEM KM UGM 2013)**

## **Pendahuluan**

Energi merupakan sumber kehidupan yang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi umat manusia. Begitu pun di Indonesia, energi senantiasa dipakai untuk menghidupi individu, keluarga, maupun masyarakat luas dari seluruh kalangan profesi. Sumber energi terbesar Indonesia masih berasal dari minyak bumi dengan 46,9 persen disusul batu bara (26,4 persen) dan gas (21,3 persen) (*sumber: data Kementerian ESDM tahun 2010*).

## **Liberalisasi Sektor Migas**

Saat ini, sektor Migas di Indonesia sudah dikuasai dan dimonopoli oleh perusahaan asing, dan mayoritas hasilnya akan lebih dinikmati negara asalnya. Sekitar 80% ladang Migas di Indonesia dikuasai asing. Asing dalam hal ini berbentuk Multi National Corporation (MNC) atau pun negara. Sedangkan BUMN hanya menguasai sekitar 17% sisanya (*sumber: data BP Migas tahun 2012*).



Fakta ini diperkuat dengan adanya UU no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan salah satunya oleh badan usaha swasta yang dalam hal ini dapat berbentuk badan usaha swasta dalam negeri maupun asing. Diperkuat oleh Pasal 3 yang menjelaskan mekanisme penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dengan cara terbuka dan transparan, dan Pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan bahwa persentase bagian dari hasil produksi Badan Usaha Migas yang wajib diberikan kepada negara hanyalah sebesar 25%, terbukti bahwa pemerintah sengaja mendukung usaha liberalisasi dalam sektor Migas bahkan membatasi produksi Migas yang akan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. UU ini menuai banyak kecaman dari berbagai pihak terlebih karena isinya yang sangat kontradiktif dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3). Sehingga, terkesan pengertian “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam ayat (3) menjadi sempit yaitu hanya dalam bentuk pajak dan royalti yang ditarik oleh pemerintah, dengan asumsi bahwa pendapatan negara dari pajak dan royalti ini akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keterlibatan rakyat dalam kegiatan mengelola sumberdaya hanya dalam bentuk penyerapan tenaga kerja oleh pihak pengelolaan sumberdaya alam tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.

### **Kacamata Pemerintah: Perspektif Historis**

Kebijakan pemerintah ini bukanlah tanpa sebab, melainkan mengacu kepada sebelum tahun 2001 dimana seluruh kegiatan pengelolaan penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dikendalikan oleh Pertamina. Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan negara yang berusaha melaksanakan urusan Migas mencakup eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan serta pemasaran dengan sistem monopoli terpadu. Namun, Pertamina dinilai tertutup dan tidak transparan dalam keuntungan dari usaha sektor Migas ini. Dalam kerjasama dan pemakaian keuntungan hasil, Pertamina didapati terjadinya korupsi pada sistem keuangannya. Hal ini yang mendorong pemerintah melakukan kerja sama dengan IMF dengan niat agar IMF dapat membantu permasalahan krisis tersebut. IMF pun bersedia untuk mengucurkan dana asalkan Indonesia menjalankan agenda reformasi



ekonomi, diantaranya reformasi sektor energi, lebih khusus lagi reformasi harga energi dan reformasi lembaga pengelola energi. (*sumber: Baswier, Revrison d. 2009. Bahaya Neoliberalisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*).

Namun pada kenyataannya, kontraktor asing bersama pemerintah yang mengelolanya pun kerap kali menimbulkan masalah. Satu diantaranya yang paling sering muncul ialah kasus manipulasi dana *Cost Recovery*. *Cost Recovery* adalah pergantian seluruh biaya oleh pemerintah dalam mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan kontraktor asing atas biaya eksplorasi, biaya produksi (termasuk penyusutan), dan biaya administrasi (termasuk *interest recovery*). Tahun 2012 biaya *cost recovery* mencapai USD 15,13 miliar atau sekitar hampir 148 triliun rupiah. Sedangkan untuk 2001-2005, besarnya *cost recovery* migas yang harus ditanggung negara (dalam miliar dolar AS) berturut-turut adalah 4,35 ; 5,06 ; 5,52 ; 5,60 ; dan 7,68 (*sumber: Laporan BP Migas*). Untuk produksi minyak bumi sendiri, trendlinenya selalu turun sejak tahun 2008. Besarnya produksi minyak bumi (dalam juta barel) untuk 2008-2012 berturut-turut adalah 357,5 ; 346,3 ; 344,9 ; 329,2 ; dan 314,6 (*sumber: data Ditjen MIGAS, diolah Pusdatin*). Sedangkan untuk tahun 2013 sendiri, produksi minyak turun 43.000 barel per hari atau hanya mencapai 811.000 barel per hari (*sumber: detik.com, pernyataan Kepala Divisi Humas SKK Migas*) sehingga apabila dikalkulasi hingga akhir tahun hanya mencapai 296 juta barel pada tahun ini.

Dilihat dari dua data diatas, ada keanehan antara kenaikan *Cost Recovery* setiap tahunnya dengan penurunan jumlah produksi minyak bumi nasional. Idealnya, produksi minyak bumi harus naik seiring meningkatnya *Cost Recovery*. Hal ini mengindikasikan adanya kecacatan dan peluang terjadinya permainan kotor di dalam sektor Migas. Sebut saja kasus dugaan korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) bulan November 2012 silam. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 23,361 juta USD atau setara dengan 265 miliar rupiah (*sumber: kompas.com*).

## Ancaman Baru

Disamping bahaya dominasi asing dalam pengelolaan sektor Migas Indonesia, ada bahaya lain yang mengancam negeri ini. Data statistik menunjukkan, cadangan minyak bumi Indonesia hanya tinggal



7,40 milyar barel pada tahun 2012, dan sebelumnya 7,73 milyar barel pada tahun 2011 (*sumber: data Ditjen MIGAS*). Dengan asumsi produksi minyak bumi 811 ribu barel per hari (kondisi terendah saat ini), maka dalam 25 tahun mendatang cadangan minyak bumi Indonesia akan habis sama sekali. Ditambah lagi, sektor pembangkit ketenagalistrikan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar Migas sebesar 37% (PLTU Minyak 5%, PLTU Gas 1%, PLTG 5%, PLTGU 26%) (*sumber: Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia, Pusdatin KESDM*). Apabila trend ini dipertahankan dan terus naik, bukan tidak mungkin dalam kurang dari 25 tahun Indonesia akan krisis *supply* energi.

Data statistik rasio elektrifikasi nasional sendiri selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 ini, direncanakan rasio elektrifikasi nasional mencapai 77,65%, meningkat dari tahun 2012 sebesar 75,8%, dan pada tahun 2011 sebesar 72,9%, dengan elektrifikasi tertinggi pada wilayah DKI Jakarta (99,99%) dan elektrifikasi terendah pada wilayah Papua (35,89%) (*sumber: DJK, KESDM*).

Rasio elektrifikasi ini masih berindikasi atas wilayah yg sudah atau belum teraliri listrik, bukan dari pemanfaatan listrik di wilayah tersebut. Dengan demikian, berarti akan lebih banyak lagi konsumsi energi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, jika kacamata yang digunakan adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan sekedar menambah persentase wilayah teraliri listrik.

### **Momentum Kedaulatan: Blok Mahakam dan Diversifikasi Energi**

Saat ini, bukan tidak mungkin Indonesia bangkit dari keterpurukan penguasaan asing dalam sektor Migas. Bahkan sekarang saatnya untuk merebut kembali kedaulatan energi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Perpanjangan kontrak pemerintah dengan Blok Mahakam yang dikelola oleh Total E&P Indonesia dan International Petroleum Exploration Corporation (INPEX) akan berakhir pada tahun 2017. Banyak pihak yang melihat ini sebagai peluang agar BUMN Pertamina bisa kembali mendapatkan dominasinya dalam sektor Migas. Pertamina telah menyatakan kemauan dan kemampuan untuk mengelola blok migas tersebut sejak 2008 dan pernyataan ini telah berulang kali disampaikan hingga saat ini. Pertamina pun telah



membuktikan keberhasilan pengelolaan blok-blok migas di lepas pantai seperti ONWJ dan WMO dengan meningkatkan kapasitas produksi yang berlipat. Pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina lambat laun akan meningkatkan dominasi penguasaan sektor migas di dalam negeri, dan akan menambah potensi BUMN untuk berkembang ke luar negeri. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada kontraktor asing dan secara bersamaan akan meningkatkan kemampuan ketahanan dan kedaulatan energi.

Terkait permasalahan cadangan energi di Indonesia, presiden bersama pemerintah telah membuat suatu kebijakan energi nasional, selanjutnya disebut Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006. Tujuan Kebijakan Energi Nasional untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Pada akhirnya, luaran yang diharapkan dari kebijakan ini adalah diversifikasi energi dengan rincian sebagai berikut: minyak bumi <20%; gas bumi >30%; batubara >33%; biofuel >5%; panas bumi >5%; energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya >5%; batubara yang dicairkan >2%. Kedua hal ini merupakan momentum dimana kebangkitan kedaulatan Indonesia dapat terwujud.

### **Peran Mahasiswa**

Mahasiswa pada hakikatnya memiliki peran sebagai *Social Control* dan juga *Agent of Change*. *Social Control* dimana ketika ada permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, mahasiswa berperan untuk “mengontrol” dan menyelesaikan persoalan tersebut. Peran mahasiswa sebagai *Agent of Change*, menciptakan revolusi perubahan terhadap kebijakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai UUD 1945, dan dianggap sudah mengkhianati rakyat Indonesia. Dari peran-peran inilah yang akan berkembang dan menciptakan yang dinamakan dengan *Gerakan Mahasiswa*. Bicara soal gerakan mahasiswa, salah satu pergerakan mahasiswa adalah sebagai *Pressure Group*, sebagai basis massa penekan.

Dari peran-peran dan gerakan mahasiswa inilah yang menjadi dasar bagi mahasiswa untuk turut menyelesaikan permasalahan Indonesia saat ini, termasuk permasalahan sektor Migas. Mahasiswa sebagai *Pressure Group*, seharusnya bisa menekan dan terus konsisten



sejak saat ini memperjuangkan kasus blok Mahakam. Jangan sampai ketika sudah mendekati penandatanganan kontrak baru, barulah mahasiswa melancarkan aksi.

Disisi lain, gerakan mahasiswa juga harus diimbangi dengan gerakan akademisi dengan gerakan politik, melalui pendekatan horizontal maupun vertikal. Gerakan akademisi terutama yang memiliki disiplin ilmu di bidang energi, berfokus pada riset-riset dan menciptakan penemuan-penemuan baru seperti pembangkit listrik energi terbarukan untuk kemudian diinstalasi pada daerah-daerah yang masih membutuhkan. Dalam Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006 – 2025 Bab V. Strategi dan Kebijakan, pemerintah sudah mendukung peningkatan mutu akademisi dan masyarakat dalam poin-poinnya seperti Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan energi, Memaksimalkan pemanfaatan energi setempat (Desa Mandiri Energi), serta Meningkatkan kapasitas SDM dan penguasaan teknologi. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kaum akademisi untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan energi bagi rakyat Indonesia. Gerakan politik mahasiswa, sebagai jembatan penghubung antara akademisi dengan birokrasi terhadap pemerintah dan BUMN. Masalah yang kerap kali muncul adalah banyaknya invensi/penemuan dari para akademisi, namun tidak ada jembatan penghubung untuk keberlanjutan dan implementasinya. Sehingga belum ada sinergitas antara akademisi dengan pihak industri.

Dari segi pendekatan, pendekatan horizontal dilakukan kepada masyarakat dalam upaya penyadaran dan pendidikan terhadap kondisi energi saat ini serta pengenalan teknologi-teknologi yang digunakan dalam upaya mendorong kesejahteraan energi, juga kepada sesama mahasiswa sebagai pembangunan basis massa. Pendekatan vertikal dilakukan sebagai upaya pembentukan jaringan dan adanya jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah, dari segi kebijakan-kebijakan yang diambil.

Pada akhirnya, peran mahasiswa harus dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten dalam pengawalan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, serta solusi konkrit yang dapat diberikan mahasiswa untuk terciptanya kedaulatan energi Indonesia.

## **Referensi Lembaran Negara**

Pasal 33 UUD 1945



UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001  
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006  
Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006 – 2025 (Kementerian ESDM)  
Statistik Minyak Bumi 2012 (Kementerian ESDM)  
Statistik Listrik 2012 (Kementerian ESDM)

### **Referensi Buku**

Baswier, Revrison. 2009. *Bahaya Neoliberalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### **Referensi Internet**

<http://www.esdm.go.id/>  
<http://www.bphmigas.go.id/>  
<http://finance.detik.com/>  
<http://nasional.kompas.com/>  
<http://beranda.miti.or.id/>  
<http://bemkm.ugm.ac.id/kajian-bahan-bakar-minyak-bbm/>  
<http://satunegeri.com/deklarasi-rakyat-untuk-blok-mahakam.html>



# **KEDAULATAN ENERGI HARUS MENJADI HARAPAN SEMUA WARGA NEGARA**

**FAIZ DEJA RAMADHAN**

***(Anggota Kementrian Ekonomi Mahasiswa BEM KM UGM 2013)***

Menjadi negara berdaulat merupakan impian semua bangsa dan warga negaranya, dari kedaulatan tersebut lahirlah kesejahteraan keadilan serta kemakmuran suatu bangsa yang membuat bangsa itu maju juga dihormati dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain diseluruh dunia. Namun demi mencapai indikator kedaulatan, suatu negara haruslah bekerja keras baik dari pemerintahannya maupun masyarakatnya untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan itu. Sebenarnya kedaulatan pun tidak hanya mengenai satu sektor atau bidang kehidupan melainkan banyak sektor kehidupan yang bersifat kompleks yang dimiliki dan diurus sendiri oleh negara.

Kedaulatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Maka dari itu dapat disimpulkan dengan singkat bahwa kedaulatan adalah semua yang ada



di negara tersebut dikuasai oleh pemerintahan negara itu sendiri. Kita tinggal di negara yang memiliki banyak kekayaan dan permata akan keanekaragaman, kita mengetahui bahwa negara kita tercinta yaitu Indonesia adalah negeri dengan sumber daya alam yang melimpah sehingga mempotensikan negara ini tersebut menjadi negara maju, adil bahkan bisa berdaulat. Namun apa yang kita lihat sekarang, benarkah Indonesia yang kita cintai ini sudah menjadi negara yang berdaulat?

Indonesia yang kita kenal adalah negara dengan bentuk kepulauan lebih dari tujuh belas ribu pulau berada di negeri ini, yang lima puluh persen lebih negeri ini pun memiliki laut dan luas kepulauannya dari ujung barat di Pulau Sabang dan ujung timur di Kota Merauke pulau Papua. Tidak hanya masalah daratan dan banyaknya lautan sumber daya maritim yang ada di laut Indonesia sangatlah kaya dari musai hasil perikanan oleh nelayan, mutiara, keanekaragaman spesies dan lainnya. Selain kekayaan di lautan di daratan Indonesia juga memiliki kekayaan hampir semua di sektor kehidupan pertanian, peternakan, perkebunan, tambang, perminyakan, bahkan hingga tambang energi alternatif pun di Indonesia ada dan banyak meskipun belum semuanya dieksplorasi dan dikelola dengan baik.

Jika dapat dihitung kekayaan negeri ini, amatlah banyak dan sulit dihitung, tetapi mengapa negeri ini masih tidak berdaulat dan sulit dianggap menjadi negeri yang berdaulat bahkan negara maju atau menjadi negara yang makmur. Sebut saja beberapa faktor yang membuat kedaulatan di negeri ini terhambat, yaitu besarnya utang negara kepada negara-negara lain, besarnya jumlah impor pangan padahal kekayaan pangan di negeri ini melimpah ruah, yang paling terlihat menjadi faktor ketidakberhasilannya Indonesia ini untuk menjadi negara berdaulat adalah kemiskinan, pengangguran, dan praktek korupsi serta penyelewengan uang-uang negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab semakin merajalela. Serta yang paling penting dari segi sumber daya energi dan mineral adalah pertambangan, dan perminyakan di Indonesia sembilan puluh persen lebih sahamnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, sangat Ironis bukan?

Semua permasalahan bangsa yang disebutkan sebelumnya dapat membuat kita berpikir dan menarik benang merah bahwasanya Indonesia membutuhkan perjuangan demi mendapatkan status kedaulatan terhadap yang pertama kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Untuk memberikan solusi terhadap kedaulatan pangan saya



hanya menekankan kepada semua warga negara Indonesia untuk membeli dan menikmati hasil bumi Indonesia sendiri tanpa harus memakan makanan-makanan impor yang jelas tidak menguntungkan bagi negara kita. Kemudian untuk kedaulatan energi inilah yang menjadi bekal dan cambuk se seluruh warga Indonesia untuk sadar dan membuka mata agar kita memperjuangkan apa yang menjadi tanggung jawab kita ke depan demi mendaulatkan energi Indonesia. Saya juga ingin mengatakan satu kalimat “Jadikanlah harapan kedaulatan energi Indonesia menjadi kedaulatan kita semua sebagai warga negara, bukan hanya diimpikan tapi juga diharapkan dan diperjuangkan!” Lalu dengan cara apa kita memperjuangkan harapan tersebut ? Itulah yang menjadi pertanyaan besar dan sulit dilakukan oleh semua orang.

Sama seperti halnya negara yang menginginkan rakyatnya bahagia, hidup makmur dan sejahtera serta berkecukupan, maka semua orang juga memiliki rasa dan hasrat untuk membahagiakan dirinya sendiri, memakmurkan kehidupannya, serta hidup sejahtera bahkan kaya raya karena itulah yang menjadi indikator-indikator kebahagiaan seseorang. Seseorang tak akan bisa bahagia, hidup sejahtera bahkan kaya raya apabila tidak berusaha dan bekerja, salah satu bentuk usaha dan pekerjaan tersebut dimulai sejak manusia itu kecil yaitu dengan mengenyam pendidikan di bangku sekolah baik dari dasar, menengah, menengah atas hingga perguruan tinggi. Semua dilakoni oleh seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang nantinya menjadi bekal pekerjaan mereka di masa depan.

Perguruan tinggi pun kini berlomba-lomba membuka jurusan dan program studi yang menarik minat banyak generasi bangsa di mana jurusan-jurusan tersebut memiliki peluang prospek pekerjaan yang sangat bagus dan dapat memberikan upah tinggi terhadap para pegawainya salah satunya adalah prospek bekerja di bidang eksplorasi-eksplorasi energi seperti perminyakan, pertambangan, gas alam dan energi seperti panas bumi, dan lain-lain. Jurusan-jurusan yang mendukung sektor-sektor itu sebut saja Geologi, Geofisika, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik kimia, teknik metalurgi dan sebagainya dimana pada tahun-tahun sekarang jurusan tersebut sangat banyak diminati bagi para calon mahasiswa baru di semua perguruan tinggi sebabnya adalah iming-iming upah atau gaji yang besar ketika mereka telah lulus dan bekerja pada bidang itu.



Memang tidak salah apabila seseorang mengharapkan apresiasi yang besar berupa gaji atau bayaran yang besar atas hasil kerja keras dan jerih payahnya. Namun yang perlu kita sadari adalah betapa singkatnya hidup ini apabila hanya mengharapkan sejumlah uang untuk membiayai hidup, apakah kita tidak ingin memajukan bangsa ini dan merebut kembali kedaulatan energi bangsa Indonesia yang kini sudah dikuasai pundi-pundi negara asing, yang itu juga terus menerus mengeruk hasil kekayaan alam negara kita tanpa adanya keuntungan yang berarti bagi negara ini. Sah saja apabila seseorang menikmati gaji hasil kerja kerasnya dari sebuah perusahaan asing yang memegang kendali energi bangsa ini, dan dengan menghamburkan uang demi kepentingan pribadi yang diinginkan, namun apakah kita tidak malu dan tidak punya hati untuk sebentar saja memikirkan nasib warga negara Indonesia yang lain yang tidak seburuk kita ketika ia sulit dan tidak mampu membeli bensin dari harga yang keuntungannya kita nikmati sebagai gaji kita. Ketika kita tertidur nyenyak di kasur yang empuk dengan listrik yang cukup menerangi malam kita namun apakah kita tidak memikirkan nasib saudara-saudara kita di pelosok yang membutuhkan bahan bakar atau energi untuk menghidupkan listrik di desanya bahkan hanya bercahayakan lampu lilin ketika tidurnya.

Inilah yang ingin saya pesankan kepada siapapun orang yang membaca bacaan ini untuk dia menaruh harapan di hatinya agar kedaulatan di negeri Indonesia kita tercinta ini bisa kita harapkan di dalam hati kita masing-masing sebagai seluruh warga negara Indonesia. Dijadikan harapan yang baik, maka perjuangan dan usaha yang kita lakukan pun harus nyata terutama pada kedaulatan energi, boleh saja kita menikmati enaknyanya hidup dengan gaji tinggi hasil kerja keras di perusahaan asing demi membahagiakan hidup kita pribadi dan keluarga kita, namun jangan sampai itu berlangsung terlalu lama dan melupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia untuk memajukan Indonesia dan mendaulatkan segala sumber daya energi di tanah air ini. Semoga harapan kita tercapai dengan restu Tuhan Yang Maha Esa dan dengan upaya kerja keras yang kita bangun sebagai warga negara yang berbakti terhadap nusa bangsanya. Aamiin.



# **SOSIAL MEDIA BAGIAN DARI *LIFE STYLE* DAN PERGESERAN TREND AKSES MEDIA MASSA BERBASISKAN JEJARING SOSIAL MEDIA**

***ARIF RAHMAN WICAKSONO DJUWARNO***  
***(Menteri Hubungan Masyarakat BEM KM UGM 2013)***

Saat ini akan sangat sulit ditemui anak muda yang tidak memiliki akun jejaring sosial media. Ditunjang dengan gadget smartphone yang memiliki akses penuh ke beberapa situs jejaring sosial media maka jadilah sosial media menjadi bagian dari lifestyle bagi anak muda jaman sekarang. Sosial media yang mulai diperkenalkan di era awal 2002 dengan pionir Friendster. Setahun kemudian mulai bermunculan Youtube, Flickr, dan Myspace. Sampai pada tahun 2005 Friendster dan Myspace tidak tergantikan hingga akhirnya muncullah Facebook pada tahun 2006 dengan membawa konsep lebih sederhana tetapi lebih interaktif. Tahun 2009 jejaring sosial mulai bermodifikasi ke arah microbloging dengan munculnya twitter.

Klaim sosial media yang telah menjadi lifestyle bukan tidak berdasar. Berdasarkan hasil survey Nielsen Company menunjukkan pengguna jejaring sosial melalui handphone mengalami kenaikan 85% dari tahun 2011 sejumlah 55.001.000 pengguna menjadi 101.802.000



pengguna dengan pengguna yang menghabiskan waktu di sosial media terlama melalui ponsel dimiliki oleh usia 25-34 tahun yaitu selama 11 jam di susul usia 18-24 tahun yaitu selama 10 jam 15 menit. Tetapi jika melihat dari segi penggunaan melalui PC dan Laptop justru golongan usia 18-24 tahun menduduki peringkat teratas yang menghabiskan waktu di sosial media dengan jumlah waktu yang di habiskan rata rata 11 jam perhari, maka bisa diambil garis besar bahwa golongan usia 18-24 tahun adalah golongan yang terkena dampak paling tinggi dari pengaruh perkembangan jejaring sosial yang tentunya menjadi lifestyle. Jika berdasarkan regional benua maka yang pengguna jejaring sosial yang tinggal di benua asia menghabiskan waktu rata-rata dalam mengakses sosial media selama 6 jam 42 menit yang didapat dari sumber survey Nielsen Company dalam The Social Media Report tahun 2012.

Sosial media yang berfungsi sebagai instrumen komunikasi sosial antar personal dan kelompok serta adanya arus informasi antar personal tentunya merubah sistem lanscape komunikasi dan informasi yang telah ada terutama disebabkan karena telah menjadi lifestyle. Perubahan lanscape sistem informasi dan komunikasi ini sangat terasa bagi kalangan usia 18-24 tahun yang sering disebut sebagai native media sosial teknologi. Kalau dulu informasi harus di cari melalui pembelian koran dan majalah maka sekarang cukup bermodalkan gadget smartphone seluler maka kita telah dapat mengakses berbagai macam koran elektronik. Apalagi saat ini di berbagai tempat seperti di universitas, tempat keramaian, pusat perbelanjaan, bahkan kantor kantor hampir semua telah berfasilitaskan hotspot sehingga dengan bermodalkan smartphone ataupun laptop maka kita bisa berselancar mencari berbagai macam informasi yang diinginkan dengan lebih murah. Melihat perkembangan yang sudah sangat pesat ini terutama di bidang media jejaring sosial yang telah menjadi lifestyle banyak sekali perusahaan media massa mulai mengembangkan infrastuktur medianya ke arah media jejaring sosial. Beberapa perusahaan media massa besar yang ada di indonesia seperti Kompas, Metro TV, dan juga Detik.com yang menjadi pemimpin utama pasar koran elektronik memiliki perhatian lebih dalam mengembangkan media massa di jejaring sosial media seperti Facebook dan Twitter.

Pemilihan pembangunan infrastruktur media massa ke jejaring sosial media seperti Facebook dan Twitter bukan tidak beralasan.



Pertama dari segi pengguna kedua situs ini masih menduduki peringkat pertama dan kedua situs yang paling banyak diakses oleh anak muda di Indonesia (Alexa,2012). Bahkan 20% dari penduduk Indonesia memiliki twitter (Semioocas,2012). Kedua pengguna twitter dan facebook bertipikal ingin mendapatkan informasi secara cepat dan sederhana sehingga hanya dengan beberapa kalimat sudah bisa diketahui apa inti informasi yang ingin diberikan. Maka jadilah akun twitter Kompas, Metro TV, Detik.com dan media massa lain membanjiri informasi setiap menit di beranda twitter personal yang mengikuti akun twitter media massa tersebut. Keunggulan media jejaring sosial yang ketiga adalah sifat media yang dua arah karena kita tidak hanya bisa membaca informasi yang diberikan tetapi juga mengomentari berita bahkan bisa langsung mendapat respon balik dari pihak administrator akun media jejaring sosial media massa yang kita ikuti. Keunggulan media jejaring sosial yang keempat adalah informasi yang akan masuk langsung ke setiap pengguna jejaring sosial yang terhubung dengan akun jejaring sosial media massa dan ini sifatnya telah terfilter dari awal yaitu pengguna jejaring sosial secara langsung menghubungkan akun media jejaring sosial yang dimilikinya dengan akun media jejaring sosial media massa sehingga pengguna sudah terseleksi dari awal ingin mendapatkan informasi atau tidak. Bahkan informasi yang diberikan bisa langsung di teruskan ke jaringan pengguna jejaring sosial dalam jumlah yang banyak baik berupa group maupun link personal. Terakhir jejaring sosial media bersifat murah, untuk mendapatkan akun reguler tidak perlu membayar cukup dengan registrasi biasa.

Keunggulan terakhir jejaring sosial media memberikan nilai tambah bahwa siapapun bisa menyampaikan dan menyebarkan informasi melalui sosial media. Nilai tambah dari hal inilah yang sering digunakan oleh anak muda terutama mahasiswa sebagai bagian dari *intellectual society* untuk menyuarakan berbagai macam informasi. Jika dulu mahasiswa dalam penyebaran berbagai macam informasi sering menggunakan media massa koran sebagai media favorit untuk menuliskan informasi maupun menyebarkan informasi maka saat ini justru semakin banyak yang beralih ke media jejaring sosial seperti facebook dengan fitur *note* ataupun melalui twitter dengan format kuliah twitter (disingkat: kultwit). Alasan utama adalah penggunaan kepraktisan dan murahnya *cost production* dalam membuat informasi dan menyebarkannya melalui jejaring yang ada. Apalagi dengan



pengguna jejaring sosial yang sangat mudah mengakses akun akun jejaring sosial yang ada dan menyebarkan informasi dari satu akun ke akun jejaring sosial yang lain tanpa adanya biaya dari informasi tersebut menjadikan dunia informasi semakin aksesibel. Inilah alasan utama kenapa terjadi perubahan landscape media massa dari media konvensional seperti koran, radio, dan TV ke arah media digital seperti jejaring sosial media. Media massa dengan pengertian media cetak, elektronik, analog maupun digital yang berfungsi sebagai tempat akses dan arus informasi bagi masyarakat umum.

Pergeseran trend akses media massa berbasisan jejaring sosial media juga didukung oleh berkembangnya koran elektronik dalam bentuk website yang tersinkronisasi dengan akun jejaring sosial media. Koran elektronik yang biasa disebut *e-newspaper* akan sangat mudah diakses dan diunduh oleh berbagai pengguna media jejaring sosial media yang berhubungan dengan akun jejaring sosial media massa yang merilisnya. pergeseran trend inilah yang sering disebut dengan digitalisasi media massa analog.

Terakhir, jika diambil korelasi antara lifestyle jejaring sosial media dan dan pergeseran akses media massa ke arah basis sosial media akan didapatkan 3 kesimpulan umum yang terwakilkan dengan 3 kata yaitu praktis, murah, dan mudah diakses. Praktis mewakili setiap pengguna jejaring sosial dapat dengan mudah membuat informasi dan menyebarkan dengan metode yang lebih interaktif dari media massa konvensional. Murah mewakili *cost production* dari pembuatan informasi maupun *cost initiative* infrastruktur media yang gratis. Dan mudah diakses mewakili siapa saja pengguna jejaring sosial media dapat mengakses informasi dari akun jejaring sosial media lainnya.

## Referensi

The Social Media Report. 2012. *Semoicas Report*. Alexa.com



# PERGERAKAN MANUSIA LINTAS NEGARA YANG MENGANCAM KESEHATAN MASYARAKAT

*SUCI ARDINI WIDYANINGSIH*

*(Anggota Kementerian Media dan Informasi BEM KM UGM 2013)*

Masyarakat dunia saat ini tidak bisa menghindari dari apa yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi ini ibarat arus sungai yang deras. Arus sungai ini dapat mengantarkan kita ke suatu tempat yang ingin kita capai. Namun, arus ini juga bisa menyeret kita ke tempat yang tidak ingin kita tuju. Atau bahkan arus yang kejam ini justru dapat menenggelamkan kita sehingga kita tidak bisa mencapai tempat yang ingin kita tuju. Fenomena di atas menggambarkan bahwa suatu negara pasti memiliki tujuan atau arah akan dibawa ke mana rakyatnya. Sekarang tinggal apakah suatu negara bisa membaca peluang dalam globalisasi untuk membawa rakyatnya ke arah yang lebih baik, atau justru sebaliknya.

Globalisasi ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat di dunia, baik sisi ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan masih banyak lagi. Berbicara mengenai masalah kesehatan, sebelum adanya globalisasi pun masalah kesehatan sudah begitu kompleks.



Apalagi dengan datangnya globalisasi, masalah kesehatan ini menjadi begitu kompleks.

Salah satu fenomena dalam globalisasi yang mengancam kesehatan masyarakat yaitu migrasi. Migrasi di sini merujuk pada migrasi internasional, yaitu perpindahan individu dari suatu negara ke negara lain. Pada tahun 2005 tercatat sejumlah 191.000.000 manusia (3% dari total populasi dunia) tinggal di luar negara tempat di mana ia dilahirkan. Faktor migrasi ini bermacam-macam, baik faktor pendorong maupun penarik, misalnya ketidakpuasan terhadap upah dalam negeri, melanjutkan studi, atau bahkan hanya sekedar mengikuti trend. Ya, mengikuti trend. Di zaman yang semakin modern ini, orang akan merasa derajatnya meningkat jika dia pernah melakukan perjalanan ke luar negeri. Dalam satu tahun tercatat bahwa terdapat 1 juta manusia yang melakukan perjalanan lintas negara. Bahkan pada tahun 2009 terdapat 54.317 rute penerbangan dengan 4.381 bandar udara di seluruh dunia.

Migrasi yang tidak terkontrol merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Ancaman pertama dari migrasi ini yakni meningkatnya persebaran penyakit infeksi akibat pergerakan manusia lintas negara yang juga semakin meningkat. Ancaman selanjutnya ialah kondisi kesehatan migran yang terabaikan dan tidak sebaik kondisi kesehatan *native* penduduk asli negara tujuan migrasi. Kemudian, ancaman terakhir yaitu persaingan antara tenaga kesehatan luar negeri dan tenaga kesehatan dalam negeri. Hal ini meliputi masuknya dokter/tenaga kesehatan asing ke Indonesia dan fenomena *brain drain* dimana para tenaga kerja kesehatan lebih memilih untuk mengaplikasikan ilmunya di luar negara asal.

Orang yang melakukan migrasi atau migran merupakan 'pembawa penyakit infeksi'. Berdasarkan fakta pada tahun 2001, angka kejadian penyakit TBC (*tuberculosis*) di Australia, Hongkong, Malaysia, Singapura tidak mengalami penurunan untuk beberapa tahun. Hal ini diakibatkan TBC justru terjadi pada imigran baru di negara-negara tersebut. Selain itu, masih banyak penyakit infeksi lain yang awalnya tidak terdapat di negara tersebut namun tiba-tiba muncul menjadi suatu wabah, misalnya SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom). Kemudian HIV/AIDS yang pada mulanya dijumpai di Afrika pada seekor kera, kini orang yang terinfeksi virus HIV sudah tersebar di mana-mana. Melihat fakta-fakta tersebut, siapa lagi penyebabnya jika bukan manusia yang berpindah lintas negara yang turut andil menyebarkan penyakit-penyakit tersebut.



Sebenarnya tidak hanya manusia yang ‘membawa’ penyakit lintas negara. Komoditas impor juga bisa ‘membawa’ penyakit, misalnya makanan yang dapat menularkan virus hepatitis C. Selain itu, rokok juga dapat dikatakan sebagai ‘pembawa penyakit’. Ya, berbicara mengenai rokok memang tidak ada habisnya. Indonesia sendiri merupakan sasaran empuk dari para produsen rokok asing. Indonesia termasuk dalam kategori 5 besar dari negara konsumen rokok terbanyak di dunia, dimana Indonesia menempati peringkat ke-4 setelah Cina, Rusia, dan Amerika Serikat. Celakanya lagi, menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 dan 2010, usia mulai merokok meningkat justru pada usia yang lebih muda.

Ancaman selanjutnya yakni kondisi kesehatan dan kesejahteraan migran yang terabaikan. Pada mulanya, para migran, dalam hal ini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melakukan migrasi dengan tujuan mencari lapangan pekerjaan yang lebih layak dengan harapan derajat kesejahteraan mereka meningkat. Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TKI kebanyakan memilih Malaysia dan Saudi Arabia sebagai tempat mengadu nasib. Sayangnya, apa yang diharapkan para migran di tempat tujuan tadi belum tentu terwujud. Kesejahteraan para migran justru terabaikan, termasuk kondisi kesehatannya. Kondisi kesehatan migran yang terabaikan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut di antaranya, gangguan psikososial, entah itu karena *culture shock*, perlakuan dari pemilik lapangan kerja terhadap migran, atau karena migran-migran tersebut harus melakukan usaha yang lebih keras untuk bisa bertahan hidup di negara tetangga. Semua kondisi tadi dapat membuat migran tertekan baik fisik maupun mental. Hal ini dapat meningkatkan faktor resiko penyakit kardiovaskular pada migran akibat stress yang dialaminya.

Ancaman terakhir migrasi terhadap kesehatan yaitu persaingan antar tenaga kesehatan meliputi masuknya tenaga kesehatan asing ke dalam negeri dan fenomena *brain drain*. Dengan diberlakukannya AFTA (ASEAN Free Trade Area) atau perdagangan bebas 2014 di kawasan ASEAN, tidak hanya barang saja yang dapat bebas diperdagangkan. Tenaga kerja, termasuk tenaga kesehatan pun bisa ‘diperdagangkan’ secara bebas. Hal ini berarti akan timbul persaingan antar tenaga kesehatan di Indonesia dengan tenaga kesehatan asing. Menurut data statistik Indonesia, terdapat 20.000 hingga 25.000 tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia sejak 2001 hingga 2004 yang kebanyakan



berasal dari Jepang, Amerika, dan Australia. Di samping masuknya tenaga kesehatan asing ke Indonesia, di sisi lain tenaga kesehatan Indonesia justru tidak sedikit yang memilih untuk mengabdikan diri ke negara lain. Inilah yang kemudian menimbulkan fenomena yang disebut dengan *brain drain*. *Brain drain* merupakan salah satu dampak migrasi yang sangat mengengaskan bagi kesehatan masyarakat. Bagaimana tidak. Jika kita lihat dari arti katanya saja, *brain* artinya otak, sedangkan *drain* artinya terkuras sehingga dapat dikatakan bahwa *brain drain* adalah fenomena 'terkurasnya otak'. Yang dimaksud dengan 'terkurasnya otak' adalah suatu negara kehilangan tenaga kerja yang pandai dan berkompeten karena sebagian besar mereka justru memilih bekerja di luar negeri daripada di negeri sendiri. Hal ini dapat terjadi karena faktor upah yang kurang memuaskan atau kesejahteraan tenaga kesehatan itu sendiri terabaikan.

Berbicara mengenai upah memang merupakan sesuatu yang sensitif. Persoalan yang dapat kita lihat di Indonesia misalnya kebijakan adanya BPJS (Badan Pekerja Jaminan Sosial) per Januari 2014. Dengan adanya kebijakan tersebut nanti, gaji yang diperoleh dokter atau premi yang dibayarkan masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan mungkin tidak sebanding dengan bagaimana perjuangan keras untuk menjadi dokter, baik dari segi waktu studi yang lama, biaya yang dikeluarkan, serta usaha untuk menguasai ilmu kedokteran itu sendiri yang memang tidaklah mudah karena menyangkut nyawa manusia. Bagaimana tenaga kesehatan dapat mensejahterakan masyarakat jika tenaga kesehatannya sendiri terabaikan kesejahteraannya. Oleh karena itu tak heran jika tidak sedikit dari mereka lebih memilih mengabdikan diri di luar negeri dimana kesejahteraan mereka lebih terjamin.

Ketiga ancaman tadi mungkin tidak terlalu mempengaruhi negara maju, namun bagi negara berkembang seperti Indonesia harus memiliki *tameng* untuk menghadapi ancaman tersebut. Semua ancaman di atas tadi harus bisa kita hadapi karena sebenarnya Indonesia adalah negara yang potensial dari segi apapun, hanya saja potensinya belum dimaksimalkan. Perbaikan tidak hanya dilakukan pada aspek kesehatan, namun menyinggung semua aspek kehidupan masyarakat. Jadi semua permasalahan tadi dapat diibaratkan berada dalam satu lingkaran yang sama. Sekarang tinggal apakah kita hanya akan melihat lingkaran itu terus berputar sendiri atautkah masuk ke dalam lingkaran dan mengendalikan putarannya.



## Referensi

- Huyen, Maud MTE, Martens, Pim, Hilderink, Henk BM 2005, 'The health impacts of globalisation: a conceptual framework', BioMed Central, vol. 1, no. 14, pp. 1-12, viewed 1 November 2013, <http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-1-14.pdf>
- Kristiansen, Maria, Mygind, Anna & Krasnik, Allan 2007, 'Health effect of migration', Dan Med Bull, vol. 54, no. 1, pp. 46-47, viewed 1 November 2013, [http://www.danmedbul.dk/DMB\\_2007/0107/0107-artikler/DMB3871.pdf](http://www.danmedbul.dk/DMB_2007/0107/0107-artikler/DMB3871.pdf)
- Martens, Pim, Akin, Su-Mia, Maud, Huynen & Mohsin, Raza 2010, 'Is globalization healthy: a statistical indicator analysis of the impacts of globalization on health', BioMed Central, vol. 6, no. 16, pp. 1-14, viewed 1 November 2013, <http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-6-16.pdf>
- Public Health Action Support Team 2011, 'Migration and the Health Effects of International Trade', Departement of Health, viewed 1 November 2013, <http://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/medical-sociology-policy-economics/4c-equality-equity-policy/migration>
- WHO 2003, 'World Health Organization International migration, health, and human rights', viewed 1 November 2013, <http://www.who.int/hhr/activities/en/FINAL-Migrants-English-June04.pdf>



# BATANG TEMBAKAU 9 SENTI YANG MERUSAK SEGALANYA

*CIPUK WULAN ADHASARI  
(Menteri Advokasi BEM KM UGM 2013)*

Berbicara masalah rokok, tidak akan ada habisnya. Sebatang tembakau liting berukuran 9 senti mampu mengubah segalanya. Orang tua, remaja, bahkan anak-anak, menyukainya. Ia tidak hanya berimbas pada kesehatan raga, tapi juga devisa sebuah negara. Siapa pemenangnya?

Sebatang rokok, yang terdiri dari ribuan zat beracun, terdiri juga dari zat candu. Sayangnya, masyarakat mudah terjerat pada zat candunya, sehingga bagaimanapun sosialisasi tentang bahaya rokok, tetap tidak akan berhasil. Namun, kita sebagai mahasiswa yang peduli akan kesehatan masyarakat, harus tetap berperang melawan rokok, meskipun bukan pada saat Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei. Pada tahun 2013 ini, HTTS bertema **“Tolak Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok”**. Sebagai mahasiswa UGM mengedepankan nilai-nilai kebaikan, kita harus menerapkan tema HTTS 2013 tersebut dalam lingkungan kampus.

Lihat saja, sudah banyak iklan, promosi, dan sponsor rokok yang masuk ke wilayah kampus UGM. Iklan, promosi, dan sponsor rokok



tersebut bisa masuk secara terang-terangan, namun bisa juga secara tidak langsung dalam bentuk beasiswa dan pembangunan fasilitas kampus. Adapun promosi rokok secara tidak langsung bisa kita saksikan di Perpustakaan Pusat yang menyediakan ruang khusus untuk membaca, yaitu “Sampoerna Corner”. Kemudian, Perpustakaan Fakultas Teknik yang telah disponsori oleh Djarum sehingga mahasiswa lebih senang menyebutnya dengan “Perpustakaan Djarum”. Ada pula Gedung Pertamina Tower di Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang kursi kuliahnya disponsori oleh Djarum. Bahkan, terdapat satu spot di gedung tersebut yang disebut “Djarum Corner”. Selain itu, beberapa sepeda kampus juga disponsori oleh Wismilak.

Selain dalam bentuk penyediaan fasilitas belajar-mengajar, perusahaan rokok juga memberikan bantuan berupa beasiswa, misalnya Beswan Djarum atau Beasiswa Sampoerna Foundation. Tidak ketinggalan, mereka juga menjadi sponsor utama untuk berbagai kegiatan mahasiswa. Memang, beasiswa dan bantuan sponsor tersebut berasal dari Foundation atau Yayasan, bukan PT Djarum Tbk, PT Sampoerna Tbk, dsb. Namun, kita tetap perlu berhati-hati. Meskipun berupa badan hukum yang berbeda, nama rokok tersebut tetap melekat. Bisa saja, beasiswa tersebut merupakan dana dari perusahaan rokok yang disisihkan untuk pengembangan pendidikan. Yang ditakutkan adalah, dengan menerima beasiswa dan sponsor dari perusahaan rokok, mulut kita dibungkam untuk berperang melawan bahaya rokok.

UGM hanyalah bagian kecil dari perang terhadap rokok yang berskala nasional. Contoh di atas merupakan hal nyata yang berpotensi pada berkurangnya kualitas pendidikan karena rokok. Perlawanan terhadap rokok tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ketika kita menyatakan sikap untuk menolak segala bentuk iklan, promosi, dan sponsor rokok, pasti ada pihak yang tidak menyetujuinya. Mereka selalu berdalih bahwa rokok merupakan penyumbang cukai terbesar untuk Indonesia. Selain itu, jika rokok dilarang beredar, bagaimana nasib para petani tembakau dan buruh pabrik rokok?

Namun, coba kita buka fakta yang sesungguhnya. Benarkah rokok merupakan penyumbang cukai terbesar dan petani serta buruh pabrik rokok akan kehilangan mata pencahariannya? World Bank telah melakukan penelitian bahwa rokok justru menyebabkan kerugian bagi negara. Meskipun perusahaan rokok berdalih bahwa mereka



memberikan pemasukan yang cukup besar ke kas negara, pengeluaran negara akibat rokok justru jauh lebih besar. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Prof. Tjandra Yoga Aditama, mengatakan bahwa pendapatan negara dalam setahun dari cukai rokok hanya Rp 55 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran makro negara yang mencapai Rp 254,41 triliun. Pengeluaran itu antara lain:

1. Pembelian rokok itu sendiri (Rp 138 triliun)
2. Biaya perawatan medis rawat inap dan rawat jalan (Rp 2,11 triliun)
3. Kehilangan produktivitas akibat kematian prematur dan mordibilitas maupun disabilitas (Rp 105,3 triliun).<sup>22</sup>

Apalagi, mulai tahun 2014 nanti, pemerintah telah menjalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah akan menanggung seluruh iuran BPJS bagi masyarakat yang tergolong miskin. Jika ternyata dampak negatif rokok pada masyarakat terjadi, pemerintah harus siap menanggungnya. Padahal, penyakit yang diakibatkan oleh rokok tergolong berat, seperti kanker, tumor, serta gangguan janin. Bukan tidak mungkin jika negara akhirnya harus merogoh kocek lebih dalam untuk merehabilitasi dampak negatif dari rokok.

Selain itu, kerugian bagi diri sendiri yang berefek jangka panjang bagi negara adalah berkurangnya kualitas sumber daya manusia. Siapa yang tidak trenyuh melihat anak-anak SD sudah merokok? Bahkan, pernah diunggah sebuah video di Youtube yang memperlihatkan seorang balita memamerkan keahliannya dalam merokok serta berbicara kasar. Dari segi kesehatan, tentu rokok merupakan penyumbang terbesar bagi timbulnya penyakit kanker di hampir semua bagian tubuh, serta gangguan kesehatan lainnya. Asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitar perokok. Dari segi psikologis, kecanduan rokok dapat menyebabkan perokok kehilangan konsentrasi dalam belajar, sukar fokus atau serius, serta mudah emosi. Dari segi sosiologis, perokok diidentikkan dengan perilaku yang tidak sopan. Dari segi ekonomis, merokok merupakan perilaku yang boros sebab harga rokok termasuk mahal jika dibandingkan dengan harga makanan pokok. Sementara itu, 70% perokok di Indonesia tergolong dalam penduduk miskin.

---

<sup>22</sup> Sumber: <http://health.detik.com/read/2013/05/30/193036/2260901/763/ini-hitungan-kemenkes-soal-cukai-dibandingkan-pengeluaran-negara-akibat-rokok>



Dari analisis kerugian akibat rokok tersebut, idealisme kita untuk membangun bangsa yang tengah terpuruk ini tidak akan tercapai jika masyarakatnya masih merokok. Bagaimana mungkin Indonesia menjadi negara maju jika untuk melawan rokok saja tidak sanggup. Tengoklah negara-negara maju, segala hal yang berhubungan dengan rokok dibatasi dengan ketat. Perokok hanya bagian kecil dari seluruh masyarakatnya. Jadi, apakah bisa disimpulkan bahwa rokok itu menguntungkan negara?

Adapun pendapat bahwa jika konsumsi rokok dikurangi, akan mengakibatkan hilangnya mata pencaharian petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Namun, kekhawatiran itu tidak akan terjadi jika pemerintah serius menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka. Pengurangan konsumsi rokok membutuhkan waktu dalam hitungan dekade, bukan sehari semalam. Maka, selama itu pula, pemerintah bisa mempersiapkan lapangan pekerjaan baru.

Para pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembela petani tembakau terus menayangkan ke publik tentang kehidupan para petani tembakau yang berkecukupan. Jika konsumsi rokok dikurangi, mereka akan jatuh miskin. Namun, jika kita lihat fakta tentang petani tembakau di daerah penghasil tembakau terbaik, yaitu Temanggung, keadaannya sungguh memprihatinkan. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang pernah mendokumentasikannya dalam sebuah video berdurasi 12 menit berjudul “*Kesaksian dari Temanggung*”.

Dalam video itu, seorang petani bernama Maryanto menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan selama menjadi petani tembakau. Tanaman tembakau adalah tanaman musiman yang hanya tumbuh pada musim kemarau. Tembakau yang ditanam pun adalah tukan kedua atau *perintilan* yang dinamakan *sog leng*. Selain itu, Bapak Maryanto juga mengeluhkan tindakan para tengkulak yang telah membuatnya merugi. Biasanya, pabrik rokok membeli tembakaunya dengan harga Rp 10.000,00 per kilogram. Namun, tengkulak berdalih bahwa para petani tidak bisa langsung menjualnya ke pabrik, tetapi harus melalui tengkulak dulu. Sialnya, para tengkulak ini membeli tembakaunya dengan harga Rp 5.000,00 sampai Rp 7.000,00 saja. Padahal sebelumnya, pabrik telah menjanjikan akan membeli tembakaunya dengan harga Rp 70.000,00 per kilogram.

Selain itu, timbangan yang digunakan tidak pernah cocok. Timbangan yang dimiliki oleh tengkulak selalu lebih ringan daripada



timbangan yang dimiliki oleh petani. Misalnya, ketika Bapak Maryanto menimbang tembakau seberat 1 kuintal di rumahnya, setelah ditimbang di timbangan tengkulak, hanya sebesar 95 kilogram. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan petani. Bapak Maryanto dan kawan-kawan petani berharap agar pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka, salah satunya dengan memberikan timbangan dengan standar internasional yang sama.

Adapun nasib para buruh pabrik rokok juga tidak kalah memprihatinkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan rokok bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak karena perusahaan rokok merupakan perusahaan padat karya. Namun, apakah para buruhnya sejahtera? Di kota yang terkenal dengan kreteknya, yaitu Kudus, para buruh pabrik rokok justru mendapatkan upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus. Mereka digaji dengan sistem jumlah besar. Setiap hari, pekerja dibayar sebesar Rp 54.000,00 untuk 7 jam kerja. Pembayaran itu pun harus dibagi sebesar Rp 32.400,00/hari untuk pekerja di bagian penggilingan dan Rp 21.600,00 per hari untuk pekerja di bagian pelintingan. Jadi, dalam sebulan, upah yang mereka terima masih di bawah UMK Kudus yang sebesar Rp 840.000,00/bulan.<sup>23</sup> Di kota lain, Malang, buruh pabrik rokok melakukan demonstrasi karena upahnya hanya Rp 800.000,00 sebulan, sementara UMK Malang sebesar Rp 1,3 juta.<sup>24</sup> Sementara di Purworejo, upah buruh pelinting rokok hanya sebesar Rp 17,00 per batang rokok yang dilintungnya. Tentu saja, upah dalam sebulannya masih berada jauh di bawah UMK Purworejo.<sup>25</sup>

Sistem kerja seperti itu sama saja bertipe *outsourcing*. Padahal, sesuai putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sistem *outsourcing* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, sistem ini tidak boleh diberlakukan lagi.

Potensi risiko penyakit juga mengancam para buruh pabrik rokok tersebut. Karena seringnya duduk melinting rokok, mereka terancam penyakit wasir. Mereka juga sering mengeluhkan penyakit asma, pusing, hingga vertigo karena seringnya menghirup tembakau, juga sakit

---

<sup>23</sup> Sumber: [http://www.gajimu.com/main/gaji/copy\\_of\\_kampanye-upah-minimum/industri-tembakau](http://www.gajimu.com/main/gaji/copy_of_kampanye-upah-minimum/industri-tembakau)

<sup>24</sup> Sumber: <http://daerah.sindonews.com/read/2013/02/06/23/714893/ratusan-buruh-rokok-mogok-kerja>

<sup>25</sup> Sumber: <http://krjogja.com/read/159952/upah-buruh-pelinting-rokok-rp-17.kr>



pungggung karena setiap hari melakukan pekerjaan yang sama dan tidak pernah berolah raga.

Maka, solusi konkret untuk mengadvokasi petani tembakau dan buruh pabrik rokok adalah dengan mengganti pekerjaan mereka dengan jenis pekerjaan yang sama. Sebaiknya petani tembakau mengganti tanaman tembakaunya ke tanaman palawija atau tanaman lain yang lebih bermanfaat bagi siapa saja. Sementara buruh pabrik rokok sebaiknya berpindah ke lapangan pekerjaan baru yang lebih menjamin hak-hak mereka dan bebas dari sistem kerja *outsourcing*. Pemerintah juga tidak boleh berlepas tangan akan terjaminnya lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masih seputar kerugian akibat rokok, kita bisa menyaksikan pendapat bahwa rokok menguntungkan negara hanyalah mitos. Faktanya, beberapa perusahaan rokok justru berkhianat menyetorkan keuntungannya kepada pihak asing. Perusahaan rokok yang paling digemari para perokok, yaitu PT HM Sampoerna Tbk., kurang lebih 98% sahamnya dimiliki oleh Philipp Morris, Amerika Serikat. Kemudian, PT Bentoel International Investama diakuisisi British American Tobacco (BAT) dengan kepemilikan saham 85% pada tahun 2009. Pada tahun 2011, BAT menyelesaikan penawarannya membeli saham Bentoel yang dikuasai publik sebanyak 14,87%. Dengan demikian, penguasaan BAT di Bentoel hampir mencapai 100%. BAT kemudian melepas sebagian saham sebesar 13,4% kepada perusahaan investasi UBS AG yang berkantor di London. Sementara PT Trisakti Purwosari Makmur yang terkenal dengan merek *Win Mild*, telah diakuisisi Korean Tobacco & Ginseng (KT&G) pada tahun 2011. KT&G menguasai kepemilikan sahamnya sebesar 60%.<sup>26</sup>

Sebuah prestasi menyedihkan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Pasifik yang tidak meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO). Bisa dikatakan, Indonesia adalah negara paling permisif terhadap rokok. Padahal, FCTC bertujuan sangat baik untuk mengatur peredaran rokok dalam sebuah negara. Manfaat jangka panjangnya adalah untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok,

---

<sup>26</sup> Sumber: <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/10/30/perebutan-harta-karun-siapa-pemenangnya>



agar semua negara menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, demi terciptanya masyarakat dunia yang sehat dan damai.

Dari kerugian-kerugian akibat rokok tersebut, sudah saatnya kita bangkit dari iming-iming perusahaan rokok yang melenakan. Mari kita edukasi para perokok dengan mengajaknya ke rehabilitasi rokok terdekat agar mereka meninggalkan batang racun 9 cm secara perlahan. Kita juga harus mencegah diri sendiri dan orang lain yang bukan perokok agar jangan pernah sekalipun mencoba menyalakan rokok. Meninggalkan rokok, berarti telah ikut menyelamatkan keuangan negara dan generasi penerus bangsa.



# KIAN AKRAB DENGAN KONDOM

**ULYA AMALIYA**

**(Wakil Menteri Kajian Strategis BEM KM UGM 2013)**

Belum sampai satu pekan, diluar rencana awalnya, rangkaian acara Pekan Kondom Nasional 2013 akhirnya dihentikan.

Kaum agamis dan moralis mengucap syukur setelah beberapa hari ini dibuat mengelus dada dan berduka. Bagi kaum moralis, event PKN menggiring maraknya seks bebas yang merusak moral bangsa, terutama generasi muda. Sedang bagi kaum agamis, PKN seakan menyeru masyarakat terhadap paktek perzinahan 'aman' yang sesungguhnya merupakan dosa besar. Kaum liberalis pun beristirahat sejenak dari koar-koar pembelaan bahwa PKN ialah sekedar bentuk sosialisasi kesehatan dan upaya menekan jumlah populasi.

Kementerian Kesehatan akhirnya bisa terbebas dari tekanan sana-sini. Setidaknya, dihentikannya program PKN bisa menjadi upaya menyelamatkan nama Menteri Kesehatan yang kadung disalahkan karena turut terlibat dalam program macam itu.

Tapi, diluar sana...para kapitalis berpesta pora. Setidaknya satu pesan mereka dapat tersampaikan kepada masyarakat, meski tidak berjalan mulus.



## Dikira, Masalah Kebijakan

Peringatan Hari AIDS yang pertama kali dicetuskan pada Agustus 1987 bertujuan agar warga dunia menyadari bahaya serta dampak dari *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, penyakit yang menyerang ketahanan tubuh (imun) manusia. Pada tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari AIDS mengandung pesan agar orang-orang yang terinfeksi virus HIV, maupun yang sudah menderita AIDS, tidak diperlakukan secara diskriminatif dan terlepas dari stigma negatif yang berkembang di masyarakat.

Di Indonesia, memperingati Hari AIDS dengan menyelenggarakan Pekan Kondom Nasional telah dijalankan sejak tahun 2007. Awalnya saya pikir gelombang protes atas diselenggarakannya Pekan Kondom Nasional di tahun 2013 ini merupakan buah dari kebijakan publik yang tak tepat sasaran. Masalah kesehatan, dalam hal ini penyebaran virus HIV/AIDS, bisa jadi sungguh merupakan masalah publik. Hingga Juni 2013, pengidap HIV dan AIDS yang tercatat oleh KPAN sebanyak 10.210 pengidap HIV dan 780 pengidap AIDS.<sup>27</sup> Dalam empat tahun terakhir, jumlah kasus pengidap AIDS ialah sekitar 21.000 kasus per tahun.<sup>28</sup> Adanya kalangan yang rentan terjangkit virus HIV/AIDS merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri. Di sejumlah daerah di Indonesia, kalangan yang rentan terhadap HIV/AIDS ialah masyarakat usia produktif.<sup>29</sup> Karena itulah Kementerian Kesehatan bersama Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi persebaran HIV/AIDS menasar kalangan usia produktif, seperti mahasiswa dan pelajar, dalam kegiatan-kegiatan memperingati hari AIDS.

Dalam acara yang diselenggarakan untuk memperingati hari AIDS tersebut, Kemenkes dan KPAN bermitra dengan perusahaan multinasional DKT yang merupakan produsen alat kontrasepsi. Walaupun dinamakan Pekan Kondom Nasional, sejumlah rancangan programnya konon tidak melulu tentang kondom. Memang akan ada bus kondom, susunan produk kondom membentuk kata AIDS yang bisa

<sup>27</sup> R. Yustiningsih (ed.), 'HARI AIDS: Hari Ini, Pekan Kondom Nasional Dimulai', *Solopos News* (online), 01 Desember 2013, < <http://www.solopos.com/2013/12/01/hari-aids-hari-ini-pekan-kondom-nasional-dimulai-469969>>, diakses 04 Desember 2013.

<sup>28</sup> D. Mahardika, 'Kemenkes Gelar Pekan Kondom Nasional', *PortalkBR.com* (online), 01 Desember 2013, <[http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3043800\\_4202.html](http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3043800_4202.html)>, diakses 04 Desember 2013.

<sup>29</sup> Baca <http://daerah.sindonews.com/read/2013/09/26/22/787815/penyebaran-hiv-aids-tak-terkendali>; <http://health.okezone.com/read/2013/11/29/482/904937/usia-produktif-risiko-tinggi-terhadap-hiv; dll>.



diambil secara cuma-cuma dan pembagian kondom gratis, namun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan akan berisi sosialisasi kesehatan. Belakangan, kontroversi mengenai pelaksanaan Pekan Kondom Nasional 2013 membuat Kemenkes mengungkapkan bahwa perhelatan tersebut bukanlah program pemerintah, melainkan swasta.<sup>30</sup> Nah lho!

Dikira, Pekan Kondom Nasional merupakan implementasi dari kebijakan untuk menekan jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia. Meski agak aneh memang. Sulit rasanya menangkap hubungan kausalitas yang jelas bahwa kondom merupakan solusi tepat dalam mengatasi kasus HIV/AIDS. Sudah banyak sekali perbincangan, terutama di sosial media, yang menangkis logika berpikir kementerian kesehatan dalam mendukung program PKN. Terasa ganjil karena yang coba dilakukan ialah mengkampanyekan penggunaan kondom alih-alih mengkampanyekan larangan seks bebas yang merupakan akar utama penyebab HIV/AIDS.<sup>31</sup>

### **Ternyata, Orang Jualan**

Jadi, mana yang benar: Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Kementerian Kesehatan menggaet DKT, perusahaan multinasional yang memproduksi alat kontrasepsi, sebagai mitra dalam PKN....atau justru PKN merupakan program DKT yang menggaet Kemenkes dan KPAN dalam mempromosikan produknya?

Barangkali apa yang menggegerkan masyarakat beberapa hari ini, sumber utamanya sepele. *Orang jualan*. Hanya berasal dari kreatifitas *business development* perusahaan alat kontrasepsi untuk membuat *marketing plan* berupa proyek yang melibatkan pemerintah, mengambil momen Hari AIDS, untuk mendongkrak penjualan produknya. Atau mungkin, tujuan pedagang kondom ini bukanlah *selling point*. Mereka merasa sudah harus meluaskan pasarnya, tak lagi menjual di sekitaran Doli, Taman Lawang, atau Sarkem. Mereka merasa harus memperbesar *target market*.

<sup>30</sup> Baca <http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/02/15/812461/kemenkes-pekan-kondom-nasional-bukan-program-pemerintah>

<sup>31</sup> "77% penyebab penularan HIV/AIDS ialah kasus hubungan seks tidak aman pada heteroseksual dan sisanya melalui jarum suntik dan hubungan sesama jenis" (S.B. Lestari, 'Seks Bebas Raketkan Penderita HIV/AIDS', *metrotvnews.com* (online), 25 November 2013, <<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/25/3/196856/Seks-Bebas-Raketkan-Penderita-HIVAIDS>>, diakses 04 Desember 2013.



Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu saja pandangan masyarakat tentang kondom harus dirubah terlebih dahulu. Maka, event PKN digunakan sebagai media untuk *campaign*. Membawa pesan mulia bahwa kondom adalah 'hero', penyelamat yang dapat digunakan untuk menangani penyebaran HIV/AIDS. Kondom adalah barang yang akan membuat hubungan seks menjadi aman. Kondom bukan barang haram yang begitu menakutkan. Yang dikejar oleh para penjual kondom ini ialah perubahan citra.

### Selamat!

Tiga hari sudah kaum moralis, agamis, liberalis, kemenkes serta masyarakat luas dihantui masalah kondom. Kata-kata kondom dengan garingnya diucapkan, dengan bebasnya dituliskan. Lugas.

Pun, masyarakat kini telah terbiasa menyaksikan apa itu kondom, bagaimana bentuknya, apa fungsinya, dan bagaimana alat itu bekerja. Tiga hari pelaksanaan Pekan Kondom Nasional telah cukup rasanya untuk 'membangkitkan kondom'.

Kondom yang selama ini dianggap barang tabu, kini menjadi jauh lebih populer. Di sejumlah minimarket, kita bisa menyaksikan kondom dengan rasa buah-buahan dipajang berjejeran dengan permen warni-warni. Sama menariknya.

Lidah kita tidak lagi kelu memperbincangkan 'benda khusus orang dewasa' tersebut, kita tidak perlu lagi ragu dan membubuhkan sejumlah tanda bintang untuk menutupi kata k\*nd\*m dalam menuliskannya, tidak merasa risih melihat iklannya disiarkan secara bebas, diperjualkan secara luas...

Maka ucapkanlah selamat kepada kapitalis yang menguasai penjualan kondom di negeri ini! Selamat, karena kondom telah berhasil menyapa akrab kalangan urban.

(Esai ini dimuat di <http://www.ugeem.com/akhirnya-kita-kian-akrab-dengan-kondom/> pada 04 Desember 2013)





## BAGIAN KEDUA

### *Kajian Tertulis BEM KM UGM 2013*





**NYANYIAN ALAM**

*Kusambut pagi, selamat datang mentari  
Hangatkan negeriku yang berseri  
Nyanyian alam tlah bersiap menemani  
Bersama hijaunya daun trembesi*

*Inilah negeriku Indonesia  
Terbentang sepanjang zamrud khatulistiwa  
Kaya flora kaya fauna kaya budaya  
Syukur pada Tuhan Yang Kuasa*

*Ribuan pulaunya antara dua samudra  
Terhubung antara dua benua  
Garis pantainya yang terpanjang di dunia  
Isi lautnya indah maha kaya*

*Inilah negeriku Indonesia  
Terbentang sepanjang zamrud khatulistiwa  
Kaya flora kaya fauna kaya budaya  
Syukur pada Tuhan Yang Kuasa*

*Tetapi kini mengapa jadi begini  
Tambang di sana dan tebang di sini  
Jangan biarkan alam kita siap mati  
Mulai dari diri sendiri*

*Nyanyian alam telah bersiap menemani  
Bersama hijaunya daun trembesi*

*Inilah negeriku Indonesia  
Terbentang sepanjang zamrud khatulistiwa  
Kaya flora kaya fauna kaya budaya  
Syukur pada Tuhan Yang Kuasa  
Syukur pada Tuhan Yang Kuasa*

*(Cipuk Wulan Adhasari)*



# **DIBALIK RENCANA PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM): IMPLEMENTASI NEOLIBERALISME SEKTOR HILIR MINYAK**

*KEMENTERIAN KAJIAN STRATEGIS BEM KM UGM 2013*

“Negara seharusnya tidak boleh memiliki tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, karena Negara memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi lembaga usaha, jadi sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya walaupun ia harus menanggung beban yang tidak ringan, karena negara bukan lembaga pragmatik” (Anonim)

## **Pendahuluan**

Pada Maret 2013 Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, yaitu akan menaikkan harga BBM premium dan solar. Keputusan ini diambil karena harga BBM internasional trendnya selalu naik. Akan tetapi, harga minyak Indonesia mencapai US\$ 107,42 per barel. Ini berarti turun US\$ 7,44 per barel dari US\$ 114,86 pada bulan Februari 2013. Sedangkan harga tukar rupiah adalah Rp 9700/1 USD.

Harga minyak internasional ditentukan oleh nilai tukar rupiah, situasi internasional, dan kondisi keuangan global, sehingga Indonesia



harus menyesuaikan dengan kebijakan dalam negeri, yaitu subsidi BBM yang ditanggung APBN. Akan tetapi, menurut UU No. 22 Tahun 2001, khususnya pasal 28, harga minyak Indonesia ditentukan oleh pemerintah, bukan pada mekanisme pasar internasional.

Indonesia adalah negara pengimpor minyak mentah untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Lifting minyak Indonesia adalah 840.000 barrel/hari (Kementerian ESDM, 13/5/2013), sedangkan kebutuhan dalam negeri Indonesia diperkirakan 1.600.000 barrel/hari. Sedangkan Pertamina hanya menguasai ladang minyak untuk eksplorasi sebanyak 20% dari seluruh ladang minyak di Indonesia. Sehingga Indonesia harus mengimpor minyak dengan harga yang mengikuti harga BBM internasional.

Kondisi di atas membuat pemerintah kewalahan karena APBN kita jebol dengan subsidi untuk sektor BBM sebesar Rp 194 Triliyun pada 2013. Sedangkan total keseluruhan untuk subsidi energi (juga termasuk listrik) adalah Rp 317 Triliyun (Kementerian ESDM, 13/5/2013), sehingga pemerintah memiliki argumentasi untuk mengurangi subsidi BBM, yaitu:

1. Subsidi membuat berkurangnya kesempatan untuk mengarahkan agar belanja negara lebih produktif dan berkualitas.
2. Konsumsi BBM sulit dikendalikan sehingga cadangan minyak akan cepat habis .
3. Semakin memicu terjadinya penyalahgunaan konsumsi BBM dan kurangnya rangsangan pengembangan energi alternatif.
4. Berkurangnya kesempatan untuk mengarahkan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan.
5. Berpotensi mereduksi program konservasi lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah berencana akan menaikkan harga premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500, dan juga untuk solar tetapi tidak akan lebih tinggi dari harga premium (VivaNews, 2013). Pemerintah berencana akan mengalokasikan subsidi tersebut untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan juga beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta sebagian untuk infrastruktur.

Terkait dengan data dan fakta di atas, maka munculah pertanyaan mengapa Indonesia selalu tidak dapat mengantisipasi harga BBM internasional yang trendnya diperkirakan akan selalu naik?



Mengapa pemerintah begitu ketakutan terkait inflasi, kondisi ekonomi global, dan nilai tukar rupiah untuk mengatur keuangan negara melalui APBN? Disaat yang bersamaan lantas mengapa Pertamina hanya menguasai 20% ladang minyak di Indonesia?

### **Menuju Pasar Neoliberalisme yang Diimpikan**

Penghapusan subsidi BBM yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah sebenarnya bukanlah sebuah kebijakan yang berdiri sendiri. Sebagai sebuah proses sistematis untuk menyesuaikan harga BBM nasional terhadap harga pasar BBM internasional, kebijakan tersebut hanya bagian dari pelaksanaan agenda ekonomi pasar neoliberal yang sedang dilakukan IMF (International Monetary Fund) dan USAID.

Sebagaimana diketahui, melalui suatu paket program yang dikenal sebagai program penyesuaian struktural (*structural adjustment program*), IMF dan para pemodal internasional lainnya sedang berusaha keras untuk menggiring perkembangan perekonomian Indonesia ke arah penyelenggaraan ekonomi pasar neoliberal.

Empat unsur utama agenda ekonomi pasar neoliberal sebagaimana tercantum dalam *Letter of Intents* (LOI) itu adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan anggaran ketat dan penghapusan subsidi
2. Liberalisasi sektor keuangan
3. Liberalisasi sektor perdagangan
4. Pelaksanaan privatisasi BUMN

USAID sebagai lembaga donor milik Amerika juga menginginkan masuknya investasi modal asing untuk sektor energi. Seperti yang dikatakan oleh situs USAID sebagai berikut terkait kebijakan bilateral soal investasi di sektor energi.

*The U.S. Department of Energy hosted the U.S. - Indonesia Energy Investment Roundtable which provided a venue for senior officials from the two countries and the private sector to address areas of opportunity and improvement in energy investment. (Fact Sheet, U.S.-Indonesia Trade and Investment Relationship, 19 November 2011)*



Sebagai bagian dari agenda ekonomi pasar neoliberal, alasan utama penghapusan subsidi BBM sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan perubahan harga minyak mentah internasional atau dengan peningkatan volume subsidi BBM dalam APBN. Alasan pokok subsidi BBM adalah untuk mengurangi peranan ekonomi negara dan untuk meningkatkan mekanisme pasar (kaum pemodal) dalam menyelenggarakan perekonomian nasional.

Hal tersebut sejalan dengan pendekatan neo-institusionalisme (Umar, 2012) yang mengisyaratkan penggunaan paradigma neoliberal dalam pengelolaan negara (Hadiz, 2004). Gill (2000) mengistilahkannya dengan *“constitutionalism of disciplinary neoliberalism”*, dengan bertumpu pada reformasi struktural pasca krisis, terutama Indonesia pasca *oil boom* tahun 1980-an (Chaniago, 2013), untuk negara-negara berkembang. Pendekatan ini mengaplikasikan perangkat legal-struktural negara untuk memastikan pasar berjalan secara efektif, yaitu dengan UU Migas. Pada hakikatnya, negara memberikan kepada individu untuk menyelenggarakan perekonomian yang berbasis pada mekanisme pasar.

Setelah Pertamina hanya menguasai 20% ladang minyak Indonesia (Syeirazi, 2012), maka liberalisasi sektor hulu Migas akan bergeser ke sektor hilir Migas. Bisnis eceran akan menjamur dengan masuknya perusahaan-perusahaan asing di sektor hilir Migas. **Dengan dicabutnya subsidi maka harga BBM nasional akan naik, dan akan terjadi persaingan ketat antara Pertamina dengan perusahaan-perusahaan minyak di sektor hilir migas.** Ini merupakan agenda neoliberalisme yang mengedepankan persaingan bebas antar pelaku usaha. Karena kondisi hingga hari ini pemerintah masih dengan harga premium Rp 4.500, maka perusahaan asing tersebut tidak akan mampu bersaing dengan Pertamina, tetapi dengan mencabut subsidi menjadi Rp 6000, dan akan terus naik dengan alasan harga BBM internasional dan kejebolan APBN, maka Pertamina akan sejajar secara harga dan regulas dengan perusahaan asing, seperti yang sudah terjadi di sektor hulu Migas satu dekade ini. Ini yang disebut dengan tidak berkedaulatan energi di sektor hulu dan juga sektor hilir.

Pada hakikatnya, semua regulasi yang mengatur soal energi, dan juga soal sektor lainnya adalah bagian Washington Consensus (Williamson, 2004) sebagai rekomendasi bagi negara-negara berkembang yang sedang dilanda krisis. Berikut adalah 10 rekomendasi dari Washington Consensus, yaitu:



1. Disiplin anggaran pemerintah;
2. Pengarahan pengeluaran pemerintah dari subsidi ke belanja sektor publik, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, sebagai penunjang pertumbuhan dan pelayanan masyarakat kelas menengah ke bawah
3. Reformasi pajak, dengan memperluas basis pemungutan pajak;
4. Tingkat bunga yang ditentukan pasar dan harus dijaga positif secara riil;
5. Nilai tukar yang kompetitif;
6. Liberalisasi pasar dengan menghapus restriksi kuantitatif;
7. Penerapan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik investasi asing langsung;
8. Privatisasi BUMN;
9. Deregulasi untuk menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi baru dan mendorong pasar agar lebih kompetitif;
10. Keamanan legal bagi hak kepemilikan.

### **Liberalisasi Sektor Hulu Migas: Perspektif Historis**

Sektor hulu adalah eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Pada 2001, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang peraturan sektor Migas di Indonesia. Sampai saat ini, undang-undang tersebut masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena dinilai sangat pro-liberalisasi yang tidak menjamin pasokan BBM dan gas bumi dalam negeri.

Sebelum tahun 2001, seluruh kegiatan pengelolaan penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dikendalikan oleh sebuah BUMN, yaitu Pertamina. Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan negara yang berusaha melaksanakan urusan Migas mencakup eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan serta pemasaran dengan sistem monopoli terpadu. Maka dari itu, pintu masuk migas ke dalam pasar hanyalah melalui Pertamina.

Dengan Pertamina sebagai satu-satunya pintu masuk, didapati kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu, proses Migas di Indonesia dapat terkontrol dengan baik dan produktivitasnya pun sangat tinggi. Oleh karena itu, sebelum tahun 2001, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor migas terbesar, apalagi pada 1970-an Indonesia mengalami *oil boom* dan sangat untung sebagai negara penghasil



minyak, dan mungkin dapat dikatakan hak masyarakat untuk mendapatkan migas dengan mudah terpenuhi.

Akan tetapi kekurangannya adalah Pertamina dinilai tertutup dan tidak transparan dalam keuntungan dari usaha sektor Migas ini. Sektor Migas merupakan sektor yang padat modal dan beresiko tinggi juga memerlukan teknologi yang tinggi sehingga Pertamina perlu bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama *Production Sharing Contract* (PSC) agar mampu melakukan tugas untuk dapat menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Dalam kerjasama dan pemakaian keuntungan hasil, Pertamina didapati terjadinya korupsi pada sistem keuangannya. Setelah terungkapnya kasus korupsi tersebut, pemerintah mengambil alih keuangan Pertamina dan dalam implementasinya. Hal ini mengakibatkan Pertamina tidak berkembang lagi dan mulai terjadi krisis Migas.

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan kerja sama dengan IMF dengan niat agar IMF dapat membantu permasalahan krisis tersebut. IMF pun bersedia untuk mengucurkan dana asalkan Indonesia menjalankan agenda reformasi ekonomi, diantaranya reformasi sektor energi, lebih khusus lagi reformasi harga energi dan reformasi lembaga pengelola energi.

*In the oil and gas sector, the government is firmly committed to the following actions: replacing existing laws with a modern legal framework; restructuring and reforming Pertamina; ensuring that fiscal terms and regulations for exploration and production remain internationally competitive; allowing domestic product prices to reflect international market levels; and establishing a coherent and sound policy framework for promoting efficient and environmentally sustainable patterns of domestic energy use.*  
(Letter of Intent RI-IMF, 20 Januari 2000)

IMF juga mendesak kepada pemerintah agar segera dibentuk RUU Migas yang intinya adalah mereduksi monopoli Pertamina dengan memecahkan industri Pertamina yang semula terintegrasi dari hulu ke hilir dan meliberalisasi sektor Migas dengan membuka selebar-lebarnya ladang investasi bagi pengusaha swasta.

Pemerintah pun membuat RUU Migas dengan dalih bahwa dengan adanya monopoli Pertamina, akan terjadi inefisiensi, rentan



korupsi. Pertamina juga posisinya dijadikan sejajar dengan kontraktor lain dan dibentuk institusi nonbisnis yakni Badan Pelaksana Migas (BP Migas) yang mengendalikan kegiatan usaha hulu di bidang Migas. Menurut pemerintah, dengan begitu akan terjadi persaingan sehat yang akan memacu Pertamina agar menjadi perusahaan yang lebih maju. Namun, bahayanya RUU ini adalah tidak adanya jaminan keamanan pemenuhan kebutuhan Migas dalam negeri. Para kontraktor biasanya lebih memilih untuk menjual Migas ke luar negeri. RUU pun di bahas bersama dengan DPR dan diwarnai oleh berbagai kritikan. Namun, DPR gagal mementahkan RUU yang dibuat pemerintah, RUU Migas pun disahkan pada Oktober 2001. Maka UU 22 tahun 2001 tentang Migas ini pun telah sah dan digunakan di Indonesia hingga hari ini.

Satu hal yang pernah diperjuangkan pada 2003 oleh Serikat Pekerja Pertamina yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 22 Tahun 2001 hanya mengambulkan pemohon untuk membatalkan pasal 28 terkait penentuan harga minyak mengikuti harga pasar, sehingga yang menentukan harga minyak menjadi milik pemerintah.

Pada 2012 yang lalu, BP Migas diketuk palu oleh MK karena melanggar konstitusi, sehingga urusan tersebut sekarang menjadi tanggungjawab SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dibawah Kementrian ESDM. Keputusan MK membatalkan BP Migas adalah satu langkah besar untuk mengembalikan peran negara dalam menentukan hajat hidup orang banyak. Tetapi, hingga hari ini ladang minyak di sektor hulu 80% dikuasai oleh asing.

### **Liberalisasi Sektor Hilir Migas: Perspektif Masa Depan**

UU No. 22 Tahun 2001 mengatakan bahwa sektor hilir meliputi beberapa bagian, yaitu 1) pengolahan, 2) pengangkutan, 3) penyimpanan, dan 4) niaga. Dengan adanya pembagian seperti itu, maka investasi sektor hilir dimungkinkan tanpa harus membebani investor dengan dana yang besar, seperti di sektor hulu.

Target investasi di sektor hilir adalah US\$ 2,4 miliar atau 13,11% pada 2012. Sudah ada 40 perusahaan asing yang akan membuka SPBU, dan masing-masing memperoleh izin untuk mendirikan 2000 unit di seluruh Indonesia. Liberalisasi di sektor hilir saat ini sedang muncul



sebagai lokasi investasi baru setelah investasi di sektor hulu dilakukan sejak masa Orde Baru dan setelah reformasi.

Payung hukum pendirian izin SPBU dari perusahaan asing ini adalah Permen ESDM No. 7 Tahun 2005. Kegiatan di sektor hilir ini diatur oleh BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas). BPH Migas setidaknya sudah membuat kewenangan untuk monopoli Pertamina di sektor hilir jadi berkurang sejak November 2005, adanya jaminan bahwa investor akan diberikan aturan yang sama dan perlakuan yang sah dengan Pertamina, dan mengizinkan investor lokal dan swasta untuk ambil bagian di kegiatan hilir, yaitu pemrosesan, pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran.

**Liberalisasi sektor hilir masuk dengan politik pembentukan harga secara transparan berdasarkan harga pasar.** Dan yang terpenting adalah adanya izin bagi investor lokal dan swasta asing untuk ambil bagian pada kegiatan hilir, terutama dalam niaga umum yang berakibat pada munculnya SPBU yang beroperasi pada bisnis eceran Migas dengan harga yang seusai dengan ICP (*Indonesian Crude Oil Price*).

Sementara itu, subsidi BBM ditujukan untuk membuat konsumsi BBM tetap dapat diakses oleh rakyat kecil, agar harga BBM tidak melambung sesuai dengan harga minyak dunia yang selalu naik. Dalam salah satu agenda Washington Consensus, maka subsidi harus diperkecil dan bahkan dihapus karena tidak efektif bagi mekanisme pasar dan membebani anggaran negara. Argumentasi ini yang dipakai pemerintah dalam mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM.

Dengan UU No 22 Tahun 2001 dan Permen ESDM tersebut, serta dengan adanya BPH Migas, maka sektor hilir pun menjadi pro-pasar. Neoliberalisme di sektor hilir adalah hal yang dilaksanakan kemudian. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sektor ini dapat berkembang untuk swasta dan asing apabila masih ada kebijakan subsidi? Jelas mereka akan kalah karena Pertamina disubsidi oleh Negara, dan masyarakat akan memilih Pertamina sebagai SPBU-nya. Satu-satunya jalan adalah dengan mencabut subsidi (subsidi BBM = Rp 0), dengan mengikuti harga pasar. Karena SPBU asing menggunakan harga pasar sebagai nominalnya. Dengan mencabut subsidi, maka persaingan setara antara Pertamina dan perusahaan asing akan lebih kompetitif, sedangkan dapat dipastikan kesuksesan agenda neoliberalisme akan sukses, dan kedaulatan energi akan semakin meninggalkan Indonesia di sektor hilir.



## Rencana Kebijakan Pemerintah

Kebijakan subsidi BBM belum diputuskan, akan tetapi akan segera diputuskan dan diimplementasikan sebelum Juli 2013. Ada rencana pemerintah untuk kebijakan subsidi BBM ini dengan menggunakan dua harga. Kebijakan diskriminasi harga ini akan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, dan mengembangkan kesempatan yang semakin luas di sektor eceran informal. Karena logika diskriminasi harga akan berdampak lurus dengan pilihan rasional

Kebijakan BLT juga akan memiliki dampak sosial yang tidak sedikit. BLT adalah kebijakan dengan logika *santau klaus*, sebuah kebijakan hadiah tunai yang sangat tidak mendidik dan tidak memperdayakan. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana rakyat miskin itu keluar dari garis kemiskinan bukan dengan memberi hadiah yang tidak berkelanjutan dan tidak produktif seperti itu.

Begitupun juga dengan kebijakan kuota subsidi BBM per hari bagi motor dan mobil. Saya pikir kebijakan ini tidak rasional, dan tidak menyelesaikan masalah. Ada juga menimbulkan masalah baru terkait dengan penyelundupan BBM yang sulit dilacak.

## Kesimpulan

Berikut adalah Pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial:

1. Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Konstitusi kita mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak



dikuasai oleh negara. Sedangkan liberalisasi yang sudah mapan terjadi di sektor hulu, dan kini akan mengekspansi ke sektor hilir dengan cara mengurangi subsidi hingga mencapai Rp 0 dengan alasan apapun adalah melanggar konstitusi demi hukum.

Perekonomian nasional yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan tidak akan pernah relevan dengan liberalisasi di sektor hilir karena menyerahkan usaha yang menguasai hidup orang banyak pada individu bukan pada negara. Apabila hal tersebut dilakukan, demi hukum itu melanggar konstitusi.

Seperti yang diungkapkan Revisond Baswir (2009) terkait dengan rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM adalah kolaborasi para ekonom neoliberal dengan perusahaan-perusahaan Migas internasional yang memicu kekisruhan harga BBM selama ini. Usaha ini terus dilakukan sejak 2000 karena ada Lol, IMF, Washington Consensus, dan USAID yang menekan dengan iming-iming bantuan internasional dan juga politik balas budi elit bangsa ini. Artinya, merekalah yang secara sistematis mengembangkan wacana mengenai dampak lonjakan beban subsidi terhadap jebolnya APBN kita. Wacana-wacana itu sesungguhnya hanyalah provokasi untuk meniadakan subsidi BBM sehingga membuat perusahaan asing dapat masuk dan berkompetisi dengan Pertamina di sektor hilir.

### **Sikap dan Rekomendasi Gerak Mahasiswa**

Kami, sebagai mahasiswa di BEM Seluruh Indonesia, dengan ini menolak dengan tegas kenaikan harga BBM karena dinilai hanya menjadi alasan untuk memudahkan kepentingan asing menguasai cabang produksi yang menguasai hidup rakyat kebanyakan, yaitu minyak dan gas bumi. Kami ingin agar subsidi tetap ada dilaksanakan sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Selain itu, alasan kami jelas mengapa kami harus menolak kebijakan pengurangan subsidi BBM karena:

1. Pemerintah meminggirkan ide Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan yang telah diatur dalam pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
2. Pemerintah lebih memikirkan kaum pemodal dan kalangan atas masyarakat dalam kebijakan harga BBM dan semua paradigma yang melandasinya



3. Pemerintah gagal melakukan diversifikasi energi bahkan tidak menunjukkan keberpihakan pada pengembangan energi alternatif untuk mengganti semua energi fosil yang akan segera habis
4. Pemerintah tidak memiliki keinginan serius untuk membangun infrastruktur transportasi publik yang berkualitas dibutuhkan rakyat banyak untuk menekan kendaraan bermotor, bukan dengan cara membebani rakyatnya sendiri dengan mengurangi subsidi BBM.
5. Pemerintah gagal menekan kebocoran BBM yang terjadi.
6. Pemerintah gagal membangun transparansi terkait biaya produksi premium dan mengilangkan permainan kartel BBM
7. Terkait dengan penyelamatan APBN, pemerintah gagal membangun prioritas pemangkasan karena yang harus dipangkas adalah beban bunga obligasi BLBI, biaya birokrasi/pejabat, dan praktek korupsi
8. Pemerintah justru gagal memberantas korupsi yang telah merampok APBN
9. Bahwa upaya pemerintah menaikkan harga BBM tidak lepas dari upaya liberalisasi BBM di sektor hilir
10. Kebijakan kenaikan BBM untuk sebagian masyarakat berarti pemerintah telah dengan sengaja membangun pertentangan dan konflik horizontal di tengah masyarakat yang berakibat adanya potensi disintegrasi sosial.

Mahasiswa bergerak untuk membela rakyat kebanyakan, rakyat kecil yang tertindas (mustadh'afin), bukan untuk membela dan berada di barisan kaum elit, swasta asing, dan koruptor. oleh karena itu kami akan bergerak untuk menolak kebijakan pengurangan subsidi BBM yang hanya merugikan bagi mereka yang kecil dan tertindas di Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia!

### Referensi Buku

- Baswier, Revrison. 2009. *Bahaya Neoliberalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chaniago, Andrinof A. 2012. *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES
- Khalid, Syeirazi. 2009. *Dibawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*. Jakarta: LP3ES



## Referensi Jurnal dan Kertas Kerja

- Gill, Stephen. 2000. *The Constitution of Global Capitalism*. Paper for a panel "The Capitalism World, Past, and Present. The International Studies Association Annual Convention, Los Angeles.
- Hadiz, Vedi R. 2004. *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutional Perspective*. Development and Change, Vol. 35 No. 4:697-718)
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2012. *Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia Pasca 1998*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 16 No. 1.
- Williamson, John. 2004. *A Short History of Washington Consensus*. Papper for Conference "From the Washington Consensus Towards A New Global Governance. Barcelona, September 24-25.

## Referensi Internet

<http://nasional.news.viva.co.id>

<http://www.esdm.go.id>

<http://id.wikisource.org>

<http://www.imf.org>

<http://indonesia.usaid.gov>

[www.bphmigas.go.id/](http://www.bphmigas.go.id/)

[www.skspmigas-esdm.go.id/](http://www.skspmigas-esdm.go.id/)

## Lembaran Negara

Pasal 33 UUD 1945

UU Nomor 22 Tahun 2012

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2005



# **ANALISA TEORI STRUKTURASI DALAM MEMAHAMI LOGIKA MARKETING POLITIK: STUDI KASUS PENCITRAAN SBY-BOEDIONO DALAM MEMENANGI PEMILU CAPRES DAN CAWAPRES RI PADA 2009**

*KEMENTERIAN KAJIAN STRATEGIS BEM KM UGM 2013*

## **Pendahuluan**

Demokratisasi dengan sistem pemilihan yang muncul sebagai sebuah gelombang mekanisme pemilihan kepala pemerintahan di berbagai belahan dunia memiliki konsekuensi langsung atas munculnya marketing politik. Dalam demokrasi liberal, fenomena marketing politik lewat branding politik memiliki konsekuensi logis dari kemajuan media massa sebagai instrumen opini publik. Media massa digital melalui televisi mampu membuat marketing politik menjadi lebih “menarik” di era digital sekarang ini. Media massa, seperti yang diungkapkan Muhtadi (2008) memiliki pengaruh penting dalam proses pembentukan cara berpikir dan berperilaku politik masyarakat. Dengan tujuan



menggiring opini publik untuk percaya dan terpesona dengan kebijakan politik dan kepentingan tertentu lewat pencitraan di layar kaca, dan temuan-temuan penelitian tertentu yang sesungguhnya memiliki agenda politik jangka pendek.

Marketing politik lewat branding politik memiliki konsekuensi positif dan negatif dalam implementasinya. Menurut hemat saya, marketing politik adalah strategi pemasaran bisnis yang diadopsi dalam ranah politik. Komunikasi yang menarik, mempesona, dan meyakinkan dari prosesnya telah merubah proses politik yang identik dengan kekerasan dan konvensional, menjadi lebih menarik dan berbudaya pop dalam kemasannya. Konsekuensi dari marketing politik, seperti yang dikatakan Louw (2005) dapat dilihat sebagai berikut ini:

Pertama, dengan melihat partai politik tidak lagi sebagai sebuah organisasi yang “menyeramkan”. Partai politik banyak menggunakan marketing politik lewat branding politik dalam kampanye mereka di media massa, terutama di media televisi yang menampilkan gambar/citra yang memukau penonton.

Kedua, politisi menggunakan marketing politik untuk membuat naskah pidato di media. Para pejabat publik sesungguhnya sangat mempesona dan berbobot pidato-pidatonya karena ada orang yang merancang dengan keahlian khusus dan teruji secara ilmiah dan akademis dalam penulisan naskah pidato para pejabat negara. Begitupun dengan politisi, mereka dapat mencitrakan kharisma seorang pemimpin dengan beragam metode branding politik lewat tipuan kamera, naskah pidato, poster, webmaster, jejaring sosial, dsb.

Ketiga, marketing politik lewat branding politik membuat politik menjadi sangat mahal dalam prakteknya. Karena biaya yang dikeluarkan untuk konsultan politik, dan media massa tidaklah sedikit dan kecil. Layaknya perusahaan yang menyewa konsultan bisnis, dan beriklan di media massa, tentunya sangat tinggi biaya untuk membayar jasa mereka. Dampak langsung dari fenomena tersebut adalah pragmatisme politik. Jabatan publik yang diincar para politisi layaknya sebuah komoditas yang diperdagangkan.

Keempat, marketing politik lewat branding politik adalah strategi yang paling bertanggung jawab atas kelahiran budaya pop dalam masyarakat lewat media massa dan pencitraan politik kontemporer, yang kadangkala minim dalam pemahaman ideologi dan minim substansi.



Kelima, marketing politik lewat branding politik juga dapat memicu konflik yang terjadi antara kavling-kavling para pendukung politik tertentu. Gencarnya pemberitaan di media massa tentang kampanye politik dapat membuat orang-orang yang kontra menjadi marah dan tidak suka. Hal tersebut dapat menjadi konflik antar pendukung calon.

Keenam, kombinasi antara marketing politik, branding politik, televisisasi politik membuat politisi menjadi lemah, dan tidak paham dengan konstituennya. Mereka cenderung manja dengan fasilitas yang ditawarkan marketer politik untuk memahami konstituennya. Mereka juga tidak dapat merealisasikan keinginan konstituen karena para konstituen sudah digirng dengan “meaning” menuju sebuah opini publik yang dirasa paling pas dan cocok untuk partai politik dan politisi itu. Sehingga, aktor politik cenderung jauh dan menghindari dari publik tanpa ada marketer politik yang membantunya untuk menjadi lebih berkapasitas.

### **Bekerjanya Teori Strukturasi dalam Kerangka Manajemen Jaringan**

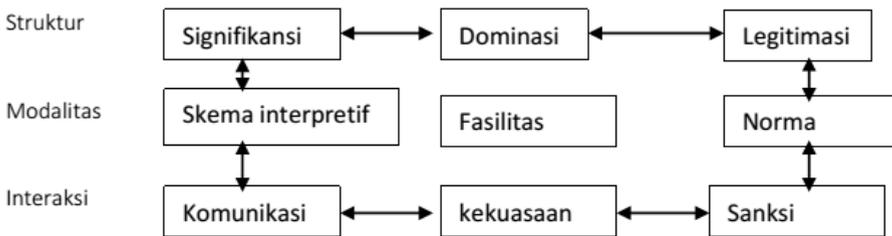
Anthony Giddens (2010) dalam membuktikan teori strukturasi terlebih dahulu membedakan antara struktur dan sistem. Dalam merumuskan struktur, Giddens akhirnya dapat mengidentifikasi aturan-aturan main (*game management*), yaitu aturan dan sumber daya, atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem-sistem sosial. Sedangkan sistem adalah relasi-relasi yang diprediksi di antara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik-praktik sosial reguler. Kejadian yang terus terulang merupakan syarat dari teori strukturasi. Seperti yang diungkapkannya dalam mengidentifikasi strukturasi yakni yang terkait dengan kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur dan karenanya reproduksi sistem-sistem sosial itu sendiri.

Teori strukturasi mengandaikan keterulangan yang terus-menerus sebagai syarat untuk memperkokoh jaringan (Giddens, 2010). Keterulangan yang terus-menerus tersebut terjadi antara aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah fenomena. Aktor tersebut juga mempengaruhi kondisi sosial yang terbentuk akibat keterulangan tadi. Sehingga *meaning* dapat dibentuk sebagai model dari hegemoni akibat keterulangan teori strukturasi dalam sebuah jaringan. Menurut Pratikno (2007, hlm. 5), keberulangan dan kontinuitas konsep-konsep itu



kemudian secara bertahap akan memunculkan suatu aturan yang mengatur perilaku mereka dalam jaringan, dari yang paling rendah tingkat mengikatnya (*binding*) sampai pada yang lebih kuat.

Oleh karena struktur jaringan sangat dipengaruhi oleh kerjasama antar aktor yang berbuntut lewat negosiasi, maka manajemen jaringan yang terbangun dalam kasus tersebut adalah manajemen negosiasi. Seperti yang dikatakan Giddens (2010) bahwa aktor manusia tidak hanya mampu memonitor aktivitas-aktivitas mereka sendiri dan aktivitas-aktivitas orang lain dalam perulangan perilaku sehari-hari, mereka juga mampu memonitor monitoring secara diskursif.



Sumber: Giddens (2010), hlm. 46

Berdasarkan bagan diatas, maka dapat ditarik identifikasi karakter masing-masing seperti yang dikatakan Pratikno (2007, hlm. 10-11), yaitu Pertama, struktur jaringan diandaikan sebagai medium interaksi sekaligus juga sebagai instrumen bagi para pelaku jaringan. Kedua, dengan tingkat otonomi yang dimiliki para pelaku jaringan, baik individu maupun organisasi, mereka memiliki apa yang disebut sebagai kemampuan mawasdiri, *self-reflection*. Dan Ketiga, adanya interaksi-interaksi yang terjadi berulang-ulang yang didasari pada kepentingan praksis, yang akan membentuk dan mengubah struktur itu.

Negosiasi adalah salah satu kata kunci untuk mengetahui marketing politik yang dipakai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2009, yaitu SBY-Boediono. Negosiasi politik yang terjadi antara aktor subyek dan obyek mirip dengan pemikiran Giddens (2010) saling mengunci dan bekerjasama dalam memenuhi tujuan politiknya. Sumber yang diperebutkan adalah terbatas, dengan teori *tragedy of the common* seperti yang diungkapkan Hardin (1998, hlm. 682-683), sumber daya yang diperebutkan adalah terbatas, yaitu Presiden dan Wakil Presiden RI 2009-2014, maka perlu ada manajemen jaringan lewat *game*



*theory* yang memaksimalkan aturan, fungsi, dan ketentuan antar aktor yang terlibat.

### Komunikasi Politik dan Politik Pencitraan

Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden 2009 silam dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono (SBY-Boediono). Pasangan urut no 2 tersebut mendapat 73.874.562 suara dengan presentase 60,80%. SBY adalah calon petahana yang berhasil memenangi pemilu tahun 2004. Pada masa itu SBY maju bersama dengan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon Wakil Presiden.

Kemenangan SBY-Boediono bukanlah kemenangan murni tanpa campur tangan marketing politik. Fox Indonesia adalah konsultan politik yang berperan memenagkan pasangan urut no 2 tersebut. Seperti yang diungkapkan (Fatah 2010) bahwa lembaga konsultan politik sangat menentukan kemenagan calon. Lembaga konsultan politik masih merupakan pemain yang jarang ada di Indonesia. Dengan begitu banyak pilkada di daerah, dan setiap lima tahun ada pemilu presiden dan partai politik, sesungguhnya lembaga konsultan politik masih memiliki pangsa pasar yang sangat bagus dan menjanjikan.

Lembaga konsultan politik menggunakan komunikasi sebagai strategi yang potensial untuk menggiring opini publik. Firmanzah (2008)



sesungguhnya telah mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses yang mencoba membangun pemahaman bersama akan suatu hal. Tujuan dari komunikasi tidak hanya memberikan data dan informasi belaka, tetapi untuk membangun pemahaman bersama agar kedua belah pihak memiliki persepsi yang sama. Komunikasi politik lewat konsultan politik dan media massa menjadi agen yang kuat untuk membantu pasangan calon untuk membangun persepsi yang sama dengan konstituen dan masa mengambang. Dengan membanjirnya informasi di era digital seperti sekarang, maka calon yang

bersaing dalam pemilu membutuhkan “image” di atas kinerja mereka yang sesungguhnya. Hal tersebut dibutuhkan terkait dengan strategi



politik untuk membedakan pasangan yang satu dengan pasangan calon yang lain. Image yang dibangun dengan bantuan lembaga konsultan politik dapat mempengaruhi suara yang mereka dapatkan. Firmanzah (2008) mengatakan terkait image yang dapat mencerminkan tingkat kepercayaan dan kompetensi tertentu pasangan calon. Image tidak selalu mencerminkan realitas obyektif. Sebuah image politik dapat kadang tidak merepresentasikan keadaan real dan hanya berupa imajinasi yang dibangun lewat bantuan media massa. Dan semua instrumen yang dibutuhkan untuk membangun image sudah dipersiapkan oleh lembaga konsultan politik yang menggunakan media massa sebagai instrumen yang paling efektif.

Kampanye yang terjadi karena ada sistem pemilihan yang sarat akan persaingan “image” politik tertentu biasanya dilakukan menjelang pemilu. Tetapi, kondisi kontemporer membutuhkan kampanye yang bersifat permanen dan berlaku untuk masa yang panjang. Karena hal tersebut dibutuhkan kader partai politik untuk maju di persaingan selanjutnya. Untuk kasus SBY-Boediono, SBY sudah sejak lama membangun image politik lewat berbagai macam cara, salah satunya yang saya angkat dalam tulisan ini adalah lewat buku “Harus Bisa!” yang ditulis Dinno Patti Djalal. Buku tersebut sangat menggambarkan sosok SBY – saat itu sudah menjadi Presiden RI bersama JK dan memenangi pemilu tahun 2004. Dalam buku tersebut digambarkan SBY yang sangat kharismatik, humoris, religius, dan tepat waktu. Menurut hemat saya, buku tersebut salah satunya sebagai strategi menggiring opini publik sebagai bentuk pencitraan politik SBY untuk maju dan menang kembali di pemilu tahun 2009 silam. Buku tersebut merupakan bentuk komunikasi dengan tujuan untuk menggiring memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait dengan apa yang ingin dibangun oleh SBY.

Iklan politik adalah bentuk baru strategi politik pencitraan untuk menggiring opini publik untuk memiliki persepsi yang sama tentang sebuah hal. Iklan politik sangat signifikan di era televisasi politik sekarang untuk mempengaruhi pemilih sebagai penonton televisi. Keberhasilan televisi sebagai bentuk komunikasi media yang efektif, seperti yang diungkapkan Setianto (2008, hlm. 252) sebagai infrastruktur penopang kehidupan masyarakat yang sangat strategis bagi pengembangan wacana ekonomi, politik, dan konsumsi masyarakat. Keberhasilan iklan dalam menciptakan pengaruh terhadap



pilihan konsumen tidak dapat dilepaskan dari hakikat periklanan itu sendiri. Menurut Setianto (2009, hlm. 370), iklan adalah salah satu bentuk persuasif yang dibiayai oleh sponsor yang dikenal, bentuk komunikasi bermedia, bukan penjualan yang bersifat personal, dan secara spesifik periklanan merupakan bentuk komunikasi lewat media massa. Pencitraan politik SBY-Boediono dalam iklan politiknya di media massa merupakan strategi efektif untuk menggiring, tentunya juga dibantu dengan lembaga konsultan politik yang canggih. Martin (1974) mendefinikan citra sebagai serangkaian kesan-kesan mengenai sesuatu atau seseorang sesuai dengan hal-hal yang diketahui umum mengenai sesuatu atau seseorang tersebut. Citra yang berlaku terhadap sesuatu merupakan hal yang subyektif. Citra sangat mempengaruhi persepsi orang lain, dan apabila digunakan untuk tujuan politik maka dapat mempengaruhi suara pemilih. Dan citra juga dapat mempengaruhi orang yang bersangkutan dengan menggunakan karakteristik yang dicitrakan.

Lipset (2007) mengatakan bahwa salah satu faktor sosial untuk mempengaruhi tingkat pemilih adalah akses terhadap informasi, kontak,



dan komunikasi. SBY sudah menggunakan metode itu untuk membangun dukungan lewat berbagai golongan. SBY banyak masuk kedalam organisasi pemuda, bermain musik, negosiasi dengan partai lain dalam

membangun pemerintahan dan kebijakan, masuk dalam lingkungan sosiologis tertentu dan membentuk ikon politik dan ranah sosial-psikologis seperti yang dikatakan Barthes (2010). Hal tersebut sangat tangguh dan kuat sebagai modal politik untuk membangun dukungan yang berbasis jaringan. Memang dalam efeknya memiliki dampak negatif, seperti yang diungkapkan Aditjondro (2010) bahwa ada skandal dengan masyarakat ekonomi tertentu, yaitu skandal kasus Bank Century yang tidak jelas hingga kini.



## Penutup

SBY-Boediono dalam memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden 2009 silam sangat dipengaruhi oleh bantuan Fox Indonesia sebagai lembaga konsultan politik yang menggunakan metode branding politik lewat media massa. Firmanzah (2008) menuturkan bahwa media komunikasi perlu diperhatikan disini sebagai karena terdapat beberapa tingkatan efektifitas media dalam menyampaikan informasi dan pesan. Ketika pasangan SBY-Boediono ingin menyampaikan pesan yang bersifat kualitatif dan multiperspektif baiknya menggunakan instrumen berupa buku dan iklan politik, disamping dialog secara langsung dengan konstituen di saat-saat kampanye baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Komunikasi politik yang efektif dapat dibangun dengan menggunakan marketing politik yang canggih dan kuat dalam branding politik. Tujuannya untuk membangun kesamaan persepsi atas seseorang. Konsekuensi langsung adalah politik pencitraan lewat buku dan iklan politik di era televisisasi politik kontemporer.

Dengan menggunakan analisa strukturasi Giddens dan game theory, maka dapat ditarik benang merah yang membuat SBY mendapatkan hasil yang spektakuler di tahun 2009 kemarin. Kampanye permanen yang dilakukan terus-menerus mempengaruhi perilaku masyarakat dan menggiring opini mereka atas sesuatu. Strukturasi dalam metode jaringan disini dapat mempengaruhi "meaning" terhadap SBY sebagai pemimpin yang kharismatik, humoris, humanis, dsb. Terlepas dari subyektifitas image yang dicoba dibangun oleh marketer politik SBY di atas, SBY juga sudah menggunakan politik negosiasi dengan berbagai organisasi sosial dan masyarakat ekonomi untuk memberikan modal sosial dan ekonomi untuk bertarung dalam pemilihan 2009. Oleh karena itu, struktur dan jaringan yang dibangun SBY sangat mempengaruhi dan saling mengunci untuk mencapai apa yang ingin dicapainya pada 2009 bersama Boediono. Dari kesimpulan diatas, dapat ditarik kembali logika berpikir jaringan antara SBY sebagai aktor politik yang berkepentingan, masyarakat ekonomi, dan masyarakat umum sebagai pemilih untuk saling mengunci. Dan SBY adalah kunci yang berhasil mempersatukan semua kator yang otonom tersebut untuk memilih dirinya sebagai pemimpin yang paling tepat untuk Indonesia pada pemilu 2009 silam.



## Referensi

### Literatur

- Aditjondro, George Junus 2010, *Membongkar Gurita Cikeas*, Galangpress, Yogyakarta.
- Barthes, Roland 2010, *Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Djalal, Dinno Patti 2008, *Harus Bisa!*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Firmanzah 2008, *Marketing Politik*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
- Firmanzah 2008, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Giddens, Anthony 2010, *Teori Strukturasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lipset, Seymour Martin 2007, *Political Man: Basis Sosial Tentang Politik*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Low, Eric 2005, *The Media and Political Process*, Sage Publication, London.
- Martin, R.J. Jr 1974, *Consumer Behavior: A Cognitive Orientation*, MacMilan Publishing Co. Inc., New York.
- Muhtadi, Asep Saeful 2008, *Kampanye Politik*, Humaniora, Bandung.

### Jurnal Ilmiah

- Hardin, Garret 1998, 'Extension of The Tragedy of The Common', *Science*, Volume 280, Nomor. 5364 (Mei 1998), hlm. 682-683.
- Pratikno 2007, 'Manajemen Jaringan Dalam Perspektif Strukturasi', *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, Volume 12, Nomor 1 (Mei 2008), hlm. 1-19, Yogyakarta: MAP UGM.
- Setianto, Widodo Agus 2008, 'Konvergensi Media dalam Konstelasi Perkembangan Teknologi Media', *Jurnal Sosial Politik*, Volume 12, Nomor 2 (November 2008), hlm. 237-255, Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Setianto, Widodo Agus 2009, 'Kajian Epistemologis Iklan Politik dan Perilaku Memilih dalam Dinamika Pemilu 2009', *Jurnal Sosial Politik*, Volume 12, Nomor 3 (Maret 2009), hlm. 365-390, Yogyakarta: FISIPOL UGM)

### Internet

- Fatah, Eep Saefulloh 2010, *Benarkah Fox Indonesia Bangkrut?*, dilihat 1 Desember 2011, <http://www.tempo.co/read/news/2010/11/02/090288835/Benarkah-Fox-Indonesia-Bangkrut>.



# ANALISA KEBIJAKAN SUBSIDI: ANTARA YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENDAPAT SUBSIDI

*KEMENTERIAN KAJIAN STRATEGIS BEM KM UGM 2013*

Ketika kita mendengar argumentasi pemerintah yang mengatakan bahwa “subsidi BBM hanya menguntungkan orang kaya”, dan mendengar bahwa “subsidi BBM tidak tepat sasaran”. Maka kita harus tinjau kembali premis itu. Kebijakan subsidi merupakan kebijakan yang penuh perdebatan antara dua *regime of knowledge*, yaitu rezim nalar liberalisme dan rezim nalar komunalisme. Kedua rezim nalar tersebut saling bertolak belakang satu sama lain. Keduanya saling meniadakan dan memiliki konsepsi tersendiri atas kebijakan subsidi.

## **Dua Rezim Nalar**

Rezim nalar liberalisme menenakan pada pengurangan peran negara lewat berbagai subsidi dari negara kepada warga negara karena alasan terlalu membebani anggaran, tidak merangsang persaingan sehat atas komoditas, menghambat investasi yang akan berkompetisi, dan



meyakini bahwa harga suatu komoditas baik barang ataupun jasa akan “adil” dengan diserahkan pada mekanisme pasar dengan *invisible hand*-nya. Sedangkan nalar komunalisme menilai bahwa negara haruslah kuat dan memiliki tanggungjawab finansial, bukan hanya tanggungjawab hukum, yang berarti memiliki mekanisme subsidi barang dan jasa kepada publik. Investasi akan dilakukan dengan pengawasan ketat dari negara, dan bahkan investasi baiknya dilakukan oleh negara. Harga komoditas ditentukan di dalam negeri untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat.

Ketika nalar liberalisme dan nalar komunalisme harus berbenturan dengan konteks Indonesia yang “unik”, di mana para pembuat kebijakan menggunakan nalar liberal, tetapi menggunakan indikator-indikator komunal dalam mengambil kebijakan, lahirlah fenomena sosial, dengan meminjam istilah Putri (2013), obsesi kesetaraan. Obsesi kesetaraan warga negara adalah kondisi di mana warga negara seolah setara dalam teorinya dalam membeli sebuah komoditas barang ataupun jasa, tetapi prakteknya terjadi diskriminasi harga. Terdapat dikotomi atas mana warga yang “mendapat subsidi” dan mana warga yang “tidak mendapat subsidi”.

Secara singkat terjadi reduksi dan eliminasi subsidi bagi sebagian warga negara, yang berarti negara melakukan proses diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri. Jika negara merupakan agen keadilan distributif bagi kesetaraan, maka kesetaraan yang dibentuk pemerintah malah melahirkan dikotomi antara “dapat subsidi” dan “tidak dapat subsidi”. Jika proses distributif bekerja secara baik, maka warga negara yang kompetenlah yang akan saling setara sebagaimana yang diharapkan. Namun, masyarakat yang tidak kompeten akan tereliminasi dari kesetaraan, baik tereliminasi terhadap kompleksitas yang ada, maupun tereliminasi oleh mitos kesetaraan itu sendiri.

### **Kesetaraan Daya Beli Tiga Kelas Sosial?**

Saya akan mengambil contoh ketika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan, maka semua komoditas lain yang dependen dengan BBM akan ikut naik. Sedangkan secara kasar warga negara terbelah secara sosial menjadi tiga kelas secara kasar, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Ketika kelas atas mendapati dirinya harus membayar lebih banyak dari biasanya terkait kebutuhan hidupnya, mereka yang memang memiliki sumber produksi, meminjam istilah



Marx sumber ekonomi, akan menaikkan harga barang produksinya untuk menutupi *margin* besaran biaya yang harus mereka keluarkan karena alasan kebijakan pengurangan subsidi dari pemerintah. Sehingga secara kasar, kelebihan biaya hidup yang harus mereka keluarkan akan ditutupi oleh orang lain (baca: kelas lain) yang membeli barang mereka. Mereka adalah para orang kaya yang menguasai sumber-sumber ekonomi.

Kasusnya akan berbeda dengan kelas menengah yang tidak memiliki sumber ekonomi atau memiliki sumber ekonomi tetapi tidak sebesar kelas atas. Mereka akan mendapati bahwa pengeluaran lebih yang mereka bayarkan karena pengurangan subsidi BBM harus ditanggung sendiri oleh mereka. Kebanyakan mereka adalah kelas menengah yang bekerja pada kelas atas. Mereka akan menuntut kenaikan upah untuk menutupi melambungnya harga komoditas yang dependen dengan BBM. Tetapi kelas atas tidak semudah itu menuruti keinginan mereka. Karena kelas atas akan tetap harus mempertahankan keuntungannya selama ini, bahkan menuntut untuk menaikkan keuntungan lagi. Sehingga akhirnya daya beli kelas menengah ini akan menurun sehingga menciptakan proses pemiskinan sistemik. Mereka adalah pekerja mulai dari tingkatan menengah sampai buruh yang bekerja untuk pemilik sumber ekonomi. Mereka juga termasuk pengusaha-pengusaha tingkat kecil dan menengah yang terancam karena kenaikan semua harga komoditas pokok.

Dan yang paling parah adalah kondisi kelas bawah, yang tetap berproduksi lebih kecil daripada kelas menengah, dan harus mendapatkan kondisi dimana mereka harus membayar lebih pada kebutuhan pokok. Untuk kelas bawah ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi asimetris (baik barang dan targetnya penerimanya). Sehingga mereka diharapkan tetap mampu membeli kebutuhan pokok. Subsidi langsung tersebut adalah bantuan langsung tunai (BLT) untuk penyesuaian harga BBM, subsidi untuk kebijakan patungan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) di bidang kesehatan, dan uang kuliah tunggal (UKT)<sup>32</sup> kategori ke-1 dan ke-2 untuk pendidikan tinggi, maupun beasiswa-beasiswa pendidikan untuk kalangan tidak mampu.

---

<sup>32</sup> Kasus UKT kategori ke-1 dan ke-2 agak lain karena subsidi yang dilakukan bukan berasal dari negara, tetapi dari mahasiswa yang membayar UKT ke-3, ke-4, dan ke-5 (UKT full).



## Penutup

Lantas dari gambaran fakta di atas, siapa yang diuntungkan dari dikurangnya subsidi BBM? Ya jawabannya adalah kelas atas. Siapa yang paling menderita? Ya jawabannya adalah kelas menengah dan kelas bawah, terutama kelas menengah yang terjepit posisinya. Kemudian kita bertanya, dimana letak kesetaraan dalam pengurangan subsidi. Kebijakan yang diambil dengan nalar liberal dengan pengurangan subsidi, berbeturan dengan konteks masyarakat Indonesia yang komunal (terbagi atas tiga kelas sosial) tersebut. Menjadi benar ketika kesetaraan dalam pengurangan subsidi hanya menjadi obsesi, bahkan hanya sekedar mitos.

*Structural adjustment programme* (SAP) yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) sebagai resep dalam penyembuhan ekonomi Indonesia, berdampak lurus terhadap kewajiban Indonesia membayar hutang-hutangnya kepada World Bank sebagai kreditor hutang.

Setelah kesetaraan mitos warga negara dalam mengakses harga komoditas BBM yang memang “menguasai hidup orang banyak”, data APBN dari tahun ke tahun tidak menunjukkan korelasi linier atas argumen awal pemerintah dalam pengurangan subsidi BBM. Kebijakan pengurangan subsidi BBM yang terjadi, tidak diimbangi dengan pengeluaran untuk kesejahteraan sosial, malahan rasio antara cicilan hutang dan pengeluaran rutin belanja pejabat dan pegawai semakin membengkak dari tahun ke tahun, padahal subsidi dari tahun ke tahun dikurangi. Oleh karena itu, premis subsidi BBM harus diubah menjadi “pengurangan subsidi BBM hanya menguntungkan orang kaya” dan “pengurangan subsidi BBM merupakan cara yang tepat untuk membayar cicilan hutang pemerintah”.



# REFLEKSI TEORITIS ATAS KEBIJAKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

*KEMENTERIAN KAJIAN STRATEGIS BEM KM UGM 2013*

Paradigma kebijakan publik yang berorientasi pada *minimal state* merupakan konseptualisasi nilai-nilai liberalisme yang mengedepankan minimnya peran negara dalam mengintervensi hak-hak sosial dan politik warga negara, dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di era demokrasi prosedural seperti saat ini, konsep yang dipercaya bahwa negara akan melakukan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) menjadi faktor terpenting dari dipakainya paradigma kebijakan seperti itu.

Di ranah konseptualisasi merupakan fenomena yang wajar di hampir sebagian pemerintahan dunia di masa kini. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pun tidak akan kalah karena sejak ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) antara Pemerintah RI dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada 2000 dengan resep berupa *structural adjustment programme* untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, Indonesia dituntun untuk melakukan praktek liberalisme dalam mengelola pemerintahan, yaitu dengan mengurangi berbagai



macam subsidi-subsidi yang memberatkan anggaran negara, privatisasi BUMN, liberalisasi perbankan dan sekuritas, dan masih banyak lagi agenda yang bertujuan untuk melepaskan semua beban finansial dan tanggungjawab negara kepada publik dan diserahkan kepada masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil.

Bagaimana dengan paradigma liberalisme pada ranah kontekstualisasinya? Ternyata terjadi benturan yang kontradiktif dalam tataran konseptual dan kontekstual. Konsep citizenship yang dikemukakan oleh Vegitya Ramadhani Putri (2013) adalah *denizenship*. Citizenship menjadi *denizenship* adalah sebuah *proto type* model citizenship baru antara relasi kuasa antara negara dengan warga negaranya sendiri lewat kebijakan publik yang diambil.

Di Indonesia yang memiliki akar sejarah nilai-nilai komunitarianisme, dan hingga kini masih menjadi budaya, harus berbenturan dengan nilai-nilai liberalisme. Sehingga terjadi semacam “keanehan” dalam proses perumusan kebijakan publik. Relasi kuasa yang saling berkompromi, dan tarik-menarik ini, kemudian melahirkan kebingungan dalam memandang kebijakan publik yang akan diambil. Apakah tetap menggunakan rekomendasi *agenda setting* global yang liberatif atau mengakomodir nilai-nilai komunitarianisme khas Indonesia?

Terbukti dengan dikeluarkannya kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan segera diterapkan per 1 Januari 2014 mendatang. SJSN merupakan bagian dari *healthy security* dari negara terhadap warga negaranya. Tetapi aneh karena menggunakan sistem patungan, yaitu patungan setiap kepala warga negara (Rp 22.000,00 per kepala per bulan) dan pemotongan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, dan Buruh. Sistem patungan yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) tersebut akan digunakan untuk subsidi kesehatan, tunjangan kematian, dan pensiun.

Merupakan hal yang aneh karena nilai-nilai komunitarianisme dari model SJSN nampak hadir, tetapi Negara absen. Konsep ini merupakan metode “jalan tengah” antara konsep *minimal state* dalam liberalisme dan nilai-nilai komunitarianisme yang mengedepankan tanggungjawab negara. Negara lewat BPJS dan SJSN nampak hadir, tetapi dana yang digunakan untuk membiayai *healthy security* diperoleh dari warga negara. Konsep *minimal state* hadir dengan lepasnya peran negara di sektor finansial, dan hanya bekerja pada sektor regulator.



Terbuka kesempatan besar untuk publik, yaitu masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil dalam menggantikan peran negara yang hilang.

Nilai komunitarianisme juga nampak hadir karena terdapat sistem *healty security* terhadap seluruh warga negara. Negara tidak melepaskan tanggungjawabnya terhadap pelayanan sosial di bidang kesehatan, tetapi mengurangnya dan menggantinya dengan sistem patungan (dan juga investasi dari publik). Konsep *governance*, yaitu manajemen kebijakan publik yang terdiri atas kerjasama antara negara dan masyarakat sipil hadir dalam konsep SJSN. Masyarakat ekonomi mungkin belum memainkan perannya sebagai investor dalam model ini, tetapi terbuka jalan untuk itu dikemudian hari.

Menjadi sebuah refleksi bagi kita bahwa konsep *minimal state* yang dilahirkan dari nilai-nilai liberalisme secara konseptual sangat canggih, tetapi berbenturan di ranah kontekstualnya di Indonesia. Sehingga terdapat kombinasi untuk berkompromi antara tekanan *agenda setting* global dengan budaya lokal komunal. Masalah lepas tanggungjawab negara atau tidak menjadi sesuatu yang dapat diperdebatkan karena kecanggihan dalam berkompromi dalam pengelolaan pelayanan sosial tersebut, contohnya adalah SJSN.

Pada hakikatnya, logika berpikir negara dalam merumuskan dan mengelola kebijakan publik setelah *structural adjustmen programme* dari IMF memiliki kesamaan logis. Benturan antara nilai liberatif yang melepas tanggungjawab dari negara dan nilai komunal yang memberikan tanggungjawab kepada negara terjadi. Relasi kuasa antara negara dan warga negara menjadi relasi kompromistis saling menipu. Fenomena ini juga terjadi terkait dengan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Logika berpikirnya sama hanya kontekstualisasinya saja yang berbeda, yaitu yang satu berada di ranah kesehatan dan yang satu berada di ranah pendidikan. Sekarang pertanyaannya dari saya adalah, apabila negara pergi dalam pelayanan kebijakan sosial dasar terhadap warga negara, mengapa warga negara harus menuruti apa keinginan negara?



# MENGEMBALIKAN KEDAULATAN PERTANIAN PANGAN DALAM NEGERI

*KEMENTERIAN KAJIAN STRATEGIS BEM KM UGM 2013*

Ketahanan pangan mungkin menjadi sebuah cita-cita yang mulia yang dimiliki negara ini. Jelas, karena ketahanan pangan merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Dalam pembukaan konstitusi negara ini pun telah disebutkan secara gamblang bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab negara. Sampai saat ini, Ketahanan pangan Indonesia masih dinilai baik walau realita dilapangan tragedi kelaparan pada sebagian masyarakat juga masih ada. Namun, titik terpenting yang menjadi pertanyaan dalam benak kita adalah apakah ketahanan pangan yang dialami Indonesia sudah dibarengi dengan kedaulatan pangan?

Hal yang memalukan jika kita membaca data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang jumlah impor makanan pokok yang dilakukan negara ini. Sejak awal tahun 2013 kita sudah mengimpor beras dari luar dengan jumlah 46 ribu ton, jagung dengan jumlah 335 ribu ton, kedelai 54 ribu ton, dan masih banyak lagi. Pertanyaan pun muncul lagi pada benak kita. Mengapa kita harus impor? Apa pertanian dalam negeri tak mampu untuk menopang pangan di negeri sendiri? Masih segar diingatan kita bahwa negeri ini dikatakan sebagai negara agraris. Yaitu negara dengan sektor ekonomi utama di bidang pertanian. Lahan pertanian di Indonesia terbentang luas sehingga menjadi sangat memalukan jika kita tidak mampu berdaulat dari segi pertanian pangan.



Penyebab terpenting jatuhnya pertanian pangan di negeri ini adalah menyerahkan pertanian sepenuhnya pada mekanisme persaingan pasar. Hal ini menyebabkan petani yang dominan berasal dari kalangan kecil dipaksa bersaing namun dengan kondisi tidak siap. Mengapa dikatakan tidak siap? Lahan pertanian di Indonesia memiliki karakter yang berbeda disetiap daerahnya. Namun, hal ini kurang diperhatikan oleh pemerintah terutama permasalahan lahan pertanian, air, dan pupuk yang menjadi hal pokok kekuatan petani. Sehingga ketika hasil pertanian masuk pada mekanisme pasar, terjadi hierarki harga hasil tani berdasarkan kualitas. Akibatnya petani menjadi merugi dan tentu saja “orang-orang pasar” diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Terlebih lagi Kementerian Perdagangan dengan leluasa membuka jalur impor makanan pokok dari luar negeri yang dipaksa disaingkan dengan hasil tani negeri kita. Siapa yang diuntungkan? Lagi-lagi “orang-orang atas” dan “orang-orang pasar” yang untung. Sedangkan petani tetap pada kemerosotan hingga penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi makan atau *subsistance*.

Pembaharuan agraria merupakan poin penting yang harus ditekankan menghadapi masalah pertanian pangan di negeri kita ini. Adanya kebijakan yang “pro-petani” dirasa penting untuk dibuat demi keberlangsungan “jalannya” pertanian pangan di negeri ini. Misalkan kebijakan konversi lahan, subsidi pupuk, fasilitas pengairan pertanian yang layak, dan lain-lain yang merupakan hal pokok yang dibutuhkan petani. Selain kebijakan yang bersifat teknis tadi perlu pula adanya kebijakan yang dapat melindungi petani dari persaingan tidak sehat yang ada di pasar. Kiranya penetapan harga hasil pertanian oleh pemerintah dapat sangat menguntungkan petani dan tetap menjaga keberlangsungan pertanian terutama pertanian pangan. Sedangkan jika diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, harga hasil tani akan diombang ambingkan di mekanisme yang akhirnya membuat rugi petani terutama petani pangan.

Mengembalikan “taring” UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) 1960. UUPA 1960 merupakan konstitusi pokok yang mengatur tentang garis garis besar agraria di Indonesia. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 3 atau yang kita tafsirkan sebagai demokrasi ekonomi. Undang-undang ini merupakan cerminan penting bahwa negeri ini merupakan negeri agraris dan undang-undang inilah yang menjadi aturan penting



yang melindungi pertanian dalam negeri. Namun, hingga saat ini UUPA tidak diterapkan secara optimal oleh pemerintah. Yang ada pemerintah “malah” membangun dan mengarahkan pertanian pada sektor perekonomian kapitalistik pasar sehingga sangat merugikan petani. Semangat demokrasi ekonomi yang diamanatkan pasal 3 ayat 3 UUD 1945 yang diwakili UUPA menjadi diabaikan. Oleh karena itu, UUPA perlu diperjuangkan untuk mengembalikan kedaulatan pertanian pangan dalam negeri.

Pembaruan agraria dirasa akan gagal jika masih ada konversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian yang dilakukan seiring penambahan jumlah penduduk dan makin heterogennya sektor perekonomian terutama saat memasuki era industri membuat lahan pertanian makin menyempit. Hal ini menyebabkan menurunnya hasil tani dalam negeri walaupun sampai saat ini luas pertanian negeri ini masih terhitung luas, namun makin lama lahan pertanian makin hilang. Akibatnya jelas, hasil tani terutama pangan makin menurun, kualitas hasil tani juga mengikuti penurunan. Melihat kondisi seperti ini perlu kebijakan pemerintah yang membatasi konversi lahan pertanian sehingga luas daerah pertanian tetap sehingga menjaga stabilitas pertanian terutama pertanian pangan yang menopang pasokan makanan pokok dalam negeri.

Point-point diatas kiranya dapat menjadi rekomendasi strategis dalam menghadapi permasalahan kedaulatan pertanian yang juga berakibat pada kedaulatan pangan dalam negeri. Namun, ada hal yang tidak kalah penting menjadi refleksi kita bersama adalah perlunya edukasi masyarakat tentang pandangan mencintai produk dalam negeri. Ditengah proses globalisasi yang menekankan pada pasar bebas, jika masyarakat terus dicekoki bahwa produk luar adalah lebih baik. Maka, point-point rekomendasi untuk kedaulatan pangan diatas dapat terpatahkan dan sia sia saja. Padahal, jika dinilai dari kualitas, hasil pertanian pangan dalam negeri merupakan hasil terbaik yang tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Oleh karena itu yang menjadi rekomendasi terakhir untuk kedaulatan pangan Indonesia adalah edukasi masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Hidup Mahasiswa, Hidup Pangan Indonesia!



# **REFORMASI SISTEM PEMILU SETENGAH HATI: SEBUAH STUDI MENGENAI ANALISA TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF**

**HEROIK MUTAQIEN PRATAMA DAN KEMENTERIAN KAJIAN STRATEGIS  
BEM KM UGM 2013**

## **Abstrak**

*Dua tahun menjelang pemilu 2014 terjadi revisi UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif, Menjadi UU No. 8 Tahun 2012. Dalam pembahasannya ternyata menuai dinamikan conflict of interest antar sembilan partai politik yang ada. Berawal dari ide melakukan penyederhanaan partai politik demi terciptanya stabilitas politik, menjadi sebagai arena untuk kepentingan untuk menjamin keberlangsungan hidup partai pada pemilu 2014 kelak. Alhasil tidak ada yang berubah dari UU Pemilu khususnya terhadap sistem pemilu di Indonesia, akibat para policy maker lebih mengedepankan syahwat politiknya dibandingkan menyelesaikan perosalan yang ada dari kebijakan publik tersebut.*



Kata Kunci : Kebijakan Publik, UU Pemilu, Penyederhanaan Partai

## Pendahuluan

Seperti biasanya menjelang pemilihan umum terjadi kembali agenda rutin lima tahunan yang dilakukan oleh anggota DPR, untuk melakukan revisi Undang – Undang Pemilu Legislatif. Dari adanya agenda rutin ini tercatat, Indonesia sudah mengalami tiga kali perubahan sistem pemilu dari tiga kali pemilu yang sudah diselenggarakan pasca reformasi. Mulai dari pemilu 1999 Indonesia menganut sistem pemilu yang proposional tertutup, kemudian pada pemilu 2004 negara kita beralih menjadi sistem pemilu proposional semi-terbuka, dan pada pemilu 2009 Indonesia mengadopsi sistem pemilu proposional terbuka (Meitzner 2009). Sedangkan pada pemilu berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 nanti, Indonesia kembali menggunakan sistem pemilu proposional terbuka setelah terjadi revisi dari UU No. 10 Tahun 2008 menjadi UU No. 8 Tahun 2012 yang baru saja disahkan pada bulan April 2012 kemarin.

Pengalaman tiga kali pemilu terakhir di Indonesia, memang menyisakan beberapa persoalan mulai dari adanya tren penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu (*vote trun out*), disproporsionalitas suara, sampai dengan sistem pemilu yang selalu menghasilkan banyak partai politik dan berdampak langsung pada efektifitas serta stabilitas pemerintahan. Fungsi dari pemilu sendiri memang beranekaragam, salah satunya ialah untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah *governability* (Croissant 2002, didalam Prihatmoko 2008, h. 5). Dari tiga kali pemilu dengan partai politik pemenang pemilu yang berbeda, memang selalu terjadi dinamika konflik tersendiri dalam pemerintahan antar eksekutif dan legislatif akibat lemahnya dukungan terhadap partai pemerintah didalam DPR dan tingginya fragmantasi politik di parlemen. Seperti yang selalu terjadi dalam pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selalu berujung konflik dalam sidang paripurna. Padahal Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang mengamankan kekuasaan lebih pada presiden *powerfull*.

Efektifitas pemerintahan dan fragamantasi politik di parlemen, memang dapat dipengaruhi dan ditekan secara langsung oleh sistem



pemilu yang ada. Melalui pembatasan jumlah partai politik diparlemen dengan merubah unsur – unsur didalam sistem pemilu, seperti *parliamentary treshold* (PT) atau ambang batas perolehan suara partai yang berhak mendapatkan kursi di parlemen. Jika memang semangat yang dibawa melalui revisi UU Pemilu Legislatif menjelang pemilu 2014 adalah untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa produk kebijakan yang dihasilkan (UU No. 8 Tahun 2012) tidak jauh berbeda dan tidak berusaha untuk menjawab permasalahan tersebut seperti UU pemilu sebelum – sebelumnya.

Hal ini terbukti pasca diimplementasikannya UU tersebut oleh KPU dengan adanya 12 partai politik nasional dan dua partai lokal aceh yang lolos sebagai peserta pemilu 2014, yang dari jumlah tersebut masih tergolong banyak dan akan berdampak kembali pada efektifitas pemerintahan. Padahal prinsip dari kebijakan publik sendiri adalah sebagai jawaban dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan untuk melanggengkan permasalahan yang ada. Atau jangan – jangan selama ini pemangku kebijakan kita memang belum selesai dengan dirinya sendiri yang selalu mengutamakan kepentingan pribadinya dalam perumusan kebijakan publik.

Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini berusaha untuk melakukan sebuah analisa terhadap UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif yang masih menyisakan berbagai persoalan didalamnya, dengan menggunakan presfektif analisa terhadap (*analysis of*) kebijakan dengan model analisa *mixed scanning*. Analisa terhadap kebijakan yang ditujukan untuk memproduksi pengetahuan terhadap proses maupun substansi dari kebijakan publik yang dihasilkan, senada dengan maksud dan tujuan dari tulisan ini yang berusaha melihat substansi dari UU Pemilu yang sebenarnya tidak mampu menjawab persoalan – persoalan yang ada. Sedangkan model analisa *mixed scanning* yang tidak hanya melihat proses kebijakan oleh perhitungan rasional – efektif – efisien melainkan perhitungan rasional politis, yang mengakibatkan proses kebijakan sebagai proses tawar menawar antar berbagai aktor dan kepentingan yang terlibat (Santoso 2010, h. 20). Dapat membantu penulis untuk melihat proses perumusan revisi UU Pemilu yang didominasi oleh berbagai kepentingan partai politik.

Untuk itu pertama – tama tulisan ini akan membahas terlebih dahulu mengenai UU Pemilu sebagai gerbang meningkatnya jumlah



partai politik, dalam hal ini bagian ini berisi mengenai permasalahan yang ditimbulkan dari Undang – Undang pemilu sebelumnya yang selalu menghasilkan banyaknya partai politik yang berdampak pada efektifitas dan stabilitas pemerintahan. Dengan kata lain pada bagian ini berisi mengenai sebuah evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya yang semestinya menjadi agenda setting kebijakan dalam pembahasan revisi UU No. 10 Tahun 2008. Setelah itu tulisan ini akan banyak membahas mengenai formulasi kebijakan yang dilakukan oleh DPR ketika merumuskan UU No. 8 Tahun 2012 yang sebagian besar didominasi kepentingan sembilan partai politik di parlemen dengan menggunakan metode *cost banefit analysis* (CBA). Untuk mengetahui perdebatan yang muncul diantara pemangku kebijakan yang lebih mengedepankan kepentingan dan keuntungan partai politik dibandingkan menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ditimbulkan dari kebijakan sebelumnya. Barulah setelah itu tulisan ini akan membahas hasil kebijakan publik (UU No. 8 Tahun 2012) dalam hal ini substansi kebijakan, yang sebenarnya sama saja dengan kebijakan – kebijakan sebelumnya dengan menyisakan berbagai persoalan.

### **UU Pemilu Sebagai Arena Berkembangbiaknya Partai Politik**

Adanya sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan revisi terhadap suatu kebijakan publik yang sudah pernah dihasilkan, bukanlah suatu langkah main – main. Dengan adanya revisi berarti ada sesuatu yang salah atau kebijakan tersebut tidak mampu menjawab persoalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik yang dihasilkan. Sehingga untuk menanggulangi permasalahan yang ada, para pemangku kebijakan (*policy maker*) melakukan sebuah perbaikan pada pasal – pasal tertentu yang dinyatakan bermasalah. Begitu pula dengan adanya revisi terhadap Undang – Undang Pemilu yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali pasca reformasi.

Undang – Undang pemilu merupakan UU politik yang didalamnya tidak hanya berbicara mengenai proses pengkonvensian perolehan suara partai politik menjadi kursi, atau hanya sebatas untuk menentukan siapa menang dan berkuasa di Indonesia. Akan tetapi, pemilu berhubungan secara langsung dengan sistem kepartaian dan sistem pemerintahan didalam suatu negara. Seperti yang diungkapkan oleh Grum (didalam Amal (ed.) 2012) sistem pemilu proposional selalu menghasilkan sistem multipartai dan sistem pemilu distrik selalu



menghasilkan sistem dua partai. Kemudian Scott Mainwaring (1993) yang melakukan penelitian di 31 negara yang sudah stabil demokrasinya, menemukan bahwasanya negara yang menganut presidensialisme dan berhasil mempertahankan demokrasi ternyata menganut sistem dwipartai.

Pada sisi lain terdapat tiga fungsi pemilu Menurut Aurel Croissant (2002, didalam Prihatmoko 2008, hh. 5-6) yang diantaranya fungsi keterwakilan yakni adanya perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat di bangku pemerintahan, fungsi integrasi yakni terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain serta masyarakat terhadap partai, dan fungsi yang terakhir yakni fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah *governability*. Lalu bagaimana dengan sistem pemilu proposional dengan sistem multipartai yang Indonesia anut yang dihadapkan dengan sistem pemerintahan presidensial yang selalu terancam efektifitas dan stabilitas pemerintahannya.

Berdasarkan amanah Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah diamandemen sebanyak tiga kali, secara gamblang menegaskan bahawasanya Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan *single cheif executive* dan memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet pemerintahannya sendiri. Dengan kata lain di dalam sistem presidensial kekuasaan terfokus dan terpusat pada lembaga eksekutif (presiden) (Yudha 2010). Sehingga dalam proses pembuatan kebijakan publik presiden sebetulnya memiliki hak penuh dan dapat produktif dalam menghasilkan kebijakan publik.

Akan tetapi karena hadirnya UU Pemilu yang selalu menghasilkan banyak partai politik yang duduk di kursi legislatif dengan fungsi *check and balnces* serta karakter dan ideologi yang berbeda pula. Keberadaan presiden di Republik Indonesia tidak lebih dari bebek pincang atau *lamb duck* dalam memproduksi kebijakan publik akibat hadirnya bayang – bayang partai politik yang tidak sedikit menyatakan ketidak sepahamannya dengan kebijakan publik yang dihasilkan. Sehingga menghasilkan ketidakstabilan dalam pemitintahan. Dengan ini jumlah partai – partai di parlemen secara positif berdampak langsung dengan ketidakstabilan pemerintah (Douglas Rae, didalam Amal & Pangabean 2012).



Dari tiga kali perubahan UU Pemilu di Indonesia memang berdampak langsung terhadap jumlah partai politik yang berbeda – beda baik dalam segi peserta pemilu maupun partai politik dibangku parlemen yang tentunya memiliki implikasi pada fragmentasi politik dan stabilitas pemerintahan. Mulai dari tahun 1999 dengan menggunakan UU No. 3 Tahun 1999 terdapat 48 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu dengan menghasilkan 21 partai politik yang duduk dibangku parlemen. Kemudian Pemilu 2004 yang menggunakan UU No. 12 Tahun 2003 terdapat sebanyak 24 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu dengan 16 partai politik yang memperoleh kursi parlemen. Sedangkan UU No. 10 Tahun 2008 yang menjadi kerangka regulasi pada pemilu 2009 terdapat 38 partai politik peserta pemilu dengan menghasilkan sembilan partai politik yang memperoleh kursi parlemen.

Pada pemilu 1999 dengan menggunakan UU No. 3 Tahun 1999, aspek yang dikedepankan dari sistem pemilu waktu itu untuk mendorong partisipasi dan keterwakilan masyarakat didalam parlemen. Mengingat pemilu 1999, merupakan pemilu pertama pasca tumbangnyarezim otoritarian yang sebelumnya menghambat partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam bidang politik. Sehingga didalam UU No. 3 Tahun 1999 terdapat kelonggaran syarat bagi partai politik untuk terdaftar sebagai peserta pemilu dengan memiliki pengurus partai lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah provinsi di Indonesia dan setiap provinsi partai politik memiliki  $\frac{1}{2}$  kepengurusan di kabupaten dan kota, serta memiliki alokasi kursi DPR minimal 2% dan 3 % DPRD provinsi, kabupaten dan kota (Pasal 39, UU/3/1999). Didalam Undang – Undang ini ditentukan pula partai politik yang tidak lolos *electoral threshold* (ET) tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai lainnya atau membentuk partai politik baru. Selain itu didalam Bab II UU No. 3 Tahun 1999 mengenai daerah pemilihan disebutkan besaran jumlah alokasi kursi per-daerah pemilihan yang diperlukan oleh partai politik, ditetapkan sesuai dengan jumlah penduduk di Daerah Tingkat I, dengan ketentuan setiap daerah sekurang – kurangnya mendapat 1 kursi (Pasal 4, UU/3/1999), kemudian untuk DPRD sekurang – kurangnya terdapat 45 kursi dan sebanyak – banyaknya 100 kursi (Pasal 5, UU/3/1999).

Alhasil terdapat 21 partai politik di parlemen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efektifitas dan stabilitas pemerintahan pada waktu itu. Tercatat terjadi bongkar pasang kabinet dari



pemerintahan Abdurahman Wahid (PKB) dan Megawati (PDIP) akibat tingginya frangantasi politik diparlemen, sampai berujung pada pemakzulan Abdurahman Wahid sebagai presiden yang kemudian digantikan oleh Megawati selaku wakil presiden pada waktu itu.

Walaupun sudah terdapat peraturan yang lebih mengikat pada pemilu 2004 dengan diwajibkannya partai politik memiliki 2/3 kepengurusan partai di provinsi dan kabupaten/kota, kemudian anggota sekurang – kurangnya 1000/ 1/1000 dari jumlah penduduk yang dibuktikan melalui KTA, serta memiliki kantor tetap dan mengajukan nama ke KPU sebagai syarat partai politik terdaftar sebagai peserta pemilu (Pasal 7, UU/12.2003). Kemudian walaupun dalam pengaturan mengenai jumlah alokasi kursi per-daerah pemeliharaan sudah mulai diatur besarnya dengan alokasi kursi sebanyak 3 – 12 per-daerah pemilihan untuk DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Kota (Pasal 46, UU/12/2003). Tetap saja masih berdampak pada banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu yang mencapai 24 partai dan menghasilkan 16 partai politik yang duduk dibanku parlemen. Hal ini dikarenakan terdapat enam partai politik yang secara otomatis mengikuti pemilu karena melampaui *electoral threshold* pada pemilu 1999 dan munculnya transformasi partai – partai lama yang tidak lolos ET menjadi partai baru dengan cara berganti nama dan bergabung dengan partai lainnya.

Pada sisi lain didalam pemilu 2004 ini terdapat penurunan *vote turn out* sebanyak 7% dari pemilu sebelumnya. Alhasil lagi – lagi terjadi ketegangan didalam pemerintahan antara eksekutif dan legislatif seperti dalam kasus kebijakan impor beras, kenaikan BBM, dukungan terhadap resolusi PBB dalam kasus Iran, perjanjian kerja sama pertanahan dengan Singapur (DCA), dan penanganan lumpur Lapindo (Prihatmoko 2008, h. 15).

Meskipun sudah ditetapkan *electoral threshold* pada pemilu 2004 sebesar 3% untuk kursi DPR (Pasal 9, UU/12/2003), tetap saja masih menimbulkan banyaknya partai politik. Dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pemilu tahun 2009, mulai muncul *parliamentary threshold* (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 2,5% untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR (Pasal 202), dengan kata lain jika terdapat partai politik yang tidak mempunyai suara sebanyak 2,5% tidak akan mendapatkan kursi parlemen. Serta adanya besaran kursi per-daerah pemilihan yang berkurang menjadi paling sediki 3, dan paling banyak 10 kusi per-daerah



pemilihan untuk kursi DPR (Pasal 22, UU/10/2008). Justru terjadi peningkatan jumlah partai politik peserta pemilu dari sebelumnya pada pemilu 2004 sebanyak 24 partai menjadi 38 partai politik dan terjadi penurunan partisipasi masyarakat pada pemilu sebanyak 70% dibandingkan pada pemilu 2004 mencapai 87% dan pemilu 1999 mencapai 90% (IDEA Int 2012, didalam Dardias 2012, h.1). Walaupun jumlah partai politik parlemen berkurang menjadi sembilan partai politik hasil pemilu 2009 dengan adanya ambang batas parlemen, akan tetapi tetap saja terjadi perselisihan antara legislatif dan eksekutif dalam pengambilan keputusan. Seperti yang terjadi baru – baru ini mengenai pengurangan subsidi BBM dan kenaikan harga Tarif Dasar Listrik.

Belum lagi UU No. 10 Tahun 2008 ini memiliki catatan permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu 2009, dengan adanya sengketa hukum di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPU mengenai Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) dan penghitungan kursi tahap III pada tingkat provinsi.

Jika kita perhatikan secara seksama, dari tiga kali pemilu yang sudah dilakukan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai unsur – unsur pemilu dan berpengaruh langsung terhadap besaran jumlah partai politik yang dapat mempengaruhi fragmentasi politik dan stabilitas pemerintahan. Unsur – unsur dari sistem pemilu yang termaktub kedalam pasal – pasal tersebut antara lain: syarat peserta pemilu, alokasi kursi per- daerah pemilihan, ambang batas pemilu (ET) dan ambang batas parlemen (PT). *Pertama*, syarat peserta pemilu biasanya dilihat dalam segi keanggotaan partai politik pada level provinsi sampai dengan kabupaten kota yang besaraan anggotanya sudah ditentukan didalam UU. Yang selanjutnya dalam proses persiapan pemilu dilakukan verifikasi faktual oleh KPU untuk menentukan partai mana dan berapa jumlah partai politik yang lolos terdaftar secara resmi sebagai peserta pemilu.

*Kedua*, alokasi kursi per-daerah pemilihan merupakan banyaknya jumlah alokasi kursi yang sudah ditentukan besarnya untuk diperebutkan oleh partai politik. Dalam teori kepemiluan alokasi kursi ini dikenal dengan *district magnitude* merupakan sedikit atau banyaknya kursi parlemen yang diperebutkan oleh partai politik dalam satu daerah pemilihan. Besar distrik terkategori menjadi tiga yakni kecil (2-5), sedang (6-10) dan besar (>10) (Pamungkas 2009, h. 15). Sehingga logikanya semakin sedikit jumlah alokasi kursi yang ditentukan per-daerah akan



semakin sulit partai politik untuk memperoleh kursi tersebut, sedangkan semakin besar jumlah alokasi kursi per- daerah pemilihan semakin besar peluang partai politik untuk memperoleh kursi parlemen, yang tentunya akan berdampak langsung pada semakin banyaknya partai politik di parlemen.

*Ketiga*, ambang batas parlemen atau yang kemudian dikenal dengan sebutan PT, merupakan jumlah perolehan suara minum yang wajib diperoleh partai untuk mendapatkan kursi parlemen. Sehingga semakin besar persentase PT yang diatur didalam UU Pemilu logikanya semakin sulit bagi partai politik untuk memperoleh kursi di parlemen, sedangkan semakin rendah PT sebaliknya yang akan berdampak pada banyaknya partai politik di Indonesia.

Berkaca dari adanya persoalan – persoalan yang muncul dari UU pemilu yang selalu berujung pada banyaknya partai politik, sehingga mengancam efektifitas dan stabilitas pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Memang sudah sepatutnya untuk melakukan revisi UU Pemilu Legislatif dengan agenda reformasi sistem pemilu yang mengarah pada penyederhanaan partai politik untuk mengantisipasi berkepanjangan permasalahan yang ditimbulkan dari UU Pemilu sebelumnya.

### **Munculnya Pasal-Pasal Krusial Dalam RUU Pemilu**

Dengan masuknya revisi Undang – Undang Pemilu dalam prolegnas (program legislasi nasional), pada tahun 2011 dibentuk pansus (pantia khusus) untuk membahas Rancangan Undang – Undang Pemilu yang diketuai oleh Arief Wibowo dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melibatkan delapan partai politik di parlemen lainnya (Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura) untuk membedah dan memperbaiki Undang – Undang Pemilu Legislatif tersebut yang akan digunakan pada pemilu 2014 kelak. Dalam proses pembahasannya ternyata bukanlah suatu hal yang mudah, dan dapat diselesaikan sesegera mungkin. Mengingat dalam proses perumusan kebijakan publik bukan hanya sekedar berbicara mengenai adanya masalah yang kemudian dijawab setelah menemukan akan permasalahannya. Akan tetapi ketika terdapat masalah dan berusaha diselesaikan terdapat cara pandang yang berbeda yang dibarengi dengan kepentingan berbeda – beda pula antar *policy maker*. Apalagi kebijakan publik yang dibahas adalah UU Pemilu yang menyangkut



hidup matinya partai politik. Sehingga dalam proses formulasi kebijakan terjadi proses tawar – menawar antar partai politik demi kepentingan pribadinya.

Alhasil dalam proses pembahasan RUU Pemilu di komisi II sampai dengan sidang paripurna untuk mengesahkan Undang – Undang tersebut, terjadi perdebatan yang sengit antar fraksi di DPR akibat adanya perbedaan pandangan terkait pasal – pasal yang memiliki pengaruh signifikan dalam penyelenggaraan pemilu terutama berpengaruh pada sedikit banyaknya partai politik diparlemen, yang belum mendapatkan kesempatan bersama dari sembilan partai politik yang ada. Pasal – pasal ini kemudian dikenal dengan pasal krusial yang diantaranya mengenai besaran PT, besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan dan juga formula penghitungan suara.

#### **A. Parliamentary Trashold (PT)**

Dalam pembahasan pasal 208 mengenai besaran PT, dari sembilan partai politik yang ada terbagi kedalam dua kubu yang berbeda dengan menawarkan besaran angka PT yang berbeda pula. Kubu pertama terdiri dari partai – partai politik besar di parlemen seperti Demokrat, PDIP, Golkar dan PKS yang menawarkan besaran PT lebih dari 3% sampai dengan 5%. Kubu kedua terdiri dari partai – partai politik kecil di parlemen seperti PPP, PAN, Hanura, PKB dan Gerindra yang menawarkan besaran PT 2,5%. Adapun besaran PT yang ditawarkan dari masing – masing partai tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut :

NO	NAMA FRAKSI	SIKAP
1.	Fraksi Partai Demokrat	4%
2.	Fraksi Partai Golkar	5%
3.	Fraksi PDI Perjuangan	5%
4.	Fraksi PKS	3 – 5%
5.	Fraksi PAN	2,5% (meskipun tidak keberatan angka 4 %)
6.	Fraksi PPP	2,5%
7.	Fraksi PKB	2,5%
8.	Fraksi P. Gerindra	2,5%
9.	Fraksi Hanura	tidak hadir

Sumber : Sukmajati 2012



Hadirnya dua kubu partai politik yang menawarkan besaran PT berbeda, tentunya berangkat dari adanya dua kepentingan yang berbeda pula untuk direalisasikan. Partai politik besar yang menawarkan besaran PT yang terbilang tinggi, dilandasi oleh semangat untuk melakukan penyederhanaan partai politik yang sebenarnya bukan hanya untuk meredam fragmentasi politik diparlemen dalam rangka menjawab permasalahan efektifitas dan stabilitas pemerintahan semata. Melainkan sebagai organisasi yang memiliki orientasi untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilu, partai politik tentunya perlu bersaing dengan partai politik lainnya. Sehingga dengan semakin sedikit jumlah partai politik yang ada, akan semakin mudah partai politik besar untuk memperoleh kekuasaan. Dengan kata lain penyederhanaan partai politik hanya menjadi modus bagi partai politik besar untuk menyingkirkan lawannya.

Sedangkan kubu kedua yang terdiri dari partai politik kecil yang menawarkan besaran PT rendah, tentunya menyadari akan dampak yang akan ditimbulkan kelak jika besaran PT melampaui kapasitas dan kemampuan bersaing dari partai – partai kecil yang berdampak pada keberlangsungan hidup mereka. Untuk itu mereka berusaha untuk menawarkan besaran PT 2,5% agar dapat memihak pada partai kecil dan menjamin keberlangsungan hidup mereka pada pemilu 2014.

## **B. Jumlah Alokasi Kursi Per-daerah Pemilihan**

Besaran jumlah alokasi kursi per-daerah pemilihan untuk DPR yang tertuang pada pasal 22 –pun, memiliki dua kepentingan yang dibawa partai politik besar dan partai politik kecil yang tidak jauh berbeda dengan perdebatan PT. Karena besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan memiliki logika semakin besar *distric magnitude* semakin besar peluang partai politik untuk memperoleh kursi parlemen, dan semakin kecil *district magnitude* semakin kecil peluang partai politik untuk memperoleh kursi parlemen. Sehingga partai – partai besar yang tergolong mapan dan lebih tepatnya memiliki kepercayaan diri berlebihan, berani menawarkan besaran alokasi kursi daerah pemilihan yang cenderung semakin kecil. Sedangkan partai kecil yang memiliki tujuan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya pada pemilu 2014 memili memperbesar jumlah alokasi kursi perdaerah pemilihan. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :



NO	NAMA FRAKSI	SIKAP
1.	Fraksi Partai Demokrat	Sistem proporsional terbuka dan penetapan calon terpilih suara terbanyak. Adapun alokasi kursi 3-10 (DPR) dan 3-12 (DPRD)
2.	Fraksi Partai Golkar	Sistem Campuran dengan alokasi kursi 3-6 berlaku untuk DPR dan DPRD
3.	Fraksi PDI Perjuangan	Sistem Proporsional Tertutup dengan alokasi kursi 3-8 (DPR) dan 3-10 (DPRD)
4.	Fraksi PKS	Sistem proporsional Tertutup dengan alokasi kursi 3-10 (DPR) dan 3-12 (DPRD)
5.	Fraksi PAN	Sistem Proporsional Terbuka dengan alokasi kursi 3-10 (DPR) dan 3-12 (DPRD)
6.	Fraksi PPP	Sistem Proporsional Terbuka dengan alokasi kursi 3-10 (DPR) dan 3-12 (DPRD)
7.	Fraksi PKB	Tidak hadir
8.	Fraksi Partai Gerindra	Tidak hadir
9.	Fraksi Hanura	Tidak hadir

Sumber : Sukmajati 2012

### C. Formula Penghitungan Suara

Sebagai salah satu pasal yang pernah mengalami permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu yang berujung sengkata di MA dan MK, metode formulasi penghitungan suara yang tertera pada pasal 211 dan 212, menjadi perdebatan pula antar sembilan fraksi partai politik di DPR. Perdebatan yang muncul lebih mengarah pada penentuan metode penghitungan suara yang didalam sistem pemilu proporsional terdapat dua metode yakni Quota dan Divisor.



NO	NAMA FRAKSI	SIKAP
1.	Fraksi Partai Demokrat	Habis di daerah pemilihan dengan metode kuota
2.	Fraksi Partai Golkar	Metode divisor (terutama varian D'Hondt atau dengan bilangan pembagi 1, 2, 3, 4, dst)
3.	Fraksi PDI Perjuangan	Agar jelas pengertian sisa suara. Habis di daerah pemilihan.
4.	Fraksi PKS	Metode divisor dengan varian webster/sainte lague (bilangan pembagi ganjil: 1, 3, 5, 7, dst)
5.	Fraksi PAN	Metode kuota dan habis di dapil
6.	Fraksi PPP	Metode kuota dan habis di dapil
7.	Fraksi PKB	Tidak hadir
8.	Fraksi Partai Gerindra	Tidak hadir
9.	Fraksi Hanura	Tidak hadir

Sumber : Sukmajati 2012

Formula penghitungan suara dengan menggunakan metode kuota atau yang lebih dikenal dengan suara sisa terbesar dengan hadirnya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang tidak tetap atau tergantung pada besaran pemilih (Pamungkas 2009, h. 32). Dapat menjamin proposionalitas suara dengan hadirnya penghitungan jumlah suara sampai habis untuk dikonversi menjadi kursi parlemen. Metode ini sangat ramah dengan partai – partai kecil yang dapat menjanjikan keberlangsungan hidupnya. Sehingga alih – alih berusaha untuk menjamin proposionalitas suara, partai politik kecil yang mengusung metode kuota sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan formula penghitungan suara dengan menggunakan metode divisor melalui perhitungan rata – rata suara tertinggi dan adanya BPP yang tetap. Akan sangat memudahkan partai politik besar untuk menjamin kekuasaannya dengan menyingkirkan partai – partai kecil yang memperoleh suara kecil, akibat adanya metode penghitungan suara yang lebih melihat perolehan rata – rata tertinggi dan dengan adanya BPP yang sudah ditentukan tanpa melihat besaran jumlah suara pemilih.



## Tidak Ada Yang Berbeda Dari UU No. 8 Tahun 2012

Setelah menuai perdebatan yang berkepanjangan dalam pembahasan mengenai revisi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, April 2012 kemarin telah berhasil disahkan UU No. 8 Tahun 2012 yang akan digunakan pada pemilu 2014. Akan tetapi sangat disayangkan produk kebijakan yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan UU sebelumnya, dan kurang mampu menjawab persoalan fragmentasi politik yang berujung pada ketidakstabilan pemerintahan dari Undang – Undang sebelumnya. Hal ini dikarenakan pasal – pasal krusial yang diperdebatkan dalam formulasi kebijakan tidak lebih dari sebagai barang lelangan yang didalamnya terdapat tawar menawar antar partai politik demi merealisasikan kepentingannya, tanpa memikirkan jawaban dan tujuan dari adanya revisi Undang – Undang pemilu tersebut. Mulai dari besaran alokasi kursi perdaerah pemilihan yang tidak berubah dengan UU sebelumnya dengan besaran 3 sampai 10 kursi, seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Pemilu baru ini dalam pasal 22 :

### Pasal 22

Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3(tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Padahal jika memang ingin melakukan penyederhanaan partai politik tentunya dapat memperkecil kembali besaran dapil tersebut. Tidak hanya cukup disitu dalam penentuan besaran alokasi kursi perdaerah pemilihan, pemerintah tidak mempertimbangkan besaran sebaran penduduk di Indonesia. Sehingga besaran dapil ini akan menciderai prinsip kedailan dalam keterwakilan yakni *one person one vote one value*.

Hal yang serupa juga terjadi pada *parliamentary threshold* dan formula penghitungan suara yang lagi – lagi tidak jauh berbeda dengan UU Pemilu sebelumnya seperti yang tertuang dalam pasal 208 mengenai besaran PT, dan pasal 211 dan 212 dalam UU No. 8 Tahun 2012 berikut :

### Pasal 208

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan



dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

#### Pasal 211

(1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 209 di daerah pemilihan yang bersangkutan.

(2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota.

#### Pasal 212

Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2), ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a) apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;
- b) apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil daripada BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan;
- c) penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.



Semestinya jika memang semangat yang dibawa oleh sembilan partai politik untuk menanggulangi stabilitas pemerintahan dengan meredam fragmentasi politik di Parlemen besaran PT dapat lebih ditingkatkan dengan konsekuensi disproposionalitas meningkat, dan menggunakan formulasi penghitungan suara dengan metode divisor yang melihat *the highest average* sehingga mampu mendorong penyederhanaan partai politik. Dilain sisi ada salah satu aspek yang diabaikan oleh anggota DPR ketika pembahasan mengenai RUU Pemilu ini, yakni *electoral threshold* ET yang besarnya tidak berubah 3% seperti pada tahun 2009 lalu. Padahal pasal ini memiliki pengaruh yang signifikan untuk membatasi jumlah partai politik pada pemilu berikutnya.

## Kesimpulan

Undang – Undang pemilu yang didalamnya mengatur sistem pemilu proporsional di Indonesia, ternyata menuai berbagai probelamtika terutama efektifitas dan stabilitas pemerintahan. Adanya Undang – Undang pemilu yang selalu menghasilkan banyak partai politik di parlemen telah berhasil membawa fragmentasi politik yang cukup tinggi di parlemen, yang berakibat pada instabilitas pemerintahan di Indonesia. Berkaca dari Undang – Undang Pemilu Legislatif sebelum – sebelumnya, mulai dari UU No. 3 Tahun 1999 yang digunakan pada pemilu 1999, UU No. 12 Tahun 2003 yang digunakan pada pemilu 2004, dan UU No. 10 Tahun 2008 yang digunakan pada pemilu 2009. Yang selalu mendorong hadirnya banyak partai politik, menjelang pemilu 2014 terjadi revisi kembali terhadap UU No. 10 Tahun 2008 untuk mengantisipasi dan menjawab persoalan – persoalan yang sudah terjadi sebelumnya.

Besar kecilnya partai politik di parlemen memang dapat ditentukan dari UU Pemilu yang didalamnya mengatur mengenai pasal – pasal yang berisi mengenai unsur – unsur dari sistem pemilu. Mulai dari *Parliamentary Treshold*, *Electoral Threshold*, *District Magnitude*, dan formula penghitungan suara. Unsur – unsur dari sistem pemilu inilah yang kemudian muncul menjadi pasal – pasal krusial dalam pembahasan mengenai RUU Pemilu pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya dua kubu partai politik parlemen yang memiliki kepentingan berbeda, mengingat proses perumusan kebijakan publik bukan hanya sekedar berbicara aspek teknokratis semata. Melainkan pertarungan kepentingan antar *policy maker* dalam meralisasikan tujuannya. Kubu



pertama terdiri dari partai – partai politik besar yang pro penyederhanaan partai politik, yang sebenarnya tujuannya bukan hanya sekedar untuk menciptakan stabilitas politik semata. Tetapi untuk menyingkirkan lawan politiknya pada pemilu 2014. Sedangkan kubu kedua terdiri dari partai – partai politik kecil yang tidak sepakat dengan penyederhanaan partai politik karena demi terciptanya proporsionalitas suara dalam pemilu. Alih – alih menjamin proporsionalitas dalam pemilu, partai politik kecil sebenarnya sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya pada pemilu 2014.

Dari perdebatan panjang tersebut, akhirnya disahkan UU No. 8 Tahun 2012 sebagai UU Pemilu Legislatif yang akan digunakan pada pemilu 2014. Akan tetapi sangat disayangkan UU ini tidak jauh berbeda dengan UU sebelumnya yang masih dapat memicu fragmentasi politik diparlemen yang berimplikasi pada ketidastabilan pemerintahan. Padahal, seperti kita ketahui bersama hadirnya sebuah kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan suatu cara untuk menjawab sebuah persoalan yang terjadi didalam suatu negara. Akan tetapi UU Pemilu yang dihasilkan justru akan tetapi memicu hadirnya persoalan tersebut. Adanya hal ini sebenarnya tidak terlepas dari para *policy maker* seperti partai politik yang masih belum tuntas dengan dirinya, atau lebih mengedepankan syahwat politiknya dibandingkan untuk menjawab persoalan yang terjadi. Alhasil dengan alih – alih membawa kepentingan masyarakat banyak, sebenarnya partai politik sedang berupaya untuk meralisasikan kepentingannya sendiri. Sehingga kebijakan publik hanya dijadikan sebuah mainan oleh partai politik yang dapat dengan mudah dibongkar pasang demi tujuan partai politik semata.

## Referensi

### Literatur

- Ambardi, K 2009, *Mengungkap Politik Kartel*, KPG, Jakarta.
- Amal, I & Pangabean, S 2012, *Reformasi Sistem Multi-Partai dan Peningkatan Peran DPR dalam Proses Legislatif*, didalam Amal, Ichlasul ed. 2012, “Teori-teori Mutakhir Partai Politik”, Triawacana, Yogyakarta.
- Dardias, Bayu, *Isu – Isu Krusial UU Pemilu dan Perubahan Politik Indonesia*, Materi Seminar Nasional “Membedah UU Pemilu dan Implikasinya Terhadap Sistem Politik di Indonesia” di Universitas



Jember 22 Mei 2012, diunduh dari <http://bayudardias.staff.ugm.ac.id> Pada Tanggal 21 Maret 2013, pkl 15.32

Grumm, Jhon 1969, *Beberapa Teori Tentang Sistem Pemilihan*, didalam Amal, Ichlasul ed. 2012, "Teori-teori Mutakhir Partai Politik", Triawacana, Yogyakarta.

Pamungkas, S 2009, *Perihal Pemilu*, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, Yogyakarta.

Prihatmoko, J 2008, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Santoso, Purowo 2010, *Analisa Kebijakan Publik*, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, Yogyakarta.

Sukmajati, Mada, *Menyikapi Bebarapa Pasal Krusial Dalam RUU Pemilu : Melalui Pendekatan Teknokratis*, Materi Seminar Nasional "Reformasi UU Pemilu" Komap UGM 12 Maret 2012.

Mainwering, S 1993, *Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination*, Comparative Political Studies, Vol. 26, No. 2.

Mietzner 2009, *Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System*, LOWY Institute.

Yudha, H 2010, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*, Gramedia, Jakarta

## **Undang-Undang**

Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Provisnis, Kota dan Kabupaten

Undang – undang Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Provisnis, Kota dan Kabupaten.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1999, Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Provisnis, Kota dan Kabupaten,

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Provisnis, Kota dan Kabupaten.



# **MENOLAK UU NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB**

***KEMENTERIAN KAJIAN STRATEGIS BEM KM UGM 2013***

Masalah pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi isu yang strategis untuk dikawal dan dibahas oleh rekan-rekan mahasiswa. Termasuk juga oleh BEM SE-UGM sebagai gerakan politik mahasiswa di Yogyakarta yang memiliki kepedulian terhadap wacana neoliberalisme pendidikan di Indonesia.

Idealnya apabila kita merujuk kepada amanat konstitusi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka tugas Negara adalah “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Adalah kewajiban bagi Negara untuk memenuhi tugas mulianya dalam proses memerdekakan rakyatnya dengan cara mencerdaskan lewat jalur pendidikan. Sehingga proses pendidikan haruslah terbebas dari intervensi pasar dan kapitalisme yang mengejar laba sebesar-besarnya. Pendidikan bukanlah



lahan strategis untuk mengeruk untung, karena pendidikan adalah jalan untuk merdeka dari segala bentuk intervensi yang membodohkan.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan peran Negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan warga Negara Indonesia serta penolakan terhadap bentuk swastanisasi pendidikan melalui putusan MK dalam Uji Materi UU BHP yang lalu (putusan Nomor 11-14-21-126 DAN 136/PUU-VII/2009). Adapun MK berpendapat sebagai berikut:

1. Otonomi pengelolaan Pendidikan Tinggi bukan merupakan sebuah keharusan dalam mencapai tujuan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan dapat menggagalkannya;
2. Konsep kekayaan Negara yang dipisahkan akan mengganggu kegiatan pendidikan;
3. Kewenangan Institusi Pendidikan untuk mencari dana secara otonom berpotensi melanggar hak atas pendidikan peserta didik;
4. Institusi pendidikan yang tidak dilindungi sebagai Objek Kepailitan melanggar Undang-Undang Dasar 1945;
5. Tidak adanya kejelasan pihak yang berwenang dalam penentuan serta penjatuhan sanksi menoleransi pelanggaran.

Paska pembatalan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi RI pada 31 Maret 2010. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia kembali diregulasi oleh DPR RI. Sedari awal proses legislasi tersebut BEM SE-UGM selalu kritis terhadap sistem pendidikan tinggi yang sedang dirancang itu. Memang sudah sejak menjadi rancangan kami kawal dan kritisi karena terindikasi banyak pasal yang sarat akan konsep neoliberalisme pendidikan, tetapi pada akhirnya UU ini berhasil disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam menyikapi UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, BEM SE-UGM menyatakan sikap untuk menolak keberadaan UU ini. Penolakan tersebut didasarkan atas empat argumen berikut:

1. **Semangat dan substansi UU Pendidikan Tinggi masih tidak bisa lepas dari kooptasi kepentingan lembaga keuangan internasional.** Ini dapat dibuktikan dengan melihat Bank Dunia yang telah melakukan penetrasi agenda *'higher education reform'* sejak dokument policy framework-nya yang berjudul, *"Higher Education: Lessons of Experience"* diterbitkan pada



tahun 1994. Agenda 'reformasi' tersebut dapat disarikan ke dalam 4 hal: *Pertama*, mendorong diferensiasi Institusi PT; *Kedua*, mendorong diferensiasi pendanaan dari publik; *Ketiga*, mendefinisi ulang peran pemerintah; *Keempat*, fokus pada kualitas, performativitas, dan persamaan. Selain itu, UU Pendidikan Tinggi ini juga merupakan amanat GATS (*General Agreements on Trade Services*) yang telah ditandatangani rezim neoliberal di Indonesia. Dalam ketentuan GATS ini ada 7 sektor yang harus diliberalkan, salah satunya adalah pendidikan nasional. Kita harus menolak dengan tegas segala macam bentuk penetrasi asing ini.

2. **UU Pendidikan Tinggi ini masih memilah perguruan tinggi dalam 'Badan Hukum' dan Menyajikan Otonomi.** Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU Pendidikan Tinggi ini hanyalah UU BHP yang berganti baju. Semangat, jiwa, dan roh dari kedua undang-undang tersebut sama. Mahalnya biaya pendidikan tinggi dan terhambatnya pemenuhan hak atas pendidikan tinggi yang berkualitas menjadi keniscayaan. Kebijakan ini merupakan bentuk pengingkaran pemerintah terhadap cita-cita dibentuknya Indonesia –mencerdaskan kehidupan bangsa- dan sekaligus bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini hak atas pendidikan. Otonomi bukan segala-galanya dalam menentukan kualitas.
3. **Semangat UU Pendidikan Tinggi ini masih mencerminkan pelepasan tanggung jawab negara dalam hal pembiayaan perguruan tinggi.** Dapat dilihat dari sistem pinjaman dana tanpa bunga bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi yang diatur dalam Pasal 76 ayat 2 huruf c UU Pendidikan Tinggi. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan semangat kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negara. Lembaga universitas seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti ini dalam proses pengelolaan sistem pendidikan.
4. **UU Pendidikan Tinggi tidak memberikan kepastian hukum.** Hal ini tercermin dari masih banyaknya peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang akan mengiringi UU ini. Sebagai contoh, masalah standar biaya operasional pendidikan di pasal 88 ayat 5. Pasal ini tidak tegas menyebutkan berapa besar dana yang ditanggung oleh mahasiswa. Ini kami analisa sebagai bentuk



ketidakpastian hukum karena akan ada peraturan yang akan mengikutinya. Ditambah lagi masalah biaya operasional pendidikan ini akan bermasalah di kemudian hari karena setiap universitas akan berbeda-beda dan akan membentuk kesenjangan sosial antar universistas seperti masalah biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sedang digodok oleh Dirjen Dikti.

BEM SE-UGM akan menolak dan menentang segala macam konsep kebijakan publik yang semangatnya dilandasi neoliberalisme. Sebagai lembaga mahasiswa tingkat universitas yang memiliki nilai-nilai filosofis Ke-UGM-an pada Pancasila dan UUD 1945, maka BEM SE-UGM dengan ini menyatakan mendukung dan akan ikut terlibat penuh dalam proses uji materi UU Nomor 12 Tahun 2012 bersama dengan koalisi lembaga-lembaga yang peduli tentang isu ini. Berpijak dari analisis tersebut, BEM SE-UGM tetap menegaskan sikap:

- 1. Menolak UU Pendidikan Tinggi dan akan memperjuangkan pencabutannya.**
- 2. Menolak Penetrasi asing dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi d Indonesia.**
- 3. Mendesak Pemerintah untuk dapat bertanggung jawab mengelola pembiayaan pendidikan tinggi sebagai hak dasar rakyat Indonesia.**
- 4. Dan mengajak seluruh elemen mahasiswa se Yogyakarta dan Indonesia untuk ikut andil bersama dalam memperjuangkan pencabutannya.**



# MEMBEDAH SISTEM UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI KAMPUS UGM

*KEMENTERIAN KAJIAN STRATEGIS BEM KM UGM 2013*

***“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”  
(Pasal 31 UUD RI Tahun 1945/Perubahan IV Ayat 1)***

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem pembayaran akademik di mana mahasiswa program S1 reguler membayar biaya satuan pendidikan yang sudah ditetapkan jurusannya masing-masing. UKT dinilai sebagai terobosan baru dalam pembayaran akademik. Ciri khas UKT adalah dihapusnya semua sumbangan awal saat masuk kuliah untuk gedung, meupun sumbangan-semumbangan lain yang dibayarkan per semester di semua jurusan di universitas negeri di seluruh Indonesia, dan dengan sistem pembayaran yang ditetapkan per semester oleh jurusan masing-masing, sehingga apabila masih ada universitas negeri di Indonesia yang menggunakan sistem pembayaran Sistem Kredit Semester (SKS), maka tidak akan berlaku lagi.



## Latar Belakang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal

Pada hakikatnya sistem pembayaran UKT ini sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam memberikan fasilitas pendidikan yang murah kepada warganegara dengan penghapusan segala bentuk pungutan-pungutan di luar biaya kuliah (seperti sumbangan gedung, biaya KKN, biaya wisuda, biaya praktikum, dan sebagainya) yang dirasa diskriminatif dan sulit dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Akan tetapi, benarkah penghapusan sumbangan-sumbangan tersebut berdampak pada hilangnya diskriminasi dalam pembayaran dan membuat biaya kuliah semakin murah?

## Perjalanan Dasar Hukum Kebijakan UKT

Berdasarkan amanah dari pasal 88 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Dikti telah mengeluarkan surat edaran yang dijadikan dasar pemberlakuan sistem UKT, yaitu:

1. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tertanggal 4 Januari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal
2. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 274/E/T/2012 tertanggal 16 Februari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal
3. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Februari 2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah
4. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 488/E/T/2012 tertanggal 21 Maret 2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi
5. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal.
6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 272/ET.1.KV/2013 tertanggal 3 April 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal

Surat edaran terakhir Dirjen Dikti mengacu kepada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang statusnya saat ini sedang proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komite Nasional Pendidikan (KNP).

Selain itu, pernah diadakan rapat antara Dikti dengan rektor sejumlah PTN yang diselenggarakan di Bandung, 2 Juni 2012 untuk membahas penerimaan mahasiswa baru tahun 2013. Dikti kembali menghimbau PTN untuk melaksanakan kebijakan UKT dan mekanisme pemberian BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri).

Berdasarkan hasil pemaparan pada dialog paska aksi Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2013 dengan Sekretaris Dikti, Bapak Patdono



Suwignjo pada 3 Mei 2013 di Gedung Dikti Lt. 4, maka memang pada dasarnya UKT ini haruslah diatur dalam Permendikbud, tetapi proses pembuatan Permendikbud yang mengatur soal UKT sedang dibahas dan akan segera keluar.

## Rumusan Kebijakan UKT

### Rumus UKT = BKT – BOPTN

Keterangan:

- UKT --> Uang Kuliah Tunggal
- BKT --> Biaya Kuliah Tunggal
- BOPTN --> Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

### Rumus BKT = Rp 5.080.000 x K1 x K2 x K3

Keterangan:

- Rp 5.080.000 adalah angka yang ditetapkan Dikti untuk standar biaya pendidikan tinggi program S1 reguler di seluruh Indonesia (belum dikalikan dengan komponen lain biaya sesuai rumusan). Angka ini mengacu pada HEFCE (Higher Education Funding Council for England) di Britania Raya.
- K1 adalah indeks mutu prodi dengan margin 1 – 4<sup>33</sup> (1 paling rendah, 4 paling tinggi)
- K2 adalah indeks mutu perguruan tinggi dengan margin 1 - 4<sup>34</sup> (1 paling rendah, 4 paling tinggi)
- K3 adalah indeks kemahalan wilayah dengan 3 pembagian wilayah<sup>35</sup>

BOPTN adalah sebuah kebijakan pemerintah yang mirip BOS (bantuan operasional sekolah) untuk tingkat SD dan SMP. BOPTN memiliki akar di pasal 88 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. BOPTN memiliki dasar hukum Permendikbud Nomor 4 Tahun 2013 yang merupakan revisi atas Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012.

<sup>33</sup> K1 untuk prodi science (laboratorium) adalah 1,3. Prodi teknologi adalah 1,7. Prodi kesehatan adalah 2,5. Prodi seni 1,8, prodi lainnya adalah 1.

<sup>34</sup> K2 untuk ITB adalah 1,5. Untuk UGM adalah 1,2. Untuk UI dan IPB adalah 1,1. Untuk PTN lainnya adalah 1.

<sup>35</sup> K3 untuk wilayah 1 (Pulau Jawa) adalah 1. Untuk wilayah 2 (Sumatera) adalah 1,1. Untuk wilayah 3 (Lainya) adalah 1,3.



Total BOPTN 2013 adalah Rp 2,7 dan sejak 30 April 2013 sudah dapat diakses oleh setiap PTN di Indonesia. Setiap PTN berbeda-beda mendapat besaran dana BOPTN tersebut. Perbedaan tersebut dilakukan Dikti atas evaluasi setiap tahun atas seluruh PTN di Indonesia. Semakin baik hasil evaluasi, maka semakin besar dana BOPTN yang akan didapatkan PTN bersangkutan di tahun berikutnya. BOPTN akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh PTN setiap akhir tahun, apabila ada penyimpangan maka BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan menindaklutinya sebagai bentuk korupsi.

BOPTN ini yang akan mengurangi UKT yang akan dibayarkan oleh mahasiswa. BOPTN akan dibagi per kepala di setiap prodi di PTN.

### **Implementasi Kebijakan UKT**

Dengan diterapkannya sistem UKT pada Agustus mendatang di seluruh Indonesia, maka sistem apapun selain itu adalah melanggar UU dan peraturan pemerintah. Pemerintah lewat Dikti berjanji akan meniadakan seluruh pungutan-pungutan di luar UKT. Perlu diketahui bahwa UKT akan dilakukan dengan berjenjang berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 272/ET.1.KV/2013 tertanggal 3 April 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal.

Lewat SE Dirjen Dikti tersebut, maka UKT minimal harus dilakukan 5 tingkat, yaitu:

1. Minimal 5% Mahasiswa dari penerimaan tiap tahun akan membayar biaya kuliah mulai dari Rp 0 s/d Rp 500.000 per semester
2. Minimal 5% Mahasiswa dari penerimaan tiap tahun akan membayar biaya kuliah mulai dari Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000 per semester
3. Jenjang dan range pembayaran berdasarkan penghasilan orang tua yang telah ditetapkan masing-masing PTN yang harus lebih murah dari UKT tingkat ke-4.
4. Jenjang dan range pembayaran berdasarkan penghasilan orang tua yang telah ditetapkan masing-masing PTN yang harus lebih murah dari UKT tingkat ke-5.
5. UKT tingkat ke-5 adalah UKT penuh yang akan dibayarkan oleh mahasiswa dengan jenjang dan range berdasarkan penghasilan orang tua yang telah ditetapkan masing-masing PTN.



## Implementasi Kebijakan UKT di UGM (sebuah contoh kasus)

Dengan rumusan UKT di atas, maka kami akan coba hitung berapa BKT penuh (biaya kuliah tunggal) yang belum dikurangi BOPTN yang harus dibayarkan mahasiswa di UGM per semesternya. Dapat dilihat di tabel berikut:

Prodi	Angka Standar Dikti	K1	K2	K3	BKT
Kesehatan	Rp 5.080.000	2,5	1,2	1	Rp 15.240.000
Sains		1,3	1,2	1	Rp 7.924.800
Teknologi		1,7	1,2	1	Rp 10.363.200
Seni		1,8	1,2	1	Rp 10.972.800
Lainya		1	1,2	1	Rp 6.096.000

Tabel 1: BKT di UGM sesuai prodi

Tabel di atas merupakan BKT per semester yang belum dikurangi BOPTN yang diterima UGM sebesar Rp 170 M. Setiap PTN memiliki BKT yang berbeda-beda sesuai dengan K1, K2, dan K3 nya, dan juga besaran BOPTN yang diterimanya. Untuk PTN dengan kualifikasi pada pendidikan keguruan juga terkena dampak UKT<sup>36</sup>.

Dengan logika Dikti yang mengatakan bahwa **“adil tidak boleh sama”**, maka di setiap prodi akan ada mahasiswa yang membayar penuh UKT tanpa dikurangi BOPTN, dan ada juga mahasiswa yang membayar gratis, serta ada juga mahasiswa yang membayar sesuai jenjang tingkat UKT yang diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing PTN.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi UGM, memang nominal UKT yang sudah bocor di kalangan mahasiswa tersebut tidak akan diterapkan kepada seluruh mahasiswa, tetapi ada mekanisme *discount* atau subsidi berdasarkan penghasilan orangtua. Mulai dari gratis biaya, hanya membayar 25% dari nominal UKT, 50% dari nominal UKT, dan 70% dari nominal UKT, dan ada yang membayar penuh nominal UKT di masing-masing jurusan.

<sup>36</sup> K1 untuk pendidikan teknik adalah 0,83. Untuk pendidikan non-teknik 0,81.



Kebijakan menentukan siapa mahasiswa yang memperoleh tingkat-tingkat UKT tersebut terdapat di Dekanat fakultas masing-masing.

Berdasarkan hasil diskusi publik juga maka dapat dilihat ada rencana kuota subsidi untuk UKT ini, yaitu:

1. UKT gratis akan diterapkan kepada 18% mahasiswa angkatan 2013
2. UKT berjenjang (mulai dari 25%, 50%, dan 70%) akan diterapkan kepada 29% mahasiswa angkatan 2013.
3. Sisanya 53% UKT penuh akan diterapkan kepada mahasiswa angkatan 2013

Logika yang ingin dibangun adalah subsidi silang. Gambarnya seperti ini, 53% mahasiswa pembayar UKT penuh atau tertinggi ini akan mensubsidi 18% mahasiswa pembayar UKT gratis, dan juga mensubsidi 29% mahasiswa pembayar UKT berjenjang.

### **Mengkritisi Kebijakan UKT**

Harapan Mendikbud dan Dirjen Dikti menginstruksikan UKT akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014. Dengan UKT, mahasiswa baru tak perlu membayar berbagai macam biaya, tetapi hanya membayar UKT yang jumlahnya akan tetap dan berlaku sama pada tiap semester selama masa kuliah. Mendikbud menjanjikan, tidak akan ada lagi biaya tinggi masuk PTN. Pemerintah akan memberikan dana BOPTN. Dana BOPTN meningkat dari tahun lalu Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2,7 triliun pada tahun ini.

Saat ini, semua PTN masih menghitung besaran UKT, termasuk UGM di dalamnya, yang kemudian hasilnya diserahkan ke Ditjen Dikti untuk mendapat persetujuan dan ditentukan besaran BOPTN yang akan diberikan kepada masing-masing PTN berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2012. Besar kemungkinan UKT yang dihitung PTN tidak akan banyak berbeda dengan biaya yang sudah berjalan saat ini. Kemungkinan PTN akan menghitungnya berdasarkan pembiayaan pendidikan tahun sebelumnya yang sudah telanjur mahal. Uang pangkal yang nilainya besar bisa saja diratakan untuk delapan semester sehingga kelihatan kecil.

Kalau kondisi ini yang terjadi, harapan UKT murah tidak akan terwujud, bahkan bisa jadi akan lebih memberatkan. Seharusnya PTN menghitung secara cermat UKT dengan melakukan efisiensi pada pos-pos pembiayaan yang prioritasnya rendah sehingga bisa menekan



nominal UKT. Tetapi hal itu tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh PTN karena sangat memberatkan dan berdampak pada mutu pendidikan

Untuk kasus UGM, memang sudah tidak lagi ada sumbangan-sumbangan, tetapi berdasarkan hitung-hitungan kasar yang telah dilakukan Kementerian Kajian Strategis BEM KM UGM dan Forum Kajian Strategis Se-UGM, dengan mengacu pada biaya kuliah total hingga lulus, maka tetap saja nominal UKT akan lebih mahal dari biaya kuliah sebelumnya. Disparitas biaya UKT dan biaya saat ini (non-UKT) tetap besar dan menjadi acuan kami dalam bersikap. Untuk apa disparitas biaya sebesar itu?

Sistem Non-UKT						
Prodi	SPMA 1 <sup>37</sup>	Biaya KKN	Biaya Wisuda	Total biaya per semester	Total semester	Total biaya hingga lulus
Politik dan Pemerintahan	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 1.980.000	8	Rp 22.540.000
Pend. Dokter	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 2.340.000	8	Rp 25.420.000
Sistem UKT						
Prodi	Tidak ada biaya sumbangan apapun			Total biaya per semester <sup>38</sup>	Total semester	Total biaya hingga lulus
Politik dan Pemerintahan	Rp 0			Rp 6.096.000	8	Rp 48.768.000
Pend. Dokter	Rp 0			Rp 15.240.000	8	Rp 121.192.000

Tabel 2: Perbandingan biaya sistem UKT dan sistem non-UKT di UGM (Hitungan Secara Kasar)

Tabel di atas membantu kita memahami disparitas antara sistem UKT dan non-UKT di UGM. Setiap kampus memiliki angka yang berbeda-beda, apalagi terkait dengan sistem non-UKT yang diterapkan. Ada kampus yang biayanya sudah paket, tetapi masih membayar

<sup>37</sup> SPMA (Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik) merupakan sumbangan awal yang dibayarkan mahasiswa UGM sekali di awal masuk kuliah. SPMA di UGM ada 5 tingkat, mulai dari tingkat 0 s/d tingkat 4. SPMA masing-masing prodi besarnya berbeda, tetapi semua prodi memiliki tingkat SPMA 0 dimana mahasiswa bersangkutan membayar SPMA sebesar Rp 0. Tabel ini menggunakan SPMA tingkat 1 yang kami yakini dibayarkan mayoritas mahasiswa di UGM

<sup>38</sup> Lihat Tabel 1: BKT UGM sesuai prodi



sumbangan gedung di awal, dsb, itu tidak dapat dikatakan UKT karena memang kebijakan UKT baru muncul pada 2012 dan baru akan implementasi pada 2013 ini. Pada hakikatnya ciri khas dari UKT adalah **tidak ada** biaya lain selain biaya yang tertera tersebut, apabila masih ada sumbangan lain maka itu **bukan** merupakan sistem UKT.

Untuk kasus UGM, UKT merupakan merupakan tarif uang kuliah yang mengintegrasikan tiga komponen pembayaran: SPMA, SPP, dan BOP. Besar UKT ditentukan dengan menghitung satuan biaya dalam satu semester. Analisis satuan biaya memberi dasar untuk menghitung biaya pendidikan seorang mahasiswa selama mengikuti studi yang mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri atas biaya tenaga kerja langsung berupa gaji & honor dosen, bahan habis pakai pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran langsung. Sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya SDM manajerial dan non dosen, sarana dan prasarana non pembelajaran, pemeliharaan, serta kegiatan pengembangan institusi untuk penelitian, kemahasiswaan, dan pengembangan program.

Tetapi SPMA yang digunakan untuk menghitung rumusan UKT ini mengadopsi nominal SPMA 4 atau SPMA tertinggi di jurusan masing-masing. Hal tersebut yang membuat nominal UKT menjadi mahal.

Karena sistem UKT ini telah menghapus SMPA dimana pendapatan terbesar PTN setiap tahun terdapat di sana, maka akan ada pengurangan biaya langsung dan tidak langsung tersebut, dan ini akan merugikan kinerja mahasiswa, baik untuk penelitian dan organisasi kemahasiswaan, dosen, dan karyawan di lingkungan PTN karena akan memotong bahkan menghapus insentif biaya langsung tersebut. Walaupun Permendikbud yang mengatur BOPTN sudah direvisi menjadi Permendikbud Nomor 4 Tahun 2013, siapa yang bisa memastikan semua berjalan sesuai rencana, karena revisi tersebut hanya mengatur tentang alokasi BOPTN untuk pegawai negeri non-sipil.

Memang trend BOPTN akan dianggarkan naik setiap tahun mengikuti trend APBN yang selalu naik sehingga otomatis anggaran tetap 20% untuk pendidikan nasional juga akan naik, akan tetapi seperti pengalaman yang telah lalu, mekanisme pencairan BOPTN tidak pernah dikatakan ideal seperti yang tertera dengan indah di peraturan. Ada banyak penundaan yang terjadi, dan mekanisme pelaporan keuangan dari PTN ke pemerintah yang hanya diberikan tenggat satu bulan setelah dana cair, seperti kasus pada 2012. Hal yang tidak masuk di akal, dan



sangat membingungkan pihak PTN sebagai pengelola keuangan dari negara.

Kami diancam oleh pihak Dikti apabila UU Nomor 12 Tahun 2012 berhasil dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka BOPTN akan hilang. Kami pikir amanat negara untuk bertanggungjawab terhadap pendidikan nasional pada umumnya, dan pendidikan tinggi pada khususnya adalah tugas negara sebagai penyelenggara pendidikan. Jadi, apabila UU PT tersebut batal dan mengilangkan status hukum BOPTN, maka kenapa harus melupakan amanat konstitusi untuk mengalokasikan 20% untuk pendidikan dari total APBN negara kita? Kita adalah negara hukum, tetapi bukan berarti hukum menjadi kaku dan dapat membuat diskriminasi baru, kita bisa membatalkan hukum dan merevisi hukum, karena ada MK sebagai bentuk dari institusi demokrasi.

### **Rekomendasi Sikap BEM KM UGM dan BEM SI**

Pendidikan adalah hak setiap warganegara untuk memperolehnya, dengan kualitas dan kuantitas yang setara. Termasuk juga pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi dalam pembayaran. Amanah UUD haruslah menjadi dasar semua kebijakan yang mengatur masalah publik, apalagi masalah pendidikan sebagai kunci sukses peradaban bangsa.

Untuk membatalkan UKT, maka yang harus diserang adalah UUPT, dan memang saat ini UUPT ini statusnya sedang disidangkan oleh Komite Nasional Pendidikan (KNP) di MK. UKT adalah konsekuensi langsung UUPT. Sudah banyak kajian tentang UUPT yang mengharuskan orang-orang yang peduli akan nasib pendidikan di Indonesia untuk bergerak.

Rekomendasi kedua adalah, terkait dengan kuatnya negara saat ini dan kondisi pergerakan kita, mahasiswa, yang belum terkonsolidasikan dengan baik lewat BEM SI, ditambah mengingat waktu yang tinggal hitungan bulan untuk proses implementasi dan banyaknya isu-isu nasional seperti BBM dan kepemimpinan nasional pada 2013 dan menjelang 2014 ini, maka kami menghimbau untuk mendesak setiap PTN menentukan dengan tegas kuota-kuota jenjang UKT untuk memastikan keadilan dan transparansi publik. Tentunya kuota yang ada haruslah mendukung masyarakat miskin untuk dapat mengakses pendidikan tinggi, bukan malah menutupnya. Bukan malah semakin



banyak yang membayar penuh UKT dan minimnya UKT dengan subsidi dan gratis di PTN.

Rekomendasi ketiga adalah mengawal beasiswa Bidik Misi yang saat ini sudah berjalan dengan cukup sukses. Jangan sampai beasiswa yang bagus ini hilang karena ada kebijakan baru tentang UKT. Pemerintah menjanjikan penerimaan beasiswa Bidik Misi diperbanyak, dan kita harus mengawal itu untuk akses yang murah dan tetap berkualitas untuk pendidikan tinggi di Indonesia.

Terakhir, mari kita gaungkan hastag #TolakKuliahMahal dan gerakan **Menolak Kuliah Mahal** sebagai salah satu gerakan di BEM SI.



# **ANALISA KOMPREHENSIF (EKONOMI, POLITIK, DAN AGRARIA) TERHADAP CITA-CITA KETAHANAN DAN KEDAULATAN PANGAN**

***KEMENTERIAN KAJIAN STRATEGIS BEM KM UGM 2013***

Ketika anak petani disekolahkan tidak untuk menjadi petani. Lapangan pekerjaan di luar petani dan pertanian menjadi tidak seksi. Lahan pekerjaan ini ditinggalkan, dan semua beralih ke kota untuk meraup Rupiah yang menggiurkan. Mengapa mereka kehilangan minat pada pertanian? Adakah pemerintah memiliki kebijakan serius untuk meningkatkan produksi pangan ditengah hilangnya minat warga negara pada pertanian? Logikanya adalah bagaimana produksi ditingkatkan apabila SDM-nya sudah tidak memiliki hasrat terhadap lahan ini?

Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia, yang tentunya membutuhkan asupan pangan yang juga besar. Ironis, kebutuhan untuk memenuhi ketahanan pangan di dalam negeri dilakukan melalui kebijakan impor. Kita masih tidak mampu memproduksi pangan untuk diri kita sendiri.



Begitupun dengan kebutuhan akan minyak bumi. Mengapa semua itu terjadi?

### **Rupiah Melemah: Menyadarkan Bobroknya Kita!**

Nilai tukar rupiah yang melemah hingga mendekati Rp 12.000 per 1 USD merupakan sebuah tamparan yang menyadarkan kita bahwa Indonesia begitu tergantung dengan bahan-bahan yang dibeli dari luar negeri dengan kurs Dollar. Kemudian kita bertanya mengapa Indonesia bisa begitu terpengaruhnya oleh Dollar?

Padahal kita yang bukan kalangan ekonom tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Apalagi orang-orang kecil di desa, para buruh tani, tukang becak, dan semua orang-orang kecil di sana-sini yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ekonomi makro yang ribet dan melangit. Kita pun menjadi sadar, sudah dalam keadaan babak belur karena Rupiah melemah (lagi), bahwa kita mengimpor segala jenis kebutuhan hidupan sehari-hari. Mulai dari kedelai untuk tempe hingga mesin pesawat terbang yang digunakan Garuda Indonesia. Mulai dari mainan murahan buatan Cina hingga Ferrari terbaru buatan Italia.

Tetapi tulisan ini tidak akan membahas semua itu dengan sangat terperinci. Tulisan ini hanya ingin membuka mata para pembaca bahwa Indonesia sebenarnya bobrok tanpa diketahui oleh warga negaranya sendiri, bahkan pemerintahnya sendiri! Kita sadar, dan seharusnya masih bersyukur karena sadar sebelum kiamat, bahwa pintu masuk menganalisa semua ini ada pada pertanian. Pertanian menjadi sebuah “lubang untuk mengintip” kebijakan negara yang salah sasaran dan penuh pragmatisme dalam memenuhi urusan perut warga negaranya. Dan kita akan tahu, bahwa masalah pertanian ini sangat ada kaitanya dengan masalah kebijakan pertanahan (tenurial) yang sudah diterapkan sejak rezim Orde Baru Soeharto menggulingkan rezim Orde Lama Sukarno yang budiman, dan hingga era desentralisasi dan otonomi daerah yang sarat kepentingan bisnis-politik kotor.

### **Cita-Cita Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan**

Ketahanan pangan adalah cita-cita luhur Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Merupakan amanat konstitusi untuk mensejahterakan kepentingan umum. Tetapi ketahanan tidak akan terjadi tanpa keadulatan pangan. Ibarat motor tanpa bahan bakar. Keduanya merupakan satu kesatuan untuk memenuhi kebutuhan



pangan rakyat Indonesia, keduanya merupakan masalah sosial-ekonomi Indonesia. Keduanya merupakan tanda bahwa Indonesia benar-benar merdeka dalam arti sesungguhnya. Keduanya adalah masalah politik kebijakan agraria, khususnya tenurial.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (FAO, 1995). Menurut Organisasi Pangan Sedunia (FAO), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketahanan pangan berarti akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat.

Hasil dari konferensi FAO, *World Food Summit 2006*, menyebutkan bahwa ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan yang sesuai dengan nilai-nilai atau budaya setempat.

Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhi, yaitu *pertama* setiap saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman, merata, dan terjangkau. *Kedua*, setiap rumah tangga, setiap saat, mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai pilihannya, untuk menjalani hidup sehat dan produktif.

Konsep ketahanan pangan tersebut memberi penekanan pada akses setiap rumah tangga dan individu terhadap pangan yang cukup, bermutu, bergizi, dan berimbang, serta harganya terjangkau, meskipun begitu setiap individu yang menjadi anggota keluarga dalam suatu rumah tangga mendapat akses pangan yang sama sesuai kebutuhan individu tersebut (Widodo, 2001: 1-8).

Implikasi kebijakan dari konsep pangan ini adalah bahwa pemerintah mempunyai dua kewajiban, yaitu menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi. Kedua hal ini merupakan kewajiban utama negara kepada rakyatnya. Tetapi, kondisi pangan di Indonesia masih jauh dari cita-cita ketahanan pangan karena tidak ada kedaulatan pangan, dan salahnya paradigma kebijakan politik pangan, serta kebijakan lain yang pragmatis dan berdampak atas masalah pangan saat ini.

Mengapa cita-cita bangsa belum terwujud untuk ketahanan dan kedaulatan pangan? Kajian ini akan mengurai kebijakan politik pangan dalam bidang agraria, masalah impor pangan yang terus menggila, konsep subsidi bagi petani, dan juga implikasi perdagangan bebas di era



neoliberalisme, utamanya dampak perjanjian *China-Asean Free Trade Area* (ACFTA) dalam bidang holtikultura. Semua akan dibingkai dengan kerangka analisa ekonomi-politik dan akumulasi kapital dan perampasan.

### **Kapitalisme Negara Pasca Orde Baru: Analisa Ekonomi-Politik**

Reformasi ekonomi-politik di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru Soeharto adalah perubahan peran sebagai agen pembangunan dan relasi negara dengan para kapitalis. Reformasi ekonomi adalah upaya agar negara tidak lagi berperan dominan sebagai pemilik modal sekaligus investor utama dalam proses pembangunan ekonomi. Guna mengatasi peran kosong yang ditinggalkan negara, swasta didorong melakukan privatisasi yang sesuai dengan prinsip pasar bebas (Hiariej, 2006: 115)

Meski begitu, negara masih berperan sebagai regulator yang menjamin agar pasar mampu bekerja dengan optimal, sekaligus menjamin relasi yang profesional antara negara dengan kapitalis. Karena itu, negara masih mendorong privatisasi dengan mengambil kebijakan seperti disiplin fiskal, mengurangi belanja publik (subsidi), reformasi pajak, liberalisasi keuangan (finansial), nilai tukar yang kompetitif, mendorong investasi asing, dan lain sebagainya.

Pada saat yang sama, reformasi ekonomi mensyaratkan adanya perubahan dalam relasi antara negara dan kapitalis. Model relasi yang tidak profesional<sup>39</sup>, bergantung pada koneksi personal, harus dihentikan karena berlawanan dengan prinsip pasar bebas yang efektif dan efisien. Negara harus bekerja secara profesional dengan para kapitalis berdasarkan standar-standar tertentu yang mendukung produktifitas. Meski begitu, relasi antara negara dengan kapitalis memiliki pola yang unik, yaitu adanya tarik-menarik antara interkasi profesional dan tidak profesional (Rahardjo, 2012: 30).

Interaksi tidak profesional adalah hubungan negara dengan kapitalis yang berlandaskan koneksi personal yang intens. Sedangkan Interaksi profesional adalah pola relasi yang berdasarkan mekanisme

<sup>39</sup> Istilah asli adalah subyektif dan obyektif. Subyektif adalah relasi parton-klien, sangat terkait erat dengan budaya KKN (kourpsi, kolusi, dan nepotisme) yang banyak terjadi di era Orde Baru. Sedangkan obyektif adalah relasi yang tidak ada unsur KKN atau sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan efisiensi dan efektifitas persaingan. Penulis merubah istilah menjadi lebih mudah dicerna. Lihat Hafid Rahardjo, *Sengketa Perubahan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi-Politik (2008-2012)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Yogyakarta, 2012: 26-44).



pasar yang wajar. Meski begitu, relasi dinamis antara negara-kapitalis yang bercorak profesional dan tidak profesional masih terus terjadi. Saat terjadi krisis, muncul peluang agar relasi ini bisa digerakkan menuju relasi yang tidak profesional. Saat ekonomi telah pulih dan tumbuh dengan positif, maka tendensi untuk merestorasi relasi negara-kapitalis secara tidak profesional akan selalu muncul (Hiariej, 2006: 115-117).

Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrem terkait relasi antara negara-kapitalis. Indonesia menjadi negara yang dihuni oleh para oligarki baik di sektor ekonomi dan politik. Mereka sanggup bertahan karena proses rekonfigurasi yang terjadi secara struktural dalam proses perubahan politik. Mereka sanggup memanfaatkan perubahan menuju arah demokratis tersebut untuk menguatkan basis material mereka (Hadiz dan Robinson, 2004: 188-189).

Tradisi demokrasi yang terjadi di Indonesia masih amat rentan menghasilkan struktur kekuasaan yang menegaskan dominasi oligarki-oligarki ini, baik dalam ranah ekonomi maupun politik. Proses transisi demokrasi memang terus bergulir, dimana pemerintah yang otoriter sangat sulit meraih legitimasi untuk berkuasa. Para oligarki ini sanggup memperbarui relasi patrimonial yang terjadi pada era Orde Baru agar sesuai dengan sistem politik baru yang demokratis (Hadiz dan Robinson, 2004: 215-217).

Konsep ekonomi-politik ini kemudian memunculkan perselingkuhan bisnis-politik antara swasta yang membutuhkan lahan pertanian dengan birokrasi/politisi predatoris yang ingin meraup untung dengan konsesi-konsesi hak guna lahan.

### **Perampasan Tanah: Analisa Akumulasi Kapital Karl Marx**

Akumulasi dan sirkulasi modal pada skala dunia pada zaman globalisasi saat ini telah sampai pada strategi pembentukan kawasan-kawasan pasar bebas (*free-trade zone*) dimana andil pemerintah begitu penting dalam mengukuhkan hak-hak kepemilikan pribadi (*property rights*), mengatur arus transaksi barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, dan mendisiplinkan masyarakat pekerja dan pelaku bisnis.

Dalam konteks ini, perlu dipahami benar konsekuensi dari penyebaran paham neoliberalisme yang memuja pasar dan perdagangan bebas (*free market and trade*) terhadap konsentrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (tenurial), kekayaan alam, dan wilayah.



Kita perlu secara seksama mempelajari bagaimana cara pemerintah Indonesia bekerja secara terus-menerus dengan dibentuk oleh apa yang Karl Polanyi sebut sebagai “gerakan pasar”<sup>40</sup>. Ekonomi pasar kapitalistik bekerja sama sekali berbeda dengan ekonomi pasar sederhana dimana terjadi tukar-menukar barang melalui tindakan belanja dan membeli yang diperantarai oleh uang. Ekonomi kapitalistik bekerja melalui hubungan-hubungan sosial yang saling melekat dengan sistem ekonomi ini (Polanyi, 2009: 57).

Dalam konteks ini sangat penting untuk memahami apa yang Karl Marx (Marx dalam Rahman, 2012: 134) kemukakan mengenai “akumulasi primitif”. Proses akumulasi primitif ini dapat dilakukand dengan mendudukan proses perampasan tanah rakyat dan petani untuk menciptakan tenaga kerja bebas.

Badan-badan pemerintah dan perusahaan-perusahaan telah merebut paksa tanah denga pendekatan sistemik tanpa disadari oleh pemilik tanah yang sah. Perusahaan dan badan pemerintah tersebut telah memagari tanah rakyat, dan mengeluarkan penduduk bumi putera dari wilayah tempat mereka memulai eksporasi dan pembangunan usaha industri dan properti.

Pemutusan hubungan itu pada intinya adalah penghentian secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alam tertentu. Tanah dan kekayaan alam itu kemudian masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan kapitalistik. Jadi, perubahan dari alam menjadi sumber daya alam ini berakibat sangat pahit bagi rakyat yang harus tersingkir dari tanah asalnya dan sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja bebas/buruh upahan (Rahman, 2012: 135).

Semua hal tersebut seperti yang pernah terjadi pada masa kolonial dahulu yang berujung pada proses paksa menciptakan orang-orang yang tidak lagi bekerja terkait pada tanah dan alam. Orang-orang ini pada gilirannya hidup hanya dengan mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya saja, lalu menjadi para pekerja bebas. Sebagian mereka kemudian pergi dari tanah mereka di desa-desa (yang sudah mereka jual atau sudah dikonversi untuk usaha perusahaan besar) ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, hanya sebagian kecil saja yang bisa terserap dalam dunia pekerjaan industrial. Selebihnya

---

<sup>40</sup> Lihat Karl Polanyi, *Transformasi Besar: Asal-Usul Ekonomi Zaman Sekarang* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009)



hidup dalam ekonomi informal, setengah penganggur, dan penganggur dalam kantung-kantung kemiskinan di kota-kota.

### **Gagalnya Strategi Pembangunan: Konversi Lahan Pertanian**

Perubahan iklim ekstrem akibat pemanasan global menimbulkan aneka bencana alam yang melanda kawasan Indonesia. Perubahan iklim itu diikuti dengan melonjaknya harga pangan dan energi disertai dengan krisis finansial global yang berdampak luas di Indonesia. Perubahan iklim, kenaikan harga pangan dan energi, serta krisis finansial merupakan tiga bencana besar yang menghantam Indonesia dalam 20 tahun terakhir.

Ketiga hal tersebut menjadi “jeritan zaman” bagi perubahan tata kelola kebijakan politik pangan (dan juga energi)<sup>41</sup> Indonesia sekarang ini. Kini, Indonesia harus mengimpor bahan-bahan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Juni 2011, nilai impor pangan Indonesia menembus 5,36 miliar dollar AS atau setara Rp 45 triliun rupiah. Sebanyak 28 komoditas pangan diimpor itu antara lain beras, jagung, kedelai, gandum, terigu, gula pasir, gula tebu, daging sapi, daging ayam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, telur, kelapa, lada, teh, kopi, cengkeh, cabai segar dingin, cabai kering tumbuk, cabai awet, tembakau, dan ubi kayu (Soedarmanta, 2012: 2). Begitupun dengan hasil laut, Indonesia kini harus mengimpor ikan kembung, layang, teri, dan tongkol, yang notabene kita bisa produksi sendiri. Masih wajar apabila Indonesia mengimpor ikan salmon, dan beberapa jenis ikan yang tidak diproduksi di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa 53 persen garam, 60 persen kedelai, 30 persen daging, 70 persen susu harus diimpor. Meskipun rata-rata inflasi sepanjang 2012-2013 dapat ditekan, tetapi harga-harga barang kebutuhan pokok terus melambung. Harga beras naik 120 persen, kedelai 85 persen, telur 100 persen, cabai 120 persen, daging 90 persen, dan jagung 700 persen (Soedarmanta, 2012: 3). Belum lagi kasus kuota impor daging sapi dimana terdapat mafia impor pangan, kebijakan kenaikan harga BBM premium dan solar dua bulan terakhir, dan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terhitung sejak akhir

---

<sup>41</sup> Kajian lebih jauh tentang energi dan liberalisasi sektor hilir Migas silahkan lihat kajian sektor energi di website resmi BEM KM UGM 2013, Faisal A. Kamil, *Kajian Bahan Bakar Minyak (BBM): Pencabutan Subsidi BBM = Implementasi Neoliberalisme Sektor Migas*, 2013.



Agustus 2013 ini, semakin akan memprihantinkan harga pangan impor tersebut. Tidak bisa dibayangkan!

Fakta di atas merupakan implikasi dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan kemakmuran rakyat dengan paradigma pertumbuhan ekonomi (*economic growth paradigm*). Pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi terlanjur dipilih menjadi strategi pembangunan selama ini, diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi dan politik secara cepat dan instan. Kebijakan itu tumbuh ketika *growth paradigm* yang ditawarkan negara-negara barat sedang menjadi tren. Bahkan paradigma ini kemudian berkembang menjadi ideologi untuk memecahkan keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan. Karena diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu menciptakan peluang kerja yang luas, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan.

Paradigma *Pro-Growth* mengakibatkan negara memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada investor atau pihak yang memiliki akses dan aset kekuasaan untuk mengembangkan investasi (Chaniago, 2012), khususnya pangan hortikultura. Deregulasi yang pro-investasi (khususnya untuk lahan produktif pertanian) membutuhkan stabilitas politik. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung investasi sehingga digunakanlah instrumen represif, koersif, dan korporatisme negara<sup>42</sup> untuk mendukung investasi (Robinson: 2013, Hadiz dan Robinson: 2004). Sejak era Orde Baru, strategi ini disebut dengan “Trilogi Pembangunan”, tetapi saya lebih senang menyebutnya sebagai “Tripetaka Pembangunan” atau tiga petaka pembangunan.

Kapitalisme adalah nilai dasar Orde Baru dan menjadi instrumen “tripetaka pembangunan” tersebut. Proyek kapitalis agribisnis Orde Baru, melalui proyek revolusi hijau, agro industri eksploitasi hutan, dan eksploitasi sumberdaya agraria lainnya membuka diri terhadap agen kapitalisme internasional, yaitu Bank Dunia, *International Monetary Fund* (IMF), dan *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI). Urusan Agraria diturunkan menjadi dibawah Direktur Jenderal di bawah Menteri Dalam Negeri. Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 tetap berlaku, tetapi fungsinya dikerdilkan dengan UU lain<sup>43</sup>. Pada

<sup>42</sup> Studi lengkap silahkan lihat Richard Robinson, *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), Vedi R. Hadiz, *The Rise of Capital dan Keniscayaan Ekonomi-Politik*, (Jurnal Prisma Volume 32, 2013: 3-19).

<sup>43</sup> UU dan peraturan yang pro-investasi dalam sektor agraria adalah: UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 8 Tahun 1968 tentang PMDN, UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-



akhirnya *land reform* yang merupakan nilai dasar UUPA 1960, berubah menjadi kegiatan teknis dan regulasi yang mendukung strategi pembangunan kapitalis yang mengembangkan Hak Guna Usaha, PTUP, Konsesi Kuasa Pertambangan, dan mereduksi persoalan keagrariaan menjadi persoalan pertanahan belaka.

**Tabel 1.**  
**Rekapitulasi Izin Lokasi Perumahan di Bogor Tangerang Bekasi**  
**(Botabek)**  
**Hingga Desember 1996**

No	Wilayah	Jumlah SK	Izin Lokasi (Ha)	Penguasaan Tanah		Areal Sudah Dibangun	
				(Ha)	%	(Ha)	%
1	Kab. Bogor	492	43.842	13.664	31.17	8.704	19.85
2	Kota Bogor	122	2.462	182	7.40	157	6.38
3	Kab. Tangerang	374	44.094	21.765	49.52	2.306	6.46
4	Kota Tangerang	207	8.359	1.522	18.21	674	8.06
5	Kab. Bekasi	397	22.874	9.506	41.56	4.768	20.84
<b>Jumlah</b>		<b>1.592</b>	<b>121.629</b>	<b>46.639</b>	<b>38.00</b>	<b>16.609</b>	<b>13.86</b>

Sumber: Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Andrinof Chaniago, *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru* (Jakarta: LPES, 2013)

Data di atas memang data pada 1996 di mana Orde Baru masih berkuasa, tetapi kita bisa bayangkan dengan kondisi saat ini dimana daerah Jabodetabek sudah menjadi surga properti. Data terkait perizinan pembukaan lokasi di atas memberi gambaran kita tentang-tantang daerah-daerah yang dirancang untuk menjadi zona pertumbuhan baru yang dirancang sejak era ekonomi pasca-minyak pada 1990-an hingga saat ini. Perusahaan properti menjadi primadona hingga hari ini, dimana lahan produktif semakin diubah fungsinya menjadi perumahan-perumahan mewah di kota-kota besar, dan diubah menjadi lahan usaha industri dan pertambangan di daerah-daerah kaya SDA di seluruh wilayah Indonesia.

Bagaimana Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan dan berkedaulatan pangan apabila semua lahan produktif dijadikan usaha-

---

ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, PP No. 21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan menjadi UU, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan maupun, dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Semua UU dan peraturan ini sarat kepentingan bisnis MNC/TNC dan mengkerdilkan UUPA 1960.



usaha besar? Konsep Revolusi hijau<sup>44</sup> hanya membuat Indonesia sempat swasembada beras selama 5 tahun pertama implementasinya pada 1980-an, tetapi setelah itu mendapat kritik sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Revolusi hijau juga mengakibatkan ketergantungan petani pada produk industri bibit, pupuk, dan insektisida. Ketergantungan itu juga berkorelasi dengan biaya produksi yang semakin tinggi. Biaya produksi menjadi sebab dari pelepasan aset oleh petani, dan kemudian petani menjual tanahnya<sup>45</sup>.

Mungkin kita ada yang berpikir bahwa reformasi 1998 yang mengakhiri Orde Baru telah merubah semua itu. Sama sekali tidak. Korporatisme negara dan kepentingan bisnis di sektor pertanian tidak lagi bergantung pada patron utama mereka, yaitu negara Orde Baru. Mereka kini memiliki patron baru dan beradaptasi di zaman desentralisasi dan otonomi daerah. Korupsi politik, perselingkuhan kelompok bisnis dan politik kini terjadi di ranah daerah mengikuti pola lingkungan yang demokratis, dimana permainan konsesi, izin, penyelewengan, mafia dan makelar impor<sup>46</sup> komoditas pangan, serta penyuaipan terus berlangsung dengan cara dan mekanisme baru. Mereka itu yang disebut dengan “mafia kerah putih”

Sekarang kita renungkan, apa dampak positif dari kebijakan pembangunan pro-invesatsi tersebut? Jawabannya tidak ada. Efek langsung yang diharapkan para ekonom perancang kebijakan tersebut, yaitu “*teori trickle down effect*” tidak pernah terjadi. Data yang berbicara. Data BPS pada Februari 2011 menunjukkan bahwa terdapat 113,74 juta angkatan kerja. 9,26 juta masuk kategori pengangguran terbuka, kemudian 31,4 juta masuk kategori setengah pengangguran.

<sup>44</sup> Revolusi hijau diawali oleh Ford dan Rockefeller Foundation, yang mengembangkan gandum di Meksiko (1950) dan padi di Filipina (1960). Revolusi hijau menekankan pada tumbuhan serealisa seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain. (serealisa adalah tanaman biji-bijian). Revolusi Hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan fundamental dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950-an hingga 1980-an di banyak negara berkembang, terutama di Asia. Sudah menjadi wajar apabila program ini memiliki kepentingan bisnis perusahaan MNC/TNC di bidang teknologi pertanian.

<sup>45</sup> Bagi petani yang tetap memproduksi bahan pangan, maka ongkos produksi yang mahal mengakibatkan tingginya harga pangan yang diproduksi dalam negeri, sehingga cenderung menguntungkan untuk mengambil langkah impor bagi pemerintah dikemudian hari.

<sup>46</sup> Untuk sektor pertanian terdapat kasus terbaru yang menggepalkan, yaitu kasus kuota impor daging sapi yang melibatkan petinggi partai politik Islam yang dinilai paling islamis, dan kini statusnya masih belum selesai. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi terdapat kasus penyuaipan Kepala SKK Migas yang melibatkan perusahaan distribusi BBM solar asal Singapura, yang hingga detik ini juga masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK.



Sehingga totalnya mencapai 40,66 juta pengangguran total. Dan perlu diketahui bahwa 43,03 juta (sekitar 41,18%) berada di sektor pertanian. Ini yang disebut dengan gagalnya strategi pembangunan pro-investasi, utamanya di sektor pertanian.

Dampak langsungnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, semakin berkurangnya lahan untuk pertanian yang digunakan untuk non-pertanian (usaha bisnis, industri, pertambangan). *Kedua*, melambungnya harga kebutuhan pokok karena produksi dalam negeri kecil karena semakin sempitnya lahan. *Ketiga*, untuk menutupi kecilnya produksi dan tingginya permintaan, maka dilakukanlah kebijakan impor yang memang harganya lebih murah. *Keempat*, serangan pendadak spekulasi krisis finansial membuat semua komoditas impor menjadi mahal karena lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. *Kelima*, kepentingan bisnis perusahaan multinasional menjadikan petani menjadi buruh tani tanpa tanah. *Keenam*, kerusakan lingkungan. *Ketujuh*, katahanan pangan, apalagi keadulatan pangan ibarat “jauh panggang dari api”.

### **Bisnis Lahan dan Mimpi Reforma Agraria**

UUPA 1960 telah mengatur misalnya, melarang orang memiliki tanah melebihi kebutuhan (pasal 7), melarang orang menelantarkan tanah (pasal 13), dan tidak membolehkan monopoli atas tanah. Selain itu, UUPA juga mengharuskan agar kedudukan kaum ekonomi lemah diperhatikan (pasal 11)<sup>47</sup>.

Apabila kita mengacu kepada beberapa ketentuan di atas, maka apa yang berlangsung dalam sistem penguasaan tanah saat ini setidaknya-tidaknya telah nampak kecenderungan monopoli, penguasaan berlebihan, penelantaran tanah, dan bahkan meninggikan harga tanah. Apabila semua telah dikonversi menjadi lahan properti dan industri, bukan hanya tanah produktif untuk pertanian yang hilang dan mengakibatkan Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan panganya sendiri, tetapi juga semakin mahalnya harga rumah. Bayangkan apabila semakin banyak penduduk, tetapi kebutuhan pangan tidak cukup dan tidak mampunya mayoritas memiliki rumah yang layak karena semua lahan digunakan untuk bisnis properti mewah dan industri-industri.

---

<sup>47</sup> Lihat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.



**Tabel 2.**  
**Penerbitan Izin Lokasi di Beberapa Daerah Strategis di Indonesia**

No	Provinsi	Luas (Ha)	Industri (Ha)	Perumahan (Ha)	Jasa
1	Aceh	230.119,54	191,29	5.752,89	405,13
2	Sumut	145.529,16	7.964,13	8.626,82	807,03
3	Jambi	87.604,47	1.434,41	105,07	0,62
4	Sumsel	486.911,46	171,47	195,89	138,83
5	Riau*	507.480,06	45.672,08	14.001,68	27.317,61
6	Jabar**	118.477,63	10.523,91	77.823,82	18.312,99
7	Jateng	6.202,38	3.565,22	1.596,87	126,17
8	Jatim	23.061,73	3.307,81	17.024,86	1.937,63
9	Kalbar	591.618,81	434,49	239,37	203,42
10	Kalsel	382.787,47	6.516,81	22.676,80	3.350,52
11	Kaltim	270.170,20	660,01	864,41	6,87
12	Lampung	60.180,34	269,69	908,81	1.452,02
13	Sulut	10.525,65	1.025,78	738,65	7.371,77
14	Sulsel	75.170,36	82,29	4.420,41	337,79

\*Sebelum pemekaran

\*\*Sebelum pemekaran

Sumber: Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1996 dalam dalam Andrinof Chaniago, *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru* (Jakarta: LPES, 2013)

Pada 1996 saja sudah sebegitu dibisniskan lahan-lahan produktif yang bisa digunakan untuk pertanian, apalagi pada masa sekarang. Semakin menjamurnya semua bisnis lahan dan konsesi lahan. Data-data angka di atas kadang-kadang juga digunakan untuk menunjukkan keseimbangan pertumbuhan antar berbagai proyek bisnis properti, industri, dan konsesi eksploitasi. Bayangkan saja Indonesia di seluruh wilayah provinsinya digunakan sebagai sumber mengeruk pajak dengan memberikan konsesi dan hak tambang. Dimana letak reformasi agraria yang diimpikan.

Belum lagi kita berbicara mengenai hak kuasa pengelolaan tanah untuk pertambangan di daerah-daerah di Indonesia. Miris melihat jutaan hektar lahan yang bisa digunakan untuk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan digunakan untuk menambang batubara, minyak bumi, dan semua kekayaan mineral Indonesia, dan dikuasai bukan oleh kita melainkan asing. Contoh adalah banyak tambang batubara di Kalimantan dan Sumatera. Penguasaan oleh PT Freeport terhadap ribuan hektare di Papua yang kaya.

Kementerian Pertanian pun memisahkan diri dari kerangka "reforma agraria", di mana soal agraria hanya menjadi tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hanya sebagai pemberi sertifikat tanah semata. Kementerian Pertanian lebih mengupayakan asistensi teknis



pertanian dan kredit untuk para penerima tanah-tanah yang didistribusi. Kementerian Pertanian memfasilitasi perusahaan-perusahaan raksasa bekerja mengembangkan *food estate* di sejumlah tempat, termasuk yang paling luas di Kab. Merauke dengan luas 500.000 Ha (Rahman, 2012: 108). Pemerintah sepertinya hanya ingin melayani kepentingan bisnis besar *food estate* untuk tujuan akumulasi pajak dan keuntungan semata.

Tabel 3.

### Konversi Lahan Sawah untuk Usaha Lain Sepanjang 1979-1999

P. Jawa	Konversi Per Tahun	Luar P. Jawa	Konversi Per Tahun
1.002.005 Ha	81.376 Ha	635.459 Ha	31.273 Ha
<b>Total Keseluruhan 1.627.514 Ha</b>			

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

### Peran Birokrasi dan Politisi Predatoris

Pada hakikatnya, Indonesia dibuat merdeka oleh para *founding father* adalah untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengatuh, dan penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing<sup>48</sup> (Harsono, 1994: 53). Peraturan dasar dalam UUPA 1960 telah mendasarkan diri pada konsepsi politik hukum Hak Menguasai dari Negara (HMN). Pada hakikatnya konsep ini sangat ideal apabila mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, tetapi pada prakteknya terdapat penyelewengan yang makin akut sejak masa Orde Baru Soeharto dan masih dilanjutkan hingga kini.

Kita dapat menyaksikan bahwa tidak henti-hentinya bagaimana perampasan tanah itu dibenarkan melalui proses yang diistilahkan oleh Noer Fauzi Rahman sebagai “negaraisasi tanah-tanah rakyat”<sup>49</sup>. Proses memasukkannya tanah rakyat sebagai kategori “tanah negara”, kemudian atas dasar definisi tersebut pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian ESDM, SKK Migas (Dulu BP Migas) memberikan hak-hak baru untuk badan-badan usaha produksi maupun konservasi.

<sup>48</sup> Pidato Pengantar Menteri Agraria (Mr. Sadjarwo) di dalam sidang DPR-GR pada 12 September 1960.

<sup>49</sup> Lihat Noer Fauzi Rahman, *Land Reform: Dari Masa Ke Masa* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012).



Pengadaan lahan tanah yang produktif untuk usaha dalam produksi pertambangan, kehutanan, perkebunan, perumahan, dan kawasan industri memberikan kemungkinan luas bagi para birokrat dan politisi pemburu rente untuk berkorporasi. Dengan logika pembangunan yang seperti itu, maka penyalahgunaan penggunaan kewenangan untuk membuat keputusan publik tertentu, yaitu berupa pemberian konsesi-konsesi untuk penguasaan tanah, pengusahaan hutan, pengerukan barang tambang, eksploitasi gas dan minyak bumi, dan lain sebagainya. Pengusahaan lahan untuk hal-hal seperti itu memang mendatangkan devisa berupa pajak, tetapi kita kehilangan motor penggerak untuk ketahanan pangan dan keduallatan pangan dan energi. Ini yang disebut oleh Andrinof Chaniago<sup>50</sup> sebagai kebijakan pembangunan yang pragmatis.

Birokrasi dan politisi itu kemudian bersekongkol dengan pemodal asing dan domestik untuk menggerogoti kekayaan publik. Sifat lain dari mereka adalah predatoris. Pembukaan hutan tropis untuk pembalakan kayu secara besar-besaran dengan hak-hak pengusahaan hutan, atau pemberian konsesi pertambangan merupakan contoh yang sangat gamblang.

Birokrasi dan politisi predatoris tersebut tetap membutuhkan justifikasi dari suatu ide dasar mengenai pembangunan. Mereka mengaku mengabdikan diri untuk pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang terbukti menyesatkan. Mereka menjadi alat teknokratik dari kekuatan ekonomi-politik yang mendominasi negara dan masyarakat. Makanya tidak heran apabila Pemilukada-Pemilukada di daerah yang kaya tambang seperti di Kalimantan seringkali beredar gosip bahwa semua biaya calon gubernur atau walikota didanai oleh perusahaan tambang. Perselingkuhan bisnis dan politik semacam ini sebagai bukti bahwa ada semacam kontrapretasi ilegal antara pemenang Pemilukada dengan perusahaan tambang yang menerima dan ingin tetap melestarikan konsesi. Itu merupakan kasus untuk perusahaan tambang, masih banyak kasus yang berkelindan dengan perusahaan properti yang memiliki kepentingan pengembangan lahan di banyak daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Bayangkan apabila semua penguasaan tanah pragmatis seperti itu digunakan untuk pertanian produktif.

---

<sup>50</sup> Lihat Andrinof Chaniago, *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 2012).



Sekarang kita analisa dengan menggunakan data terhadap perluasan lahan kelapa sawit. Bagaimana mungkin lahan pertanian terus berkurang, tetapi lahan untuk pengusahaan lain terus meluas. Pada hakikatnya kelapa sawit memang memberikan devisa yang besar bagi negara, tetapi sekali lagi kebijakan pajak pragmatis (dengan konsesi perusahaan-perusahaan) yang menjual lahan ini mengakibatkan berkurangnya lahan dan berdampak pada jauhnya mimpi ketahanan dan kedaulatan pangan.

**Tabel 4.**  
**Perkembangan Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit (2006-2010)**

Tahun	Areal (Ha)				Produksi (Ton)			
	Petani Mandiri	Negara	Swasta	Total	Petani Mandiri	Negara	Swasta	Total
2006	2.549.572	687,43	3.357.914	6.594.914	5.783.088	2.313.729	9.254.031	17.350.848
2007	2.752.172	606,25	3.408.416	6.766.836	6.358.389	2.117.035	9.189.301	17.664.725

Sumber: Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian 2010 dalam Serikat Petani Indonesia (SPI). *Hentikan Kebijakan Liberalisasi dan Korporatisasi Pertanian: Catatan Pembangunan Pertanian, Pedesaan dan Pembaruan Agraria 2010.*

Dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun terakhir produksi minyak kelapa sawit meningkat hampir lima kali lipat, dari sebesar 4,8 juta ton minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 1996 menjadi 19, 8 juta ton pada tahun 2010. Dimana hampir separuh dari perkebunan ini merupakan milik perusahaan-perusahaan swasta asing seperti Sime Darby, Wilmar dan Cargill (SPI, 2010: 8)

Total produksi kelapa sawit 80 persen ditujukan untuk ekspor, pada semester pertama tahun 2010, tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ialah India sebesar 36%, Uni Eropa 26%, Bangladesh 19%, dan China 13%. Dengan total nilai perdagangan kelapa sawit mencapai 10.366.610.000 US\$. Besarnya ekonomi kelapa sawit ini mendapatkan dukungan yang tidak sedikit dari pemerintah. Dari kebijakan hingga kemudahan kredit bagi para pengusaha sawit (SPI, 2010: 9).

Hal ini menjadi gambaran bagi kita besarnya eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini. Jika lahan pangan berkurang 13 persen dalam setahun terakhir, perkebunan sawit justru meningkat 4 persen pada periode 2009-2010. Di Sumatra Utara



misalnya 24.970 hektar atau sekitar 12,3 persen dari seluruh lahan swah nonirigasi yang ada di Sumatera Utara berubah menjadi perkebunan kelapa sawit (SPI, 2010: 9).

### **Praktek Desentralisasi Menyelamatkan atau Mememperbesar?**

Menurut penelitian dengan pendekatan ekonomi-politik yang dilakukan oleh Robinson dan Hadiz (2004), kebanyakan oligarki Indonesia yang terdiri atas birokrasi-politisi rente dan kawan-kawan pengusahanya berhasil melewati badai krisis finansial dan perubahan politik di masa transisi demokrasi yang dimulai pada 1998. Bahkan mereka kemudian dapat bekerja lebih baik lagi dalam tatanan politik yang demokratis. Mereka telah berhasil membentuk kembali diri mereka menjadi aktor-aktor demokratik melalui partai-partai politik dan parlemen yang mereka mainkan. Dengan demikian lembaga-lembaga demokrasi itu telah dipakai dan dibajak oleh oligarki lama yang merupakan eksponen utama dari rezim yang terdahulu (baca: rezim Orde Baru Soeharto)

Ketika kebijakan desentralisasi diterapkan mulai 2001, para oligarki pun berhasil menyesuaikan diri dan memanfaatkannya dan dengan mendesentralisasi kekuatan oligarkinya dengan membangun jaring-jaring baru dengan kekuatan lokal, termasuk pula dengan para “bandit-bandit dan preman politik dalam kepemimpinan partai-partai, parlemen, dan lembaga eksekutif yang kesemuanya mengendalikan agenda desentralisasi.

Dengan kebijakan desentralisasi yang berlangsung sejak 2001, maka kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk memberikan konsesi-konsesi berupa izin lokasi, perusahaan hutan skala kecil, konsesi eksploitasi tambang batu bara, dan mineral lainnya pada badan-badan usaha telah membuat pemburu rente berlipat ganda begitu cepat, membanyak, dan meluas di tingkatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Fakta yang sangat mengerikan!

### **Subsidi dan Kredit Pertanian, Peternakan, dan Perikanan**

Masalah di atas adalah masalah ekonomi-politik-agraria. Akan tetapi, ketahanan dan kedaulatan pangan tidak akan terwujud hanya dengan mengurai dan memecahkan masalah pangan di satu sisi, yaitu hanya soal reforma agraria. Terdapat dukungan dari subyek petani yang menghasilkan produk. Subyek petani disini merupakan usaha dorongan



untuk mempercepat ketahanan dan kedaulatan pangan. Dorongan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian subsidi sektor pertanian (pupuk dan kontrol harga) dan juga kredit untuk memudahkan sektor ini berkembang dan mengkadi usaha yang diminati warga negara.

Subsidi pertanian merupakan salah satu permasalahan pelik yang seakan tak kunjung usai. Pada satu sisi, subsidi ini dipandang oleh kaum neoliberal sebagai penghambat perdagangan, namun di sisi lain pemerintah tetap mempertahankan subsidi dengan berbagai kelemahan dalam mekanisme pemberiannya. Subsidi pertanian sempat dihapuskan pasca penandatanganan *Letter of Inten (Lol)* dengan IMF tahun 1998, yang kemudian tahun 2002 diberlakukan kembali, subsidi pertanian di Indonesia diberikan melalui subsidi input pertanian, seperti pupuk dan benih. Belum ada bentuk subsidi untuk hasil produk pertanian seperti subsidi untuk perlindungan harga produk atau jaminan kegagalan panen.

Subsidi bagi petani adalah hal yang penting untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Memang subsidi pupuk merupakan subsidi ketiga terbesar setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, tetapi mengapa tidak memiliki dampak yang signifikan. Subsidi pupuk memang penting untuk menekan harga pangan, akan tetapi harga pangan saat ini diserahkan pada mekanisme pasar. Seharusnya pemerintah memiliki aturan yang mengatur harga komoditas pangan. Kasus terakhir adalah melonjaknya harga kedelai, beras, bawang, daging sapi, dan daging ayam. Tanpa pengontrolan harga komoditas pangan, maka harga pangan akan fluktuatif tidak menentu yang seringkali harganya mahal tidak masuk akal.

Permainan kartel dan penyerahan pada harga pasar membuat subsidi pupuk tidak memiliki dampak terhadap harga pangan yang seringkali melambung tinggi. Kemudian sudah diserahkan pada harga pasar, ditambah dengan melemahnya nilai tukar Rupiah semakin mempermahal harga komoditas pangan. Perlu diketahui bahwa Indonesia mengimpor hampir semua jenis komoditas pangan karena impor lebih murah, cepat, lebih berkualitas, untuk menutupi kebutuhan konsumsi kita selama ini. Oleh karena itu, selain dibutuhkan asistensi untuk petani supaya meningkatkan produktifitas pertanian (dan juga peternakan dan perikanan) secara kuantitas dan kualitas, dibutuhkan usaha serius selain hanya subsidi untuk pupuk semata.



Selain subsidi, juga terdapat pemberian kredit kepada sektor usaha pertanian oleh bank pemerintah, akan tetapi kebanyakan ditujukan kepada perusahaan multinasional untuk perdagangan dan orientasi ekspor, bukan pada petani perseorangan. Model tersebut hanya menguntungkan usaha yang besar, dan semakin melemahkan yang kecil. Sebagian besar benih untuk tanaman pangan dikontrol oleh perusahaan multinasional, seperti jagung hibrida yang mencapai 43 persen dipasok oleh *Syngenta* dan *Bayern Corp.*

Seharusnya subsidi dan kredit jangan diberikan pada perusahaan multinasional, tetapi pada petani perorangan, lewat serikat tani. Dukungan bagi pengembangan benih pangan berbasis komunitas (serikat tani yang independen) harus dijadikan sebagai salah satu cara memandirikan petani. Karena setidaknya Indonesia hampir di setiap propinsi memiliki universitas-universitas yang mumpuni untuk mendorong penelitian-penelitian yang dilakukan oleh petani. Ke depan harapannya, secara perbenihan Indonesia bisa maju dan mandiri (SPI, 2012: 8-9).

### Soal Impor Pangan dan Peran Bulog

Dihapuskannya bea masuk impor hingga nol persen tentu akan menyebabkan serbuan beras-beras impor dari negara tetangga. Hal ini tentu akan merugikan petani dalam negeri. Saat ini saja sudah dipastikan adanya kontrak impor beras sebanyak 600 ribu ton (Republika, 23/09/2013), hingga akhir tahun. Kemudian ditambah dengan 500 ribu ton per tahun (Suara Pembaruan, 23/04/2013) dari Myanmar. Tidak terserapnya produksi beras dalam negeri menandakan perlu adanya perbaikan kinerja dan daya serap Bulog.

Menurut analisa yang dilakukan Serikat Petani Indonesia (SPI) pada 2010, daya serap Bulog yang lemah menjadi suatu argumen yang sangat tidak masuk akal untuk membuka keran impor lagi. Jika masalahnya bukan pada produksi beras nasional tetapi pada penyerapan cadangan beras oleh BULOG, impor seharusnya tidak menjadi pilihan (SPI, 2010: 4).

Saat ini perlu meninjau kembali peran kelembagaan Bulog yang sejak 1998 menjadi perusahaan umum yang bersifat komersil dengan kewajiban pelayanan publik (PSO). Bulog menjadi terikat aturan pasar karena perannya tidak hanya sebagai *public service obligation* (PSO) lagi,



melainkan sudah mencari profit. Bagi mereka adalah rasional jika lebih berorientasi impor dalam keadaan kekurangan stok dan kenaikan harga.

**Tabel 5.**  
**Total Produksi Gabah dan Daya Serap Bulog 2009-2010**

Tahun	Total Produksi Gabah (Ton)	Daya Serap Bulog (Ton)
2009	64.398.890	3.800.000
2010	65.980.670	1.800.000

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Kasus yang mencuat pada September 2013 adalah harga komoditas kedelai yang melambung tinggi. Dengan melambungnya harga kedelai impor selama tiga pekan lalu merupakan tamparan yang membuka mata kita bahwa kebijakan impor dengan konsep Bulog saat ini yang mencari profit sangat tidak memihak pada petani dan masyarakat umum. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk melakukan impor bahan pangan kedelai guna menstabilkan harga kedelai yang masih tinggi saat ini. Untuk beras saja tidak mampu menyerap dengan efektif, sekarang dibukalah keran impor untuk kedelai yang harganya sedang naik. Tidak hanya itu, pajak impor juga dikurangi bahkan mencapai nol untuk memperlancar proses impor tersebut.

Penulis berpikir bahwa ketika Rupiah melemah terhadap Dollar AS, maka akan berdampak pada naiknya harga beras dan komoditas pangan lain yang diimpor, termasuk kedelai. Apakah kebijakan ekonomi yang instant dengan impor menjadi andalan pemerintah kita? Sungguh miris apabila hal itu menjadi cara yang dilakukan terus menerus.

Belajar dari kontrol harga dari pemerintah yang lemah pada produk kelapa sawit/CPO dan kedelai, yang menyebabkan kenaikan luar biasa pada minyak goreng dan harga kedelai hingga hasil olahannya seperti tempe dan tahu menjadi mahal. Jadi, jangan serahkan petani dan perdagangan pangan ke pasar. Inilah mandat sesungguhnya dari konstitusi kita pasal 28 dan 33 UUD 1945.

Oleh karena itu, mendorong produktivitas pertanian, reformasi agraria, pemberian subsidi, dan pengontrolan harga komoditas pangan menjadi penting untuk menciptakan cita-cita ketahanan dan kedaulatan pangan. Tetapi, kebijakan impor yang terus dilakukan untuk menutupi



lubang-lubang rumitnya masalah pertanian menjadi jawaban jangka pendek untuk ketahanan pangan, tetapi menjadi sebuah jebakan yang membuat kita harus tergantung pada mekanisme pasar yang memang mendukung perdagangan bebas tanpa pengontrolan harga komoditas pangan.

### Tantangan Perdagangan Bebas

Awal tahun 2010 pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan secara penuh Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Cina (ACFTA) menyusul sejumlah perjanjian perdagangan bebas yang telah ditanda tangani sebelumnya yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-Korea Selatan FTA, dan Indonesia-Japan Partnership Agreement.

Yang berbeda dari ACFTA dengan berbagai perjanjian perdagangan bebas lainnya ialah perjanjian ini sudah ditanda tangani dan dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2002. Tertundanya pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas menunggu kesiapan sejumlah negara ASEAN menghapuskan tarif impor barang-barang dari Cina yang jauh sebelum berlakunya FTA sudah merajai pasar domestik di banyak negara.

Hampir satu tahun sejak berlakunya ACFTA, nilai perdagangan Indonesia-China mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika pada periode 2009, ekspor non migas Indonesia ke China sebesar 7,71 milyar Rupiah, pada akhir tahun 2010 ini nilai ekspor non migas Indonesia melonjak hingga 11,185 triliun Rupiah (1,24 milyar US\$) suatu peningkatan yang sangat fantastis. Dari sisi impor produk China ke Indonesia kenaikannya bahkan jauh lebih tinggi, dari 12,01 milyar Rupiah tahun 2009 menjadi 81,19 triliun (8,99 milyar US\$) di akhir tahun 2010 ini (SPI, 2010: 7-8)

**Tabel 6.**  
**Nilai Perdagangan (Ekspor-Impor) Non Migas Indonesia-China**  
**(dalamtriliun rupiah)**

Tahun	Nilai Ekspor Indonesia	Nilai Impor Cina
2008	0.0078	0.015
2009	0.0077	0.012
2010	11.815	81.190

Sumber: SPI 2010



Data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ekspor-impor antara Indonesia dan Cina. Tetapi, peningkatan tersebut sangat timpang di mana impor Cina tujuh kali lipat lebih daripada ekspor kita ke Cina. Dampak dari kebijakan ACFTA memang meningkatkan gairah perdagangan non-migas, tetapi miris karena Indonesia tidak mampu bersaing dengan produk-produk Cina, terutama produk hortikultura.

Menjadi tidak heran apabila jeruk impor dari Cina lebih murah harganya daripada jeruk buatan lokal. Jeruk, dan produk buah lainnya merupakan salah satu contoh produk yang kalah bersaing dengan produk Cina. Apa yang terjadi? Petani jeruk lokal akhirnya menjual tanahnya, atau tanahnya diusahakan oleh perusahaan besar yang lebih efektif dan efisien serta didukung pemerintah untuk mengelola tanahnya. Petani tanahnya di rampas tanpa disadari, dan memang sistem ekonomi yang membuat kondisinya seperti itu.

Angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan pada 2008 sebesar 15,42% dan turun pada 2009 menjadi 14,15% atau sebanyak 32,53 juta jiwa (Soedarminta, 2012: 81). Perlu diketahui bahwa 63,58% rakyat miskin tersebut adalah rakyat yang tinggal di pedesaan (70% adalah rakyat petani dan buruh tani). Dengan menggunakan sistem ekonomi pasar maka akan menjadi sumber kemiskinan di Indonesia, utamanya para petani yang tanahnya digunakan untuk keperluan usaha pasar bebas produk-produk pertanian, pertambangan, bahkan properti mewah untuk kalangan menengah dan atas.

Perampasan tanah untuk akumulasi modal di sini terbukti, dimana yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. Perlu diketahui pula bahwa untuk menghadapi pasar bebas harus ada instrumen-instrumen kebijakan yang melindungi tubuh bangsa. Banjir impor produk hortikultura dari Cina bisa terjadi karena pemerintah di sana dalam waktu lama saat negeri itu menutup diri dari dunia luar telah membangun industrinya lebih dulu. Contoh lain yang lebih dekat, tidak ada pengusaha terkemuka di Cina saat ini yang dulu tidak mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah *via* kredit bank.

Memang Indonesia memberikan kredit *via* bank kepada pengusaha pertanian (lihat bagian yang mendiskusikan soal kelapa sawit), tetapi kredit diberikan kepada perusahaan menengah dan besar, bukan pada per-seorangan lewat serikat petani. Ini yang menjadi masalah. Sehingga memang kucuran kredit secara kuantitas besar, tetapi banyak yang tidak dapat. Sama seperti kasus subsidi pupuk yang



tidak mampu menekan kenaikan harga pangan karena tidak adanya kontrol harga, dan dibukanya keran impor pangan yang membanjiri pasar domestik.

## Penutup

Kebijakan salah arah sejak era Orde Baru yang melestarikan predatoris birokrat/politisi menjadi sebuah fenomena di era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini. Dimana konsesi agraria menjadi sumber pengeruk untung bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Hasilnya adalah lemahnya produktifitas pertanian secara kualitas dan kuantitas, kebijakan impor, dan lemahnya negara terhadap sistem ekonomi zaman sekarang (pasar bebas). Hal tersebut kontra-produktif dengan cita-cita luhur untuk mesejahterakan Indonesia dengan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Untuk itu perlu ada langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan cita-cita luhur ketahanan dan kedaulatan pangan, yaitu:

1. Reformasi agraria. Menghentikan konversi lahan produktif pertanian untuk konsesi bisnis *food estate*, pertambangan, dan properti.
2. Memberikan insentif kepada petani lewat serikat tani untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian secara kuantitatif dan kualitatif.
3. Mengerem kebijakan impor pangan
4. Membangun sebuah sistem pengontrolan harga kebutuhan pangan yang diatur dalam UU untuk menyiasati melemahnya harga tukar Rupiah. Kebijakan ini relevan dilakukan mengingat hingga saat ini masih banyaknya komoditas pangan diimpor dan dibeli dengan kurs Dollar.

Ketahanan pangan adalah terpenuhinya stok pangan secara fisik dan ekonomi bagi warga negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan konsep berdikari untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai kedaulatan pangan. Semua menjadi nyata apabila kita (pemerintah dan masyarakat) mau kembali kepada ide dasar dalam UU Pokok Agraria Tahun 1960 dan Pasal 33 UUD 1945, dan meminggirkan kepentingan pembangunan pragmatis yang terbukti gagal.



## Referensi

### Literatur Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Statistik Indonesia*.
- Chaniago, Andrinof. 2012. *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Food Agriculture Organization (FAO). 1995. *World Agriculture: Toward 2010*. John Wiley & Sons.
- Hadiz, Vedi R. 2013. *The Rise of Capital dan Keniscayaan Ekonomi-Politik*. LP3ES: Jurnal Prisma Vol. 32
- Hadiz, Vedi R., Richard Robinson. 2004. *Reorganizing Power In Indonesia*. London and New York: Routledge Curzon.
- Harsono, Boedi. 1994. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Jambatan.
- Hiariej, Eric. 2006. *Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Vol. 10 No. 1).
- Polanyi, Karl. 2009. *Transformasi Besar: Asal-Usul Ekonomi Zaman Sekarang*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamil, Faisal A. 2013. *Kajian Bahan Bakar Minyak (BBM): Pencabutan Subsidi BBM = Implementasi Neoliberalisme Sektor Migas*.
- Serikat Petani Indonesia (SPI). 2010. *Hentikan Kebijakan Liberalisasi dan Korporatisasi Pertanian: Catatan Pembangunan Pertanian, Pedesaan dan Pembaruan Agraria 2010*.
- Rahardjo, Hafid. 2012. *Perubahan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi-Politik (2008-2012)*. Universitas Gadjah Mada: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Vol. 16 No. 1).
- Rahman, Noer Fauzi. 2012. *Land Reform: Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Robinson, Richard. 2013. *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Soedarmanta, J.B. 2012. *An Indonesian Renaissance*. Jakarta: Kompas.
- Widodo, Sri. 2001. *Ketahanan Pangan Pada Era Globalisasi dan Otonomisasi*. Universitas Gadjah Mada: Jurnal Agro Ekonomi.

### Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- UU No. 8 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri



UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan  
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Pertambangan  
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air  
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004  
tentang Perubahan UU No. 41 tentang Kehutanan menjadi UU  
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan  
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-  
Pulau Kecil  
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH

### **Media Massa**

Republika, 23 September 2013

Suara Pembaruan, 24 April 2013



# **PENYEBAB KORUPSI PARTAI POLITIK: STUDI KASUS WISMA ATLET DI TUBUH PARTAI DEMOKRAT**

*KEMENTERIAN KAJIAN STRATEGIS BEM KM UGM 2013*

## **Pengantar**

Di zaman era globalisasi ini korupsi semakin merajarela, mengingat terdapat banyak kesempatan dan peluang untuk melakukan tindakan korupsi yang sudah sangat merugikan banyak masyarakat pada umumnya. Merebaknya informasi tentang kasus korupsi akhir-akhir ini sangat menyedot perhatian masyarakat luas terutama pada kasus korupsi wisma atlet yang banyak melibatkan oknum dari partai demokrat.

Dalam tulisan ini, kami ingin memaparkan pengetahuan kami tentang kasus korupsi wisma atlet di Sumatra Selatan yang pada saat ini menjadi buah bibir masyarakat baik melalui media massa maupun media elektronik. Perkembangan kasus Nazarudin dalam perkara dugaan korupsi Wisma Atlet Palembang. Kasus ini melibatkan banyak tokoh dari Partai Demokrat. Partai bentukan SBY yang kini menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus Presiden Republik Indonesia.

Kasus dugaan korupsi wisma atlet ini sedikit banyak memperlihatkan wajah sistem birokrasi serta hukum di Indonesia. Dalam bidang birokrasi, kasus ini menunjukkan betapa birokrasi di



Indonesia yang sedemikian rupa dapat di dimainkan dan dapat diperjual belikan dengan uang. Dan kasus korupsi selalu melibatkan banyak pihak di ranah birokrasi. Dalam bidang hukum, kasus ini menunjukkan sebuah sistem hukum yang ada di Indonesia tak mampu dengan cepat menyelesaikan sebuah kasus yang melibatkan banyak pelaku birokrasi tingkat atas. Hukum Indonesia terlalu mudah untuk diputar balik oleh permainan para pelaku birokrasi.

Korupsi merupakan masalah yang sudah banyak diperbincangkan, mulai dari kalangan yang tidak mengenal atau mengetahui tentang hukum hingga kalangan yang ahli dalam seluk beluk hukum. Menghadapi masalah korupsi yang sudah meluas dan berurat-akar, yang oleh sementara kalangan dianggap sudah merupakan *way of life*, orang sudah setengah putus asa dan acuh-tak acuh.

Korupsi merupakan penyakit masyarakat, sebagaimana penyakit ditubuh manusia, yang memerlukan penelitian yang lebih serius untuk mengenali hakikat penyakitnya secara lebih pasti, agar pengobatannya bisa mencapai yang dimaksud. Demikianlah pandangan sepintas mengenai korupsi.

Korupsi yang terjadi lewat partai politik, menjadi hal yang baru dan perlu diperhatikan bagi kajian ilmu politik kontemporer dalam sistem pemerintahan modern. Mungkinkah efek dari sistem tersebut menghasilkan korupsi yang kini terjadi, atau menjadi masalah internal partai politik yang tidak becus mengkader anggotanya, masih menjadi penelitian lebih lanjut, dan tulisan ini mencoba mengangkat permasalahan tersebut untuk lebih dimengerti.

Sebagaimana kita ketahui bahwa partai politik adalah organisasi yang mempunyai kegiatan yang bersinambungan. Artinya, masa hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya. Partai politik adalah organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat lokal. Para pemimpin di tingkat pusat dan lokal berkehendak kuat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk membuat keputusan politik secara sendiri maupun dengan berkoalisi dengan partai lain, dan melakukan kegiatan mencari dukungan dari para pemilih melalui pemilihan umum atau cara-cara lain untuk mendapatkan dukungan umum. Jadi, ciri-ciri partai politik ialah berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara terus-menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, dan ikut serta dalam



pemilihan umum. Apabila organisasi tersebut tidak memiliki ciri-ciri seperti di atas, maka tidak dapat dikategorikan sebagai partai politik.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Surbakti (1999) mendefinisikan partai politik sebagai fungsi-fungsi politik seperti berikut:

1. Sosialisasi Politik
2. Rekrutmen Politik
3. Partisipasi Politik
4. Pemandu Kepentingan
5. Komunikasi Politik
6. Pengendalian Konflik
7. Kontrol Politik

Seiring dengan perkembangan zaman, partisipasi politik menjadi penting baik di negara yang mengaku demokratis hingga negara yang dicap sosialis, bahkan otoriter sekalipun, maka peran partai politik sebagai instrumen partisipasi politik semakin menguat. Pada hakikatnya, fungsi partai politik sebagai instrumen dari partisipasi politik masyarakat perlu dikaji semakin dalam. Efek samping menguatnya hal tersebut berdampak atas penyimpangan yang dilakukan partai politik. Dalam tulisan ini kami hendak mengambil bentuk penyimpangan korupsi dalam tataran partai politik. Sebagai lembaga politik yang memiliki massa, partai politik tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsinya dalam proses pembuatan kebijakan publik. Parlemen sebagai lembaga legislatif yang hanya boleh diwakili kursinya oleh orang-orang dari partai politik untuk menentukan kebijakan, anggaran, dan hal-hal strategis lainnya yang pasti sarat dengan penyimpangan korupsi.

Sistem kepartaian di Indonesia masih menerapkan pola-pola lama. Menurut Semma (2008) bahwa elit partai politik memiliki dukungan yang kuat dari pemerintahan untuk dapat melakukan penyelewengan dan segala penyimpangan. Hal ini disebabkan oleh kekuatan partai politik di masa lalu, untuk dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila kita menengok kembali sejarah partai politik, seperti fakta bahwa di era Orde Lama Sukarno masih membutuhkan dukungan dari banyak pihak, terutama dari sekian banyak partai politik yang ada. Kuasa pemerintahan secara otomatis menjadi terbelenggu oleh pamor partai



politik. Intervensi partai politik, terlebih yang memiliki basis massa yang besar dalam pemerintahan Sukarno, serta-merta akan dituruti oleh pemerintah Sukarno, sekedar untuk mempertahankan amuk partai sebagai oposan dalam pemerintahan.

Sistem kepartaian di Indonesia yang cenderung masuk karakteristik partai elit. Dalam artian institusi partai politik di Indonesia lemah dalam hal *decisional autonomy* atau otonomi dalam membuat keputusan. Dalam kasus ini sekelompok elit partai politik memiliki hak veto dalam pengambilan kebijakan partainya. Disinilah sumber korupsi yang sering terjadi di tubuh partai politik. Dalam menganalisa hal ini, kami menggunakan teori Crowl dalam melihat karakteristik partai politik. Kami mengambil contoh kasus Partai Demokrat sebagai partai pemerintah, yang menurut kami, masih masuk dalam kategori partai elit dari segi otonomi yang begitu menentukan kebijakan di satu sisi, tetapi masuk kategori *cartel party* atau Partai Kartel dalam hal kebutuhan politiknya.

### **Apa Itu Korupsi?**

Korupsi merupakan masalah yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di ruang publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi yang terjadi dalam konteks organisasi, baik perusahaan, partai politik, persatuan olahraga, dan sebagainya. Pada dasarnya, ada yang pro namun ada pula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi tetap saja merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Korupsi dalam bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang mempunyai makna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Namun secara harfiah korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. (Rais, 1999)

Pada hakikatnya korupsi merukapakan “benalu sosial” yang dapat merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya korupsi nampaknya sangat sulit diberantas karena pada faktanya sulit untuk memberikan pembuktian-pembuktian yang



eksak. Selain itu sangat sulit pula untuk mendeteksi dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Apabila seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah (Wertheim dalam Lubis, 1970). Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan hingga detik ini. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Bahkan di Amerika Serikat sendiri praktek-praktek korupsi masih merajalela. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif



jarang terjadi. Akan tetapi, semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan partai politik untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

Partai-partai politik, terutama partai politik yang baru membutuhkan pembiayaan yang hanya dapat dipenuhi secara tidak teratur di sebagian besar negara berpenghasilan rendah. Investasi organisasi dan pembelian dukungan mereka memerlukan uang banyak sekali, dan sering satu-satunya cara yang tersedia untuk memperoleh modal kerja itu ialah dengan menyedotnya dari negara (Lubis, 1993). Dalam arti birokrasi-rasional yang sempit, jenis korupsi ini merupakan kerugian yang gawat. Akan tetapi, dalam perspektif yang lebih luas, korupsi seperti itu merupakan investasi tidak resmi infrastruktur politik (perkembangan partai), yang akan membuka saluran penyambung kepentingan yang baru atau memperkuat yang sudah ada. Pemilihan umum di Indonesia tahun 1955 menyaksikan usaha yang berhasil oleh beberapa partai, khususnya Partai Nasional Indonesia (PNI), untuk mengalihkan sumber daya (kekayaan) negara ke dana kampanye mereka sendiri (Feith dalam Mochtar Lubis, dkk, 1993).

Selain itu, dibalik keperluan pemilihan umum, terdapat pengeluaran rutin sehari-hari yang dibutuhkan agar partai dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Para pemimpin partai di Indonesia telah berusaha dan berhasil memperoleh hak-hak istimewa komersial di luar pengawasan hukum dan pemakaian fasilitas pemerintah untuk membantu kebutuhan penghasilan mereka, dan mereka mungkin akan melanjutkan praktek ini; contoh lain adalah organisasi militer menempuh strategi yang sama dengan hasil yang bahkan lebih besar di masa Orde Baru.

Dalam tataran pragmatis, tujuan partai politik adalah mendapatkan kekuasaan, lantas mencoba melanggengkan kekuasaan yang telah didapatkan. Oleh karena itu, segala sumber daya dan daya upaya diarahkan untuk hal tersebut. Tidak mengherankan jika semua lini akan diberdayakan oleh partai politik, termasuk dengan korupsi.

Di atas permukaan, parpol getol mencitrakan diri dalam pemberantasan korupsi. Namun fakta yang terbuka kemudian, parpol kerap disebut menjadi salah satu yang bermasalah dengan korupsi itu sendiri. Survey nasional kemitraan pada 2001 misalnya, memperlihatkan



bahwa parpol termasuk salah satu institusi yang tidak dipercaya oleh masyarakat Indonesia (Pramono , 2011).

Dewasa ini, melekatnya partai politik dengan korupsi kembali mengemuka setelah muncul kasus skandal Wisma Atlet yang menyeret partai penguasa ini, Partai Demokrat. Kasus korupsi tersebut melibatkan banyak tokoh elit dari Partai Demokrat seperti Nazarudin, Angelina Sondakh, bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga disebut-sebut turut terlibat didalamnya.

Didalam pemeriksaan, Nazarudin sendiri mengakui bahwa terdapat sekitar 20% dari anggaran pembangunan Wisma Atlet senilai Rp 200 miliar yang dikorupsi. Namun hasil korupsi tersebut tidak dinikmatinya sendiri, melainkan dibagi-bagi kepada Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum untuk kepentingan Partai Demokrat.

### **Penyebab Korupsi di Tubuh Partai Demokrat**

Sebelum kita masuk membahas mengenai kasus korupsi di Partai Demokrat, sebaiknya kita melihat etika politik sebagai landasan utama dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan politik. Tanggungjawab yang diemban warganegara sebagai makhluk sosial dan politik bukan hanya masalah tanggungjawab atas hak dan kewajiban sebagai manusia, tetapi juga sebagai manusia. Dari hal tersebut juga dibutuhkan kemampuan tanggungjawab kepada negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Suseno (1994) mengutip Aristoteles yang menyatakan bahwa identitas antara manusia yang baik dan warganegara yang baik hanya terdapat apabila negara sendiri baik. Apabila negara itu buruk, maka orang yang baik sebagai warganegara, jadi yang dalam segala-galanya hidup sesuai aturan negara buruk itu, adalah buruk, barangkali jahat, sebagai manusia, dan sebaliknya, dalam negara buruk, manusia yang baik sebagai manusia, jadi seseorang yang betul-betul bertanggungjawab, akan buruk sebagai warganegara, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan buruk negara itu.

Permasalahn korupsi di Wisma Atlet Palembang yang didalangi secara mayoritas oleh beberapa fungsionaris Partai Demokrat menjadi penting untuk ditelusiru masalah etika politik para pengurus, fungsionaris, dan kader-kadernya yang memiliki akses terhadap sumber daya negara yang melimpah. Etika politik manusia sebagai makhluk politik ada baiknya kita jadikan landasan moral yang utama sebagai



partai penguasa yang otomatis menjadi pemerintah di negara yang kita cintai ini.

Apabila kita boleh menengok kembali ke masa di mana demokrasi dan reformasi baru saja dilahirkan, tenggelamannya rezim orde baru dengan kepemimpinan Soeharto, dan di gantikan dengan Presiden Abdurahman wahid, kemudian Megawati Soekarno Putri sebagai Pesiden RI yang mengusung kebijakan yang terkait penurunan subsidi terhadap partai politik yang masuk ke dalam parlemen dikurangi, sehingga partai politik tidak mampu membiayaiin kerja politik partai. Padahal diluar itu, partai politik membutuhkan dana untuk membiayai partainya agar partai berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan perolehan yang didasarkan pada jumlah suara yang didapat, dan pengurangan subsidi bisa menjadi penyebab menjadi “buasnya” partai mencari sumber finansial lain untuk biaya politiknya yang mahal itu.

Proses keuangan partai yang tidak transparan terkait dengan pembiayaan juga menjadi sebab munculnya korupsi di tubuh partai politik. Minimnya transparansi keuangan partai politik memungkinkan adanya “money politic” terjadi secara massif, bahkan terstruktur sangat rapi. Dan inilah mengapa banyaknya muncul mafia-mafia anggaran, dan mafia-mafia proyek pemerintah.

Kembali ke era sekarang, perjuangan dan kiprah Partai Demokrat semakin memuncak. Ditandai dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua dewan pembina sekaligus pengaggas berdirinya Partai Demokrat resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. dalam kepemimpinanya, ternyata SBY mengalami banyak gunjingan, kritik, sehingga tidak semulus prestasinya di Partai Demokrat dan dunia militer. Pedoman yang selalu ia galakan tentang *anti korupsi* ternyata malah menjadi buah simalakama untuk dirinya dan Partai Demokrat sendiri.

Permasalahan ada pada sisi hukum di Indonesia yang lemah dan mudah untuk dibeli Bagaimana tidak, kesempatan inilah yang akan dimanfaatkan para petinggi kita di DPR untuk melakukan aksinya sebagai koruptor. Satu persatu mereka akan bergantian melakukan kegiatan korupsi karena institusi hukum sekelas KPK hanya dianggap sebagai angin lalu untuk mereka. Lemahnya hukum di indonesia disebabkan oleh para institusi penegaknya yang juga ikut-ikutan



melakukan tindak korupsi. Mulai dari kepolisian sampai dengan KPK juga pernah memiliki *track record* seperti ini.

Faktor selanjutnya adalah disebabkan dari ketidakmampuan parpol yang memiliki anggota di eksekutif dan legislatif mengkader para anggotanya untuk memahami etika politik. Permasalahan ini ada pada sisi pengorganisasian partai politik sebagai sebuah institusi politik. Kata kuncinya ada pada pelembagaan di tubuh internal partai politik itu sendiri. Bermula dari hal itu, maka tidak heran para anggota parpol yang bekerja eksekutif atau legislatif akan mencari uang sebanya-banyaknya untuk partai dan dirinya. Inilah misi dari sebuah parpol untuk memperkaya diri yaitu memasukan para anggotanya ke eksekutif dan legislatif, berharap semua anggotanya disana berkontribusi dalam memfeedback partainya dengan maksimal. Hal-hal tersebut yang semakin memicu para tetinggi di DPR beramai-ramai mencari celah untuk memperkaya partainya, salah satunya yaitu dengan tindak korupsi. Bisa lewat program-program yang diberi pemerintah atau swasta yang sedianya siap di proyek oleh mereka. Apalagi mengingat di indonesia hukum sangat lemah ditambah para institusi penegak hukum yang bisa dibeli semakin memberi kesempatan luas bagi mereka untuk berkorupsi.

## Penutup

Partai politik merupakan institusi intermediari yang penting untuk kebijakan publik di era transisi demokrasi. Sistem politik modern pasca kejatuhan Soeharto pada 1998 tidak mampu menafikan korupsi yang menjadi efek dari kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terkait dengan menurunkan tingkat subsidi langsung dari pemerintah, sehingga partai politik membutuhkan dana dari pihak luar, selain dari iuran anggotanya. Fungsi sentra kebijakan publik menjadi sarana untuk memperoleh bantuan dana keuangan untuk tujuan sukses pencalonan anggota parpol di level internal, lokal, regional, hingga level nasional.

Dalam tulisan ini kami melihat bahwa fungsi parpol sesungguhnya hanya menjadi topeng untuk memperoleh keuntungan lewat pendanaan pihak swasta. proses suksesi Anas Urbaningrum, menyeret Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet sebagai bentuk *money politic* yang menjadi contoh dari fenomena korupsi politik dalam tubuh partai politik di era transisi demokrasi. Selain itu, permasalahan lemahnya supremasi hukum dan mental para



kader partai politik yang mudah tergoda semakin memperkuat praktek korupsi politik tersebut.

### Referensi Buku

- Kartono, Kartini. 1983. *Pathologi Sosial*. Jakarta: CV Rajawali Press.
- Lubis, Mochtar. 1977. *Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri*. Jakarta: Karya Aksara.
- Lubis, Mochtar, James C. Scott. 1993. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pramono. 2011. *Korupsi Memiskinkan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rais, Amin. 1999. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Semma, Mansyur. 2008. *Negara dan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Setiawan, Bambang, Dkk. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: KOMPAS.
- Soedarso, Boesono. 2009. *Latar Belakang Sejarah Dan Kultural Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suseno, Franz Magnis. 1994. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.

### Sumber Internet

<http://www.demokrat.or.id>, diakses pada 17 Maret 2012 pukul 19.34 WIB.

<http://www.demokrat.or.id/visi-misi/>, diakses pada 18 Maret 2012 pukul 20.45 WIB.

<http://hukum.kompasiana.com/2012/02/22/kasus-korupsi-wisma-atlit-matinya-nurani>, diakses pada 18 Maret 2012 pukul 19.49 WIB.

<http://metrotvnews.com/read/tajuk/2011/09/22/895/Terbukti-Korupsi-di-Wisma-Athlet/tajuk>, diakses pada 17 Maret 2012 pukul 17:00 WIB.



## BAGIAN KETIGA

*Kajian Tertulis BEM/DEMA/LEM Fakultas*





## MENERUSKAN PERJUANGAN

*Barangkali, para pejuang kemerdekaan tidak pernah mengetahui  
Bahwa Indonesia telah sampai pada saat  
Ketika penyelenggara negara sibuk memperkaya diri  
Dan telinganya tersekat, tak dapat mendengar suara rakyat yang  
menjerit sekerat  
atas kehidupan yang serba melarat*

*Barangkali, para proklamator tidak pernah menyangka  
Bahwa Indonesia akan tiba pada masa  
Dimana SDAnyanya dikeruk nyaris tanpa sisa  
dan SDMnya diperbudak tak berdaya  
oleh bangsa asing yang berkedok kerjasama*

*Kepada para pejuang kemerdekaan dan proklamator RI  
Yang telah mewariskan pada kita negeri subur ini  
Jangan mengeluh bahwa bangsa ini miskin dan terpuruk  
Jangan katakan kita ini bodoh dan bermental bobrok  
Katakan saja: kita sedang berjuang..  
Ya. Kita semua masih terus berjuang.*

(Ulya Amaliya)



# KAJIAN PROYEKSI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AKAN PADI DAN JAGUNG DI INDONESIA

*KAJIAN STRATEGIS BEM FAKULTAS GEOGRAFI UGM 2013*

**Tabel Kebutuhan Kalori berdasarkan Umur**

Umur	Kebutuhan Kalori (kal/hari)
1-3 tahun	1000
4-6 tahun	1400
7-9 tahun	1800
10-12 tahun	2000
13-15 tahun	2400
16-19 tahun	2500
20-45 tahun	2800
46-59 tahun	2500
60 tahun	2200

Setiap golongan umur mempunyai kebutuhan kalori yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap golongan umur berbeda menurut ruang dan waktu. Kelompok umur 1-3 tahun memiliki kebutuhan kalori yang lebih rendah dibanding kelompok umur 13 hingga 45 tahun. Hal ini disebabkan pada masa batita, kegiatan yang dilakukan tidak sebanyak dan seberat kelompok umur lainnya. Begitu juga kelompok umur 60



tahun keatas memiliki kebutuhan kalori yang lebih rendah dibanding kelompok umur 13-45 tahun. Kelompok umur pada rentang 13-45 memiliki kebutuhan kalori yang lebih besar karena memang pada tahun-tahun tersebut merupakan tahun usia produktif yang mengharuskan seseorang bergerak lebih cepat dengan melakukan banyak aktifitas.

**Tabel Perhitungan Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan Kelompok Umur Terhadap Kebutuhan Kalori yang Diperlukan**

umur	kal/hari	jumlah penduduk		kebutuhan Kalori (kkal)	
		2005	2010	2005	2010
1-3	1000	11.547.504	13.661.172	4214838960	4986327780
4-6	1400	13.010.764	13.745.182	6648500404	7023788002
7-9	1800	12.974.824	14.127.423	8524459368	9281716911
10-12	2000	12.971.428	13.677.477	9469142440	9984558210
13-15	2400	12.504.696	13.408.650	10954113696	11745977400
16-19	2500	15.629.293	16.465.688	14261729863	15024940300
20-45	2800	89.861.428	99.486.041	91838379416	101674733902
45-59	2500	29.586.061	34.050.873	26997280663	31071421613
60+	2200	15.535.810	18.043.712	12475255430	14489100736
		total		185383700239	205282564854

Peningkatan jumlah penduduk disertai adanya perubahan iklim yang semakin ekstrim mengakibatkan penurunan ketersediaan sumber pangan pokok. Hal ini menuntut kita untuk berupaya lebih serius dalam mengupayakan sumber pangan lain di luar beras melalui penganekaragaman sumber bahan pangan. Peningkatan penyediaan pangan sejatinya harus didukung oleh peningkatan produksi pertanian, seperti jagung dan Padi. Dengan meningkatnya ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi baik dalam jumlah, kualitas, keragaman dan keseimbangan, diharapkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat mendekati atau mencapai sasaran skor mutu pangan yang dianjurkan. Untuk mencapai sasaran tersebut kebijakan yang bisa ditempuh adalah dengan mengupayakan peningkatan ketahanan pangan, yang meliputi peningkatan produksi, daya beli masyarakat, distribusi dan kemampuan penyediaan pangan serta terkoordinasinya kebijaksanaan harga; mendorong diversifikasi konsumsi pangan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola pangan yang beraneka-ragam untuk meningkatkan gizinya; meningkatkan keamanan pangan



untuk melindungi masyarakat dari pangan yang berbahaya untuk kesehatan dan bertentangan dengan keyakinan; dan mengembangkan kelembagaan pangan yang efektif dan efisien dengan meningkatkan keterpaduan, koordinasi dan kerja sama lembaga-lembaga yang terkait dalam pembangunan pangan, antara pemerintah dan masyarakat, dan antar kelompok masyarakat.

No	Produksi	2005 (ton)	2010 (ton)	2005 (kg)	2010 (kg)	r	Proyeksi 2015 (kg)
1	Padi	54.056.282	65.150.764	54.056.282.000	65.150.764.000	0,038041385	78.522.271.469
2	Jagung	12.413.353	18.016.537	12.413.353.000	18.016.537.000	0,077349073	26.148.906.381

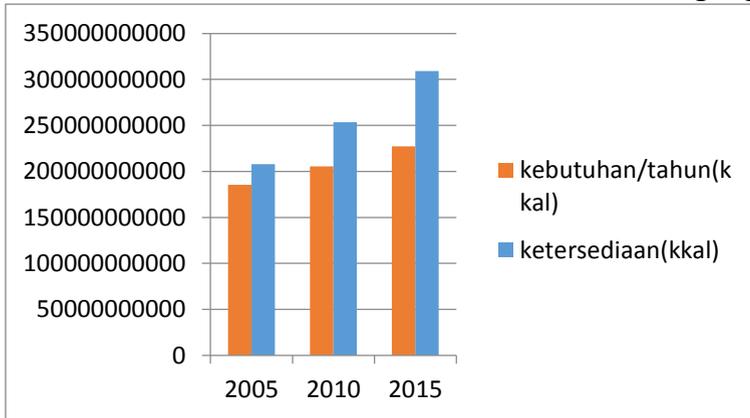
Berdasarkan tabel diatas, terjadi peningkatan produksi padi dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Hal ini bisa dimungkinkan karena didorong oleh kebijakan harga dasar gabah serta faktor-faktor lain seperti iklim yang menguntungkan, perbaikan irigasi, terutama irigasi sederhana, peningkatan teknologi pemupukan, serta peningkatan mutu intensifikasi. Begitu juga dengan produksi jagung yang apabila kita lihat pada tabel diatas produksinya selalu meningkat. Kebutuhan jagung terus meningkat dari tahun ketahun seiring dengan berkembangnya populasi manusia dan bertambahnya industri yang membutuhkan jagung sebagai bahan baku produksi. Kedua jenis komoditas diatas yaitu padi dan jagung merupakan salah satu panganan pokok Indonesia dengan tingkat permintaan dan konsumsi yang tinggi disetiap tahunnya. Karenanya, untuk mengestimasi tingkat ketersediaan dan kebutuhan pangan dilakukan analisis proyeksi dari tahun 2005 hingga tahun 2015. Hal tersebut diorientasikan untuk memperkirakan jumlah ketersediaan padi dan jagung khususnya dalam kilo kalori apakah masih mencukupi atau tidak agar selebihnya dapat ditempuh suatu langkah antisipasi apabila ketersediaannya lebih kecil daripada kebutuhannya.

ketersediaan dalam kilo kalori			
tahun	padi	jagung	total
2005	197320039091	10672259336	207992298427
2010	237817896897	15489542205	253307439102
2015	286627513074	22481267571	309108780645



	kebutuhan/tahun(kkal)	ketersediaan(kkal)
2005	185383700239	207992298427
2010	205282564854	253307439102
2015	227317349791	309108780645

**Grafik Ketersediaan Vs Kebutuhan Akan Padi dan Jagung**



Apabila kita lihat pada grafik ketersediaan VS Kebutuhan Padi dan Jagung diatas, grafik tersebut merepresentasikan bahwasannya ketersediaan padi dan jagung pada tahun 2005-2010 selalu meningkat dan lebih besar daripada kebutuhannya. Begitu juga dengan proyeksi ketersediaan dan kebutuhan akan padi dan jagung pada tahun 2015 menunjukkan bertambahnya kebutuhan akan padi dan jagung. Namun demikian, dari proyeksi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Indonesia masih dalam posisi aman dalam hal ketersediaan padi dan jagung karena ketersediaannya lebih besar daripada kebutuhannya. Total ketersediaan padi dan jagung pada tahun 2015 diestimasikan sebesar 309.108.780.645 kkal, sedangkan kebutuhannya pertahun sebesar 227.317.349.791 kkal. Artinya, seharusnya Indonesia masih bisa mengakomodasi permintaan dalam negeri akan padi dan jagung. Namun, walaupun secara hitungan matematis Indonesia masih berada pada posisi aman dalam hal ketersediaan padi dan jagung, tapi pada kenyataannya Indonesia masih menjadi negara terbesar pengimpor beras di Asia. Hal-hal tersebut yang pada akhirnya masih menjadi tanda tanya di Indonesia, Negara agraris tapi masih mengimpor beras dari Thailand.



# KORUPSI: FAKTA, PROBLEM, DAN PERAN MAHASISWA

*KAJIAN STRATEGIS BEM FAKULTAS GEOGRAFI UGM 2013*

## Potret Indonesia saat ini

- **LISTRIK:** 35% (sekitar 84 juta) penduduk Indonesia setiap malam masih dirundung kegelapan – tanpa listrik  
(sumber: *listrikindonesia.com*)
- **ENERGI:** 35,6% konsumsi energi di negeri ini sangat tergantung pada BBM → subsidi untuk BBM pada tahun 2011 menghabiskan hampir 14% APBN  
(sumber: *bicaraenergi.com dan jpnn.com*)
- **KESEHATAN:** 2/3 penduduk Indonesia masih mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari → sebagian besar masyarakat kita hidup di bawah standar garis kemiskinan.
- **AIR:** 85 juta penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Penyediaan air bersih saat ini baru menjangkau 9% dari total penduduk Indonesia.  
(sumber: *Kementerian PU*)



- **KERUSAKAN ALAM:** 3,8 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran. Akibatnya, 39% habitat alami turut musnah.  
(sumber: [isai.or.id](http://isai.or.id))
- **KESEJAHTERAAN:** Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 11,96% (29,13 juta orang). Penduduk miskin Indonesia > jumlah penduduk Malaysia (28,9 juta orang)  
(sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))
- **PENDIDIKAN:** Tiap menit, 4 anak Indonesia putus sekolah.  
(sumber: [www.citizenjournalism.com](http://www.citizenjournalism.com))

### Potret pengangguran

Pengangguran masih jadi masalah. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2012:

- Jumlah penduduk Indonesia: 244.775.796 jiwa
- Jumlah angkatan kerja: 118 juta orang
- Jumlah penduduk bekerja: 112, 8 juta orang
- Jumlah pengangguran: 7,61 juta orang

### Hutang Indonesia

Data Ditjend Pengelolaan Hutang Kemenkeu RI pada Januari 2012:

- Hutang Pemerintah Indonesia tahun 2012 Rp1.937 triliun. Berupa pinjaman Rp615 triliun dan surat utang Rp1.322 triliun.
- Pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp115,21 triliun dalam tahun 2011 melalui APBN

Indonesia terlalu banyak masalah untuk diberi tambahan masalah lagi, terutama korupsi. Korupsi adalah kejahatan biasa yang menjadi luar biasa di Indonesia karena intensitas dan volumenya. Kata “korupsi” sendiri berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). **Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Karsona, 2011).** Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa



**korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan serta menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan (Revida, 2003).**

Pada dasarnya, korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan dapat merusak sendi – sendi kebersamaan bangsa. Korupsi adalah akar semua masalah. Pendidikan mahal, ekonomi tinggi, BBM, dana bantuan, lapangan kerja, penegakan hukum, rendahnya kesehatan, minim fasilitas umum, minimnya militer, dan lain sebagainya. Konvensi PBB pun menentang korupsi. Karena hal-hal yang diserang adalah *Human right, democracy, rule of law, sustainable development, markets, quality of life, dan human security*.

Survey terakhir tahun 2010 dalam Peringkat Birokrasi Asia (PERC), Indonesia menempati urutan kedua setelah India, dengan nilai 8,59. Itu menunjukkan bahwa sistem birokrasi kita banyak masalah. Semakin tinggi angkanya berarti paling korup. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia yang update terakhir hingga 2011, mengungkapkan fakta yang cukup ironis. Dimulai dari tahun 2003 IPK Indonesia 1,9; tahun 2004 2,0; tahun 2005 2,2; tahun 2006 2,4; tahun 2007 2,3; tahun 2008 2,6; dan tahun 2011 3,0. Kita berjalan tidak terlalu progresif.

**Korupsi birokrasi adalah kejahatan jabatan.** Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Setiap institusi publik yang berhubungan dengan pelayanan publik rentan dijangkiti penyakit pungutan liar, gratifikasi, suap dan ‘jual beli’ kewenangan –discretionary corruption- misal pengurusan administrasi, perijinan. Seperti itulah karakter koruptor. Kemaslahatan diabaikan. Sikapnya curang, mau menang sendiri, mau cepat kaya dan berhasil. Ruang publik diserbu sikap pragmatisme, konsumerisme, transisi nilai yang tidak jelas, dan ketiadaan keteladanan.

Sifat korupsi di Indonesia:

1. Sistemik dan massif
2. Meningkat seiring kemajuan dan teknologi
3. Praduga penyalahgunaan kekuasaan
4. Sistem pemerintahan/birokrasi yang kondusif
5. Hukuman kurang memberikan efek jera

Akar masalah adalah di penegakan hukum.

1. Kelemahan peraturan



2. Kelemahan manajemen SDM (perekrutan, mekanisme mutasi, promosi, evaluasi kerja, dst)
3. Kelemahan kepemimpinan (ideologi, visi, keberpihakan dan keteladanan)
4. Gaji/tunjangan/anggaran kurang memadai
5. Kelemahan pengawas internal dan eksternal
6. Kelemahan sistem penanganan perkara

Agar bangsa dan negara ini tidak roboh karena faktor internal maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Korupsi dapat menggerogoti sikap mental dan moral bangsa sehingga menimbulkan sikap saling tidak percaya dalam masyarakat dan pada akhirnya akan membawa bangsa ini ke jurang kehancuran.

Kebangkitan itu dapat diwujudkan dengan tindakan yang fokus dan sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, baik yang bersifat preventif maupun yang represif. Selain itu, penanggulangan korupsi ini harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun segenap elemen masyarakat.

Upaya pencegahan:

- Transparansi dalam pelayanan; transparan dan tepat waktu dari mulai proses awal sampai akhir sehingga dapat meminimalisasi terjadi pungutan liar
- *Good Governance Principle*; transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi publik
- Kode etik birokrat
- Reformasi birokrasi; remunerasi pegawai dan pemangkasan proses birokrasi yang tidak perlu
- Memperketat pengawasan internal
- Sanksi yang tegas (pidana dan administrasi)
- Pengendalian gratifikasi
- Kerjasama antar instansi
- Tertib administrasi hukum, LHKPN, dll.

### **Apa yang Bisa Dilakukan Oleh Kita Sebagai Mahasiswa?**

Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun jaman terus



bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme.

Semangat-semangat yang berkobar terpatri dalam diri mahasiswa, semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya. Intuisi dan hati kecilnya akan selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa tahu, ia harus berbuat sesuatu untuk masyarakat, bangsa dan negaranya.

Mahasiswa, sebagai agen perubahan, diharapkan mampu ikut serta mengatasi permasalahan bangsa ini terutama dalam hal korupsi. Sebagai bagian dari elemen masyarakat yang berkarakter intelek, jiwa muda, dan idealis, mahasiswa harus mengambil fungsi dan perannya dalam upaya menanggulangi masalah korupsi. Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum (Wibowo dan Puspito, 2011).

Dengan bekal sebagai manusia terdidik, mahasiswa diharapkan mampu mengubah kebiasaan hidupnya dengan menanamkan nilai – nilai antikorupsi. Nilai – nilai yang dimaksud adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai – nilai tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang baik yaitu terbebasnya masyarakat dari masalah korupsi. Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa sehingga apabila nilai – nilai antikorupsi sudah tertanam sejak awal maka memutus rantai “budaya” korupsi yang telah lahir sejak lama.

Menurut Wibowo dan Puspito (2011), keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi antikorupsi di dalam diri mereka



sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

Hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa dalam melakukan peran gerakan antikorupsi adalah sikap idealis dan kritis yang ada sejak mahasiswa harus selalu dijaga dan dibawa pasca lulus dari dunia kampus. Seminar, lokakarya, pamflet – pamflet, dan sarana gerakan antikorupsi lainnya diharapkan selalu membekas dalam diri mahasiswa. Dengan demikian, karakter antikorupsi tak akan luntur dan bahkan akan diwariskan ke generasi berikutnya. Dengan terbebasnya bangsa ini dari korupsi maka pembangunan bangsa ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa bangsa ini kepada kejayaan dan kesejahteraan.

## Referensi

- Revida, Erika. 2003. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. USU Digital Library.
- Karsona, Agus Mulia. 2011. *Pengertian Korupsi. Dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/ Anti Korupsi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Wibowo, Aryo P. dan Puspito, Nanang T. 2011. *Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kemendikbud.



# KEDAULATAN PANGAN = RETORIKA?

## ***KAJIAN STRATEGIS DEWAN MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UGM 2013***

Dari analisis kedaulatan pangan ini semoga kedaulatan pangan Indonesia tidak hanya sebuah retorika tetapi perwujudan yang nyata dan cita-cita bersama dari rakyat Indonesia. Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Pertanian Indonesia!

### **Pendahuluan**

Jutaan orang di seluruh dunia hidup dalam deraan kelaparan dan kemiskinan kronis yang tidak teratasi. Data terkini menunjukkan bahwa di Asia saja lebih dari 500 juta rakyat menderita kelaparan kronis, hal ini terutama menimpa anak-anak dan perempuan. Seruan kedaulatan rakyat atas pangan mendapat respon luar biasa dari gerakan-gerakan tani di seluruh belahan dunia sebab seruan ini menyentuh inti persoalan sesungguhnya yaitu masa depan produksi pangan bagi masyarakat. Demikian pula sebagai sebuah respon langsung terhadap ancaman globalisasi pada kedaulatan pangan.

Konsep kedaulatan pangan telah berkembang sedemikian rupa melampaui konsep ketahanan pangan (*food security*) yang lebih dikenal sebelumnya, yang hanya bertujuan untuk memastikan diproduksinya



pangan dalam jumlah yang cukup dengan tidak memperdulikan macamnya, bagaimana, di mana dan seberapa besar skala produksi pangan tersebut. Kedaulatan pangan adalah interpretasi luas dari hak atas pangan, ia melampaui wacana tentang hak pada umumnya.

Pangan sangat penting bagi kehidupan. Karenanya, hak atas pangan merupakan perluasan dari hak asasi manusia paling mendasar untuk hidup. Sebagai kaidah hak asasi manusia kedaulatan pangan menegaskan baik hak-hak individu maupun hak kolektif sekaligus mendorong pengejawantahan hak-hak tersebut. Senantiasa menegaskan hak rakyat menentukan nasibnya sendiri serta kebebasan rakyat menjalankan aksi secara mandiri menuntut hak-haknya.

Fokus diskusi yang telah dilaksanakan sebelumnya adalah untuk mengetahui kondisi permasalahan penting pada sektor-sektor pertanian dan pangan. Pengaruh terbukanya perdagangan bebas di era globalisasi ini sangat penting dibahas karena memiliki kaitan yang erat dengan kedaulatan pangan di setiap negara. Pembicara diharapkan memberikan gambaran tentang isu-isu yang terkait dengan kedaulatan pangan, terutama kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait isu ini. Pembicara juga diharapkan memberikan sebuah masukan kebijakan alternatif terhadap permasalahan kedaulatan pangan ini.

Hasil yang diharapkan adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian dapat melakukan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu memulihkan kondisi pertanian di Indonesia sehingga terwujudnya kedaulatan pangan bagi negeri ini. Selain itu mahasiswa diharapkan dapat memunculkan suatu ide kreatif agar dapat menciptakan kedaulatan pangan bagi Indonesia.

## **Pembahasan dan Diskusi**

Konsep yang telah dipaparkan terlebih dahulu yaitu sebuah konsep **Ketahanan Pangan** yang memiliki makna bahwa bangsa ini harus mampu untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam negeri (mencukupi kebutuhan akan pangan) tanpa memperhatikan dari mana pangan itu berasal. Dari konsep ini terdapat sebuah kejanggalan pada makna tanpa tahu darimana pangan berasal. Hal ini sangat dikhawatirkan jikalau konsep ketahanan pangan ini diterapkan maka negara akan bebas mendatangkan pangan dari manapun asalkan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Jika seperti ini maka muaranya akan



bertemu pada kegiatan impor yang berlebihan. Hal ini tentu tidak relevan jika kita hanya berpikir untuk memenuhi pangan namun asalnya karena adanya kegiatan impor.

Adanya konsep ketahanan pangan yang terbilang agak rancu maka dimunculkan sebuah konsep **Kedaulatan Pangan**. Konsep ini sama tujuannya dengan ketahanan pangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa namun berbeda dengan cara memperolehnya. Pada konsep kedaulatan pangan, pangan diperoleh dan diupayakan dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari dalam negeri dan tidak sama sekali bergantung dengan impor. Pada konsep ini seluruh masyarakat Indonesia harus dan dituntut untuk memanfaatkan kearifan lokal dari budaya asli Indonesia secara optimal. Jika konsep kedaulatan pangan ini dapat dimengerti, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia seluruhnya maka konsep kedaulatan pangan ini tidak dianggap sebagai angin lalu, sekadar retorika, atau hanya sekadar konsep belaka. Namun harapannya konsep ini dapat mendarah daging di benak masyarakat Indonesia seluruhnya dan anggapan kedaulatan pangan hanya sekadar retorika adalah konsep yang tidak benar..

Perwujudan konsep kedaulatan pangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri tetapi harus ada kerjasama antara pihak pemerintah, kalangan akademisi, swasta, dan masyarakat Indonesia secara umum. Sebab perwujudan kedaulatan pangan untuk saat ini masih sangat sulit akibat dari sikap oknum-oknum pemerintah yang terkadang tidak berpihak pada petani, menguntungkan egonya masing-masing untuk memperkaya diri, dan masih sulit juga dalam birokrasi pemerintahannya (birokrasi yang *ruwet* dan memakan waktu yang cukup lama tetapi tidak ada hasilnya). Akibat ulah tersebut banyak masyarakat yang tidak mau lagi percaya dengan oknum pemerintah dan kecewa terhadap pelayanan yang diberikan.

Selain itu, konsep kedaulatan pangan ini identik dengan pembangunan di dunia pertanian. Kedaulatan pangan dapat dicapai jika kondisi pertanian negara kita mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan dapat bersaing dengan luar negeri. Bukankah Indonesia sebagai negara Agraris? Tongkat kayu dan batu menjadi tanaman? Tapi kenyataannya bagaimana? Pertanian Indonesia banyak dirundung masalah, mulai dari lahan pertanian yang sebenarnya tidak relevan untuk mengadakan usaha pertanian dengan skala besar, alih fungsi



lahan yang kian hari kian gencar dan mengikis (mengurangi) lahan pertanian Indonesia, sarana produksi yang mahal dan daya beli petani cukup rendah, subsidi pupuk yang tidak merata, produksi pertanian yang sangat dipengaruhi oleh adanya iklim sedangkan kondisi iklim saat ini sangat sulit ditebak, harga hasil panen yang terkadang merugikan petani, pemasaran hasil-hasil pertanian yang rantai distribusinya sangat panjang sehingga harga dipermainkan oleh para tengkulak-tengkulak, kebijakan pemerintah yang jarang sekali berpihak pada petani, dari segi kualitas sumber daya manusia cukup rendah, teknologi yang belum modern, dan masih banyak lagi. Melihat permasalahan yang dipaparkan, begitu kompleksnya masalah pertanian di Indonesia dari hulu ke hilir. Jika tidak ada yang konsen dan fokus untuk memerangi dan memiliki kesadaran diri untuk mengatasi dan peduli kondisi pertanian Indonesia, akankah Indonesia ini akan jaya?

Begitu banyak masalah internal dalam dunia pertanian Indonesia, apalagi rakyat Indonesia telah dihadapkan oleh Asia Free Trade Area (AFTA) atau perdagangan bebas. Jika rakyat Indonesia tidak segera berbenah diri, berinovasi, kreatif, dan mandiri, pasar internasional Indonesia akan *collaps* dan kita hanya akan dijadikan konsumen besar dari negara-negara lain. Ini adalah masalah (problema) yang besar bagi kita seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya aku (mahasiswa), dosen, pemerintah, swasta, bahkan petani. Bergerak sinergi dan saling membantu adalah hal yang harus kita lakukan dari sekarang untuk menyelamatkan Indonesia di masa depan. Berjaya atau hancur? Semua adalah pilihan, bergantung kita semua yang memperjuangkannya.

Selain pangan, perdagangan bebas, dan masih banyak lagi masalah yang pada akhirnya bermuara di bidang pertanian. Entah berapa tahun lagi kita semua akan dihadapkan pada kondisi krisis air, perubahan iklim, dan ketersediaan energi. Itu tidak lama lagi kawan, sebentar lagi. Kita dapat melihat sekarang ini, mengapa kita belum mampu berdaulat pangan? Dapat diketahui bahwa hasil pertanian kita difungsikan tidak hanya untuk pangan umat manusia tetapi untuk berbagi pada hewan dan makhluk hidup lainnya. Selain itu sekarang sudah masuk ke zaman penggunaan energi alternatif seperti *biofuel* dari singkong. Singkong yang notabenehnya sebagai bahan makanan pokok dialihfungsikan untuk *biofuel* (sumber energi). Dengan kondisi yang seperti ini dapat diketahui adanya tumpang tindih antara pangan dan energi. Sekali lagi kita harus



waspadaa dengan kondisi alam yang akhirnya akan menggerogoti diri kita sendiri.

Melihat permasalahan seperti itu apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa agar dapat mengurangi dampak dari keganasan alam semesta? Upaya yang disarankan yaitu mulai dari yang kecil, dari diri sendiri, dan dari sekarang. Misalnya : Sekarang gencar sekali bahan makanan yang terbuat dari gandum dan itu mayoritas, padahal jika kita ketahui bahwa gandum itu merupakan hasil impor terbesar di Indonesia, sebagai mahasiswa kita harus mengajak setidaknya keluarga untuk mengurangi budaya konsumsi yang berbahan dasar dari gandum seperti roti tawar. Selain itu, mahasiswa harus sering memupuk kepedulian dengan melakukan pemberdayaan langsung ke petani, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, bukan berorientasi ke nilai, agar dapat membantu permasalahan yang dihadapi petani, menciptakan inovasi alat-alat pertanian, menerapkan pertanian organik dan lain-lain.

Terkait dengan permasalahan kebijakan, pernah dipaparkan sebelumnya yaitu ketika petani di kabupaten Bantul sedang mengalami musim panen cabai tetapi harga cabai di pasaran turun, dan petanipun merasa dirugikan dan akhirnya membiarkan cabai-cabai tersebut. Ketika itu Bantul sedang dipimpin oleh seorang Bupati yang bernama Bapak Idam Samawi, beliau merasa prihatin dengan kondisi petani cabai yang merasa dirugikan dan beliau memutuskan untuk mengalokasikan anggaran dana pemerintah untuk membeli semua cabai-cabai dari petani dibantu dengan pegawai bawahannya dengan harga beli yang lebih tinggi dari harga pasaran. Pemerintah pun membeli dan membawa cabai itu ke Jakarta untuk dipasarkan di sana kebetulan harga cabai di Jakarta masih lebih tinggi dengan harga yang ditawarkan Bupati kepada petani. Beruntung sekali pemerintah karena mendapat keuntungan yang lebih dari apa yang diharapkan. Dari salah satu contoh inilah kita dapat melihat sebuah kebijakan seorang pemimpin yang membela petaninya yang sedang dirugikan akibat harga jual yang tidak menentu dan sering berubah.

Dari analisis kedaulatan pangan ini semoga kedaulatan pangan Indonesia tidak hanya sebuah retorika tetapi perwujudan yang nyata dan cita-cita bersama dari rakyat Indonesia. Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Pertanian Indonesia!



## Kesimpulan

Konsep kedaulatan pangan merupakan sebuah konsep yang membenahi konsep ketahanan pangan yang salah kaprah. Konsep kedaulatan pangan sangat memperhatikan darimana pangan itu berasal dan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga dan melestarikan kearifan lokal budaya bangsa Indonesia. Disisi lain kedaulatan pangan sangat dipengaruhi oleh keadaan pertanian, akan tetapi dalam dunia pertanian begitu banyak dijumpai permasalahan yang sangat kompleks. Sehingga perlu adanya kepedulian dari generasi bangsa untuk bergerak dan peduli terhadap nasib pertanian di masa depan tanpa melupakan cita-cita bersama dalam mewujudkan Indonesia berdaulat pangan. Dengan kata lain kedaulatan pangan yang selama ini kita gadang-gadang tidak hanya dijadikan sebagai konsep angin lalu atau retorika tetapi menjadi bukti bahwa Indonesia mampu berdaulat pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

## Sumber

Diskusi Selasar DEMA FAPERTA “Kedaulatan Pangan = Retorika???” dengan pemantik Bapak Subejo (Dosen PKP Faperta UGM), Bapak Prof. Ali Agus (Dekan Peternakan), dan Mahasiswa Fakultas Pertanian.



# KAMI JUGA INGIN SEKOLAH

## *KAJIAN STRATEGIS BEM FAKULTAS GEOGRAFI UGM 2013*

Pendidikan merupakan salah satu hak warga negara yang telah diatur dalam undang – undang dasar 1945. Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan”. Menurut UUD 1945 pasal 26 yang dimaksud dengan warga Negara adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga Negara. Hal ini berarti tidak memandang suku, agama, dan ras. Semua yang termasuk warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Gambar 1. Atap Bangunan Sekolah





Pada kenyataannya di lapangan, belum semua warga Negara Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Ini membuktikan bahwa UUD 1945 pasal 31 ayat 1 belum terealisasi dengan baik. Selain itu pendidikan yang harusnya bisa didapatkan di semua daerah, masih terpusat di Indonesia bagian barat khususnya Pulau Jawa. Bagaimana dengan keadaan pendidikan warga Indonesia di bagian Timur? Apakah mereka sudah mendapatkan pendidikan yang layak?

Sebut saja bumi cendrawasih, Papua. Pendidikan yang ada pada tanah penghasil emas itu masih sangat mini dan memprihatinkan. Fasilitas pendidikan yang seharusnya mereka terima sama dengan kita yang ada di Pulau Jawa. Sekolah yang nyaman, aman, dan tenaga pendidik yang memadai. Namun pada kenyataannya mereka masih harus menempuh pendidikan yang seadanya di tempat yang sangat tidak layak serta tenaga pendidik yang masih sangat kurang.

Bahkan mereka masih harus menempuh jarak yang tidak dekat untuk sampai di sekolahnya. Ada yang harus berjalan melalui bukit bahkan menyebrang sungai dengan sampan. Mereka berjalan tanpa alas kaki di keadaan jalan yang masih buruk, banyak batuan terjal dan mungkin panas. Perjuangan yang begitu luar biasa demi mendapat ilmu.

Gambar 2. Berjalan Tanpa Alas Kaki



Perjuangan yang begitu luar biasa terkadang berakhir sia – sia ketika mereka sudah sampai sekolah tetapi terpaksa diliburkan karena tenaga pendidik yang tidak hadir. Tenaga pendidik yang hanya satu – satunya dan harus mengajar beberapa kelas sekaligus. Sungguh luar



biasa semangat dan keinginan anak – anak papua untuk mendapatkan ilmu yang sangat berharga.

Ternyata semangat untuk mendapatkan ilmu bukan hanya berada pada anak – anak. Bapak – bapak bahkan kakek – kakek juga masih berjuang untuk mendapatkan ilmu. Tidak peduli umur mereka, tidak peduli jikalau mereka harus berada satu ruangan dengan anaknya, mereka tetap berjuang untuk mendapatkan ilmu. Hal ini menandakan bahwa ilmu merupakan hal yang sangat berharga bagi mereka. Perjuangan yang begitu luar biasa dan tidak peduli gengsi sudah cukup sebagai bukti bahwa mereka sangat menghargai ilmu dan sangat menginginkannya.

Gambar 3. Bapak-Bapak dengan Seragam SMA



Namun sayangnya perjuangan yang luar biasa dan keinginan yang sangat besar itu tidak dibarengi keadaan yang mendukung. Dari sisi tenaga pendidik, bumi cenderawasih masih sangat membutuhkan. Keterbatasan tenaga pendidik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kurangnya orang yang berpendidikan yang bisa mengajarkan ilmu, tidak banyak orang yang tinggal di luar Papua yang mau mengabdikan di tanah cenderawasih.

Banyak alasan yang mereka utarakan untuk tidak mengabdikan di bumi cenderawasih. Mulai dari jauh dengan keluarga mereka hingga fasilitas yang tidak selengkap di tempat tinggal mereka. Bagaimana bisa bumi cenderawasih yang bisa dikatakan “tertinggal” dibanding pulau –



pulau lain jika pendidikan pun masih sulit diakses. Padahal jika pendidikan bisa diakses dengan mudah mereka bisa membenahi banyak hal. Contohnya di bidang pemerintahan. Dengan pendidikan, pemerintahan bisa diperbaiki dengan pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan.

Rasa nasionalisme juga bisa ditumbuhkan melalui pendidikan. Dengan pendidikan kewarganegaraan, mereka menjadi lebih mengerti arti nasionalisme dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak asing. Kesenjangan yang begitu mencolok antara Papua dengan pulau – pulau besar lainnya di Indonesia membuat mereka “cemburu”. Mengapa mereka diperlakukan “berbeda” padahal masih berada pada Negara yang sama, Indonesia?

Kelemahan yang seperti itu bisa dimanfaatkan oleh pihak asing. Sebut saja Benua Australia yang jaraknya relatif dekat dengan Papua, bisa memanfaatkan kelengahan ini. Banyak cara yang bisa mereka lakukan, misalkan dengan memberikan perhatian lebih kepada warga Papua dibanding pemerintah Indonesia. Hal ini tentu sangat berbahaya karena warga Papua akan berpikir bahwa Australia justru lebih “perhatian” dengan mereka. Sedikit demi sedikit jika perhatian oleh pemerintah Australia ini terus berjalan, akan membuat rasa nasionalisme Indonesia warga Papua luntur. Pada saat mereka sudah merasa diacuhkan oleh pemerintah Indonesia dan bujukan pemerintah asing lebih menarik perhatian mereka, maka kemungkinan terburuk lepasnya bumi cenderawasih dari Negara Kesatuan Indonesia tidak bisa lagi dihindarkan.

Jika anak – anak Papua bisa menyampaikan aspirasinya mereka mungkin akan mengatakan “Kami ingin sekolah seperti kakak kakak, kami ingin sepatu agar kaki kami tidak lecet ketika harus berjalan jauh ke sekolah, kami ingin buku banyak untuk baca”. Betapa mirisnya keadaan yang begitu timpang ketika kita bisa menikmati kehidupan yang begitu mudah mengakses pendidikan, menikmati listrik setiap saat, membeli barang – barang dengan harga yang terjangkau tetapi masih banyak saudara kita di bumi cenderawasih masih banyak yang harus berjuang dengan keras demi meinmba ilmu, tidak bisa menikmati listrik, harus membeli barang – barang dengan harga yang melambung.

Mereka hanya butuh sedikit perhatian, perhatian yang tidak muluk – muluk. Mereka hanya ingin ilmu, mereka hanya ingin sekolah. Seberat apapun perjalanan yang harus mereka lalui, mereka siap untuk



menjalankannya, apapun buku yang ada mereka akan membacanya dengan senang. Tetapi bagaimana mereka bisa membaca jika mereka tidak bisa membaca? Bagaimana mereka bisa membaca jika mereka belum mengerti huruf? Bagaimana mereka akan mengerti huruf jika tidak ada yang mengenalkan mereka huruf kepada mereka? Semua akan terpenuhi jika mereka memiliki tenaga pendidik yang sabar dan setia mendampingi mereka sampai mereka mengerti huruf.

Sedikit perhatian yang bisa kita berikan akan berarti banyak bagi mereka, akan mengubah banyak kehidupan mereka. Mereka akan lebih bisa menyambut masa depan yang lebih cerah, mereka akan mengerti arti nasionalisme, mereka akan sangat senang menyambut kebaikan kita. Tenaga pendidik maupun anak – anak pencari ilmu di bumi cenderawasih adalah orang – orang yang paling semangat. Mereka rela melakukan apapun demi ilmu. Tidak peduli hujan, panas, tanpa alas kaki, tua, muda, semua disingkirkan demi ilmu.

Bersyukur adalah kata yang paling pantas untuk kita yang tinggal di pulau yang dekat dengan pusat pemerintahan, yang fasilitasnya lengkap, yang mudah mengakses pendidikan, yang bisa menikmati listrik setiap saat, yang bisa membeli barang – barang dengan harga murah, yang bisa berjalan di jalanan yang halus dan tidak terjal, yang bisa berjalan nyaman dengan alas kaki, yang selalu terpenuhi tenaga pendidiknya, yang tidak perlu menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah, dan yang tidak perlu belajar di tempat yang bisa saja roboh sewaktu – waktu.



# **SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL: BABAK BARU SISTEM KESEHATAN INDONESIA**

## ***ADVOKASI DAN KAJIAN STRATEGIS BEM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UGM 2013***

Indonesia tidak lama lagi akan memasuki babak baru dalam dunia kesehatan masyarakat yang tepatnya akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014. Babak baru tersebut akan ditandai dengan diberlakukannya kebijakan terbaru pemerintah yakni pelaksanaan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini nantinya akan memberikan asuransi terhadap seluruh masyarakat dalam lima aspek, yakni : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Untuk melaksanakan jaminan tersebut, maka pemerintah membentuk badan hukum yang nantinya sebagai pelaksana program jaminan sosial yakni BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sebagaimana termaktub dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Dengan dilaksanakannya sistem yang terbaru ini, maka beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemudian akan bertransformasi menjadi BPJS. BUMN ini diantaranya adalah PT. ASKES (Persero) selanjutnya akan menjadi BPJS Kesehatan, sedangkan PT. ASABRI (Persero), PT. JAMSOSTEK (Persero), PT. TASPEN (Persero) selanjutnya akan dilebur menjadi satu dalam BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan diawali oleh PT. ASKES (Persero) yang menjadi BPJS Kesehatan dan akan mulai beroperasi mulai



tanggal 1 Januari 2014. Selain itu, PT. JAMSOSTEK (Persero) akan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan di waktu yang sama. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 24 tahun 2011, BPJS Kesehatan nantinya akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial, hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 3. Pembentukan jaminan sosial tersebut meskipun telah diamanatkan sejak Amandemen Keempat UUD 1945 dari tahun 2002, namun baru dikeluarkan mengenai perundang-undangnya pada tahun 2004 yakni UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sesuai amanat UU No. 40 tahun 2004, program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, nantinya akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial tersebut. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau keluarganya. Wewenang BPJS antara lain menagih iuran, menempatkan dana, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi kerja, mengenakan sanksi administrasi kepada Peserta dan Pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam mengelola SJSN, maka BPJS harus memegang teguh prinsip – prinsipnya, antara lain : kegotongroyongan; nirlaba; keterbukan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar – besar kepentingan peserta. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 24 tahun 2011, BPJS terdiri dari dua jenis yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaannya, tata aturan mengenai kepesertaan sistem BPJS ini telah dijelaskan secara rinci dalam UU No. 24 tahun 2011 Bab V tentang Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran. Dalam **Pasal 14**, telah dijelaskan bahwa peserta program Jaminan Sosial ini berlaku wajib bagi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Selain itu, **Pasal 15** juga menjelaskan secara rinci mengenai aturan kepesertaan BPJS :



- Pemberi Kerja yakni perseorangan, badan usaha atau badan lain yang memiliki pegawai untuk mendaftarkan dirinya dan pegawainya kepada BPJS.
- Pemerintah akan mendaftarkan masyarakat miskin sebagai Penerima Bantuan luran beserta keluarganya kepada BPJS.
- Setiap orang selain yang telah diatur sebelumnya, wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS.
- Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial.

Dalam **Pasal 19** menjelaskan mengenai iuran yang diwajibkan kepada masing – masing peserta BPJS :

- Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.
- Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- Peserta yang bukan pekerja dan bukan penerima bantuan luran wajib membayar dan menyetor luran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- Pemerintah membayar dan menyetor luran untuk Penerima Bantuan luran kepada BPJS.

Sampai saat ini, sudah ada beberapa perundang – undangan yang dikeluarkan dalam mendampingi UU yang telah ada sebelumnya, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Kesehatan. Dalam PP No. 101 tahun 2012 ini, ditegaskan kembali bahwa Penerima Bantuan luran merupakan fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang ditetapkan melalui kriteria tertentu setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Untuk tahap awal (1 Januari 2014), pemerintah nantinya akan menanggung PBI sejumlah 86,4 juta jiwa.

Salahsatu hal yang penting dan harus dicermati menjelang pelaksanaan SJSN pada tanggal 1 Januari 2014 yakni sosialisasi. Dari survei yang diselenggarakan Edelman Indonesia bekerjasama dengan Bagian Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Responden sebanyak 421 dokter dan dokter spesialis di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan diwawancarai pada survei yang



berlangsung pada 5 November hingga 14 Desember 2012. Berdasarkan hasil survei yang dipublikasikan pada pertengahan maret 2013, ternyata kurang dari 50% dokter dan dokter spesialis yang telah memahami SJSN Kesehatan. Di Jakarta, hanya 3% responden yang menyatakan mengetahui sepenuhnya, dan yang mengetahui sebanyak 35%, sedangkan 35% tidak mengetahui dengan pasti, serta 35% tidak mengetahui, dan tidak menjawab 1%. Kemudian di 3 kota lainnya, mengetahui sepenuhnya 5%, mengetahui 38%, tidak mengetahui dengan pasti 32%, tidak mengetahui 19%, dan tidak menjawab 6%. Dari hasil ini menunjukkan para responden di Jakarta memiliki pengetahuan mengenai SJSN Kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan sejawatnya di 3 kota lainnya. Dari realitas tersebut, maka menjadi tugas utama bagi pemerintah dalam menyebarluaskan informasi secara intensif tentang pemberlakuan sistem SJSN serta berbagai macam hal petunjuk teknis kepada seluruh tenaga medis di Indonesia.

Selain masalah terkait sosialisasi, penerapan SJSN juga masih mengalami kendala karena sejumlah rumah sakit sampai saat ini masih merasa belum siap untuk menerapkan sistem SJSN. Hal ini terkait dengan renumerasi, penggajian dan pembentukan tim kerja untuk menyaliasi pos – pos yang bisa dihemat. Selain itu keterbatasan jumlah dokter spesialis dan sebarannya yang belum merata serta infrastruktur yang belum memadai nantinya juga dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Sehingga dalam menyaliasi kondisi tersebut, diharapkan adanya pilot project atau proyek percontohan dalam pelaksanaan SJSN. Nantinya, apabila proyek percontohan tersebut akan berjalan lancar dan tidak membebani rumah sakit, maka rumah sakit swasta pun juga akan mengikuti penerapan sistem ini.

Sistem pembayaran dalam SJSN yang jauh berbeda dengan sistem sebelumnya tentu juga akan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi SJSN mendatang. Penerapan SJSN nantinya akan menerapkan pola *prospective payment* dimana biaya sudah ditentukan sebelum layanan diberikan. Sistem pembayaran ini dinamakan INA CBG's (Indonesia Case Based Group's). INA CBG's merupakan sistem pembayaran kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang dikelompokkan (*grouped*) berdasarkan ciri klinis yang sama dan pemakaian sumber daya (biaya perawatan) yang sama. Pembayaran dengan INA-CBG's ini meliputi biaya dari mulai pasien masuk rumah sakit sampai pasien pulang/sembuh. Satu tarif dibayarkan sekaligus



untuk seluruh komponen pelayanan yang meliputi pemeriksaan dokter, penunjang diagnostik (laboratorium, radiodiagnostik, elektromedik, dll), dan obat-obatan, serta akomodasi kelas rawat untuk pasien rawat inap.

Dalam hal ini, program KJS (Kartu Jakarta Sehat) telah menerapkan sistem pembayaran INA CBG's dengan melibatkan Rumah Sakit se-DKI Jakarta, sehingga diharapkan penerapan program tersebut bisa menjadi semacam latihan dan percontohan bagi sistem pembayaran tersebut dalam implementasi SJSN mendatang.

Berbagai kendala juga dapat ditemui mengenai posisi RSGMP (Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan) dalam kerangka sistem SJSN. RSGMP merupakan wadah untuk menunjang pendidikan profesi dokter gigi, dokter gigi spesialis maupun program magister dan doctoral. RSGMP selain sebagai sarana pendidikan, juga untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan gigi dalam rangka meningkatkan status kesehatan gigi masyarakat. Namun sampai saat ini, belum ada kejelasan regulasi yang terkait dengan posisi RSGMP dalam pemberlakuan SJSN. Hal ini perlu dicermati karena apabila RSGMP kemudian diposisikan sebagai rumah sakit yang tidak diperbolehkan melayani peserta BPJS, tentu akan menyulitkan posisi mahasiswa yang memerlukan pasien untuk pendidikan profesi. Maka untuk menghindari hal tersebut, pemerintah sudah selayaknya harus memberikan ketegasan dan kejelasan bagi posisi RSGMP dalam kerangka SJSN secara utuh.

## Penutup

Salah satu pasal di dalam UUD 1945 tentang jaminan sosial segera akan diimplementasikan dalam bentuk SJSN. SJSN ini mencakup seluruh rakyat Indonesia (*universal coverage*). Lembaga yang nantinya menyelenggarakan SJSN adalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang berprinsip nirlaba. BPJS dibagi menjadi dua, yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan. Kesehatan merupakan gabungan dari PT ASKES (persero) dan JPK PT JAMSOSTEK (persero) sedangkan ketenagakerjaan merupakan gabungan dari PT JASMSOSTEK (persero), PT TASPEN (persero), PT ASABRI (PERSERO). SJSN diharapkan dapat menjadi sebuah sistem yang dapat menjamin seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali dan dapat menjadi salah satu perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sila ke lima, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.



## **Sikap terhadap SJSN**

1. Mendukung terwujudnya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Sosialisasi terkait dengan SJSN sangat diperlukan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya adalah tenaga medis, pihak rumah sakit, mahasiswa serta masyarakat secara umum.
3. Pemerintah/ Presiden segera menerbitkan peraturan turunan dari UU SJSN dan UU BPJS demi terselenggaranya suatu sistem yang adil dan berpihak kepada rakyat.



# MEMBEDAH MODE TRANSPORTASI MASSAL DI INDONESIA

## *KAJIAN STRATEGIS BEM FAKULTAS TEKNIK UGM 2013*

Indonesia adalah salah satu negara dengan luas terbesar di dunia. Dengan luas sebesar 1,904,569 km<sup>2</sup> dengan jarak antar kota di Indonesia yang terpisahkan cukup jauh, menyebabkan masyarakatnya dituntut untuk selalu mobile<sup>51</sup>. Apalagi ditunjang dengan fakta bahwa pertumbuhan dan kemajuan antar kota yang tidak merata. Hal tersebut semakin memperkuat kebutuhan mobilisasi penduduk menuju kota dengan tingkat kemajuan yang lebih baik.

Dengan tingginya mobilisasi penduduk di Indonesia, menyebabkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sangat dibutuhkan. Dalam hal ini utamanya adalah sarana transportasi massal yang dipergunakan. Dengan mempertimbangkan faktor jarak dan kondisi geografis di Indonesia, maka 3 ranah transportasi (transportasi darat, air, dan udara) akan menjadi tulang punggung dari mobilisasi penduduk. Dan karena tingkat kebutuhan akan transportasi tersebut

---

<sup>51</sup> [id.wikipedia.org/wiki/indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/indonesia)



tinggi, menyebabkan transportasi dapat menjadi ladang uang yang menggiurkan bagi siapapun yang ikut serta didalamnya.

Transportasi air mutlak dibutuhkan mengingat kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jalur antar pulau yang terpisahkan laut maupun selat, berusaha dihubungkan dengan kapal laut. Tak peduli yang diangkut itu penumpang manusia ataupun barang, semuanya berusaha diangkut oleh kapal laut. Pengaturan angkutan laut di Indonesia dilakukan oleh Pelni. Meskipun didalamnya juga ada perusahaan swasta yang juga menjalankan bisnis transportasi ini.<sup>52</sup>

Meskipun pada beberapa tahun ini transportasi udara telah berkembang pesat, hal tersebut tidak membuat mode transportasi ini mati. Mengingat, banyak rute dari kapal laut yang tidak ter-cover oleh mode transportasi udara. Selain itu, pertimbangan harga juga membuat mode ini masih terus beroperasi hingga saat ini. Hal ini nampak ketika musim lebaran telah tiba. Pada tahun 2013 diperkirakan jumlah pemudik yang menggunakan kapal laut sebanyak 1.664.832 orang<sup>53</sup>. Bahkan pihak Pelni pun harus menambah armada tambahan dengan menggunakan kapal laut milik angkatan laut TNI.<sup>54</sup>

Namun, meskipun mode transportasi ini masih tetap beroperasi hingga saat ini, armada yang dipergunakan umumnya masih menggunakan armada berusia lanjut. Akibatnya adalah seringnya terjadi insiden kecelakaan. Meskipun akhir-akhir ini jarang terjadi kecelakaan, pada tahun 2002-2012 telah terjadi kecelakaan yang melibatkan mode transportasi ini sebanyak 19 kali dan menyebabkan korban jiwa sebanyak 686 orang<sup>55</sup>. Selain kondisi armada, hal lain yang patut diamati adalah mengenai faktor alat keselamatan dalam kapal yang sering kali kurang dari yang dibutuhkan. Hal itu pulalah yang menyebabkan korban jiwa selalu ada jika terjadi insiden kecelakaan.

Kurangnya kompetisi antar operator kapal membuat perkembangan mode transportasi ini cukup lambat. Bandingkan dengan mode transportasi lain, perkembangan mode transportasi air dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Peremajaan kapal yang jarang

<sup>52</sup> <http://www.indonesiaferry.co.id/id/news/industry>

<sup>53</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2013/08/05/090502398/Ini-Jumlah-Pemudik-per-H-4-Lebaran>

<sup>54</sup> [http://www.fajar.co.id/metromakassar/2859990\\_5961.html](http://www.fajar.co.id/metromakassar/2859990_5961.html)

<sup>55</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecelakaan\\_dan\\_insiden\\_kapal\\_di\\_Indonesia#2009](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecelakaan_dan_insiden_kapal_di_Indonesia#2009)



dilakukan adalah salah satu permasalahan yang terjadi akibat minimnya kompetisi antar operator transportasi.<sup>56</sup>

Beralih ke transportasi udara. Mode transportasi ini memiliki perkembangan paling cepat dibandingkan dengan mode transportasi air maupun darat. Seiring semakin majunya teknologi penerbangan, pertumbuhan maskapai di Indonesia pun turut meningkat. Tercatat hingga saat ini terdapat 49 maskapai yang aktif beroperasi di Indonesia. Baik yang beroperasi untuk kapasitas lebih dari 30 penumpang maupun yang kurang dari 30 penumpang. Jumlah tersebut belum termasuk 39 pesawat cargo.<sup>57</sup> Akibat banyaknya maskapai tersebut, semakin banyak kawasan di Indonesia yang telah terhubung oleh pesawat udara.

Dibalik kemajuan perkembangan transportasi udara, permasalahan yang ada pun juga cukup banyak. Utamanya terkait infrastruktur pendukung transportasi udara, kelayakan operasi pesawat, hingga masalah yang terkait langsung dengan penumpang. Terkait masalah infrastruktur pendukung, hingga saat ini, mayoritas bandara di Indonesia tidak mampu menampung penumpang yang ada. Untuk daerah operasional PT Angkasa Pura II, Tercatat hanya bandara Kuala Namu di Medan, Sultan Iskandar Muda di Aceh, dan **Halim** Perdanakusumah di Jakarta yang masih memiliki kapasitas lebih dalam menampung penumpang yang ada. Bahkan, bandar udara Soekarno Hatta pun juga tidak mampu menampung penumpang yang ada<sup>58</sup>. Akibatnya, tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang pun berkurang. Apalagi untuk bandara skala internasional, tentunya akan memberikan citra buruk bagi dunia internasional jika pelayanannya buruk. Mengingat bandara dapat dikatakan sebagai gerbang masuk wisatawan internasional.

Berkaitan dengan kelayakan operasi pesawat, umumnya dikaitkan dengan kualitas armada pesawat yang digunakan. Meskipun beberapa bulan terakhir dunia penerbangan sempat dihebohkan dengan pembelian 234 pesawat baru oleh salah satu maskapai Indonesia dari produsen pesawat terkemuka<sup>59</sup>, masih banyak maskapai di Indonesia

---

<sup>56</sup> <http://news.okezone.com/read/2012/10/04/337/699104/yliki-33-persen-kapal-penyeberangan-sudah-uzur>

<sup>57</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_maskapai\\_penerbangan\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_maskapai_penerbangan_Indonesia)

<sup>58</sup> <http://www.beritasatu.com/bisnis/40792-10-bandara-di-barat-indonesia-kelebihan-kapasitas.html>

<sup>59</sup> <http://id.berita.yahoo.com/beli-airbus-senilai-rp-230-triliun-lion-air-191322731.html>



yang menggunakan pesawat dengan usia lanjut<sup>60</sup>. Bahkan, beberapa kali tercatat insiden pesawat yang diakibatkan oleh kerusakan komponen pesawat itu sendiri. Selain permasalahan komponen, faktor lain yang tidak dapat diabaikan adalah faktor kesalahan manusia (human error) yang beberapa kali masih terjadi.

Seiring semakin banyaknya maskapai pesawat, maka dibuatlah UU yang mengatur operasional maskapai yaitu UU no. 1 tahun 2009 tentang penerbangan<sup>61</sup>. Utamanya UU ini dibuat untuk melindungi hak dari penumpang serta sebagai quality control bagi maskapai itu sendiri. Tanpa adanya UU ini dikhawatirkan jika maskapai akan bersikap seenaknya kepada penumpangnya jika terjadi suatu permasalahan tertentu, misalnya saja terkait keterlambatan armada pesawat. Mengenai masalah keterlambatan itu sendiri saat ini telah diatur lebih rinci lagi pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (“Permenhub 77/2011”) dan Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (“Permenhub 25/2008”)<sup>62</sup>

Terakhir adalah mode transportasi darat. Mode transportasi ini sangat dekat dan paling sering dipergunakan oleh masyarakat. Ada dua komponen utama dalam mode transportasi ini. Yaitu kereta api dan bus. PT KAI selaku operator utama pelayanan kereta api telah mengalami perubahan signifikan setelah pergantian direktur utamanya. Tercatat beberapa rute kereta api yang sebelumnya mati kembali dihidupkan, seperti rute KA Sukabumi-Bogor<sup>63</sup>. Selain itu, fasilitas dalam kereta api pun semakin membaik saat ini. Tidak nampak lagi pemandangan tidak manusiawi pada pengguna KA kelas ekonomi. bahkan untuk kelas ekonomi saat ini telah dipasang AC split serta tidak ada lagi tiket tanpa tempat duduk. Dan salah satu terobosan yang dilakukan adalah diberlakukannya sistem online dalam pembelian tiketnya. Hal ini secara

---

<sup>60</sup> <http://totosp.wordpress.com/2012/06/16/hanya-5-airline-indonesia-dengan-rerata-usia-pesawat-di-bawah-10-tahun/>

<sup>61</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517b35e8be1ee/aturan-tentang-keterlambatan-penerbangan>

<sup>62</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e68e0492fbe4>

<sup>63</sup> <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/11/08/mulai-besok-kereta-api-pangrango-rute-bogor-sukabumi-beroperasi>



signifikan mampu mengurangi peran calo yang selama ini cukup meresahkan.<sup>64</sup>

Tidak ada gading yang tak retak. Hal itu juga berlaku untuk kereta api di Indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil pun cukup kontroversial. Diantaranya merubah jadwal KA yang masih mendapatkan PSO (*public service obligation*). Sebagai contoh, jika sebelumnya KA ekonomi Bengawan berangkat malam hari dari dan tiba pagi hari di Solo, namun saat ini dirubah menjadi berangkat dari Jakarta siang hari dan tiba tengah malam di Yogyakarta<sup>65</sup>. Kebijakan ini banyak dikeluhkan karena tidak menguntungkan bagi para pekerja serta dianggap sebagai bentuk pengusiran secara halus untuk pindah ke KA yang tidak bersubsidi. Selain itu, wacana double track di pulau Jawa yang diharapkan selesai akhir tahun 2013<sup>66</sup>, hingga saat ini tidak tampak terealisasi. Bahkan beberapa daerah masih terkendala dalam pembebasan lahan<sup>67</sup>.

Komponen lain di transportasi darat adalah bus. Hampir seluruh kota di Indonesia dapat dihubungkan oleh bus. Hal itu menyebabkan armada ini termasuk yang paling sering digunakan oleh masyarakat selain tentunya kereta api. Fakta tersebut menyebabkan banyak perusahaan otobus yang berperan dalam mode ini. Akibatnya, dalam satu trayek terkadang dilayani oleh beberapa perusahaan otobus. Perusahaan otobus milik negara pun juga ikut serta dalam transportasi ini melalui Damri. Banyaknya perusahaan otobus tersebut membuat mereka saling bersaing memberikan fasilitas yang terbaik kepada penumpang. Bus-bus dengan mesin-mesin baru seharga ratusan juta rupiah didatangkan<sup>68</sup>. Mesin-mesin tersebut diberikan badan bus oleh karoseri-karoseri terpilih. Karoseri di Indonesia pun saat ini cukup diakui di dunia. Salah satu karoseri bahkan mampu meng-ekspor body bis buatanya hingga ke luar negeri<sup>69</sup>.

Dibalik itu semua, sebenarnya masih banyak masalah yang terjadi dalam mode transportasi ini. Utamanya terkait sarana prasarananya. Kondisi jalan yang seringkali rusak seringkali menghambat

<sup>64</sup> <http://news.detik.com/read/2013/08/01/132504/2321272/10/petugas-tak-berdaya-mengusir-calo-kereta>

<sup>65</sup> <http://www.tiketkai.com/index.php/mainroutes/news/11>

<sup>66</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2011/10/06/090360211/Tahun-2013-Double-Track-Utara-Jawa-Ditargetkan-Selesai>

<sup>67</sup> <http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/04/08/jalur-ganda-kereta-api-hindari-macet>

<sup>68</sup> <http://stephenlangitan.com/archives/53090>

<sup>69</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2010/06/05/03580684/Karoseri.Jateng.Tembus.Pasar.Ekspor>



perjalanan bus. Hal itu nampak utamanya menjelang lebaran yang mana seringkali terjadi perbaikan jalan yang menyebabkan terjadinya kemacetan. Potensi kerugian yang diterima oleh pihak otobus pun dapat meningkat akibat biaya solar yang terbuang sia-sia<sup>70</sup>. Serta dari sisi penumpang pun akan dirugikan oleh waktu yang terbuang sia-sia. Selain itu, meskipun banyak armada bus yang baru, namun masih banyak armada bus yang beroperasi, namun tak layak jalan. Entah itu karena tidak pernah uji kir, perawatan yang kurang diperhatikan, atau kondisi dari supir bus itu sendiri yang sejatinya tidak layak untuk mengemudi. Akibatnya, jumlah kecelakaan yang melibatkan bus seringkali terjadi dan menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit.

Dari paparan di atas, terlihat jika masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan. Utamanya terkait operasional transportasi itu sendiri. Karena, transportasi merupakan sarana terpenting untuk mobilisasi penduduk di Indonesia. Yang mana ketika terjadi permasalahan di bidang transportasi, hal itu akan dapat merambah hingga permasalahan ekonomi. Harapannya, semoga dunia transportasi Indonesia akan semakin baik kedepannya dan mampu menopang segala sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

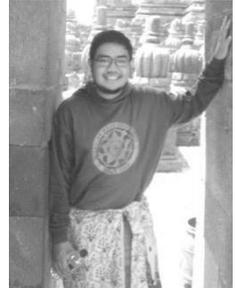
---

<sup>70</sup> <http://forum.detik.com/kenapa-tarif-bis-melonjak-tinggi-ketika-mudik-lebaran-t760960.html?df8833new?nd771104forum>



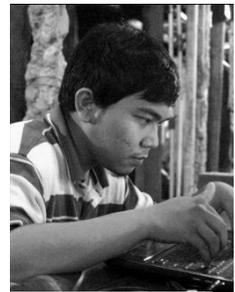
## PROFIL PENULIS ESAI

Faisal Arief Kamil adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Saat ini dipercaya sebagai Menteri Kajian Strategis BEM KM UGM 2013. Email: [faisal.thepresident@gmail.com](mailto:faisal.thepresident@gmail.com)



Ulya Amaliya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Saat ini dipercaya sebagai Wakil Menteri Kajian Strategis BEM KM UGM 2013. Email: [ulyaamaliya@yahoo.com](mailto:ulyaamaliya@yahoo.com)

Muhammad Fakhurrrazi adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Saat ini dipercaya sebagai Wakil Menteri Kajian Strategis BEM KM UGM 2013. Email: [raziclaxone@gmail.com](mailto:raziclaxone@gmail.com)



Hamzah Muhammad Hafiq adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM. Saat ini merupakan anggota Kementerian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013. Email: [hamzahhafiq@gmail.com](mailto:hamzahhafiq@gmail.com)



Heroik Mutaqien Pratama adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Saat ini dipercaya sebagai Menteri Aksi dan Propaganda BEM KM UGM 2013. Email: [heroikmp@yahoo.com](mailto:heroikmp@yahoo.com)



Pipit Suprihatin adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UGM. Saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal BEM KM UGM 2013. Email: [suprihatin.pipit@yahoo.com](mailto:suprihatin.pipit@yahoo.com)

Michael adalah mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Saat ini merupakan anggota Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia BEM KM UGM 2013. Email: [michael\\_chrnolucavi@hotmail.com](mailto:michael_chrnolucavi@hotmail.com)



Ditta Nisa adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UGM. Saat ini merupakan anggota Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia BEM KM UGM 2013. Email: [dittanisa@gmail.com](mailto:dittanisa@gmail.com)



Faiz Deja Ramadhan adalah mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Saat ini merupakan anggota Kementerian Ekonomi Mahasiswa BEM KM UGM 2013. Email: rfaiz15@yahoo.co.id



Andhika Haryawan adalah mahasiswa Fakultas Pertanian UGM. Saat ini merupakan anggota Kementerian Minat dan Bakat BEM KM UGM 2013. Email: pein\_dhika@yahoo.co.id

Rizky Alif Alvian adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Saat ini merupakan anggota Kementerian Kajian Strategis BEM KM UGM 2013. Email: alvianrizky@gmail.com



Cipuk Wulan Adhasari adalah mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Saat ini dipercaya sebagai Menteri Advokasi BEM KM UGM 2013. Email: cipukoya@gmail.com



Suci Ardini Widyaningsih adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM. Saat ini merupakan anggota Kementerian Media dan Informasi BEM KM UGM 2013. Email: [ardiniwid.25@gmail.com](mailto:ardiniwid.25@gmail.com)



Muhammad Reksa Pasha Nizahiksan adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Saat ini merupakan anggota Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia BEM KM UGM 2013. Email: [pasha\\_islamic@yahoo.com](mailto:pasha_islamic@yahoo.com)

Arief Rahman Wicaksono Djuwarno adalah mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Saat ini dipercaya sebagai Menteri Hubungan Masyarakat BEM KM UGM 2013. Email: [alvianrizky@gmail.com](mailto:alvianrizky@gmail.com)



## PROFIL KAJIAN



BEM KM UGM 2013 adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.  
 Twitter: @bemkmgm

BEM KM Fakultas Teknik 2013 adalah organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas di lingkungan Fakultas Teknik Univeristas Gadjah Mada.  
 Twitter: @bemkmftugm



BEM KM Fakultas Geografi 2013 adalah organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas di lingkungan Fakultas Geografi Univeristas Gadjah Mada.  
 Twitter: @BEMKM\_FGE

BEM Fakultas Kedokteran Gigi 2013 adalah organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Univeristas Gadjah Mada.  
 Twitter: @BEMFKGUGM





Dema Fakultas Pertanian 2013 adalah organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.

Twitter: @demafaperta





# MENATAP INDONESIA

## DARI KAMPUS BULAKSUMUR

*Kumpulan Ide, Gagasan dan Kajian Kritis*

FAISAL ARIEF KAMIL | ULYA AMALIYA | MUHAMMAD FAKHRURRAZI |  
HAMZAH MUHAMMAD HAFIQ | HEROIK MUTTAQIEN PRATAMA | PIPIT SUPRIHATIN  
| MICHAEL | DITTA NISA | FAIZ DEJA RAMADHAN | ANDHIKA HARYAWAN |  
RIZKY ALIF ALVIAN | CIPUK WULAN ADHASARI | SUCI ARDINI WIDYANINGSIH  
| MUHAMMAD REKSA PASHA NIZAHIKSAN | ARIEF RAHMAN WICAKSONO DJUWARNO |  
KASTRAT BEM FAKULTAS GEOGRAFI UGM | KASTRAT BEM FAKULTAS TEKNIK UGM  
| ADVOKASI & KASTRAT BEM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UGM |  
KASTRAT DEWAN MAHASISWA PERTANIAN | BEM KM UGM

Selama satu tahun masa pengabdian bersama keluarga besar BEM KM UGM, tentunya Kementerian Kajian Strategis memiliki pengalaman yang berharga atas pergumulan intelektual dan diskusi-diskusi akademis dalam memberikan BEM KM UGM sikap terhadap sebuah isu ekstremal. Buku ini adalah buku kajian yang awalnya dimaksudkan untuk mencerdaskan semua kalangan, utamanya mahasiswa di lingkungan UGM terhadap berbagai macam isu-isu strategis. Selain berisi hasil kajian selama setahun kepengurusan, buku ini juga memuat opini-opini yang berasal dari pemikiran anggota-anggota BEM KM UGM 2013 di berbagai sektor strategis dan beberapa kajian dari BEM/DEMA/LEM fakultas yang ada di UGM tentang berbagai sektor yang digeluti dan menjadi *concernnya*. Semua hal tersebut membuat buku ini menjadi sebuah buku serial pemikiran dan hasil kajian yang komprehensif di berbagai sektor. Pada akhirnya, semoga buku serial hasil kajian ini menjadi pintu gerbang yang membuka cakrawala kehangatan diskusi intelektualitas mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Selamat menatap Indonesia dari Kampus Bulaksumur!



Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada 2013